



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
BALI NONOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR - ISI

- I. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023**
- II. PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023**
- III. LAMPIRAN I : RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
- IV. LAMPIRAN II : RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
- V. LAMPIRAN III : RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
 - 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
 - 2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
 - 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
 - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
 - 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
 - 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
9. Dinas Perhubungan Provinsi Bali
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
13. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
15. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
16. Dinas Pariwisata Provinsi Bali
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
20. Sekretariat Daerah Provinsi Bali
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
24. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
27. Badan Penghubung Provinsi Bali
28. Inspektorat Provinsi Bali
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

VI. LAMPIRAN IV : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

VII. LAMPIRAN V : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

- VIII. LAMPIRAN VI : REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
- IX. LAMPIRAN VII : SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023**
- X. LAMPIRAN VIII : SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023**
- XI. LAMPIRAN IX : SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
- XII. LAMPIRAN X : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**
- XIII. LAMPIRAN XI : DAFTAR PIUTANG DAERAH**
- XIV. LAMPIRAN XII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**
- XV. LAMPIRAN XIII : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN- LAIN**
- XVI. LAMPIRAN XIV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2023**
- XVII. LAMPIRAN XV : DAFTAR DANA CADANGAN**
- XVIII. LAMPIRAN XVI : DAFTAR PINJAMAN DAERAH**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-4092 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang penjabaran perubahan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa sesuai hasil rapat antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali terhadap beberapa ketentuan dalam Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, telah mendapat persetujuan bersama untuk penyempurnaan dan penyesuaian;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tetang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

23. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 46);
24. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 47).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Uraian lebih lanjut penyempurnaan Hasil Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 16 Oktober 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI BALI,



Ketua,

I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si

Wakil Ketua,

A handwritten signature in blue ink, belonging to Dr. I Nyoman Sugawa Korry.

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY,
SE.,M.M.,Ak.,CA

Wakil Ketua,

A handwritten signature in blue ink, belonging to I Nyoman Suyasa.

I NYOMAN SUYASA, ST

Wakil Ketua,

A handwritten signature in blue ink, belonging to Tjok Gde Asmara Putra Sukawati.

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI,
S.IP., M.A.P

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota Se- Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se- Bali;
6. Arsip;

MATRIK PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2023
I.	TUJUAN EVALUASI	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan: A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; B. kepentingan umum; C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	
II.	KEBIJAKAN UMUM	
	Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur, meliputi:	

A. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan jadwal penyusunan Perubahan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Perubahan RKPD	32 Tahun 2023	14 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu III bulan Juli)
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah	B.13.900/6346/P ADFE/BPKAD	15 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu III bulan Juli)

	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.13.900/6346/PADFE/BPKAD	16 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)	
	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	B.13/900/6593/PADFE/BPKAD B.08/910/26746/Keu/DPRD	25 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	
	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	B.13/900/6594/PADFE/BPKAD B.08/910/26747/Keu/DPRD	25 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	
	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.13.900/6821/PADFE/BPKAD	1 September 2023	Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September)	
	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	B.13.900/6858/PADFE/BPKAD B.08.910/28696/Keu/DPRD	4 September 2023	Sesuai, Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran	

				berakhir	
	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi	B.13.900/6930/P ADFE/BPKAD	4 September 2023. Disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 7 September 2023	Sesuai, Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama	
	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai				Pemerintah Provinsi Bali pada tahun-tahun mendatang akan lebih tertib dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

	untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan: 1. Kebijakan Pendapatan Daerah a. Perubahan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun	

	2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyusun prognosis target pendapatan harus memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 Rp5.885.778.601.466,34 atau 105,17% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 pada semester pertama Rp3.733.046.504.586,86 atau 53,84% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan langkah-langkah percepatan dalam meningkatkan realisasi pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. d. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak	Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam meningkatkan realisasi pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan serta melakukan kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, melakukan kebijakan strategis berupa keringanan dan pembebasan sanksi pajak daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya, mulai tanggal tanggal 12 Juni sampai dengan 31 Agustus 2023 serta Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya.

	untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. 2. Kebijakan Belanja Daerah a. Perubahan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 Rp6.745.070.237.109,59 atau 89,56% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 pada semester pertama Rp3.538.104.943.079,70 atau 47,10% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan langkah- langkah percepatan dalam meningkatkan realisasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mengingat masih rendahnya realisasi belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu hanya sebesar 47,10%. b. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. c. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Pemerintah Provinsi Bali akan terus mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan realisasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan belanja wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, mendorong percepatan realisasi belanja daerah yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

	(SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana maksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. d. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana maksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. e. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. f. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. g. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah	

	sesuai kemampuan pendapatan daerah antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, mengantisipasi perubahan iklim dampak fenomena El Nino, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. h. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
III.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM	

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp6.933.947.319.883,00 bertambah Rp309.513.938.064,00 menjadi Rp7.243.461.257.947,00, sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target P- APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		% dari Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target P- APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target P- APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi Semester I						
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8	
PENDAPATAN DAERAH	5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17	6.933.947.319.883,00	3.733.046.504.586,86	53,84	7.243.461.257.947,00	309.513.938.064,00	4,46	51,54	
Pendapatan Asli Daerah	3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	4.731.419.182.089,00	2.610.030.148.850,86	55,16	5.041.446.320.153,00	310.027.138.064,00	6,55	51,77	
Pajak Daerah	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.960.437.850.589,00	2.213.183.732.609,00	74,76	3.238.968.237.629,00	278.530.387.040,00	9,41	68,33	
Retribusi Daerah	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	59.595.436.500,00	7.441.184.185,00	12,49	53.416.681.500,00	(6.178.755.000,00)	(10,37)	13,93	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00	810.711.860.000,00	158.120.019.322,32	19,50	808.120.019.322,00	(2.591.840.678,00)	(0,32)	19,57	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	383.496.351.484,00	397.680.649.900,76	103,70	900.674.035.000,00	231.285.212.734,54	25,68	940.941.381.702,00	40.267.346.702,00	4,47	24,58	
Pendapatan Transfer	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.146.820.137.794,00	1.123.013.178.236,00	52,31	2.146.820.137.794,00	0,00	0,00	52,31	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.146.820.137.794,00	1.123.013.178.236,00	52,31	2.146.820.137.794,00	0,00	0,00	52,31	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	55.708.000.000,00	3.177.500,00	0,01	55.194.800.000,00	(513.200.000,00)	(0,92)	0,01	
Pendapatan Hibah	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	55.708.000.000,00	3.177.500,00	0,01	55.194.800.000,00	(513.200.000,00)	(0,92)	0,01	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel. 3
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2022	3.863.191.406.848,23	5.885.778.601.466,34	65,64
2023	4.731.419.182.089,00	6.933.947.319.883,00	68,24
P-APBD 2023	5.041.446.320.153,00	7.243.461.257.947,00	69,60

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp4.731.419.182.089,00 bertambah Rp310.027.138.064,00 menjadi Rp5.041.446.320.153,00 atau 69,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp2.960.437.850.589,00 bertambah Rp278.530.387.040,00 menjadi Rp3.238.968.237.629,00 atau 44,72% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp1.475.094.698.500,00 bertambah Rp20.776.128.960,00 menjadi Rp1.495.870.827.460,00;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula Rp737.265.417.800,00 bertambah Rp247.754.258.080,00 menjadi Rp985.019.675.880,00;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) semula Rp390.000.000.000,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp400.000.000.000,00;

	d) Pajak Air Permukaan Rp3.200.000.000,00; dan e) Pajak Rokok Rp354.877.734.289,00. 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp59.595.436.500,00 berkurang Rp6.178.755.000,00 menjadi Rp53.416.681.500,00 atau 0,74% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut: a) Retribusi Jasa Umum semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp40.500.000,00 menjadi Rp140.500.000,00; b) Retribusi Jasa Usaha semula Rp55.289.436.500,00 berkurang Rp6.294.255.000,00 menjadi Rp48.995.181.500,00; dan c) Retribusi Perizinan Tertentu semula Rp4.206.000.000,00 bertambah Rp75.000.000,00 menjadi Rp4.281.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar menetapkan: PBBKB untuk Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (<i>Gas Oil</i>) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen), serta PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).i) Lampiran	Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dalam Raperda dan Rapergub tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah didasarkan pada data potensi pajak daerah di Provinsi Bali dan juga memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan: a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sebagaimana maksud butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan: a) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; b) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; c) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun	Penganggaran jenis pajak daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

	2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan d) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen). Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir 1)a) harus berpedoman pada ketentuan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak provinsi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target PKB dimaksud harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Sedangkan, untuk penggunaan Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak provinsi, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak	Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak provinsi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan penggunaan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

	rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana maksud butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran target pendapatan pajak rokok sebagaimana tercantum pada butir 1)e) harus menyesuaikan dengan alokasi pajak rokok yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-38/PK/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2023, Rp354.877.734.289,00. b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp810.711.860.000,00 berkurang Rp2.591.840.678,00 menjadi Rp808.120.019.322,00 atau 11,16% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan	Penganggaran target pendapatan Pajak Rokok akan disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-38/PK/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp354.877.734.289,00.

	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan kedalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari: 1) PT. BPD Bali Rp155.842.363.119,00 atau 25,34% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp614.912.000.000,00; 2) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Rp1.297.540.665,00 atau 1,08% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp120.000.000.000,00; 3) Perusahaan Daerah Provinsi Bali Rp331.193.680,00 atau 6,27% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1974 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp5.282.769.658,00; 4) PT. Puri Raharja Rp446.466.359,00 atau 5,11% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp8.736.000.000,00; 5) PT. Asuransi Bangun Askrida Rp202.455.499,00 atau 17,60% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 1990 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp1.150.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai	

	perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada PT. Jasamarga Bali Tol mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp100.000.000.000,00, belum menunjukkan kinerja yang memadai (<i>performance based</i>), mengingat tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan langkah- langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang	Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya peningkatan kinerja PT. Jasamarga Bali Tol, yang masih difokuskan pada percepatan pengembalian Break Even Poin (BEP) selama 37 Tahun, sehingga sampai dengan saat ini semua pemegang saham belum mendapatkan bagian laba atas penyertaan modal tersebut. Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (<i>performance based</i>), akan dilakukan upaya-upaya pembenahan dengan harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

	saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD. c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp900.674.035.000,00 bertambah Rp40.267.346.702,00 menjadi Rp940.941.381.702,00 atau 12,99% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp390.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan semula Rp568.577.407.000,00 bertambah Rp140.171.000,00 menjadi Rp568.717.578.000,00 atau 7,85% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah	

	Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 3) Hasil Kerja Sama Daerah semula Rp1.402.600.000,00 bertambah Rp807.000.000,00 menjadi Rp2.209.600.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 4) Jasa Giro semula Rp10.000.000.000,00 berkurang Rp5.751.167.388,00 menjadi Rp4.248.832.612,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 5) Pendapatan Bunga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan	

	Rp1.691.989.308,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp10.500.000,00 atau 0,0001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp529.844.530,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula Rp50.473.986.000,00 bertambah Rp5.000,00 menjadi	

	Rp50.473.991.000,00 atau 0,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah semula Rp200.000,00 bertambah Rp1.584.900,00 menjadi Rp1.784.900,00 atau 0,00002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 10) Pendapatan dari Pengembalian semula Rp600.000.000,00 bertambah Rp861.578.852,00 menjadi Rp1.461.578.852,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 11) Pendapatan BLUD semula Rp269.229.842.000,00 bertambah Rp41.975.840.500,00 menjadi Rp311.205.682.500,00 atau 4,30% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	

	Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 2. Pendapatan Transfer Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.146.820.137.794,00 atau 29,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp2.146.820.137.794,00 atau 29,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan: a. Dana Perimbangan Rp2.084.419.079.794,00 atau 28,78% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan: 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp136.760.061.000,00 lebih kecil Rp3.631.496.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Rp140.391.557.000,00;	
		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya yang menjadi bagian Provinsi Bali yaitu sebesar Rp1.320.544.000,00 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

	2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.243.564.753.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp115.523.529.794,00 lebih kecil Rp4.041.120.206,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp119.564.650.000,00; 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp588.570.736.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023. b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp62.401.058.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023, sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), dan butir C.2.b.4).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana	Terdapat penyesuaian alokasi DAK Fisik dari semula sebesar Rp119.564.650.000,00 menjadi Rp115.523.529.794,00 karena adanya penyesuaian pada alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sesuai hasil verifikasi dan kesepakatan Rencana Kegiatan dengan Kementerian Kesehatan dari yang semula dialokasikan sebesar Rp31.653.117.000,00 menjadi Rp27.611.996.794,00 Pemerintah Provinsi Bali telah menyesuaikan alokasi anggaran pendapatan Insentif Fiskal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp5.491.918.000,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 merupakan alokasi untuk penyaluran DBH tahun sebelumnya (TA. 2021 dan TA. 2022) sehingga tidak terkait dengan penganggaran dan penyaluran DBH Reguler Tahun 2023.

	Transfer ke Daerah (TKD) berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp55.708.000.000,00 berkurang Rp513.200.000,00 menjadi Rp55.194.800.000,00 atau 0,76% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Hibah semula Rp55.708.000.000,00 berkurang Rp513.200.000,00 menjadi Rp55.194.800.000,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri semula Rp5.708.000.000,00 berkurang Rp513.200.000,00 menjadi Rp5.194.800.000,00; dan b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Rp50.000.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak	

	mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Berkaitan dengan itu, pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi digunakan: - biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan PKB dan SWDKLLJ; dan - biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi; sebagaimana maksud butir C.2.c.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. B. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp7.522.393.048.914,00 bertambah Rp438.199.414.975,00 menjadi Rp7.960.592.463.889,00, sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:	

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			%	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target P-APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% Target APBD Tahun Anggaran 2023 (1A Ta Ang 2023)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			Target (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)					
	1	2	3		4=3:2	5					
BELANJA DAERAH	7.531.470.927.461.00	6.745.070.237.109.59	89.56		7.512.368.048.914.00	3.538.104.943.079.70	47.10	7.950.567.463.889.00	438.199.414.975.00	5.83	
Belanja Operasi	4.065.798.053.130.00	3.787.524.758.325.73	93.16		4.333.691.844.932.00	2.351.774.139.563.80	54.27	4.476.351.386.551.00	142.659.541.619.00	3.29	
Belanja Pegawai	1.824.026.422.662.45	1.740.899.431.377.08	95.44		2.072.564.871.779.00	1.110.600.384.473.00	53.59	2.010.944.599.816.00	(61.620.271.963.00)	(2.97)	
Belanja Barang dan Jasa	1.838.472.468.547.55	1.690.049.421.497.65	91.93		1.348.709.586.876.00	655.877.121.468.80	48.63	1.385.044.864.083.00	36.335.277.207.00	2.69	
Belanja Hibah	403.159.161.920.00	356.436.889.451.00	88.41		881.696.186.277.00	585.296.633.622.00	66.38	1.070.361.922.652.00	188.665.736.375.00	21.40	
Belanja Bantuan Sosial	140.000.000.00	139.016.000.00	99.30		30.721.200.000.00	0.00	-	10.000.000.000.00	(20.721.200.000.00)	(67.45)	
Belanja Modal	1.800.399.412.612.00	1.452.064.568.386.86	80.65		1.419.978.951.582.00	427.416.915.765.90	30.10	1.427.292.185.361.00	7.313.233.779.00	0.52	
Belanja Modal Tanah	770.002.219.242.00	623.975.476.572.00	81.04		182.964.805.976.00	130.903.438.759.00	71.55	186.051.723.369.00	3.086.917.393.00	1.69	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.701.330.422.00	109.213.603.835.00	84.20		207.854.510.993.00	50.178.542.298.90	24.14	213.115.280.226.00	5.260.769.233.00	2.53	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	413.591.434.404.00	340.651.767.017.86	82.36		705.969.048.170.00	126.952.362.243.00	17.98	696.999.124.704.00	(8.969.923.466.00)	(1.27)	
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	452.699.429.919.00	354.881.755.251.00	78.39		269.502.569.533.00	108.409.845.787.00	40.23	274.436.779.322.00	4.934.209.789.00	1.83	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.329.998.625.00	23.276.736.561.00	67.80		53.688.016.910.00	10.972.726.678.00	20.44	55.789.277.740.00	2.101.260.830.00	3.91	19.67
Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000.00	65.229.150.00	86.97	0.00	0.00	0.00	-	900.000.000.00	900.000.000.00	-	-
Belanja Tidak Terduga	7.848.875.371.00	4.759.779.107.00	60.64	50.000.000.000.00	5.537.428.161.00	11.07	14.456.135.733.00	(35.543.864.267.00)	(71.09)	38.31	
Belanja Tidak Terduga	7.848.875.371.00	4.759.779.107.00	60.64	50.000.000.000.00	5.537.428.161.00	11.07	14.456.135.733.00	(35.543.864.267.00)	(71.09)	38.31	
Belanja Transfer	1.657.424.586.348.00	1.500.721.131.290.00	90.55	1.708.697.252.400.00	753.376.459.589.00	44.09	2.032.467.756.244.00	323.770.503.844.00	18.95	37.07	
Belanja Bagi Hasil	1.354.111.107.615.00	1.231.251.353.817.00	90.93	1.186.722.448.892.00	643.943.811.029.00	54.26	1.510.092.952.736.00	323.370.503.844.00	27.25	42.64	
Belanja Bantuan Keuangan	303.313.478.733.00	269.469.777.473.00	88.84	521.974.803.508.00	109.432.648.560.00	20.97	522.374.803.508.00	400.000.000.00	0.08	20.95	

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Sebelum Perubahan						Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Setelah Perubahan						Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja					Belanja								
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Belanja Operasi (Rp)		Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)			
URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.455.921.918.860,00	965.996.606.919,00	0,00	0,00	3.421.918.525.779,00	45,49	2.526.550.484.946,00	973.699.781.299,00	0,00	0,00	3.500.240.266.245,00	43,97		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.455.871.352.360,00	373.430.817.880,00	0,00	0,00	1.829.302.170.240,00	24,32	1.417.196.529.978,00	377.712.982.955,00	0,00	0,00	1.794.909.512.933,00	22,55		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	869.089.971.911,00	82.147.061.793,00	0,00	0,00	951.237.033.614,00	8,66	872.004.835.290,00	84.272.354.753,00	0,00	0,00	956.277.190.043,00	8,24		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	331.524.140.434,00	504.144.470.803,00	0,00	0,00	835.668.611.237,00	11,11	440.622.215.805,00	505.317.812.856,00	0,00	0,00	945.940.028.661,00	11,88		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMBANGUNAN	2.160.753.864,00	0,00	0,00	0,00	2.160.753.864,00	0,03	1.878.271.020,00	0,00	0,00	1.878.271.020,00	0,02			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PEHLINDUNGAN NASYARAKAT	67.476.582.795,00	2.317.526.500,00	0,00	0,00	69.794.109.295,00	0,93	66.399.683.982,00	2.413.445.100,00	0,00	0,00	68.813.129.082,00	0,86		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	29.799.117.496,00	3.956.730.033,00	0,00	0,00	33.755.847.529,00	0,45	28.456.948.871,00	3.973.185.635,00	0,00	0,00	32.430.134.506,00	0,41		
URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	861.7945.10853,00	401.023.987.436,00	0,00	0,00	1.262.818.507.289,00	16,79	874.609.018.832,00	403.770.278.005,00	0,00	0,00	1.278.379.296.837,00	16,66		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	34.007.845.396,00	364.217.190,00	0,00	0,00	34.372.062.496,00	0,46	32.342.631.470,00	214.142.000,00	0,00	0,00	32.556.773.479,00	0,41		

Urusan Pemerintahan	Sebelum Perubahan					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Setelah Perubahan					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja						Belanja					
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDAYAAN PERUMPUAN DAN PEHLINDUNGAN ANAK	2.306.400.192.00	0.00	0.00	0.00	2.306.400.192.00	0.03	2.306.757.984.00	0.00	0.00	0.00	2.306.757.984.00	0.03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.965.255.704.00	0.00	0.00	0.00	2.965.255.704.00	0.04	2.899.599.208.00	0.00	0.00	0.00	2.899.599.208.00	0.04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	311.272.200.00	0.00	0.00	0.00	311.272.200.00	0.00	200.595.300.00	0.00	0.00	0.00	200.595.300.00	0.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.075.715.191.00	106.486.280.00	0.00	0.00	4.182.201.471.00	0.06	9.412.334.215.00	2.264.486.280.00	0.00	0.00	11.676.820.495.00	0.15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN REGISTRASI SIPIL	326.868.988.00	0.00	0.00	0.00	326.868.988.00	0.00	304.400.676.00	0.00	0.00	0.00	304.400.676.00	0.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDAYAAN NASYARAKAT DAN DESA	33.227.751.192.00	102.215.962.00	0.00	0.00	33.329.967.154.00	0.44	29.081.855.181.00	88.688.962.00	0.00	0.00	29.170.544.143.00	0.37
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGELOMPOKAN DAN SELURUGA BERENCANA	603.494.588.00	0.00	0.00	0.00	603.494.588.00	0.01	537.575.276.00	0.00	0.00	0.00	537.575.276.00	0.01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36.514.095.713.00	11.084.459.513.00	0.00	0.00	48.498.555.226.00	0.64	35.388.906.679.00	12.091.195.050.00	0.00	0.00	47.480.102.629.00	0.60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71.296.927.626.00	393.182.860.891.00	0.00	0.00	454.479.788.507.00	6.04	83.726.750.818.00	383.891.908.113.00	0.00	0.00	467.608.658.931.00	5.87

Urutan Pemerintahan	Sebelum Perubahan					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Setelah Perubahan					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja						Belanja					
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terlaga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terlaga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHAA KECIL DAN MENENGAH	32.441.566.574,00	56.950.800,00	0,00	0,00	32.498.517.374,00	0.43	31.604.197.124,00	56.940.000,00	0,00	0,00	31.661.137.124,00	0.40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.044.957.160,00	606.570.000,00	0,00	0,00	19.651.527.160,00	0.26	17.861.399.438,00	589.570.000,00	0,00	0,00	18.450.969.438,00	0.23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPERIDAIAN DAN OLAH RAGA	25.023.489.203,00	117.587.200,00	0,00	0,00	25.141.076.403,00	0.33	22.947.543.803,00	222.332.600,00	0,00	0,00	23.169.876.403,00	0.29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	547.332.440,00	226.179.000,00	0,00	0,00	773.511.440,00	0.01	547.779.680,00	226.179.000,00	0,00	0,00	773.958.680,00	0.01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	870.953.696,00	283.961.000,00	0,00	0,00	1.154.914.696,00	0.02	871.132.592,00	283.961.000,00	0,00	0,00	1.155.093.592,00	0.01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	597.118.942.874,00	3.817.499.700,00	0,00	0,00	600.935.842.574,00	7.99	603.539.503.760,00	3.775.874.100,00	0,00	0,00	607.315.377.860,00	7.63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	542.052.284,00	175.000.000,00	0,00	0,00	717.052.284,00	0.01	512.451.764,00	75.000.000,00	0,00	0,00	587.451.764,00	0.01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARIFAN	570.198.832,00	0,00	0,00	0,00	570.198.832,00	0.01	523.603.864,00	0,00	0,00	0,00	523.603.864,00	0.01
URUSAN PEMERINTAHAN PELILAN	199.310.159.383,00	9.724.723.400,00	0,00	0,00	209.034.882.783,00	2.78	200.483.171.468,00	8.032.842.100,00	0,00	0,00	208.516.013.568,00	2.62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.191.613.361,00	2.873.500.000,00	0,00	0,00	28.065.113.361,00	0.37	24.568.362.255,00	2.368.538.200,00	0,00	0,00	26.928.900.455,00	0.34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.151.817.368,00	0,00	0,00	0,00	15.151.817.368,00	0.20	14.165.488.356,00	22.950.000,00	0,00	0,00	14.188.438.356,00	0.18
Urutan Pemerintahan	Sebelum Perubahan					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Setelah Perubahan					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja						Belanja					
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terlaga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terlaga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	88.363.458.962,00	4.287.194.700,00	0,00	0,00	92.650.653.662,00	1.23	85.190.514.003,00	4.292.791.200,00	0,00	0,00	89.483.305.203,00	1.12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	40.913.976.684,00	982.373.700,00	0,00	0,00	41.896.350.384,00	0.56	49.138.280.275,00	72.037.700,00	0,00	0,00	49.210.317.975,00	0.62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	536.141.800,00	500.000.000,00	0,00	0,00	1.036.141.800,00	0.01	58.137.800,00	0,00	0,00	0,00	58.137.800,00	0.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.566.519.840,00	1.030.111.000,00	0,00	0,00	21.596.630.840,00	0.29	18.486.705.243,00	1.230.111.000,00	0,00	0,00	19.716.816.243,00	0.25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.526.470.368,00	51.544.000,00	0,00	0,00	8.578.014.368,00	0.11	8.851.316.536,00	46.414.000,00	0,00	0,00	8.897.730.536,00	0.11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANS MIGRASI	60.159.000,00	0,00	0,00	0,00	60.159.000,00	0.00	32.367.000,00	0,00	0,00	0,00	32.367.000,00	0.00
UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	456.335.321.824,00	17.948.743.775,00	0,00	0,00	474.284.065.599,00	6.30	431.741.577.624,00	17.802.181.504,00	0,00	0,00	449.543.759.128,00	5.65
SEKRETARIAT DAERAH	211.888.861.489,00	17.192.152.775,00	0,00	0,00	229.081.014.264,00	3.05	215.885.994.623,00	15.435.521.268,00	0,00	0,00	231.321.515.891,00	2.91
SEKRETARIAT DPMD	244.446.460.335,00	756.591.000,00	0,00	0,00	245.203.051.335,00	3.26	215.855.583.001,00	2.366.660.236,00	0,00	0,00	218.222.243.237,00	2.74
UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	299.194.950.089,00	16.453.350.251,00	50.000.000.000,00	1.708.697.252.400,00	2.874.345.552.740,00	27.58	302.406.044.987,00	15.167.514.152,00	14.456.135.733,00	2.032.467.756.244,00	2.364.497.451.116,00	29.70
PERENCANAAN	24.962.048.121,00	3.116.326.498,00	0,00	0,00	28.078.374.619,00	0.37	22.751.430.664,00	2.067.464.000,00	0,00	0,00	24.818.894.664,00	0.31
KUANGAN	191.990.526.199,00	11.183.364.753,00	50.000.000.000,00	1.708.697.252.400,00	1.961.871.143.352,00	26.08	199.108.866.990,00	10.354.507.753,00	14.456.135.733,00	2.032.467.756.244,00	2.256.386.466.730,00	28.34
KEPEGAWAIAN	48.024.222.099,00	934.658.900,00	0,00	0,00	48.958.880.999,00	0.65	48.441.295.609,00	1.250.267.500,00	0,00	0,00	49.691.563.109,00	0.62
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	877.977.592,00	0,00	0,00	0,00	877.977.592,00	0.01	584.088.384,00	0,00	0,00	0,00	584.088.384,00	0.01

Urusan Pemerintahan	Sebelum Perubahan					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Setelah Perubahan					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja						Belanja					
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Total Variasi (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Total Variasi (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
PEKERJAAN DAN PENGEMBANGAN	2.500.520.589,00	799.180.000,00	0,00	0,00	25.859.700.589,00	0,34	23.166.105.274,00	722.860.900,00	0,00	23.888.966.174,00	0,30	
PENGLOLAAN PENGUMBUH	8.279.655.489,00	419.820.100,00	0,00	0,00	8.699.475.589,00	0,12	8.355.058.066,00	772.413.999,00	0,00	9.127.472.065,00	0,11	
UNSUBSIDISIR PENGAWASAN (UNSUBSIDISIR) PENGAWASAN	3.497.885.105,00	8.506.188.301,00	0,00	0,00	43.485.039.356,00	0,58	3.4812.466.799,00	8.506.188.301,00	0,00	43.318.655.100,00	0,54	
INSTRUMENTAL DAERAH	3.497.885.105,00	8.506.188.301,00	0,00	0,00	43.485.039.356,00	0,58	3.4812.466.799,00	8.506.188.301,00	0,00	43.318.655.100,00	0,54	
UNSUBSIDISIR PERSERIKATAN UMUM	3.618.112.388,00	325.351.500,00	0,00	0,00	36.506.475.368,00	0,49	11.5773.441.895,00	323.400.000,00	0,00	116.0968.41.895,00	1,46	
KELAUTAN RANCIA DAN POLYTER	3.618.112.388,00	325.351.500,00	0,00	0,00	36.506.475.368,00	0,49	11.5773.441.895,00	323.400.000,00	0,00	116.0968.41.895,00	1,46	
Total	4.343.716.844.932,00	1.419.970.951.582,00	5.000.000.000,00	1.708.697.252.400,00	7.522.359.048.914,00	4.486.376.206.551,00	1.427.292.185.361,00	14.456.135.733,00	2.032.467.756.244,00	7.960.592.283.889,00		
Total Belanja Daerah	7.522.359.048.914,00					Total Belanja Daerah	7.960.592.283.889,00					

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:
- a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp3.421.918.525.779,00 bertambah Rp78.321.740.466,00 menjadi Rp3.500.240.266.245,00 atau 43,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula Rp1.829.302.170.240,00 berkurang Rp34.392.657.307,00 menjadi Rp1.794.909.512.933,00 atau 22,55% dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp651.237.033.614,00 bertambah Rp5.040.156.429,00 menjadi Rp656.277.190.043,00 atau 8,24% dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp835.668.611.237,00

	bertambah Rp110.271.417.424,00 menjadi Rp945.940.028.661,00 atau 11,88% dari total belanja daerah; 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula Rp2.160.753.864,00 berkurang Rp290.482.844,00 menjadi Rp1.870.271.020,00 atau 0,02% dari total belanja daerah; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula Rp69.794.109.295,00 berkurang Rp980.980.213,00 menjadi Rp68.813.129.082,00 atau 0,86% dari total belanja daerah; dan 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula Rp33.755.847.529,00 berkurang Rp1.325.713.023,00 menjadi Rp32.430.134.506,00 atau 0,41% dari total belanja daerah. b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp1.262.818.507.289,00 bertambah Rp15.560.789.548,00 menjadi Rp1.278.379.296.837,00 atau 16,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula Rp34.372.062.496,00 berkurang Rp1.815.289.026,00 menjadi Rp32.556.773.470,00 atau 0,41% dari total belanja daerah; 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula Rp2.306.400.192,00 bertambah Rp357.792,00 menjadi Rp2.306.757.984,00 atau 0,03% dari total belanja daerah; 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula Rp2.965.255.704,00 berkurang Rp65.656.496,00 menjadi Rp2.899.599.208,00 atau 0,04% dari total belanja daerah;	

	4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan semula Rp311.272.200,00 berkurang Rp110.676.900,00 menjadi Rp200.595.300,00 atau 0,003% dari total belanja daerah; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula Rp4.182.201.471,00 bertambah Rp7.494.619.024,00 menjadi Rp11.676.820.495,00 atau 0,15% dari total belanja daerah; 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula Rp326.868.988,00 berkurang Rp22.468.312,00 menjadi Rp304.400.676,00 atau 0,004% dari total belanja daerah; 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula Rp33.329.967.154,00 berkurang Rp4.159.423.011,00 menjadi Rp29.170.544.143,00 atau 0,37% dari total belanja daerah; 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula Rp603.494.588,00 berkurang Rp65.919.312,00 menjadi Rp537.575.276,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula Rp48.498.555.226,00 berkurang Rp1.018.452.597,00 menjadi Rp47.480.102.629,00 atau 0,60% dari total belanja daerah; 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula Rp454.479.788.507,00 bertambah Rp13.128.870.424,00 menjadi Rp467.608.658.931,00 atau 5,87% dari total belanja daerah; 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula Rp32.498.517.374,00 berkurang Rp837.380.250,00 menjadi Rp31.661.137.124,00 atau 0,40% dari total belanja daerah; 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula Rp19.651.527.160,00 berkurang Rp1.200.557.722,00 menjadi Rp18.450.969.438,00 atau 0,23% dari total belanja daerah;	

	13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula Rp25.141.076.403,00 berkurang Rp1.971.200.000,00 menjadi Rp23.169.876.403,00 atau 0,29% dari total belanja daerah; 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik semula Rp773.511.440,00 bertambah Rp447.240,00 menjadi Rp773.958.680,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula Rp1.154.914.696,00 bertambah Rp178.896,00 menjadi Rp1.155.093.592,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula Rp600.935.842.574,00 bertambah Rp6.379.535.286,00 menjadi Rp607.315.377.860,00 atau 7,63% dari total belanja daerah; 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula Rp717.052.284,00 berkurang Rp129.600.520,00 menjadi Rp587.451.764,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula Rp570.198.832,00 berkurang Rp46.594.968,00 menjadi Rp523.603.864,00 atau 0,01% dari total belanja daerah. c. Urusan Pemerintahan Pilihan Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula Rp209.034.882.783,00 berkurang Rp518.869.215,00 menjadi Rp208.516.013.568,00 atau 2,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula Rp28.065.115.361,00 berkurang Rp1.136.214.906,00 menjadi Rp26.928.900.455,00 atau 0,34% dari total belanja daerah; 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula Rp15.151.817.368,00 berkurang Rp963.379.012,00 menjadi Rp14.188.438.356,00 atau 0,18% dari total belanja daerah;	

	3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula Rp92.650.653.662,00 berkurang Rp3.167.348.459,00 menjadi Rp89.483.305.203,00 atau 1,12% dari total belanja daerah; 4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan semula Rp41.896.350.384,00 bertambah Rp7.313.967.591,00 menjadi Rp49.210.317.975,00 atau 0,62% dari total belanja daerah; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral semula Rp1.036.141.800,00 berkurang Rp978.004.000,00 menjadi Rp58.137.800,00 atau 0,001% dari total belanja daerah; 6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula Rp21.596.630.840,00 berkurang Rp1.879.814.597,00 menjadi Rp19.716.816.243,00 atau 0,25% dari total belanja daerah; 7) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula Rp8.578.014.368,00 bertambah Rp319.716.168,00 menjadi Rp8.897.730.536,00 atau 0,11% dari total belanja daerah; dan 8) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi semula Rp60.159.000,00 berkurang Rp27.792.000,00 menjadi Rp32.367.000,00 atau 0,0004% dari total belanja daerah. d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula Rp474.284.065.599,00 berkurang Rp24.740.306.471,00 menjadi Rp449.543.759.128,00 atau 5,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari: 1) Sekretariat Daerah semula Rp229.081.014.264,00 bertambah Rp2.240.501.627,00 menjadi Rp231.321.515.891,00 atau 2,91% dari total belanja daerah; dan 2) Sekretariat DPRD semula Rp245.203.051.335,00 berkurang Rp26.980.808.098,00 menjadi	

	Rp218.222.243.237,00 atau 2,74% dari total belanja daerah. e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula Rp2.074.345.552.740,00 bertambah Rp290.151.898.376,00 menjadi Rp2.364.497.451.116,00 atau 29,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari: 1) Perencanaan semula Rp28.078.374.619,00 berkurang Rp3.259.479.955,00 menjadi Rp24.818.894.664,00 atau 0,31% dari total belanja daerah; 2) Keuangan semula Rp1.961.871.143.352,00 bertambah Rp294.515.323.368,00 menjadi Rp2.256.386.466.720,00 atau 28,34% dari total belanja daerah; 3) Kepegawaian semula Rp48.958.880.999,00 bertambah Rp732.682.110,00 menjadi Rp49.691.563.109,00 atau 0,62% dari total belanja daerah; 4) Pendidikan dan Pelatihan semula Rp877.977.592,00 berkurang Rp293.889.208,00 menjadi Rp584.088.384,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; 5) Penelitian dan Pengembangan semula Rp25.859.700.589,00 berkurang Rp1.970.734.415,00 menjadi Rp23.888.966.174,00 atau 0,30% dari total belanja daerah; dan 6) Pengelolaan Penghubung semula Rp8.699.475.589,00 bertambah Rp427.996.476,00 menjadi Rp9.127.472.065,00 atau 0,11% dari total belanja daerah. f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula Rp43.485.039.356,00 berkurang Rp166.384.256,00 menjadi Rp43.318.655.100,00 atau 0,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah semula Rp43.485.039.356,00 berkurang Rp166.384.256,00 menjadi	

	Rp43.318.655.100,00 atau 0,54% dari total belanja daerah. g. Unsur Pemerintahan Umum Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula Rp36.506.475.368,00 bertambah Rp79.590.366.527,00 menjadi Rp116.096.841.895,00 atau 1,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa dan Politik semula Rp36.506.475.368,00 bertambah Rp79.590.366.527,00 menjadi Rp116.096.841.895,00 atau 1,46% dari total belanja daerah. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan belanja daerah: a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM. Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut: a. SPM Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula Rp351.179.238.898,00 berkurang Rp14.187.462.232,00 menjadi Rp336.991.776.666,00 atau 18,77% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp1.794.909.512.933,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	

	semula Rp195.143.290.886,00 berkurang Rp3.108.236.493,00 menjadi Rp192.035.054.393,00; 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan semula Rp137.981.320.656 berkurang Rp10.050.161.184,00 menjadi Rp127.931.159.472,00; 3) Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi semula Rp333.186.874.442,00 berkurang Rp13.158.397.677,00 menjadi Rp320.028.476.765,00; dan 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus semula Rp17.992.364.456,00 berkurang Rp1.029.064.555,00 menjadi Rp16.963.299.901,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi yang terdiri dari: 1) 100% Warga Negara Usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan menengah; dan 2) 100% Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan khusus; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. b. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula Rp3.689.942.880,00 berkurang Rp8.274.073.500,00 menjadi Rp11.964.016.380,00 atau 1,82% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp656.277.190.043,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi semula Rp2.779.162.080,00 bertambah Rp172.296.800,00 menjadi Rp2.951.458.880,00; dan	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Butir G.5.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

	1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula Rp777.939.776,00 berkurang Rp54.680.972,00 menjadi Rp723.258.804,00 atau 38,67% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp1.870.271.020,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi semula Rp355.192.688,00 berkurang Rp38.697.650,00 menjadi Rp316.495.038,00; dan 2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi semula Rp422.747.088,00 berkurang Rp15.983.322,00 menjadi Rp406.763.766,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Provinsi yang terdiri dari: 1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	

Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Butir G.5.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

	59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018. e. SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula Rp20.907.168.636,00 bertambah Rp205.883.704,00 menjadi Rp21.113.052.340,00 atau 30,68% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp68.813.129.082,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi semula Rp20.774.768.636,00 bertambah Rp270.781.704,00 menjadi Rp21.045.550.340,00; dan 2) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi semula Rp132.400.000,00 berkurang Rp64.898.000,00 menjadi Rp67.502.000,00; harus diprioritaskan dalam rangka memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk provinsi yang terdiri dari 100% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di provinsi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. f. SPM Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula Rp4.974.808.468,00 berkurang Rp152.431.200,00 menjadi Rp4.822.377.268,00 atau 14,87% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp32.430.134.506,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Trantibumlinmas, sebagaimana dimaksud dalam Butir G.5.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

	1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Rp56.624.300,00; 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti semula Rp1.307.314.568,00 berkurang Rp30.830.000,00 menjadi Rp1.276.484.568,00; 3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti semula Rp970.534.000,00 berkurang Rp134.241.200,00 menjadi Rp836.292.800,00; 4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti semula Rp2.384.397.800,00 bertambah Rp12.640.000,00 menjadi Rp2.397.037.800,00; dan 5) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Rp255.937.800,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi yang terdiri dari: 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; 2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; 3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti; 4) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti; dan 5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; 6) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; 7) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;	Telah dialokasikan dan dimanfaatkan untuk pencapaian indikator target kinerja SPM Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Butir G.5.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

	8) 100% Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti; 9) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti; dan 10) 100% Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; 3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi. Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah: a. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator: 1) pertumbuhan ekonomi 5,3% s.d. 5,9%; 2) tingkat pengangguran terbuka 5,3% s.d. 6,0%; 3) rasio gini 0,375 s.d. 0,378; dan 4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%. b. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator: 1) indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,49; dan 2) tingkat kemiskinan 7,5% s.d. 8,5%. Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam	

	Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi: a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp230.442.493.967,00 atau 2,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian. Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut: 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	

	Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp58.137.800,00; 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp27.493.224.936,00; 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp64.892.679.475,00; 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp27.026.107.447,00; 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp31.661.137.124,00; 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp29.751.363.550,00; 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp19.861.031.859,00; dan 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp29.698.811.776,00. b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam	

	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp257.387.784.288,00 atau 3,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Provinsi Bali pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan. c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.565.774.671.644,00 atau 32,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan <i>stunting</i>, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut: 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; 2) Reformasi sistem perlindungan sosial; 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Mengentaskan kemiskinan; dan 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan	

	pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu: 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp537.575.276,00; 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp32.963.962.290,00; 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp656.157.039.043,00; 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.806.580.913.997,00; 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp24.942.806.603,00;	

	6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp13.260.821.267,00; dan 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp31.331.553.168,00. d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp607.315.377.860,00 atau 7,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut: 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; 5) Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan 6) Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif. Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut,	

	pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp486.085.661.135,00; 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp43.345.375.549,00; 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp77.884 341.176,00. e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.146.511.796.020,00 atau 14,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan	

	ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut: 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar; 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK. Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu: 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp122.148.490.313,00; 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp568.088.374.176,00; 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp47.898.615.873,00; 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan 5) Transformasi <i>Digital</i> (PP5) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp408.376.315.658,00. f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp85.230.903.315,00 atau 1,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan	

	lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut: 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap <i>baseline</i>. Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp61.079.482.362,00; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp24.151.420.953,00; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka	

	meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.067.929.436.795,00 atau 38,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut: 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesenjangan	

	Warga Negara Secara Optimal; 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri; 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu: 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp218.222.243.237,00; 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp48.986.461.605,00; 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.684.623.890.058,00; dan 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp116.096.841.895,00. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengalokasikan	

	anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:			
	Tabel 6 Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023			
No.	Prioritas Nasional	Rancangan Perubahan APBD TA 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)	
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	230.442.493.967,00	2,89	
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	257.387.784.288,00	3,23	
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	2.565.774.671.644,00	32,23	
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	607.315.377.860,00	7,63	
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	1.146.511.796.020,00	14,40	
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	85.230.903.315,00	1,07	
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	3.067.929.436.795,00	38,54	
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	7.960.592.463.889,00	100,00	
	Total Belanja Daerah	7.960.592.463.889,00		

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran dimaksud harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Provinsi Bali pada tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 meliputi: - Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali sebesar 5,3% s.d 5,8%; - Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Jawa-Bali sebesar 6,9% s.d 7,6%; dan - Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Jawa-Bali sebesar 6,0% s.d. 6,7%. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (<i>rebound</i>) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di wilayah Jawa-Bali sebesar 73,05% s.d 82,43%. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu: - Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global; - Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;	

	c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>Omnibus Law</i>, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM; d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2023. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023 sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:	

Tabel 7 Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023				
No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD TA 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)	
1.	Pangan, Sandang dan Papan	216.063.873.679,00	2,71	
2.	Kesehatan dan Pendidikan	2.475.481.606.419,00	31,10	
3.	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	32.731.642.270,00	0,41	
4.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	622.196.675.280,00	7,82	
5.	Pariwisata	14.188.438.356,00	0,18	

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD TA 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
6.	Penguatan Infrastruktur	1.462.930.595.318,00	18,38
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.136.999.452.567,00	39,41
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	7.960.592.283.889,00	100,00
	Total Belanja Daerah	7.960.592.463.889,00	

5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah semula Rp150.545.532.193,00 berkurang Rp19.732.569.822,00 menjadi Rp130.812.962.371,00 atau 1,64% dari total belanja daerah yang dianggarkan pada:
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan semula Rp68.972.053.391,00 berkurang Rp1.294.321.322,00 menjadi Rp67.677.732.069,00;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp2.299.766.741,00;
 - Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat semula Rp3.560.208.183,00 berkurang Rp23.788.000,00 menjadi Rp3.536.420.183,00;

	d. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen Rp32.680.000,00; e. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp525.000.000,00; f. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rp198.766.600,00; g. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp182.000.000,00; h. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Rp10.175.000.000,00; i. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Rp1.674.498.700,00; j. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Rp1.549.165.200,00; k. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan Rp397.820.000,00; l. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Rp563.900.000,00; m. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Rp224.089.900,00; n. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Rp4.424.300.000,00; o. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Rp951.504.500,00;	

	p. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp27.500.000,00; q. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan semula Rp2.256.099.440,00 bertambah Rp51.839.500,00 menjadi Rp2.307.938.940,00; r. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp22.400.000,00; s. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Rp1.549.165.200,00; t. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani semula Rp69.180.000,00 berkurang Rp3.600.000,00 menjadi Rp65.580.000,00; u. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat semula Rp5.451.500.000,00 bertambah Rp289.700.000,00 menjadi Rp5.741.200.000,00; v. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi semula Rp775.168.000,00 berkurang Rp2.400.000,00 menjadi Rp772.768.000,00; w. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp3.059.450.000,00; x. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp3.303.615.000,00; y. Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Rp10.000.000.000,00; dan z. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp9.550.701.338,00;	

	agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.888.040.579.485,00 atau 25,10% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 berkurang Rp36.460.445.387,00 menjadi Rp1.851.580.134.098,00 atau 23,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 8 sebagai berikut:	

Tabel 8

Alokasi Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah (Rp)			Jumlah (Rp)		
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		1.829.302.170.240,00	96,89		1.794.909.512.933,00	96,94
	1) Belanja Operasi:	1.455.871.352.360,00		77,11	1.417.196.529.978,00		76,54
	a. belanja pegawai;	1.057.907.216.098,00		56,03	1.034.212.288.768,00		55,86
	b. belanja barang dan jasa;	285.126.146.262,00		15,10	288.896.251.210,00		15,60
	c. belanja hibah;	94.087.990.000,00		4,98	94.087.990.000,00		5,08
	d. belanja bantuan sosial.	18.750.000.000,00		0,99	0,00		0,00
	2) Belanja Modal;	373.430.817.880,00		19,78	377.712.982.955,00		20,40
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		27.700.908.604,00	1,47		27.700.908.604,00	1,50
	1) Belanja Operasi:	27.700.908.604,00		1,47	27.700.908.604,00		1,50
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00	0,00		0,00
	b. belanja barang dan jasa;	27.700.908.604,00		1,47	27.700.908.604,00		1,50
	c. belanja hibah;	0,00		0,00	0,00		0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	0,00		0,00
	2) Belanja Modal;	0,00		0,00	0,00		0,00

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah (Rp)			Jumlah (Rp)		
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		717.052.284,00	0,04		587.451.764,00	0,03
	1) Belanja Operasi:	542.052.284,00		0,03	512.451.764,00		0,03
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00	0,00		0,00
	b. belanja barang dan jasa;	542.052.284,00		0,03	512.451.764,00		0,03
	c. belanja hibah;	0,00		0,00	0,00		0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	0,00		0,00
	2) Belanja Modal;	175.000.000,00		0,01	75.000.000,00		0,004
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		25.141.076.403,00	1,33		23.169.876.403,00	1,25
	1) Belanja Operasi:	25.023.489.203,00		1,33	22.947.543.803,00		1,24
	a. belanja pegawai;	0,00		0,00	0,00		0,00
	b. belanja barang dan jasa;	14.402.289.203,00		0,76	14.297.543.803,00		0,77
	c. belanja hibah;	8.650.000.000,00		0,46	8.650.000.000,00		0,47
	d. belanja bantuan sosial.	1.971.200.000,00		0,10	0,00		0,00
	2) Belanja Modal;	117.587.200,00		0,01	222.332.600,00		0,01

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah (Rp)			Jumlah (Rp)		
e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		5.179.371.954,00	0,27		5.212.384.394,00	0,28
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00	0,00		0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00		0,00	0,00		0,00
	2) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1.040.782.900,00		0,06	1.075.628.100,00		0,06
	3) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.962.539.110,00		0,21	3.962.718.006,00		0,21

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	P-APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah (Rp)			Jumlah (Rp)		
	4) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan pada Dinas Pariwisata	176.049.944,00		0,01	174.038.288,00		0,01
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	1.888.040.579.485,00			1.851.580.134.098,00		
3.	Total Belanja Daerah	7.522.393.048.914,00			7.960.592.463.889,00		
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,10%			23,26%		

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Provinsi Bali. Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk: 1) program pada urusan bidang pendidikan Rp1.794.909.512.933,00 atau 96,94% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam: a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp1.055.723.726.508,00 atau 57,02% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; b) Program Pengelolaan Pendidikan Rp734.848.938.657,00 atau 39,69% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp62.262.900,00 atau 0,003% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. 2) Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan Rp5.212.384.394,00 atau 0,28% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, diuraikan dalam: a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan	

	Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Rp1.075.628.100,00 atau 0,06% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; b) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp3.962.718.006,00 atau 0,21% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan c) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan pada Dinas Pariwisata Rp174.038.288,00 atau 0,01% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. b. Alokasi Anggaran Kesehatan Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp790.256.529.453,00 atau 11,54% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah Rp4.988.115.245,00 menjadi Rp795.244.644.698,00 atau 10,90% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:	

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2023		% dari total anggaran kesehatan	P-APBD 2023		% dari total anggaran kesehatan
		Jumlah (Rp)			Jumlah (Rp)		
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:		651.237.033.614,00	82,41		656.277.190.043,00	82,53
	1) Belanja Operasi:	569.089.971.911,00		72,01	572.004.835.290,00		71,93
	a. belanja pegawai;	307.525.425.534,00		38,91	301.568.087.973,00		37,92
	b. belanja barang dan jasa;	261.564.546.377,00		33,10	270.436.747.317,00		34,01
	c. belanja hibah;	0,00		0,00	0,00		0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00		0,00	0,00		0,00
	2) Belanja Modal;	82.147.061.703,00		10,39	84.272.354.753,00		10,60
	Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		139.019.495.839,00	17,59		138.967.454.655,00	17,47
	1) Belanja Transfer:	80.977.038.508,00		10,25	80.977.038.508,00		10,16
	Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka <i>Sharing</i> Pembiayaan JKN	80.977.038.508,00		10,25	80.977.038.508,00		10,16
	2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Seluruh OPD diluar dinas Kesehatan	57.159.069.791,00		7,23	57.159.069.791,00		7,19
	3) Belanja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas PMD Dukcapil	586.833.700,00		0,07	537.575.276,00		0,07
	4) Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan	296.553.840,00		0,04	293.771.080,00		0,04
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		790.256.529.453,00			795.244.644.698,00	
3.	Total Belanja Daerah		7.522.393.048.914,00			7.960.592.463.889,00	
4.	Gaji		673.222.405.301,00			665.837.668.134,00	
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji (3-4)		6.849.170.643.613,00			7.294.754.795.755,00	
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		11,54%			10,90%	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Provinsi Bali.

	Alokasi anggaran kesehatan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk: 1) Program pada urusan bidang kesehatan Rp656.277.190.043,00 atau 82,53% dari total anggaran kesehatan, antara lain diuraikan dalam: a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp240.016.575.177,00 atau 30,18% dari total anggaran kesehatan; dan b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp36.718.978.752,00 atau 4,62% dari total anggaran kesehatan. Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Pembangunan Sarana Kesehatan Rp84.272.354.753,00 atau 10,60% dari total anggaran kesehatan. 2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan Rp138.967.454.655,00 atau 17,47% dari total anggaran kesehatan, antara lain diuraikan dalam: a) Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka <i>Sharing</i> Pembiayaan JKN Rp80.977.038.508,00 atau 10,18% dari total anggaran kesehatan; b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Seluruh OPD diluar dinas Kesehatan Rp57.159.069.791,00 atau 7,19% dari total anggaran kesehatan; c) Belanja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas PMD Dukcapil Rp537.575.276,00 atau 0,07% dari total anggaran kesehatan; dan d) Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Rp293.771.080,00 atau 0,04% dari total anggaran kesehatan. Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi	

	<i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (<i>under weight</i>) pada anak balita dan menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp626.845.276,00 atau 0,08% dari total anggaran kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah. Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. c. Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tabel. 10 sebagai berikut: Tabel 10 Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik <table><tr><th>No.</th><th>Komponen Perhitungan</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Total Belanja Daerah</td><td>7.960.592.463.889,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Belanja Bagi Hasil</td><td>1.510.092.952.736,00</td></tr><tr><td></td><td>b. Belanja Bantuan Keuangan</td><td>522.374.803.508,00</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah (a+b)</td><td>2.032.467.756.244,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Selisih (1-2)</td><td>5.928.124.707.645,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)</td><td>2.371.249.883.058,00</td></tr></table>	No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	1.	Total Belanja Daerah	7.960.592.463.889,00	2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			a. Belanja Bagi Hasil	1.510.092.952.736,00		b. Belanja Bantuan Keuangan	522.374.803.508,00		Jumlah (a+b)	2.032.467.756.244,00	3.	Selisih (1-2)	5.928.124.707.645,00	4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	2.371.249.883.058,00	
No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)																								
1.	Total Belanja Daerah	7.960.592.463.889,00																								
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:																									
	a. Belanja Bagi Hasil	1.510.092.952.736,00																								
	b. Belanja Bantuan Keuangan	522.374.803.508,00																								
	Jumlah (a+b)	2.032.467.756.244,00																								
3.	Selisih (1-2)	5.928.124.707.645,00																								
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	2.371.249.883.058,00																								

Tabel 11			
Belanja Infrastruktur Daerah			
No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	
1	a) Belanja Modal		1.427.292.185.361,00
	1) Tanah	186.051.723.369,00	
	2) Peralatan dan Mesin	213.115.280.226,00	
	3) Bangunan dan Gedung	696.999.124.704,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	274.436.779.322,00	
	5) Aset tetap lainnya	55.789.277.740,00	
	6) Aset lainnya	900.000.000,00	
	b) Belanja pemeliharaan		31.687.112.955,00
2	a) Belanja Hibah		336.110.226.046,00
	b) Belanja Bantuan Sosial		0,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan		337.500.000.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		2.132.589.524.362,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pengalokasian anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja infrastuktur pelayanan publik dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

	d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali semula Rp43.485.039.356,00 berkurang Rp166.384.256,00 menjadi Rp43.318.655.100,00 atau 0,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun 2023, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula Rp20.467.540.274,00 berkurang Rp170.677.760,00 menjadi Rp20.296.862.514,00 atau 0,25% dari total belanja daerah; dan 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp23.017.499.082,00 bertambah Rp4.293.504,00 menjadi Rp23.021.792.586,00 atau 0,29% dari total belanja daerah; antara lain tercantum pada: 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal semula Rp3.899.443.658,00 bertambah Rp983.928,00 menjadi Rp3.900.427.586,00; 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp2.099.999.330,00 bertambah Rp447.240,00 menjadi Rp2.100.446.570,00; dan 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula Rp1.949.872.594,00 bertambah Rp268.344,00 menjadi Rp1.950.140.938,00; belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar). Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam	Pengalokasian anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan tersebut sudah sangat mencukupi dan telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

	Pengawasan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar). Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaa dan pengawasan, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, yaitu: a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, RKA-SKPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Reviu Laporan Keuangan; e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi <i>Probity Audit</i>,	

	Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis <i>gender</i>, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, <i>monitoring</i> dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain. sebagaimana maksud butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp49.836.858.591,00 bertambah Rp438.792.902,00 menjadi Rp50.275.651.493,00 atau 0,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang	

	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional semula Rp877.977.592,00 berkurang Rp293.889.208,00 menjadi Rp584.088.384,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga semula Rp13.629.772.032,00 bertambah Rp805.032,00 menjadi Rp13.630.577.064,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui: 1) Upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui	

	pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era <i>Digital</i> yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti <i>trafficking</i>, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian; 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka <i>stunting</i>, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan <i>digital</i> untuk ibu/anak, Antropometri, <i>Thermometer</i>, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia	

	Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: a) penghayatan dan pengamalan pancasila; b) gotong royong; c) pangan; d) sandang; e) perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) pendidikan dan keterampilan; g) kesehatan; h) pengembangan kehidupan berkooperasi; i) kelestarian lingkungan hidup; dan j) perencanaan sehat. 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program	Alokasi anggaran dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK telah dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang sandang dan pangan, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya. 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp467.280.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana maksud butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Dan penggunaannya diprioritaskan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>, pengelolaan Posyandu pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, serta kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK.

	c. Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp7.211.011.800,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp7.211.011.800,00, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Bali. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial yang tercantum pada Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS semula Rp137.661.648,00 berkurang Rp9.664.552,00 menjadi Rp127.997.096,00, dianggarkan dalam Rancangan	Penyediaan alokasi anggaran untuk FKUB sebesar Rp7.211.011.800,00 telah melalui koordinasi antara SKPD leading dengan FKUB, dan telah mengalami peningkatan dari alokasi anggaran FKUB dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp70.435.800,00.

	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi <i>deforestasi</i> dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.276.380.365.956,51 atau 48,60% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp2.626.285.326.075,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan	

	Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa semula Rp513.318.792,00 berkurang Rp104.797.104,00 menjadi Rp408.521.688,00; 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan semula Rp477.435.840,00 berkurang Rp8.088.760,00 menjadi Rp469.347.080,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi semula Rp17.976.319.276,00 bertambah Rp5.855.555.876,00 menjadi Rp23.831.875.152,00; 2) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota semula Rp884.750.200,00 bertambah Rp585.204.180,00 menjadi Rp1.469.954.380,00; 3) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi semula Rp479.260.196,00 berkurang Rp305.391.704,00 menjadi Rp173.868.492,00; dan	

	4) Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi Rp2.000.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum semula Rp2.188.361.084,00 bertambah Rp715.584,00 menjadi Rp2.189.076.668,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Rp799.999.800,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi: 1) pembentukan Paskibraka; 2) pelaksanaan tugas Paskibraka; 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila; 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila; 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta	

	Pancasila; dan 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan alokasi anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera yang semula dianggarkan pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dialihkan pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada: 1) Belanja Pegawai BLUD semula Rp82.999.324.890,00 bertambah Rp6.896.213.683,00 menjadi Rp89.895.538.573,00; 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp134.891.961.191,00 bertambah Rp26.421.391.417,00 menjadi Rp161.313.352.608,00; 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula Rp28.941.472.054,00 bertambah Rp3.708.978.250,00 menjadi Rp32.650.450.304,00; 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula Rp19.971.588.555,00 bertambah Rp255.000.000,00 menjadi Rp20.226.588.555,00; 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula Rp520.000.000,00 berkurang Rp120.000.000,00 menjadi Rp400.000.000,00; dan 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD semula Rp1.874.043.710,00 bertambah Rp205.000.000,00 menjadi Rp2.079.043.710,00,	Pengalihan alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), akan ditindaklanjuti pada APBD Tahun Anggaran 2024.

	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 8. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp4.343.716.844.932,00 bertambah Rp142.659.541.619,00 menjadi Rp4.486.376.386.551,00 atau 56,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja: a. Belanja Pegawai Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula Rp2.072.564.871.779,00 berkurang Rp61.620.271.963,00 menjadi Rp2.010.944.599.816,00 atau 25,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp1.770.563.805.071,00 atau 22,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru,	

	tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus secara konsisten mempertahankan ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan porsi Belanja Pegawai secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan Belanja belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2027. Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada: 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp927.729.128.050,00 berkurang Rp34.819.743.445,00 menjadi Rp892.909.384.605,00 atau 11,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji	Pemerintah Provinsi Bali dalam mengalokasikan anggaran belanja gaji dan tunjangan juga telah memperhitungkan kebutuhan gaji dan tunjangan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

	pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), butir D.16.a.1).j).(3) dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada: a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut: (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp53.771.598.976,00 berkurang Rp1.024.055.790,00 menjadi Rp52.747.543.186,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel.12 sebagai berikut:	

Tabel.12
 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan	
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	665.837.668.134,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	58.967.555.648,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.391.889.256,00
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.845.870.978,00
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.387.596.023,00
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	617.625.774.187,00
2	Jumlah Belanja	1.411.056.354.226,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	56.442.254.169,04
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	52.747.543.186,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	(3.694.710.983,04)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp56.442.254.169,04 atau terdapat selisih kurang Rp3.694.710.983,04. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran

Alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN dihitung berdasarkan batas paling tinggi Gaji atau Upah (Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan) ASN per bulan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yaitu sebesar Rp12.000.000,00, sehingga perhitungan alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Gaji Pokok dalam Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp665.837.668.134,00 termasuk gaji pokok bagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 yang saat ini belum dilakukan proses seleksi, sehingga belum dapat dialokasikan belanja iuran jaminan kesehatannya.

sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp175.000.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2023 (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.842.403.603,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	200.000.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.550.000.000,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	227.800.000,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00
2	Jumlah Belanja	4.820.203.603,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	192.808.144,12
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	175.000.000,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	(17.808.144,12)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp192.808.144,12 atau terdapat

Alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD telah disesuaikan kembali dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

selisih kurang Rp17.808.144,12.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH semula Rp8.836.800,00 berkurang Rp1.262.400,00 menjadi Rp7.574.400,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2023 (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	81.000.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.900.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	145.800.000,00
2	Jumlah Belanja	236.700.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	9.468.000,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	7.574.400,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)	(1.893.600,00)

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH seharusnya Rp9.468.000,00 atau terdapat selisih kurang Rp1.893.600,00. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam	Alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH telah disesuaikan kembali dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut: (1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp1.616.930.535,00 berkurang Rp317.946.318,00 menjadi Rp1.298.984.217,00; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp4.856.501.854,00 berkurang Rp1.146.504.956,00 menjadi Rp3.709.996.898,00; belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp1.598.010.403,52, atau terdapat selisih kurang Rp299.026.186,52; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp4.794.031.210,56 atau terdapat selisih kurang Rp1.084.034.312,56. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1)	Besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN akan disesuaikan kembali dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Belanja Gaji Pokok dalam Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp665.837.668.134,00 termasuk gaji pokok bagi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 yang saat ini belum dilakukan proses seleksi, sehingga belum dapat dialokasikan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian.

	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. (2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH semula Rp181.440,00 berkurang Rp25.920,00 menjadi Rp155.520,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH semula Rp544.320,00 berkurang Rp77.760,00 menjadi Rp466.560,00; (c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp8.850.000,00; dan (d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp24.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	

	Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa Pelaksanaan Medical Check Up DPRD semula Rp273.353.448,00 bertambah Rp89.448,00 menjadi Rp273.442.896,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84	

	Tahun 2022. 3) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, yang diuraikan pada: a) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS semula Rp4.253.722.034,00 berkurang Rp1.140.431.603,00 menjadi Rp3.113.290.431,00; dan b) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK semula Rp39.203.558,00 berkurang Rp19.509.744,00 menjadi Rp19.693.814,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir G.58. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain: a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp58.289.033.531,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:	

(1) Belanja Uang Representasi DPRD
Rp1.842.403.603,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel 15 sebagai berikut :

Tabel. 15
Belanja Uang Representasi DPRD

No.	Komponen Perhitungan Rancangan Perubahan APBD TA 2023			
	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	2.400.000,00	7.200.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	51	2.250.000,00	114.750.000,00
4	Jumlah uang representasi Pimpinan dan Anggota	55		124.950.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)			1.749.300.000,00
6	Alokasi uang representasi pada Perubahan APBD			1.842.403.603,00
	Selisih (angka 6 - angka 5)			93.103.603,00

	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp227.800.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:	Untuk Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, sudah kami anggarkan sesuai ketentuan, efektif, efisien dan dibayarkan sesuai dengan posisi dan keanggotaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Alat Kelengkapan DPRD.

Tabel. 16				
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD				
No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	55	3.000.000,00	9.900.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Perubahan APBD			9.900.000.000,00
3	Selisih (angka 2 - angka 1)			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Untuk Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sudah dianggarkan sesuai ketentuan.

	Operasional. (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.475.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut: Tabel. 17 Belanja Tunjangan Reses DPRD <table><tr><th>No.</th><th>Komponen Perhitungan</th><th>Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD</th><th>Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD sedang)</td><td>55</td><td>3.000.000,00</td><td>2.475.000.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Alokasi Tunjangan Reses pada Perubahan APBD</td><td></td><td></td><td>2.475.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Selisih (angka 2 - angka 1)</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table> Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana	No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)	1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD sedang)	55	3.000.000,00	2.475.000.000,00	2	Alokasi Tunjangan Reses pada Perubahan APBD			2.475.000.000,00		Selisih (angka 2 - angka 1)			0,00	Belanja Tunjangan Reses DPRD sudah dianggarkan sesuai ketentuan.
No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)																		
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD sedang)	55	3.000.000,00	2.475.000.000,00																		
2	Alokasi Tunjangan Reses pada Perubahan APBD			2.475.000.000,00																		
	Selisih (angka 2 - angka 1)			0,00																		

	maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. (6) Penyediaan alokasi anggaran yang tercantum dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp25.690.929.928,00; dan (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp14.800.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah,	Belanja Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD sudah dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No.	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2023		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	144.000.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	216.000.000,00
3	Jumlah Dana Operasional		360.000.000,00
4	Alokasi Dana Operasional pada APBD		360.000.000,00
Selisih (angka 4 - angka 3)			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas

Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN sudah dianggarkan sesuai ketentuan.

	ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. 5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp7.097.128.773,00 bertambah Rp388.138.875,00 menjadi Rp7.485.267.648,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.041.446.320.153,00 yaitu Rp7.562.169.480,23. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. 6) Tambahan Penghasilan ASN (TPP ASN) Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp688.469.791.010,00 berkurang Rp70.844.016.823,00 menjadi Rp617.625.774.187,00 atau 7,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp7.097.128.773,00 telah disesuaikan menjadi sebesar Rp7.562.169.480,23 sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

	Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp476.215.111.751,00 berkurang Rp34.597.675.063,00 menjadi Rp441.617.436.688,00; b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp121.647.250,00; c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp51.603.568.177,00 berkurang Rp5.458.995.933,00 menjadi Rp46.144.572.244,00; dan d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN semula Rp160.529.463.832,00 berkurang Rp30.787.345.827,00 menjadi Rp129.742.118.005,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir D.16.a.1).j).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/4619/Keuda tanggal 23 Februari	Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah telah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

	2023 Hal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023. 7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp307.359.916.465,00 bertambah Rp36.762.829.529,00 menjadi Rp344.122.745.994,00 atau 4,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula Rp62.126.944.500,00 bertambah Rp16.907.382.597,00 menjadi Rp79.034.327.097,00; b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula Rp337.470.512,00 berkurang Rp79.335.000,00 menjadi Rp258.135.512,00; c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp215.706.720.000,00 bertambah Rp19.293.574.745,00 menjadi Rp235.000.294.745,00; d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp4.237.500.000,00 bertambah Rp1.143.000.000,00 menjadi Rp5.380.500.000,00; e) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN semula Rp18.276.046.453,00 berkurang Rp94.022.813,00 menjadi Rp18.182.023.640,00; f) Belanja Honorarium semula Rp5.404.435.000,00 berkurang Rp515.370.000,00 menjadi Rp4.889.065.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula Rp4.925.005.000,00 berkurang Rp337.825.000,00 menjadi Rp4.587.180.000,00; dan (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula Rp474.330.000,00 berkurang Rp172.445.000,00 menjadi Rp301.885.000,00.	

	g) Belanja Jasa Pengelolaan BMD semula Rp1.270.800.000,00 bertambah Rp107.600.000,00 menjadi Rp1.378.400.000,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada: a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.	

	b) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan. c) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. d) Butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp1.348.709.586.876,00 bertambah Rp36.335.277.207,00 menjadi Rp1.385.044.864.083,00 atau 17,40% dari total	

	belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: 1) Belanja Barang Penganggaran Belanja Barang semula Rp188.876.335.252,00 berkurang Rp3.704.453.429,00 menjadi Rp185.171.881.823,00 atau 2,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Barang Pakai Habis semula Rp188.876.335.252,00 berkurang Rp3.704.453.429,00 menjadi Rp185.171.881.823,00 atau 2,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp24.557.578.149,00 bertambah Rp1.550.117.612,00 menjadi Rp26.107.695.761,00; b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp35.374.927.629,00 bertambah Rp1.071.970.540,00 menjadi Rp36.446.898.169,00;	

	c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp47.817.680.000,00 berkurang Rp10.359.885.000,00 menjadi Rp37.457.795.000,00; d) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp11.115.789.771,00 berkurang Rp1.324.542.498,00 menjadi Rp9.791.247.273,00; dan e) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp7.082.985.000,00 bertambah Rp2.089.455.000,00 menjadi Rp9.172.440.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp3.995.830.000,00 bertambah Rp1.237.459.000,00 menjadi Rp5.233.289.000,00; dan b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp109.600.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan	Penganggaran belanja barang telah memperhatikan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya.

	pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp19.891.548.000,00 bertambah Rp346.200.000,00 menjadi Rp20.237.748.000,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp4.404.800.000,00 bertambah Rp346.200.000,00 menjadi Rp4.751.000.000,00; - b Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp2.854.150.000,00;	

	c) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp12.492.598.000,00; dan d) Belanja Santunan Kematian Rp140.000.000,00; diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selain itu, dalam pelaksanaannya penyediaan alokasi anggaran dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 2) Belanja Jasa Penganggaran Belanja Jasa semula Rp662.376.909.987,00 bertambah Rp19.082.378.162,00 menjadi Rp681.459.288.149,00 atau 8,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Kantor semula Rp546.385.544.905,00 bertambah Rp24.677.920.869,00 menjadi	

	Rp571.063.465.774,00 atau 7,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp9.885.800.000,00 berkurang Rp3.357.300.000,00 menjadi Rp6.528.500.000,00; (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp6.949.795.000,00 berkurang Rp1.259.025.000,00 menjadi Rp5.690.770.000,00; (3) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp59.286.476.800,00 berkurang Rp9.006.595.600,00 menjadi Rp50.279.881.200,00; (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp58.097.291.072,00 bertambah Rp1.400.169.200,00 menjadi Rp59.497.460.272,00; (5) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan semula Rp13.320.150.000,00 bertambah Rp2.135.500.000,00 menjadi Rp15.455.650.000,00; (6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp166.091.107.356,00 bertambah Rp4.912.580.536,00 menjadi Rp171.003.687.892,00; (7) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp26.259.179.520,00 bertambah Rp8.604.149.000,00 menjadi Rp34.863.328.520,00; (8) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula Rp6.086.640.248,00 bertambah Rp7.386.809.850,00 menjadi	

	Rp13.473.450.098,00; (9) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula Rp16.043.450.000,00 bertambah Rp13.651.937.060,00 menjadi Rp29.695.387.060,00; (10) Belanja Tagihan Listrik semula Rp23.715.612.029,00 berkurang Rp428.317.034,00 menjadi Rp23.287.294.995,00; (11) Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan semula Rp17.546.464.000,00 berkurang Rp26.200.000,00 menjadi Rp17.520.264.000,00; dan (12) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan semula Rp1.945.862.256,00 bertambah Rp63.906.322,00 menjadi Rp2.009.768.578,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta	

	sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp51.700.708.088,00 bertambah Rp895.199.997,00 menjadi Rp52.595.908.085,00 atau 0,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang tercantum pada Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp22.925.977.200,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi	

	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. (2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula Rp13.232.695.620,00 bertambah Rp933.953.688,00 menjadi Rp14.166.649.308,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula Rp794.275.100,00 bertambah Rp13.844.525,00 menjadi Rp808.119.625,00; dan (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula Rp13.218.960.168,00 bertambah Rp247.401.784,00 menjadi Rp13.466.361.952,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).iv, butir D.16.a.2).c).(2).(d) dan butir D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. (3) Penyediaan alokasi Belanja Asuransi Barang Milik Daerah semula Rp1.528.800.000,00 berkurang Rp300.000.000,00 menjadi Rp1.228.800.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun	

	Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Sewa Tanah Rp45.000.000,00 atau 0,0006% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp3.000.000,00; dan (b) Belanja Sewa Lapangan Lainnya Rp42.000.000,00. (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp25.240.621.297,00 bertambah Rp2.607.588.900,00 menjadi Rp27.848.210.197,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Excavator semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.826.080.000,00; (b) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.199.100.000,00; (c) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula Rp9.238.972.000,00 bertambah Rp2.447.170.000,00 menjadi	

	Rp10.000.000,00 menjadi Rp20.000.000,00; (5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula Rp1.436.600.000,00 bertambah Rp12.500.000,00 menjadi Rp1.449.100.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Audio Visual semula Rp321.500.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp571.500.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir	Penganggaran belanja sewa telah sesuai kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.

	D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp800.000.000,00 bertambah Rp1.151.855.704,00 menjadi Rp1.951.855.704,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp100.000.000,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp235.630.000,00; (c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp149.950.000,00; dan (d) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp493.375.410,00 menjadi Rp543.375.410,00. (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp10.798.881.136,00 berkurang	

	Rp3.365.909.851,00 menjadi Rp7.432.971.285,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei semula Rp2.045.000.000,00 berkurang Rp359.049.317,00 menjadi Rp1.685.950.683,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula Rp5.376.892.136,00 berkurang Rp1.526.912.834,00 menjadi Rp3.849.979.302,00; dan (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus semula Rp1.591.989.000,00 berkurang Rp79.947.700,00 menjadi Rp1.512.041.300,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai	

	aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir F.1.f.31) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. e) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp238.620.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan Rp238.620.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir D.16.a.2).c).(2).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp7.302.272.104,00 berkurang Rp933.450.000,00 menjadi Rp6.368.822.104,00 atau 0,08% dari total	

	belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp3.584.457.104,00 berkurang Rp1.137.175.000,00 menjadi Rp2.447.282.104,00; (2) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp956.000.000,00 menjadi Rp1.056.000.000,00; dan (3) Belanja Diklat Kepemimpinan semula Rp3.617.815.000,00 berkurang Rp752.275.000,00 menjadi Rp2.865.540.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula Rp14.206.353.976,00 bertambah Rp1.073.376,00 menjadi Rp14.207.427.352,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan	

	Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,	

	lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 3) Belanja Pemeliharaan semula Rp30.494.049.270,00 bertambah Rp1.193.063.685,00 menjadi Rp31.687.112.955,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp19.323.813.145,00 bertambah Rp1.200.303.910,00 menjadi Rp20.524.117.055,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya semula Rp860.000.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp1.460.000.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp9.793.180.000,00 berkurang Rp33.796.640,00 menjadi Rp9.759.383.360,00; (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp1.300.000.000,00 berkurang Rp120.000.000,00 menjadi Rp1.180.000.000,00; (4) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula Rp1.114.875.000,00 bertambah Rp214.690.000,00 menjadi Rp1.329.565.000,00; dan (5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-	

	Personal Computer semula Rp1.433.260.000,00 berkurang Rp16.060.000,00 menjadi Rp1.417.200.000,00. (b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp9.287.943.436,00 bertambah Rp404.309.775,00 menjadi Rp9.692.253.211,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp1.619.374.904,00 berkurang Rp48.677.800,00 menjadi Rp1.570.697.104,00; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp5.016.000.000,00; dan (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman semula Rp1.795.858.332,00 bertambah Rp559.987.575,00 menjadi Rp2.355.845.907,00. (c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp1.454.292.689,00 berkurang Rp339.550.000,00 menjadi Rp1.114.742.689,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya semula Rp271.655.908,00 bertambah Rp6.750.000,00 menjadi Rp278.405.908,00; dan (2) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya semula Rp692.599.108,00 berkurang Rp324.500.000,00 menjadi Rp368.099.108,00. (d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya semula	

	Rp318.000.000,00 berkurang Rp22.000.000,00 menjadi Rp296.000.000,00 atau 0,0037% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian- Alat Musik semula Rp10.000.000,00 bertambah Rp16.000.000,00 menjadi Rp26.000.000,00; dan (2) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian- Barang Bercorak Kesenian Lainnya Rp115.000.000,00. (e) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud semula Rp110.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp60.000.000,00 atau 0,0008% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software semula Rp110.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp60.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana	

	maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir F.1.f.31) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 4) Belanja Perjalanan Dinas semula Rp173.076.292.500,00 berkurang Rp10.874.088.704,00 menjadi Rp162.202.203.796,00 atau 2,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp154.464.002.500,00 berkurang Rp11.303.839.204,00 menjadi Rp143.160.163.296,00 atau 1,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp93.810.258.500,00 bertambah Rp3.742.657.000,00 menjadi Rp97.552.915.500,00; (2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula Rp40.747.438.000,00 berkurang Rp1.791.604.000,00 menjadi Rp38.955.834.000,00; dan (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp19.906.306.000,00 berkurang	

	Rp13.254.892.204,00 menjadi Rp6.651.413.796,00. b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula Rp18.612.290.000,00 bertambah Rp429.750.500,00 menjadi Rp19.042.040.500,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Negeri semula Rp18.612.290.000,00 bertambah Rp429.750.500,00 menjadi Rp19.042.040.500,00. Harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan	Belanja perjalanan dinas dialokasikan berdasarkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: a) Sekretariat Daerah semula Rp14.557.216.500,00 bertambah Rp6.347.137.500,00 menjadi Rp20.904.354.000,00 atau 8,99% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp232.432.571.519,00; dan b) Sekretariat DPRD semula Rp104.027.463.000,00	Alokasi belanja perjalanan dinas luar negeri telah dilakukan penyesuaian kembali serta sudah dialokasikan berdasarkan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

	berkurang Rp13.809.191.000,00 menjadi Rp90.218.272.000,00 atau 41,34% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp218.222.243.237,00; dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja wajib dalam penanganan dampak inflasi, memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang- kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar). Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat serta anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp10.661.160.676,00 berkurang Rp45.149.000,00 menjadi Rp10.616.011.676,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	

	a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp10.309.570.008,00 bertambah Rp52.051.000,00 menjadi Rp10.361.621.008,00; dan b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat semula Rp351.590.668,00 berkurang Rp97.200.000,00 menjadi Rp254.390.668,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 6) Belanja Barang dan Jasa BOS semula Rp128.441.330.000,00 bertambah Rp3.915.935.076,00 menjadi Rp132.357.265.076,00 atau 1,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan	

	butir C.2.b.4).a).(4).(e).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. c. Belanja Subsidi Penganggaran Belanja Subsidi Rp10.025.000.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Belanja subsidi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat agar hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal, belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah	

	mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula Rp912.417.386.277,00,00 bertambah Rp167.944.536.375,00,00 menjadi Rp1.080.361.922.652,00,00 atau 13,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang tercantum pada: 1) Belanja Hibah semula Rp881.696.186.277,00 bertambah Rp188.665.736.375,00 menjadi Rp1.070.361.922.652,00 atau 13,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp79.753.807.200,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp78.829.667.200,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp78.829.667.200,00; dan (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan	

	APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp924.140.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp924.140.000,00. b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp771.140.341.277,00 bertambah Rp107.490.187.284,00 menjadi Rp878.630.528.561,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp476.477.090.756,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp476.477.090.756,00; (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp294.613.250.521,00 bertambah Rp107.490.187.284,00 menjadi Rp402.103.437.805,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp263.802.162.400,00 bertambah Rp114.648.500.000,00 menjadi Rp378.450.662.400,00; dan (3) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp50.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	

	Rp50.000.000,00. c) Belanja Hibah Dana BOS Rp94.087.990.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp94.087.990.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp94.087.990.000,00; 2) Belanja Bantuan Sosial semula Rp30.721.200.000,00 berkurang Rp20.721.200.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp30.721.200.000,00 berkurang Rp20.721.200.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp30.721.200.000,00 berkurang Rp20.721.200.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp30.721.200.000,00 berkurang Rp20.721.200.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial telah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

	77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja wajib dalam penanganan dampak inflasi, memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar). Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat serta anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada	

	masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan belanja bantuan	

	sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp16.467.855.000,00 bertambah Rp1.372.321.250,00 menjadi Rp17.840.176.250,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta butir D.16.a.5).a).(4).(g).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Persetujuan Menteri terhadap Kenaikan Bantuan Keuangan	Mengingat tidak adanya persetujuan Menteri terhadap Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut, , serta tidak tercantum dalam dokumen KUA dan PPAS, maka tambahan anggarannya tidak diakomodir dan anggarannya akan dialihkan untuk menambah alokasi Belanja Tidak Terduga.

	Partai Politik menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Persetujuan diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah provinsi yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020. Berkaitan dengan itu, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.420.641,00 yang hanya dianggarkan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.420.641,00, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mengingat penyediaan alokasi anggaran tersebut hanya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Untuk itu, penyediaan alokasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya dimaksud untuk dialihkan penganggarnya ke dalam Belanja Bantuan Keuangan apabila penerima hibah dimaksud adalah Pemerintah Provinsi Lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan/atau di luar wilayahnya, dan Pemerintah Desa, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Bab II butir D.2.e.5).b) Lampiran Peraturan Menteri	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya telah disesuaikan kembali berpedoman pada nomenklatur kode rekening belanja yang tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 9. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp1.419.978.951.582,00 bertambah Rp7.313.233.779,00 menjadi Rp1.427.292.185.361,00 atau 17,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada: a. perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD;	

	b. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; dan c. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada: a. Belanja Modal Tanah semula Rp182.964.805.976,00 bertambah Rp3.086.917.393,00 menjadi Rp186.051.723.369,00 atau 2,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil semula Rp182.964.805.976,00 bertambah Rp3.086.917.393,00 menjadi Rp186.051.723.369,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Lainnya semula Rp159.062.140.676,00 bertambah Rp1.734.917.393,00 menjadi Rp160.797.058.069,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang	

	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana maksud butir D.16.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp207.854.510.993,00 bertambah Rp5.260.769.233,00 menjadi Rp213.115.280.226,00 atau 2,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Besar semula Rp2.191.000.000,00 berkurang Rp1.322.000.000,00 menjadi Rp869.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Besar Darat semula Rp1.900.000.000,00 berkurang Rp1.307.000.000,00 menjadi Rp593.000.000,00 yang diuraikan pada sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Excavator Rp1.300.000.000,00; dan (2) Belanja Modal Compacting Equipment semula Rp600.000.000,00 berkurang Rp7.000.000,00 menjadi Rp593.000.000,00. b) Belanja Modal Alat Bantu semula Rp291.000.000,00 berkurang Rp15.000.000,00 menjadi Rp276.000.000,00 yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Rp265.000.000,00.	

	2) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp21.258.013.000,00 berkurang Rp869.140.000,00 menjadi Rp20.388.873.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp21.258.013.000,00 berkurang Rp869.140.000,00 menjadi Rp20.388.873.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp12.583.399.000,00 berkurang Rp1.174.208.000,00 menjadi Rp11.409.191.000,00; b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp8.001.000.000,00 berkurang Rp5.000.000,00 menjadi Rp7.996.000.000,00; c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp673.614.000,00 bertambah Rp270.068.000,00 menjadi Rp943.682.000,00; dan d) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp40.000.000,00. 3) Belanja Modal Alat Pertanian semula Rp3.890.229.115,00 bertambah Rp66.490.525,00 menjadi Rp3.956.719.640,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan semula Rp3.890.229.115,00 bertambah Rp66.490.525,00 menjadi Rp3.956.719.640,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak semula Rp942.824.475,00 bertambah Rp363.525,00 menjadi Rp943.188.000,00; dan b) Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian semula Rp2.947.404.640,00 bertambah Rp66.127.000,00 menjadi Rp3.013.531.640,00. 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp14.466.125.418,00 bertambah Rp3.473.487.842,00	

	menjadi Rp17.939.613.260,00, yang diuraikan pada rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp2.524.830.617,00 berkurang Rp576.622.857,00 menjadi Rp1.948.207.760,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor semula Rp1.044.851.500,00 berkurang Rp416.501.500,00 menjadi Rp628.350.000,00; dan (2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp1.479.061.917,00 berkurang Rp159.204.157,00 menjadi Rp1.319.857.760,00. b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp11.343.772.801,00 bertambah Rp4.204.968.699,00 menjadi Rp15.548.741.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Mebel semula Rp6.786.580.200,00 bertambah Rp4.734.916.000,00 menjadi Rp11.521.496.200,00; (2) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp2.585.318.800,00 berkurang Rp111.323.100,00 menjadi Rp2.473.995.700,00; dan (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) semula Rp1.304.264.201,00 bertambah Rp54.985.799,00 menjadi Rp1.359.250.000,00. c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula Rp597.522.000,00 berkurang Rp154.858.000,00 menjadi Rp442.664.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Meja Kerja Pejabat semula Rp227.548.000,00 berkurang Rp177.588.000,00 menjadi Rp49.960.000,00. 5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula Rp4.090.185.985,00 bertambah Rp631.641.380,00 menjadi Rp4.721.827.365,00, yang diuraikan pada rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Studio semula Rp2.548.811.985,00	

	bertambah Rp653.641.380,00 menjadi Rp3.202.453.365,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan Studio Audio semula Rp387.466.485,00 bertambah Rp57.419.000,00 menjadi Rp444.885.485,00; (2) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film semula Rp1.176.139.000,00 bertambah Rp527.220.380,00 menjadi Rp1.703.359.380,00; dan (3) Belanja Modal Alat Studio Lainnya semula Rp963.504.500,00 bertambah Rp69.002.000,00 menjadi Rp1.032.506.500,00. b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula Rp1.524.374.000,00 berkurang Rp5.000.000,00 menjadi Rp1.519.374.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus Rp1.470.000.000,00. 6) Belanja Modal Komputer semula Rp14.668.260.234,00 berkurang Rp521.057.146,00 menjadi Rp14.147.203.088,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp11.479.037.074,00 berkurang Rp284.581.500,00 menjadi Rp11.194.455.574,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Personal Computer semula Rp11.354.037.074,00 berkurang Rp284.581.500,00 menjadi Rp11.069.455.574,00; b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp3.189.223.160,00 berkurang Rp236.475.646,00 menjadi Rp2.952.747.514,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan Personal Computer semula Rp2.030.147.998,00 berkurang Rp191.834.998,00 menjadi Rp1.838.313.000,00; dan	

	(2) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp1.000.223.962,00 berkurang Rp43.768.648,00 menjadi Rp956.455.314,00. 7) Belanja Modal Alat Eksplorasi semula Rp268.290.000,00 bertambah Rp3.886.000,00 menjadi Rp272.176.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika semula Rp268.290.000,00 bertambah Rp3.886.000,00 menjadi Rp272.176.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Elektronik/Electric semula Rp268.290.000,00 bertambah Rp3.886.000,00 menjadi Rp272.176.000,00; 8) Belanja Modal Rambu-Rambu semula Rp1.349.400.813,00 berkurang Rp480.893.063,00 menjadi Rp868.507.750,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat semula Rp1.349.400.813,00 berkurang Rp480.893.063,00 menjadi Rp868.507.750,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Rambu Bersuar Rp793.300.000,00; dan b) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya semula Rp556.100.813,00 berkurang Rp480.893.063,00 menjadi Rp75.207.750,00. 9) Belanja Modal Peralatan Olahraga semula Rp102.587.200,00 bertambah Rp114.745.400,00 menjadi Rp217.332.600,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga semula Rp102.587.200,00 bertambah Rp114.745.400,00 menjadi Rp217.332.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya semula Rp92.283.000,00 bertambah Rp73.975.000,00 menjadi Rp166.258.000,00. c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp705.969.048.170,00 berkurang Rp8.969.923.466,00 menjadi Rp696.999.124.704,00 atau 8,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara	

	lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp680.447.459.615,00 berkurang Rp9.223.445.912,00 menjadi Rp671.224.013.703,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek: a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp679.973.735.615,00 berkurang Rp8.790.445.912,00 menjadi Rp671.183.289.703,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp28.719.803.692,00 berkurang Rp1.902.415.301,00 menjadi Rp26.817.388.391,00; (2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp781.000.000,00; (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah semula Rp48.034.232.771,00 berkurang Rp5.450.025.858,00 menjadi Rp42.584.206.913,00; (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp1.232.135.407,00 berkurang Rp490.000.000,00 menjadi Rp742.135.407,00; (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp226.404.728.300,00 berkurang Rp2.073.311.000,00 menjadi Rp224.331.417.300,00; (6) Belanja Modal Bangunan Terbuka semula Rp936.930.000,00 bertambah Rp170.000.000,00 menjadi Rp1.106.930.000,00; (7) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp366.394.382.660,00 bertambah Rp126.212.386,00 menjadi Rp366.520.595.046,00; (8) Belanja Modal Taman semula Rp2.018.725.000,00 berkurang Rp528.975.375,00 menjadi Rp1.489.749.625,00; dan (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp3.726.430.835,00. b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	

	semula Rp473.724.000,00 berkurang Rp433.000.000,00 menjadi Rp40.724.000,00; 2) Belanja Modal Monumen semula Rp5.350.000.000,00 berkurang Rp1.477.554,00 menjadi Rp5.348.522.446,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti semula Rp5.350.000.000,00 berkurang Rp1.477.554,00 menjadi Rp5.348.522.446,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Peninggalan semula Rp5.350.000.000,00 berkurang Rp1.477.554,00 menjadi Rp5.348.522.446,00; dan 3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar Rp200.000.000,00. d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan semula Rp269.502.569.533,00 bertambah Rp4.934.209.789,00 menjadi Rp274.436.779.322,00 atau 3,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp230.259.393.033,00 bertambah Rp5.205.560.312,00 menjadi Rp235.464.953.345,00 yang diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Jalan semula Rp230.259.393.033,00 bertambah Rp5.205.560.312,00 menjadi Rp235.464.953.345,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Jalan Provinsi semula Rp164.879.253.183,00 berkurang Rp6.624.253.887,00 menjadi Rp158.254.999.296,00; dan b) Belanja Modal Jalan Lainnya semula Rp65.380.139.850,00 bertambah Rp11.829.814.199,00 menjadi Rp77.209.954.049,00. 2) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp25.583.162.000,00	

	bertambah Rp697.397.047,00 menjadi Rp26.280.559.047,00 yang diuraikan pada rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula Rp22.099.162.000,00 berkurang Rp430.268.000,00 menjadi Rp21.668.894.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi semula Rp21.749.162.000,00 berkurang Rp80.268.000,00 menjadi Rp21.668.894.000,00. b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp3.360.000.000,00 berkurang Rp1.124.084.829,00 menjadi Rp2.235.915.171,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp3.360.000.000,00 berkurang Rp1.124.084.829,00 menjadi Rp2.235.915.171,00. c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.142.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.142.000.000,00. 3) Belanja Modal Instalasi semula Rp2.535.494.500,00 berkurang Rp700.721.080,00 menjadi Rp1.834.773.420,00, yang diuraikan pada rincian objek belanja: a) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku semula Rp179.341.100,00 berkurang Rp101.866.100,00 menjadi Rp77.475.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya semula Rp179.341.100,00 berkurang Rp101.866.100,00 menjadi Rp77.475.000,00;	

	b) Belanja Modal Instalasi Air Kotor semula Rp1.325.000.000,00 berkurang Rp95.320.070,00 menjadi Rp1.229.679.930,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik semula Rp1.325.000.000,00 berkurang Rp129.320.070,00 menjadi Rp1.195.679.930,00; dan c) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik semula Rp700.000.000,00 berkurang Rp500.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) semula Rp700.000.000,00 berkurang Rp500.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00. 4) Belanja Modal Jaringan semula Rp10.604.520.000,00 berkurang Rp148.026.490,00 menjadi Rp10.456.493.510,00, yang diuraikan pada rincian objek belanja: a) Belanja Modal Jaringan Air Minum semula Rp9.961.000.000,00 berkurang Rp123.606.490,00 menjadi Rp9.837.393.510,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya semula Rp462.150.000,00 berkurang Rp16.650.000,00 menjadi Rp445.500.000,00; dan b) Belanja Modal Jaringan Telepon semula Rp181.370.000,00 berkurang Rp7.770.000,00 menjadi Rp173.600.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya semula Rp177.870.000,00 berkurang Rp7.770.000,00 menjadi Rp170.100.000,00. e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp53.688.016.910,00 bertambah Rp2.101.260.830,00 menjadi Rp55.789.277.740,00 atau 0,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan	

	Perpustakaan semula Rp175.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp75.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya semula Rp175.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp75.000.000,00. f. Belanja Modal Aset Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp900.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp900.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp900.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp900.000.000,00. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan asset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2	

	Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir F.1.f.31) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pengadaan barang milik daerah maksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: a) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp29.498.590.894,00 atau 0.37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Rp29.496.790.894,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp767.214.500,00; 2) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung Rp17.105.111.117,00; 3) Belanja Modal Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i> Rp1.117.579.600,00; dan 4) Belanja Modal Alat Kedokteran <i>Radioterapi</i> Rp10.506.885.677,00. b) Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp9.844.749.280,00 berkurang Rp1.694.931.000,00 menjadi Rp8.149.818.280,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir semula	

	Rp2.800.000.000,00 berkurang Rp600.000.000,00 menjadi Rp2.200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya semula Rp2.800.000.000,00 berkurang Rp600.000.000,00 menjadi Rp2.200.000.000,00; 2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah semula Rp5.954.786.000,00 berkurang Rp155.689.000,00 menjadi Rp5.799.097.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya semula Rp5.954.786.000,00 berkurang Rp155.689.000,00 menjadi Rp5.799.097.000,00; dan 3) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp8.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal <i>System/Power Supply</i> Rp8.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. 10. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp50.000.000.000,00 berkurang Rp35.543.864.267,00 menjadi Rp14.456.135.733,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan	

	APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara memadai dan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 serta kemungkinan adanya kegiatan- kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 11. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp1.708.697.252.400,00 bertambah Rp323.770.503.844,00 menjadi Rp2.032.467.756.244,00 atau 25,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada: a. Belanja Bagi Hasil semula Rp1.186.722.448.892,00 bertambah Rp323.370.503.844,00 menjadi Rp1.510.092.952.736,00 atau 18,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, atau terdapat selisih lebih Rp235.811.387.731,70 dari yang seharusnya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Rp1.274.281.565.004,30, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Bagi Hasil PKB $\text{Rp}1.495.870.827.460,00 \times 30\% = \text{Rp}448.761.248.238,00$; 2) Belanja Bagi Hasil BBNKB $\text{Rp}985.019.675.880,00 \times 30\% = \text{Rp}295.505.902.764,00$; 3) Belanja Bagi Hasil PBBKB $\text{Rp}400.000.000.000,00 \times 70\% = \text{Rp}280.000.000.000,00$; 4) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan $\text{Rp}3.200.000.000,00 \times 50\% = \text{Rp}1.600.000.000,00$; dan 5) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok $\text{Rp}354.877.734.289,00 \times 70\% = \text{Rp}248.414.414.002,30$. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil	Penyediaan anggaran belanja Tidak Terduga telah disesuaikan kembali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 serta kemungkinan adanya kegiatan- kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang- undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta butir C.2.s.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Selisih lebih Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp235.811.387.731,70 merupakan kewajiban Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

	Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana maksud Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir D.16.d.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b. Belanja Bantuan Keuangan semula Rp521.974.803.508,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp522.374.803.508,00 atau 6,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp446.304.403.508,00; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp75.670.400.000,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp76.070.400.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta	

	alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Provinsi Bali tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir F.1.f.31) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar). Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat serta anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di	

luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp588.445.729.031,00 bertambah Rp128.685.476.911,00 menjadi Rp717.131.205.942,00, sebagaimana Tabel. 19 sebagai berikut:

Tabel.19
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target P. APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Salah Target P. APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Salah Target P. APBD Tahun Anggaran 2023	% dari Target P. APBD Tahun Anggaran 2023
	Target	Realisasi		Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3.2	5	6	7=6.5	8	9=8.5	10=9.5	11=10.8
PEMBAYARAN DAERAH	2.045.341.671.769,00	1.293.798.304.068,62	63,26	588.445.729.031,00	72.039.964.711,36	12,24	717.131.205.942,00	128.685.476.911,00	21,87	10,05
PENERIMAAN PEMBAYARAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.050.341.671.769,00	1.293.798.304.068,62	63,10	1.025.945.729.031,00	330.133.723.425,36	32,18	1.112.919.271.871,00	86.973.542.840,00	8,48	29,66
	850.341.671.769,00	850.296.343.468,62	99,99	1.025.945.729.031,00	330.133.723.425,36	32,18	330.133.723.425,00	(695.812.005.606)	(67,82)	100,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	78.829.667.200,00	78.829.667.200	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.200.000.000.000,00	443.501.960.600,00	36,96	0,00	0,00	-	703.955.881.246,00	703.955.881.246	-	-
PENGELUARAN PEMBAYARAN	5.000.000.000,00	0,00	-	437.500.000.000,00	258.093.758.714,00	58,99	395.788.065.929,00	(41.711.934.071,00)	(9,53)	65,21
Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	150.000.000.000,00	-	-	100,00
Pemertan Modal Daerah	5.000.000.000,00	0,00	-	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00	-	-	100,00
Pembayaran Gaji Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	-	187.500.000.000,00	8.093.758.714,00	4,32	145.788.065.929,00	(41.711.934.071,00)	(22,25)	5,55

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari: 1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. 3. Penerimaan Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula Rp1.025.945.729.031,00 bertambah Rp86.973.542.840,00 menjadi Rp1.112.919.271.871,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp1.025.945.729.031,00 berkurang Rp695.812.005.606,00 menjadi Rp330.133.723.425,00 atau 4,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.960.592.463.889,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2022 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2021 Rp850.341.671.769,52 atau 10,76% dari total belanja daerah Rp7.903.323.253.052,00 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2020 Rp192.855.860.215,36 atau 2,79% dari total	Pemerintah Provinsi Bali akan terus berupaya mendorong capaian target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sertamelakukan pengendalian belanja daerah pada tahap pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

	belanja daerah Rp6.924.582.165.725,65. Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp1.025.945.729.031,00 berkurang Rp695.812.005.606,00 menjadi Rp330.133.723.425,00, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan target pendapatan daerah secara terukur dan rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian penerimaan dengan tetap memperhatikan capaian realisasi pendapatan daerah tahun anggaran berkenaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga harus melakukan rasionalisasi belanja daerah guna mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan memperhatikan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan dimaksud tersedia atau cukup tersedia dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mengingat APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran seseuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pencairan Dana Cadangan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pencairan Dana Cadangan yang semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp78.829.667.200,00 atau 0,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang	

	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.3.a.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Dana Cadangan tersebut penggunaannya diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Untuk pencairan dana cadangan, dapat dicairkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan yang menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal Dana Cadangan dimaksud belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Selanjutnya, penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai maksud Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal pencairan dana cadangan tersebut akan digunakan guna mendanai pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2024 pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menggunakan pencairan dana cadangan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Penerimaan Pinjaman Daerah Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan	

	Penerimaan Pinjaman Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp703.955.881.246,00 atau 8,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Berkenaan dengan Pinjaman daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dapat menganggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. 4. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan semula Rp437.500.000.000,00 berkurang Rp41.711.934.071,00 menjadi Rp395.788.065.929,00, terdiri dari: a. Pembentukan Dana Cadangan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pembentukan Dana Cadangan Rp150.000.000.000,00 atau 1,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sepanjang Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan tersebut paling sedikit memuat:	Pembentukan Dana Cadangan Rp150.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

	1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 2) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 4) sumber dana cadangan; dan 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Penggunaan dana cadangan dimaksud harus diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.3.b.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.2)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b. Penyertaan Modal Daerah Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp100.000.000.000,00, dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir E.3.b.(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula Rp187.500.000.000,00 berkurang Rp41.711.934.071,00 menjadi Rp145.788.065.929,00 atau 1,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus dianggarkan dalam APBD setiap	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp100.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dengan Jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp644.912.000.000,00. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati dengan PT. SNI.

	tahun sampai dengan selesainya kewajibannya dimaksud, sebagaimana maksud butir E.3.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.																															
IV.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PERUBAHAN RKPD SERTA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS																															
	1. Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel. 20 sebagai berikut: Tabel. 20 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS <table><tr><th>No.</th><th>Keterangan</th><th>APB D 2023</th><th>P-RKP D 2023</th><th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th><th>P-KUA P-PPAS</th><th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th><th>P-APB D 2023</th><th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Jumlah Program</td><td>127 program</td><td>127 program</td><td rowspan="3">7.960.797.335.414</td><td>127 program</td><td rowspan="3">7.960.592.463.889</td><td>127 program</td><td rowspan="3">7.960.592.463.889</td></tr><tr><td>2.</td><td>Jumlah Kegiatan</td><td>234 kegiatan</td><td>234 kegiatan</td><td>234 kegiatan</td><td>234 kegiatan</td></tr><tr><td>3.</td><td>Jumlah Sub Kegiatan</td><td>570 sub kegiatan</td><td>569 sub kegiatan</td><td>569 sub kegiatan</td><td>569 sub kegiatan</td></tr></table> 2. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD	No.	Keterangan	APB D 2023	P-RKP D 2023	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P-KUA P-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P-APB D 2023	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	1.	Jumlah Program	127 program	127 program	7.960.797.335.414	127 program	7.960.592.463.889	127 program	7.960.592.463.889	2.	Jumlah Kegiatan	234 kegiatan	234 kegiatan	234 kegiatan	234 kegiatan	3.	Jumlah Sub Kegiatan	570 sub kegiatan	569 sub kegiatan	569 sub kegiatan	569 sub kegiatan	
No.	Keterangan	APB D 2023	P-RKP D 2023	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P-KUA P-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P-APB D 2023	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)																								
1.	Jumlah Program	127 program	127 program	7.960.797.335.414	127 program	7.960.592.463.889	127 program	7.960.592.463.889																								
2.	Jumlah Kegiatan	234 kegiatan	234 kegiatan		234 kegiatan		234 kegiatan																									
3.	Jumlah Sub Kegiatan	570 sub kegiatan	569 sub kegiatan		569 sub kegiatan		569 sub kegiatan																									

	Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati.

	berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar). Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat serta anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
V.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RPJMD	
	Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2023 Rp6.559.769.864.222,00	

	sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.960.592.463.889,00; dan 2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2023 sejumlah 132 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 127 program. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperhatikan: 1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan 2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2019-2023.	
VI.	REKOMENDASI	
	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut: A. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD, rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	

	Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemuatakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk: 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, 2. melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir G.57.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. C. Dalam rangka mengantisipasi dampak dari fenomena <i>El Nino</i> yang mengakibatkan pemanasan suhu sehingga terjadinya musim kemarau dan kondisi kering pada bulan pada Agustus hingga Oktober 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	D. Sasaran utama pengembangan Wilayah Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali sebesar 5,3% s.d 5,8%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 6,9% s.d 7,6%, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,0% s.d. 6,7% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (<i>rebound</i>) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022. Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. E. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. F. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun	

	2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. G. Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memperhatikan program, kegiatan, sub kegiatan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan dimaksud tersedia atau cukup tersedia dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. H. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. I. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas	

	Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja wajib dalam penanganan dampak inflasi, memenuhi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar). Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat serta anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat penurunan prognosis target pendapatan Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memprioritaskan penggunaan alokasi anggaran untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD, Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. J. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan: 1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai	

	Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan 4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah Provinsi Bali memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan. K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar- besarnya (<i>value for money</i>), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. L. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir F.1.f.31) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. M. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.	

	Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. N. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (<i>roadmap</i>) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan <i>monitoring</i> terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. O. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu: 1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik	

	berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>); 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. P. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Keadaan darurat meliputi: 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi: 1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat	

	yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Q. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk: 1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana maksud butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 3. Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (<i>under weight</i>) pada anak balita dan menurunnya	

	prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak balita sebagaimana maksud butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022. 4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui: - upaya percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; - dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era <i>Digital</i> yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti <i>trafficking</i>, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; - mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; - mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai	

	ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka <i>stunting</i>, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, <i>Thermometer</i>, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; g. Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan	

	sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. 6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar mengambil langkah- langkah sebagai berikut: a. mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam Panti; 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti; 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti; 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;	

	6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi; 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.	

	d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan 2) Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 7. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi	

	anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir G.48.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. R. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1) nama kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. S. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan	

	pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. T. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi: 1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan	

	5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran <i>Sport Development Index</i> (SDI) di daerah. U. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun A Peraturan Gubernur Bali tentang Tahun Anggaran 2023 yang tertuan menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. V. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. W. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Bali.	Ditetapkan di Denpasar Pada Tanggal 17 Oktober 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
KETUA,



I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si.

WAKIL KETUA

A handwritten signature in blue ink, belonging to Dr. I Nyoman Sugawa Korry.

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.

WAKIL KETUA

A handwritten signature in blue ink, belonging to I Nyoman Suyasa.

I NYOMAN SUYASA, ST

WAKIL KETUA

A handwritten signature in blue ink, belonging to Tjok Gde Asmara Putra Sukawati.

TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP.



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, serta keadaan darurat dan mendesak, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp7.959.893.048.914,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp368.781.380.153,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp8.328.674.429.067,00 (delapan triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah
 - a. semula Rp6.933.947.319.883,00
 - b. bertambah Rp315.005.856.064,00jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan Rp7.248.953.175.947,00
 2. belanja daerah
 - a. semula Rp7.522.393.048.914,00
 - b. bertambah Rp410.493.314.224,00jumlah belanja daerah
setelah perubahan Rp7.932.886.363.138,00
 3. pembiayaan daerah
 - a. penerimaan pembiayaan
 - 1) semula Rp1.025.945.729.031,00
 - 2) bertambah Rp53.775.524.089,00jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp1.079.721.253.120,00
 - b. pengeluaran pembiayaan
 - 1) semula Rp437.500.000.000,00
 - 2) berkurang Rp41.711.934.071,00jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp395.788.065.929,00
 - c. jumlah pembiayaan netto
 - 1) semula Rp588.445.729.031,00
 - 2) bertambah Rp95.487.458.160,00setelah perubahan Rp683.933.187.191,00
- siswa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah
 - 1) semula Rp4.731.419.182.089,00
 - 2) bertambah Rp310.027.138.064,00
 - jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp5.041.446.320.153,00
- b. pendapatan transfer
 - 1) semula Rp2.146.820.137.794,00
 - 2) bertambah Rp5.491.918.000,00
 - jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.152.312.055.794,00
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) semula Rp55.708.000.000,00
 - 2) berkurang Rp513.200.000,00
 - jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp55.194.800.000,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. pajak daerah
 - 1) semula Rp2.960.437.850.589,00
 - 2) bertambah Rp278.530.387.040,00
 - jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp3.238.968.237.629,00
- b. retribusi daerah
 - 1) semula Rp59.595.436.500,00
 - 2) berkurang Rp6.178.755.000,00
 - jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp53.416.681.500,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) semula Rp810.711.860.000,00
 - 2) berkurang Rp2.591.840.678,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp808.120.019.322,00
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) semula Rp900.674.035.000,00
 - 2) bertambah Rp40.267.346.702,00
 - jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp940.941.381.702,00

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah	
1) semula	Rp55.708.000.000,00
2) berkurang	<u>Rp513.200.000,00</u>
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp55.194.800.000,00
b. dana darurat	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp0,00

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi	
1) semula	Rp4.343.716.844.932,00
2) bertambah	<u>Rp131.052.432.238,00</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp4.474.769.277.170,00
b. belanja modal	
1) semula	Rp1.419.978.951.582,00
2) berkurang	<u>Rp10.158.078.841,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.409.820.872.741,00
c. belanja tidak terduga	
1) semula	Rp50.000.000.000,00
2) berkurang	<u>Rp34.171.543.017,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp15.828.456.983,00
d. belanja transfer	
1) semula	Rp1.708.697.252.400,00
2) bertambah	<u>Rp323.770.503.844,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp2.032.467.756.244,00

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai
 - 1) semula Rp2.072.564.871.779,00
 - 2) berkurang Rp69.971.107.159,00
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp2.002.593.764.620,00
- b. belanja barang dan jasa
 - 1) semula Rp1.348.709.586.876,00
 - 2) bertambah Rp44.594.511.954,00
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp1.393.304.098.830,00
- c. belanja bunga
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0,00
- d. belanja subsidi
 - 1) semula Rp10.025.000.000,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp10.025.000.000,00
- e. belanja hibah
 - 1) semula Rp881.696.186.277,00
 - 2) bertambah Rp187.150.227.443,00
 - jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp1.068.846.413.720,00
- f. belanja bantuan sosial
 - 1) semula Rp30.721.200.000,00
 - 2) berkurang Rp30.721.200.000,00
 - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp0,00

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
 - 1) semula Rp182.964.805.976,00
 - 2) berkurang Rp5.385.132.607,00
 - jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp177.579.673.369,00

- b. belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) semula Rp207.854.510.993,00
 - 2) bertambah Rp85.248.233,00
 - jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp207.939.759.226,00
- c. belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) semula Rp705.969.048.170,00
 - 2) berkurang Rp12.011.848.086,00
 - jumlah modal belanja gedung dan bangunan setelah perubahan Rp693.957.200.084,00
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1) semula Rp269.502.569.533,00
 - 2) bertambah Rp4.172.392.789,00
 - jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp273.674.962.322,00
- e. belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) semula Rp53.688.016.910,00
 - 2) bertambah Rp2.081.260.830,00
 - jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp55.769.277.740,00
- f. belanja modal aset lainnya
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp900.000.000,00
 - jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp900.000.000,00

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. semula Rp50.000.000.000,00
- b. berkurang Rp34.171.543.017,00
- jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp15.828.456.983,00

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil
 - 1) semula Rp1.186.722.448.892,00
 - 2) bertambah Rp323.370.503.844,00
 - jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.510.092.952.736,00

- b. belanja bantuan keuangan
 - 1) semula Rp521.974.803.508,00
 - 2) bertambah Rp400.000.000,00
 - jumlah belanja bantuan keuangan
 - setelah perubahan Rp522.374.803.508,00

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
 - 1) semula Rp1.025.945.729.031,00
 - 2) bertambah Rp53.775.524.089,00
 - jumlah penerimaan pembiayaan
 - setelah perubahan Rp1.079.721.253.120,00
- b. pengeluaran pembiayaan
 - 1) semula Rp437.500.000.000,00
 - 2) berkurang Rp41.711.934.071,00
 - jumlah pengeluaran pembiayaan
 - setelah perubahan Rp395.788.065.929,00

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) semula Rp1.025.945.729.031,00
 - 2) berkurang Rp695.812.005.606,00
 - jumlah sisa lebih perhitungan
 - anggaran tahun sebelumnya
 - setelah perubahan Rp330.133.723.425,00
- b. pencairan dana cadangan
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp78.829.667.200,00
 - jumlah pencairan dana cadangan
 - setelah perubahan Rp78.829.667.200,00
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah hasil penjualan kekayaan
 - daerah yang dipisahkan
 - setelah perubahan Rp0,00

- d. penerimaan pinjaman daerah
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp670.757.862.495,00
 - jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp670.757.862.495,00
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) semula Rp187.500.000.000,00
 - 2) berkurang Rp41.711.934.071,00
 - jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp145.788.065.929,00
- b. penyertaan modal daerah
 - 1) semula Rp100.000.000.000,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp100.000.000.000,00
- c. pembentukan dana cadangan
 - 1) semula Rp150.000.000.000,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp150.000.000.000,00
- d. pemberian dana pinjaman
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 - jumlah pemberian dana pinjaman setelah perubahan Rp0,00

- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1) semula Rp0,00
 - 2) bertambah Rp0,00
 jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Defisit
 - a. semula Rp588.445.729.031,00
 - b. bertambah Rp95.487.458.160,00
 defisit setelah perubahan Rp683.933.187.191,00
- (2) Pembiayaan Netto
 - a. semula Rp588.445.729.031,00
 - b. bertambah Rp95.487.458.160,00
 pembiayaan netto setelah perubahan Rp683.933.187.191,00

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

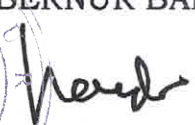
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2023;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2023;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Bali
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (13-206/2023)



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
BALI NONOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023**

LAMPIRAN I

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.731.419.182.089	5.041.446.320.153	310.027.138.064	7 %
4.1.01	Pajak Daerah	2.960.437.850.589	3.238.968.237.629	278.530.387.040	9 %
4.1.02	Retribusi Daerah	59.595.436.500	53.416.681.500	(6.178.755.000)	10 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	810.711.860.000	808.120.019.322	(2.591.840.678)	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	900.674.035.000	940.941.381.702	40.267.346.702	4 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.146.820.137.794	2.152.312.055.794	5.491.918.000	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.146.820.137.794	2.152.312.055.794	5.491.918.000	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	55.708.000.000	55.194.800.000	(513.200.000)	1 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	55.708.000.000	55.194.800.000	(513.200.000)	1 %
	Jumlah Pendapatan	6.933.947.319.883	7.248.953.175.947	315.005.856.064	5 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	4.343.716.844.932	4.474.769.277.170	131.052.432.238	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	2.072.564.871.779	2.002.593.764.620	(69.971.107.159)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.348.709.586.876	1.393.304.098.830	44.594.511.954	3 %
5.1.04	Belanja Subsidi	10.025.000.000	10.025.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	881.696.186.277	1.068.846.413.720	187.150.227.443	21 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.721.200.000	0	(30.721.200.000)	100 %
5.2	BELANJA MODAL	1.419.978.951.582	1.409.820.872.741	(10.158.078.841)	1 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	182.964.805.976	177.579.673.369	(5.385.132.607)	3 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.854.510.993	207.939.759.226	85.248.233	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	705.969.048.170	693.957.200.084	(12.011.848.086)	2 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	269.502.569.533	273.674.962.322	4.172.392.789	2 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.688.016.910	55.769.277.740	2.081.260.830	4 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	900.000.000	900.000.000	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000	15.828.456.983	(34.171.543.017)	68 %

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	15.828.456.983	(34.171.543.017)	68 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.708.697.252.400	2.032.467.756.244	323.770.503.844	19 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.186.722.448.892	1.510.092.952.736	323.370.503.844	27 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	521.974.803.508	522.374.803.508	400.000.000	0 %
	Jumlah Belanja	7.522.393.048.914	7.932.886.363.138	410.493.314.224	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(588.445.729.031)	(683.933.187.191)	(95.487.458.160)	-16 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.025.945.729.031	1.079.721.253.120	53.775.524.089	5 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.025.945.729.031	330.133.723.425	(695.812.005.606)	68 %
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	78.829.667.200	78.829.667.200	100 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	670.757.862.495	670.757.862.495	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.025.945.729.031	1.079.721.253.120	53.775.524.089	5 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	437.500.000.000	395.788.065.929	(41.711.934.071)	10 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000	150.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	187.500.000.000	145.788.065.929	(41.711.934.071)	22 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	437.500.000.000	395.788.065.929	(41.711.934.071)	10 %
	Pembiayaan Netto	588.445.729.031	683.933.187.191	95.487.458.160	16 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN II

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023**

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	264.124.910.000	2.455.921.918.860	965.996.606.919	0	0	3.421.918.525.779	302.624.158.500	2.487.326.397.396	969.994.800.953	0	0	3.457.321.198.349
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.363.500.000	1.455.871.352.360	373.430.817.880	0	0	1.829.302.170.240	1.464.000.000	1.418.068.154.778	376.841.358.155	0	0	1.794.909.512.933
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.363.500.000	1.451.720.092.276	373.310.444.880	0	0	1.825.030.537.156	1.464.000.000	1.413.913.942.910	376.720.985.155	0	0	1.790.634.928.065
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	0	3.238.545.812	120.373.000	0	0	3.358.918.812	0	3.240.245.324	120.373.000	0	0	3.360.618.324
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	0	912.714.272	0	0	0	912.714.272	0	913.966.544	0	0	0	913.966.544
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	233.023.519.000	569.089.971.911	82.147.061.703	0	0	651.237.033.614	266.329.867.500	580.062.665.036	80.955.817.607	0	0	661.018.482.643
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	233.023.519.000	291.076.033.222	2.179.917.000	0	0	293.255.950.222	266.329.867.500	277.477.771.829	1.505.526.000	0	0	278.983.297.829
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	0	2.629.636.392	429.266.200	0	0	3.058.902.592	0	5.570.909.136	539.266.200	0	0	6.110.175.336
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	0	9.399.147.134	1.177.369.470	0	0	10.576.516.604	0	10.583.258.018	1.208.537.270	0	0	11.791.795.288
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	0	2.364.197.352	149.250.400	0	0	2.513.447.752	0	2.326.400.944	155.540.400	0	0	2.481.941.344
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Bali Mandara	0	161.230.497.441	69.211.144.233	0	0	230.441.641.674	0	167.210.667.584	67.715.208.087	0	0	234.925.875.671
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Rumah Sakit Jiwa	0	36.249.362.598	2.906.054.500	0	0	39.155.417.098	0	36.556.697.334	2.906.054.500	0	0	39.462.751.834

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000	0	70.914.623.000	6.444.668.250	0	0	77.359.291.250
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	0	16.523.097.772	1.712.059.900	0	0	18.235.157.672	0	9.422.337.191	481.016.900	0	0	9.903.354.091
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.730.691.000	331.524.140.434	504.144.470.803	0	0	835.668.611.237	34.820.691.000	392.494.791.605	505.894.895.856	0	0	898.389.687.461
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	0	1.472.592.968	3.373.736.100	0	0	4.846.329.068	0	1.356.504.201	1.118.563.633	0	0	2.475.067.834
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Air Minum	0	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336	0	27.653.292.962	4.161.643.710	0	0	31.814.936.672
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pengelolaan Air Limbah	0	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800	0	11.504.884.800	0	0	0	11.504.884.800
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.730.691.000	295.270.913.040	497.185.590.993	0	0	792.456.504.033	34.820.691.000	351.980.109.642	500.614.688.513	0	0	852.594.798.155
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	2.160.753.864	0	0	0	2.160.753.864	0	1.869.131.020	0	0	0	1.869.131.020
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	2.160.753.864	0	0	0	2.160.753.864	0	1.869.131.020	0	0	0	1.869.131.020

PROVINSI BALI RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023															
Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	67.476.582.795	2.317.526.500	0	0	69.794.109.295	0	66.425.848.582	2.385.140.500	0	0	68.810.989.082
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0	44.504.749.249	334.526.500	0	0	44.839.275.749	0	44.325.921.629	334.526.500	0	0	44.660.448.129
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	16.744.059.698	508.000.000	0	0	17.252.059.698	0	15.876.497.457	569.614.000	0	0	16.446.111.457
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	0	6.227.773.848	1.475.000.000	0	0	7.702.773.848	0	6.223.429.496	1.481.000.000	0	0	7.704.429.496
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.200.000	29.799.117.496	3.956.730.033	0	0	33.755.847.529	9.600.000	28.405.806.375	3.917.588.835	0	0	32.323.395.210
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.200.000	26.057.126.712	103.779.198	0	0	26.160.905.910	9.600.000	24.726.688.571	79.500.000	0	0	24.806.188.571
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	UPTD Pelayanan Sosial	0	3.741.990.784	3.852.950.835	0	0	7.594.941.619	0	3.679.117.804	3.838.088.835	0	0	7.517.206.639
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.740.592.000	861.794.519.853	401.023.987.436	0	0	1.262.818.507.289	6.712.292.000	885.798.642.459	403.473.432.805	0	0	1.289.272.075.264
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.443.600.000	34.007.845.396	364.217.100	0	0	34.372.062.496	4.503.600.000	32.342.631.470	214.142.000	0	0	32.556.773.470
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	0	1.654.408.128	207.057.600	0	0	1.861.465.728	0	1.635.837.056	155.988.600	0	0	1.791.825.656
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	UPTD Balai Hyperkes dan	0	459.403.446	0	0	0	459.403.446	0	445.595.090	0	0	0	445.595.090

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			Keselamatan Kerja												
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.443.600.000	31.894.033.822	157.159.500	0	0	32.051.193.322	4.503.600.000	30.261.199.324	58.153.400	0	0	30.319.352.724
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	2.306.400.192	0	0	0	2.306.400.192	0	2.306.074.984	0	0	0	2.306.074.984
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0	1.412.990.200	0	0	0	1.412.990.200	0	1.412.567.200	0	0	0	1.412.567.200
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0	893.409.992	0	0	0	893.409.992	0	893.507.784	0	0	0	893.507.784
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	2.965.255.704	0	0	0	2.965.255.704	0	2.813.995.008	0	0	0	2.813.995.008
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	1.407.811.044	0	0	0	1.407.811.044	0	1.376.757.788	0	0	0	1.376.757.788
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0	1.557.444.660	0	0	0	1.557.444.660	0	1.437.237.220	0	0	0	1.437.237.220
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	311.272.200	0	0	0	311.272.200	0	200.595.300	0	0	0	200.595.300
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	311.272.200	0	0	0	311.272.200	0	200.595.300	0	0	0	200.595.300

PROVINSI BALI RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0	4.075.715.191	106.486.280	0	0	4.182.201.471	0	11.554.234.215	122.486.280	0	0	11.676.720.495
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	729.284.388	0	0	0	729.284.388	0	703.045.076	0	0	0	703.045.076
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0	577.382.919	85.904.080	0	0	663.286.999	0	577.830.159	85.904.080	0	0	663.734.239
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	UPTD Pengelolaan Sampah	0	2.769.047.884	20.582.200	0	0	2.789.630.084	0	10.273.358.980	36.582.200	0	0	10.309.941.180
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	326.868.988	0	0	0	326.868.988	0	368.128.476	0	0	0	368.128.476
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	326.868.988	0	0	0	326.868.988	0	368.128.476	0	0	0	368.128.476
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	33.227.751.192	102.215.962	0	0	33.329.967.154	0	32.146.793.181	88.688.962	0	0	32.235.482.143
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	33.227.751.192	102.215.962	0	0	33.329.967.154	0	32.146.793.181	88.688.962	0	0	32.235.482.143

PROVINSI BALI RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023															
Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	603.494.588	0	0	0	603.494.588	0	537.575.276	0	0	0	537.575.276
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	603.494.588	0	0	0	603.494.588	0	537.575.276	0	0	0	537.575.276
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	219.600.000	36.514.095.713	11.984.459.513	0	0	48.498.555.226	219.600.000	36.218.656.679	12.091.195.950	0	0	48.309.852.629
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	219.600.000	25.357.931.837	806.808.400	0	0	26.164.740.237	219.600.000	24.865.232.917	1.688.503.400	0	0	26.553.736.317
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	0	1.359.475.380	231.830.500	0	0	1.591.305.880	0	1.346.819.860	0	0	0	1.346.819.860
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	0	8.757.467.884	9.456.092.000	0	0	18.213.559.884	0	8.492.682.460	9.411.682.000	0	0	17.904.364.460
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Perlengkapan Jalan	0	568.609.032	1.389.614.613	0	0	1.958.223.645	0	1.048.203.982	908.721.550	0	0	1.956.925.532
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	0	470.611.580	100.114.000	0	0	570.725.580	0	465.717.460	82.289.000	0	0	548.006.460
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	71.296.927.626	383.182.860.881	0	0	454.479.788.507	0	82.552.754.845	385.719.770.913	0	0	468.272.525.758
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	71.296.927.626	383.182.860.881	0	0	454.479.788.507	0	82.552.754.845	385.719.770.913	0	0	468.272.525.758

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	32.441.566.574	56.950.800	0	0	32.498.517.374	0	21.486.705.124	56.940.000	0	0	21.543.645.124
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	28.061.679.128	56.950.800	0	0	28.118.629.928	0	17.109.792.546	56.940.000	0	0	17.166.732.546
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0	4.379.887.446	0	0	0	4.379.887.446	0	4.376.912.578	0	0	0	4.376.912.578
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.600.000	19.044.957.160	606.570.000	0	0	19.651.527.160	3.600.000	17.861.399.438	589.570.000	0	0	18.450.969.438
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.600.000	19.044.957.160	606.570.000	0	0	19.651.527.160	3.600.000	17.861.399.438	589.570.000	0	0	18.450.969.438
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	25.023.489.203	117.587.200	0	0	25.141.076.403	0	25.072.543.803	222.332.600	0	0	25.294.876.403
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	25.023.489.203	117.587.200	0	0	25.141.076.403	0	25.072.543.803	222.332.600	0	0	25.294.876.403
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440	0	540.404.680	233.471.000	0	0	773.875.680
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440	0	540.404.680	233.471.000	0	0	773.875.680

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696	0	870.981.992	283.961.000	0	0	1.154.942.992
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696	0	870.981.992	283.961.000	0	0	1.154.942.992
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.073.792.000	597.118.342.874	3.817.499.700	0	0	600.935.842.574	1.985.492.000	617.889.112.360	3.775.874.100	0	0	621.664.986.460
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	2.073.792.000	98.406.175.739	785.545.900	0	0	99.191.721.639	1.985.492.000	116.897.088.101	785.545.900	0	0	117.682.634.001
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	UPTD Taman Budaya	0	6.098.913.184	514.248.000	0	0	6.613.161.184	0	6.480.220.168	1.102.068.000	0	0	7.582.288.168
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	UPTD Museum Bali	0	4.174.393.076	506.756.600	0	0	4.681.149.676	0	4.180.573.852	415.000.000	0	0	4.595.573.852
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	0	5.123.288.172	438.245.000	0	0	5.561.533.172	0	5.012.016.104	358.245.000	0	0	5.370.261.104
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0	483.315.572.703	1.572.704.200	0	0	484.888.276.903	0	485.319.214.135	1.115.015.200	0	0	486.434.229.335
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284	0	512.451.764	75.000.000	0	0	587.451.764
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284	0	512.451.764	75.000.000	0	0	587.451.764
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	570.198.832	0	0	0	570.198.832	0	523.603.864	0	0	0	523.603.864
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0	570.198.832	0	0	0	570.198.832	0	523.603.864	0	0	0	523.603.864
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	52.857.804.500	199.310.159.383	9.724.723.400	0	0	209.034.882.783	46.523.220.500	203.760.161.468	7.977.682.525	0	0	211.737.843.993
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	50.613.600.000	25.191.615.361	2.873.500.000	0	0	28.065.115.361	44.458.600.000	25.308.412.255	2.360.000.000	0	0	27.668.412.255

PROVINSI BALI RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			KELAUTAN DAN PERIKANAN												
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.613.600.000	22.213.009.021	0	0	0	22.213.009.021	44.458.600.000	22.066.648.465	0	0	0	22.066.648.465
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Produksi Perikanan Budidaya	0	837.661.742	0	0	0	837.661.742	0	852.656.456	0	0	0	852.656.456
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0	765.044.398	2.800.000.000	0	0	3.565.044.398	0	788.670.534	2.288.000.000	0	0	3.076.670.534
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	0	1.111.958.304	73.500.000	0	0	1.185.458.304	0	1.336.316.008	72.000.000	0	0	1.408.316.008
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pelabuhan Perikanan	0	263.941.896	0	0	0	263.941.896	0	264.120.792	0	0	0	264.120.792
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	15.151.817.368	0	0	0	15.151.817.368	0	14.165.518.756	22.950.000	0	0	14.188.468.756
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	0	15.151.817.368	0	0	0	15.151.817.368	0	14.165.518.756	22.950.000	0	0	14.188.468.756
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	896.404.500	88.363.458.962	4.287.194.700	0	0	92.650.653.662	815.150.500	87.690.149.003	4.292.791.200	0	0	91.982.940.203
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	896.404.500	75.924.319.052	60.000.000	0	0	75.984.319.052	815.150.500	75.292.330.713	60.000.000	0	0	75.352.330.713
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0	632.106.832	0	0	0	632.106.832	0	629.471.864	0	0	0	629.471.864
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	5.149.654.698	1.716.298.700	0	0	6.865.953.398	0	5.128.008.266	1.716.298.700	0	0	6.844.306.966
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	UPTD Balai Perlindungan	0	3.253.968.116	2.460.896.000	0	0	5.714.864.116	0	3.233.081.632	2.466.492.500	0	0	5.699.574.132

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan												
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0	3.403.410.264	50.000.000	0	0	3.453.410.264	0	3.407.256.528	50.000.000	0	0	3.457.256.528
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.321.800.000	40.913.976.684	982.373.700	0	0	41.896.350.384	1.223.470.000	49.129.280.275	72.037.700	0	0	49.201.317.975
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.321.800.000	38.456.887.198	645.997.700	0	0	39.102.884.898	1.223.470.000	46.758.922.453	72.037.700	0	0	46.830.960.153
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	0	869.872.416	300.000.000	0	0	1.169.872.416	0	865.313.032	0	0	0	865.313.032
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	0	603.446.232	36.376.000	0	0	639.822.232	0	604.251.264	0	0	0	604.251.264
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	0	420.278.250	0	0	0	420.278.250	0	414.556.042	0	0	0	414.556.042
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	0	379.276.440	0	0	0	379.276.440	0	301.931.888	0	0	0	301.931.888
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	0	184.216.148	0	0	0	184.216.148	0	184.305.596	0	0	0	184.305.596
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	536.141.800	500.000.000	0	0	1.036.141.800	0	58.137.800	0	0	0	58.137.800
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi	0	536.141.800	500.000.000	0	0	1.036.141.800	0	58.137.800	0	0	0	58.137.800

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			Sumber Daya Mineral												
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	20.566.519.840	1.030.111.000	0	0	21.596.630.840	0	18.525.300.243	1.183.489.625	0	0	19.708.789.868
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	20.141.704.200	1.011.361.000	0	0	21.153.065.200	0	18.137.425.363	1.164.739.625	0	0	19.302.164.988
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0	424.815.640	18.750.000	0	0	443.565.640	0	387.874.880	18.750.000	0	0	406.624.880
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	26.000.000	8.526.470.368	51.544.000	0	0	8.578.014.368	26.000.000	8.850.996.136	46.414.000	0	0	8.897.410.136
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.000.000	7.690.538.972	0	0	0	7.690.538.972	26.000.000	8.091.790.844	0	0	0	8.091.790.844
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	UPTD Rumah Kreatif	0	835.931.396	51.544.000	0	0	887.475.396	0	759.205.292	46.414.000	0	0	805.619.292
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	60.159.000	0	0	0	60.159.000	0	32.367.000	0	0	0	32.367.000
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0	60.159.000	0	0	0	60.159.000	0	32.367.000	0	0	0	32.367.000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	810.711.860.000	456.335.321.824	17.948.743.775	0	0	474.284.065.599	808.120.019.322	458.260.801.155	7.075.022.849	0	0	465.335.824.004
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	810.711.860.000	211.888.861.489	17.192.152.775	0	0	229.081.014.264	808.120.019.322	246.344.979.248	5.909.954.199	0	0	252.254.933.447
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Pemerintahan dan	0	49.549.695.496	332.207.274	0	0	49.881.902.770	0	79.102.139.392	332.207.274	0	0	79.434.346.666

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			Kesejahteraan Rakyat												
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0	83.575.349.292	6.060.334.701	0	0	89.635.683.993	0	95.844.482.961	2.684.440.125	0	0	98.528.923.086
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Hukum	0	5.548.524.800	0	0	0	5.548.524.800	0	5.870.907.752	0	0	0	5.870.907.752
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	810.711.860.000	65.638.663.529	0	0	0	65.638.663.529	808.120.019.322	58.815.415.699	0	0	0	58.815.415.699
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0	2.049.710.240	215.179.800	0	0	2.264.890.040	0	1.967.956.080	238.101.800	0	0	2.206.057.880
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	0	5.526.918.132	10.584.431.000	0	0	16.111.349.132	0	4.744.077.364	2.655.205.000	0	0	7.399.282.364
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0	244.446.460.335	756.591.000	0	0	245.203.051.335	0	211.915.821.907	1.165.068.650	0	0	213.080.890.557
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	244.446.460.335	756.591.000	0	0	245.203.051.335	0	211.915.821.907	1.165.068.650	0	0	213.080.890.557
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.799.512.153.383	299.194.950.089	16.453.350.251	50.000.000.000	1.708.697.252.400	2.074.345.552.740	6.084.973.485.625	291.746.386.744	12.329.559.808	15.828.456.983	2.032.467.756.244	2.352.372.159.779
5	01		PERENCANAAN	0	24.962.048.121	3.116.326.498	0	0	28.078.374.619	0	22.958.420.464	1.691.700.000	0	0	24.650.120.464
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	24.962.048.121	3.116.326.498	0	0	28.078.374.619	0	22.958.420.464	1.691.700.000	0	0	24.650.120.464
5	02		KEUANGAN	5.792.458.321.383	191.990.526.199	11.183.364.753	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.961.871.143.352	6.073.327.661.625	191.248.413.117	7.912.317.409	15.828.456.983	2.032.467.756.244	2.247.456.943.753
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.781.465.137.794	31.171.600.498	1.358.507.200	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.791.227.360.098	2.783.784.585.996	28.995.857.036	862.650.200	15.828.456.983	2.032.467.756.244	2.078.154.720.463
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	3.023.766.536	473.724.000	0	0	3.497.490.536	0	2.757.392.272	40.724.000	0	0	2.798.116.272
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	3.010.993.183.589	127.734.540.345	9.351.133.553	0	0	137.085.673.898	3.289.543.075.629	128.454.032.577	7.008.943.209	0	0	135.462.975.786
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	0	5.694.574.084	0	0	0	5.694.574.084	0	5.750.315.068	0	0	0	5.750.315.068

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

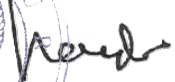
Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	0	2.009.669.838	0	0	0	2.009.669.838	0	2.362.056.630	0	0	0	2.362.056.630
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	0	2.425.012.884	0	0	0	2.425.012.884	0	2.602.964.668	0	0	0	2.602.964.668
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	0	4.805.094.052	0	0	0	4.805.094.052	0	4.852.995.204	0	0	0	4.852.995.204
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	0	5.112.248.248	0	0	0	5.112.248.248	0	5.318.388.764	0	0	0	5.318.388.764
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	0	3.417.593.788	0	0	0	3.417.593.788	0	3.463.858.876	0	0	0	3.463.858.876
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	0	2.149.864.354	0	0	0	2.149.864.354	0	2.173.265.778	0	0	0	2.173.265.778
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	0	2.560.290.476	0	0	0	2.560.290.476	0	2.563.600.052	0	0	0	2.563.600.052
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	UPTD Pelayanan Pajak dan	0	1.886.271.096	0	0	0	1.886.271.096	0	1.953.686.192	0	0	0	1.953.686.192

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem												
5	03		KEPEGAWAIAN	6.959.832.000	48.024.222.099	934.658.900	0	0	48.958.880.999	11.595.824.000	48.049.609.439	1.250.267.500	0	0	49.299.876.939
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.959.832.000	40.827.553.115	223.605.000	0	0	41.051.158.115	11.595.824.000	36.529.037.871	208.605.000	0	0	36.737.642.871
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0	686.836.984	261.053.900	0	0	947.890.884	0	1.517.747.568	241.662.500	0	0	1.759.410.068
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000	0	10.002.824.000	800.000.000	0	0	10.802.824.000
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	877.977.592	0	0	0	877.977.592	0	536.780.384	0	0	0	536.780.384
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	877.977.592	0	0	0	877.977.592	0	536.780.384	0	0	0	536.780.384
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0002	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	25.060.520.589	799.180.000	0	0	25.859.700.589	0	20.578.105.274	722.860.900	0	0	21.300.966.174
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	25.060.520.589	799.180.000	0	0	25.859.700.589	0	20.578.105.274	722.860.900	0	0	21.300.966.174
5	07		PENGLOLAAN PENGHUBUNG	94.000.000	8.279.655.489	419.820.100	0	0	8.699.475.589	50.000.000	8.375.058.066	752.413.999	0	0	9.127.472.065
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	94.000.000	8.279.655.489	419.820.100	0	0	8.699.475.589	50.000.000	8.375.058.066	752.413.999	0	0	9.127.472.065
6			UNSUR PENGAWASAN	0	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356	0	34.765.627.692	8.506.188.301	0	0	43.271.815.993

PROVINSI BALI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
			URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356	0	34.765.627.692	8.506.188.301	0	0	43.271.815.993
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356	0	34.765.627.692	8.506.188.301	0	0	43.271.815.993
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368	0	113.111.260.256	464.185.500	0	0	113.575.445.756
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368	0	113.111.260.256	464.185.500	0	0	113.575.445.756
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368	0	113.111.260.256	464.185.500	0	0	113.575.445.756
TOTAL				6.933.947.319.883	4.343.716.844.932	1.419.978.951.582	50.000.000.000	1.708.697.252.400	7.522.393.048.914	7.248.953.175.947	4.474.769.277.170	1.409.820.872.741	15.828.456.983	2.032.467.756.244	7.932.886.363.138

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN III

**RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.363.500.000	1.464.000.000	100.500.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.106.400.000	1.106.400.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	257.100.000	357.600.000	100.500.000	
Jumlah Pendapatan											1.363.500.000	1.464.000.000	100.500.000	
0	00	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.829.302.170.240	1.794.909.512.933	(34.392.657.307)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	747.862.862.298	737.141.160.257	(10.721.702.041)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	390.336.230.286	387.110.225.022	(3.226.005.264)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	116.516.686.900	105.485.926.900	(11.030.760.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	60.226.900	60.336.900	110.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	60.226.900	60.336.900	110.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2			BELANJA MODAL	116.456.460.000	105.425.590.000	(11.030.870.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.456.460.000	105.425.590.000	(11.030.870.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	11.921.124.900	11.400.662.900	(520.462.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	15.729.900	15.729.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.729.900	15.729.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2			BELANJA MODAL	11.905.395.000	11.384.933.000	(520.462.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.905.395.000	11.384.933.000	(520.462.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	668.000.000	668.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2			BELANJA MODAL	668.000.000	668.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	668.000.000	668.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	558.578.000	558.578.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2			BELANJA MODAL	558.578.000	558.578.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	558.578.000	558.578.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	1.117.156.000	1.117.156.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	558.578.000	558.578.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	558.578.000	558.578.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	558.578.000	558.578.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	558.578.000	558.578.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07				Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	334.906.000	334.906.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	2		BELANJA MODAL	334.906.000	334.906.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	334.906.000	334.906.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	14				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.632.733.000	3.558.862.229	926.129.229	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	2		BELANJA MODAL	2.632.733.000	3.558.862.229	926.129.229	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.632.733.000	3.558.862.229	926.129.229	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.851.357.000	11.838.410.841	4.987.053.841	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	1		BELANJA OPERASI	763.164.000	763.164.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	763.164.000	763.164.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	2		BELANJA MODAL	6.088.193.000	11.075.246.841	4.987.053.841	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.088.193.000	11.075.246.841	4.987.053.841	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	365.255.000	1.919.960.930	1.554.705.930	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20	5	2		BELANJA MODAL	365.255.000	1.919.960.930	1.554.705.930	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	365.255.000	1.919.960.930	1.554.705.930	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	614.200.000	614.200.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	2		BELANJA MODAL	614.200.000	614.200.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	614.200.000	614.200.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	614.200.000	614.200.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23	5	2		BELANJA MODAL	614.200.000	614.200.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	614.200.000	614.200.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	25				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	381.582.000	381.582.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	25	5	2		BELANJA MODAL	381.582.000	381.582.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	25	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	381.582.000	381.582.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	28				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	497.892.000	497.892.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	28	5	2		BELANJA MODAL	497.892.000	497.892.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	28	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497.892.000	497.892.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.528.580.000	3.333.023.000	1.804.443.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31	5	2		BELANJA MODAL	1.528.580.000	3.333.023.000	1.804.443.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.528.580.000	3.333.023.000	1.804.443.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36				Pengadaan Mebel Sekolah	1.942.000.000	4.253.000.000	2.311.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36	5	1		BELANJA OPERASI	32.000.000	32.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	32.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36	5	2		BELANJA MODAL	1.910.000.000	4.221.000.000	2.311.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.910.000.000	4.221.000.000	2.311.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.121.899.750	2.121.899.750	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	1		BELANJA OPERASI	1.918.007.550	1.918.007.550	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.918.007.550	1.918.007.550	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	2		BELANJA MODAL	203.892.200	203.892.200	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.892.200	203.892.200	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	42				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	6.104.998.800	6.104.998.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	42	5	1		BELANJA OPERASI	6.104.998.800	6.104.998.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	42	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.104.998.800	6.104.998.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	45				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.339.250.000	0	(8.339.250.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	45	5	1		BELANJA OPERASI	8.339.250.000	0	(8.339.250.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	45	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	8.339.250.000	0	(8.339.250.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	554.737.200	554.737.200	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47	5	1		BELANJA OPERASI	554.737.200	554.737.200	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	554.737.200	554.737.200	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	48				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	114.824.800	114.824.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	48	5	1		BELANJA OPERASI	114.824.800	114.824.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	48	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	114.824.800	114.824.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.077.887.600	1.077.887.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49	5	1		BELANJA OPERASI	1.077.887.600	1.077.887.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.077.887.600	1.077.887.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.236.970.036	53.333.752.772	96.782.736	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50	5	1		BELANJA OPERASI	53.236.970.036	53.333.752.772	96.782.736	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.236.970.036	53.333.752.772	96.782.736	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	292.540.000	292.540.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51	5	1		BELANJA OPERASI	292.540.000	292.540.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	292.540.000	292.540.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	410.816.500	378.706.500	(32.110.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52	5	1		BELANJA OPERASI	410.816.500	378.706.500	(32.110.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	410.816.500	378.706.500	(32.110.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	170.437.760.000	175.454.222.000	5.016.462.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	1		BELANJA OPERASI	97.404.715.000	99.912.946.000	2.508.231.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.033.045.000	75.541.276.000	2.508.231.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	1	05	Belanja Hibah	24.371.670.000	24.371.670.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	2		BELANJA MODAL	73.033.045.000	75.541.276.000	2.508.231.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.819.827.000	45.324.765.600	1.504.938.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.213.218.000	30.216.510.400	1.003.292.400	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	42.994.700	42.994.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54	5	1		BELANJA OPERASI	42.994.700	42.994.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.994.700	42.994.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	57				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	129.726.800	129.726.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	57	5	1		BELANJA OPERASI	129.726.800	129.726.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	57	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.726.800	129.726.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	58				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	281.928.100	281.928.100	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	58	5	1		BELANJA OPERASI	281.928.100	281.928.100	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	58	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	281.928.100	281.928.100	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	59				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	281.828.700	281.828.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	59	5	1		BELANJA OPERASI	281.828.700	281.828.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	59	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	281.828.700	281.828.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	61				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.883.900	39.883.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	61	5	1		BELANJA OPERASI	39.883.900	39.883.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	61	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.883.900	39.883.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	62				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	323.932.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	62	5	1		BELANJA OPERASI	323.932.600	323.932.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	62	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	323.932.600	323.932.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	00				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	322.913.766.656	315.807.251.708	(7.106.514.948)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01				Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	54.752.103.700	54.752.103.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	54.752.103.700	54.752.103.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.752.103.700	54.752.103.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.533.000.000	5.533.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2		BELANJA MODAL	5.533.000.000	5.533.000.000	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.533.000.000	5.533.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04				Pembangunan Ruang Praktik Siswa	8.391.000.000	8.546.689.000	155.689.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	3.504.000.000	3.504.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.504.000.000	3.504.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2		BELANJA MODAL	4.887.000.000	5.042.689.000	155.689.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.887.000.000	5.042.689.000	155.689.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.105.808.000	1.105.808.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	440.808.000	440.808.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	440.808.000	440.808.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2		BELANJA MODAL	665.000.000	665.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	665.000.000	665.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	15				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.090.716.000	3.090.716.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	15	5	2		BELANJA MODAL	3.090.716.000	3.090.716.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	15	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.090.716.000	3.090.716.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	16				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.000.000	225.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	2		BELANJA MODAL	225.000.000	225.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.000.000	225.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28				Pengadaan Mebel Sekolah	1.565.400.000	1.565.400.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	5	1		BELANJA OPERASI	380.400.000	380.400.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	380.400.000	380.400.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	5	2		BELANJA MODAL	1.185.000.000	1.185.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.185.000.000	1.185.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	34				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	2.475.000.000	2.475.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	34	5	1		BELANJA OPERASI	2.475.000.000	2.475.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	34	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000.000	2.475.000.000	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	12.740.636.600	2.842.136.600	(9.898.500.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	1		BELANJA OPERASI	12.730.636.600	2.832.136.600	(9.898.500.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.832.136.600	2.832.136.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	9.898.500.000	0	(9.898.500.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	2		BELANJA MODAL	10.000.000	10.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12.768.434.000	12.612.745.000	(155.689.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	1		BELANJA OPERASI	6.813.648.000	6.813.648.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.813.648.000	6.813.648.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	2		BELANJA MODAL	5.954.786.000	5.799.097.000	(155.689.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.954.786.000	5.799.097.000	(155.689.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	366.887.000	366.887.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39	5	1		BELANJA OPERASI	366.887.000	366.887.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	366.887.000	366.887.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	40				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	142.451.000	78.611.000	(63.840.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	40	5	1		BELANJA OPERASI	142.451.000	78.611.000	(63.840.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	40	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.451.000	78.611.000	(63.840.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	968.912.200	1.051.380.600	82.468.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41	5	1		BELANJA OPERASI	968.912.200	1.051.380.600	82.468.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	968.912.200	1.051.380.600	82.468.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	46.949.982.256	47.036.478.472	86.496.216	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42	5	1		BELANJA OPERASI	46.949.982.256	47.036.478.472	86.496.216	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.949.982.256	47.036.478.472	86.496.216	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	748.663.900	748.663.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43	5	1		BELANJA OPERASI	748.663.900	748.663.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	748.663.900	748.663.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	550.682.000	532.053.600	(18.628.400)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45	5	1		BELANJA OPERASI	550.682.000	532.053.600	(18.628.400)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	550.682.000	532.053.600	(18.628.400)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	169.551.590.000	172.257.078.836	2.705.488.836	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	1		BELANJA OPERASI	119.164.855.000	120.517.599.418	1.352.744.418	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.386.735.000	51.739.479.418	1.352.744.418	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	1	05	Belanja Hibah	68.778.120.000	68.778.120.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	2		BELANJA MODAL	50.386.735.000	51.739.479.418	1.352.744.418	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.232.041.000	31.043.687.651	811.646.651	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.154.694.000	20.695.791.767	541.097.767	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	50				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	118.635.500	118.635.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	50	5	1		BELANJA OPERASI	118.635.500	118.635.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	50	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	118.635.500	118.635.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	51				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	237.391.800	237.391.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	51	5	1		BELANJA OPERASI	237.391.800	237.391.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	51	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	237.391.800	237.391.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	52				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	270.457.000	270.457.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	52	5	1		BELANJA OPERASI	270.457.000	270.457.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	52	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	270.457.000	270.457.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	54				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.083.100	37.083.100	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	54	5	1		BELANJA OPERASI	37.083.100	37.083.100	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	54	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.083.100	37.083.100	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	55				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	323.932.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	55	5	1		BELANJA OPERASI	323.932.600	323.932.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	55	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	323.932.600	323.932.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pengelolaan Pendidikan Khusus	34.612.865.356	34.223.683.527	(389.181.829)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.126.957.200	10.076.957.200	(50.000.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	119.642.600	69.642.600	(50.000.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	119.642.600	69.642.600	(50.000.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	2		BELANJA MODAL	10.007.314.600	10.007.314.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.007.314.600	10.007.314.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.733.000.000	1.253.036.589	(479.963.411)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2		BELANJA MODAL	1.733.000.000	1.253.036.589	(479.963.411)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.733.000.000	1.253.036.589	(479.963.411)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	08				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.972.042.000	3.502.005.411	529.963.411	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	2		BELANJA MODAL	2.972.042.000	3.502.005.411	529.963.411	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.972.042.000	3.502.005.411	529.963.411	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35				Pengadaan Mebel Sekolah	529.363.800	529.363.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	5	1		BELANJA OPERASI	10.080.000	10.080.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000	10.080.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	5	2		BELANJA MODAL	519.283.800	519.283.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	519.283.800	519.283.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.031.672.000	1.036.622.000	4.950.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36	5	1		BELANJA OPERASI	1.031.672.000	1.036.622.000	4.950.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.031.672.000	1.036.622.000	4.950.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	41				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	239.560.000	239.560.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	41	5	1		BELANJA OPERASI	239.560.000	239.560.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	41	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	239.560.000	239.560.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	44				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	512.250.000	0	(512.250.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	44	5	1		BELANJA OPERASI	512.250.000	0	(512.250.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	44	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	512.250.000	0	(512.250.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	123.582.000	118.632.000	(4.950.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47	5	1		BELANJA OPERASI	123.582.000	118.632.000	(4.950.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	123.582.000	118.632.000	(4.950.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	48				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.217.700	467.217.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	48	5	1		BELANJA OPERASI	467.217.700	467.217.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	48	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	467.217.700	467.217.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.551.968.156	5.565.117.012	13.148.856	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49	5	1		BELANJA OPERASI	5.551.968.156	5.565.117.012	13.148.856	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.551.968.156	5.565.117.012	13.148.856	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	259.215.500	259.215.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	5	1		BELANJA OPERASI	259.215.500	259.215.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	259.215.500	259.215.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10.981.300.000	11.091.219.315	109.919.315	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	1		BELANJA OPERASI	5.959.750.000	6.014.709.658	54.959.658	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.021.550.000	5.076.509.658	54.959.658	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	1	05	Belanja Hibah	938.200.000	938.200.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	2		BELANJA MODAL	5.021.550.000	5.076.509.657	54.959.657	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.012.930.000	3.045.905.794	32.975.794	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.008.620.000	2.030.603.863	21.983.863	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.547.900	16.547.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53	5	1		BELANJA OPERASI	16.547.900	16.547.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.547.900	16.547.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	56				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.629.500	50.629.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	56	5	1		BELANJA OPERASI	50.629.500	50.629.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	56	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.629.500	50.629.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	60				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600	17.559.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	60	5	1		BELANJA OPERASI	17.559.600	17.559.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	60	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.559.600	17.559.600	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	207.016.500	207.016.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	00				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	179.548.800	179.548.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	132.307.900	132.307.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	132.307.900	132.307.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.307.900	132.307.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	47.240.900	47.240.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	47.240.900	47.240.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.240.900	47.240.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	00				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.467.700	27.467.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.467.700	27.467.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	27.467.700	27.467.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.467.700	27.467.700	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	62.262.900	62.262.900	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	00			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	62.262.900	62.262.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	01			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.762.500	31.762.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	31.762.500	31.762.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.762.500	31.762.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	30.500.400	30.500.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	30.500.400	30.500.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.400	30.500.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	79.090.400	79.090.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	00			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	79.090.400	79.090.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	06			Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	79.090.400	79.090.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	79.090.400	79.090.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	79.090.400	79.090.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.081.090.938.142	1.057.419.982.876	(23.670.955.266)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.561.300	130.561.300	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.469.400	88.469.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	88.469.400	88.469.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.469.400	88.469.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.091.900	42.091.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	42.091.900	42.091.900	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.091.900	42.091.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.058.013.831.398	1.034.318.904.068	(23.694.927.330)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.057.907.216.098	1.034.212.288.768	(23.694.927.330)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.057.907.216.098	1.034.212.288.768	(23.694.927.330)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.057.907.216.098	1.034.212.288.768	(23.694.927.330)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.252.800	22.252.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	22.252.800	22.252.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.252.800	22.252.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.362.500	84.362.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	84.362.500	84.362.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.362.500	84.362.500	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	00				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.100.000	52.100.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	52.100.000	52.100.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	52.100.000	52.100.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.100.000	52.100.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	00				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.975.000	50.975.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.975.000	50.975.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	50.975.000	50.975.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.975.000	50.975.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.370.462.350	3.132.887.550	(237.574.800)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.707.878.300	2.417.483.500	(290.394.800)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	319.986.900	479.986.900	160.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	319.986.900	479.986.900	160.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	2.387.891.400	1.937.496.600	(450.394.800)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.384.891.400	1.937.496.600	(447.394.800)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000	0	(3.000.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.384.800	8.384.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	8.384.800	8.384.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.384.800	8.384.800	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.091.000	33.091.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	33.091.000	33.091.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.091.000	33.091.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250	31.526.250	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	31.526.250	31.526.250	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.526.250	31.526.250	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	589.582.000	642.402.000	52.820.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	589.582.000	642.402.000	52.820.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	589.582.000	642.402.000	52.820.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.793.473.714	10.942.215.778	148.742.064	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	716.785.650	841.555.650	124.770.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	716.785.650	841.555.650	124.770.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	716.785.650	841.555.650	124.770.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.076.688.064	10.100.660.128	23.972.064	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	10.076.688.064	10.100.660.128	23.972.064	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.076.688.064	10.100.660.128	23.972.064	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.679.534.380	8.792.339.180	112.804.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	916.028.700	1.016.028.700	100.000.000	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	916.028.700	1.016.028.700	100.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	916.028.700	1.016.028.700	100.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05				Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.410.000	14.410.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	14.410.000	14.410.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.410.000	14.410.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.160.906.180	7.198.710.980	37.804.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.412.000.000	1.586.804.800	174.804.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.412.000.000	1.586.804.800	174.804.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	5.748.906.180	5.611.906.180	(137.000.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.748.906.180	5.611.906.180	(137.000.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	583.189.500	558.189.500	(25.000.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	583.189.500	558.189.500	(25.000.000)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	583.189.500	558.189.500	(25.000.000)	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.141.076.403	25.294.876.403	153.800.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.471.199.600	1.499.999.600	(1.971.200.000)	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	00				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.471.199.600	1.499.999.600	(1.971.200.000)	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	2.571.199.800	599.999.800	(1.971.200.000)	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.571.199.800	599.999.800	(1.971.200.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	599.999.800	599.999.800	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	1.971.200.000	0	(1.971.200.000)	
	2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	100.000.000	100.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	799.999.800	799.999.800	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	799.999.800	799.999.800	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	799.999.800	799.999.800	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.169.876.803	23.294.876.803	2.125.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	00				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	13.019.876.803	13.019.876.803	0	
	2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	13.019.876.803	13.019.876.803	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.902.289.603	12.797.544.203	(104.745.400)	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.902.289.603	12.797.544.203	(104.745.400)	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	117.587.200	222.332.600	104.745.400	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.587.200	207.332.600	104.745.400	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000	15.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	00				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.150.000.000	10.275.000.000	2.125.000.000	
	2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	8.150.000.000	10.275.000.000	2.125.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	8.150.000.000	10.275.000.000	2.125.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03	5	1	05	Belanja Hibah	8.150.000.000	10.275.000.000	2.125.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	500.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	00				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	500.000.000	500.000.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Kepramukaan				
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000	500.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	500.000.000	500.000.000	0	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1	05	Belanja Hibah	500.000.000	500.000.000	0	
Jumlah Belanja										1.854.443.246.643	1.820.204.389.336	(34.238.857.307)	
Total Surplus/(Defisit)										(1.853.079.746.643)	(1.818.740.389.336)	34.339.357.307	
0	00	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	233.023.519.000	266.329.867.500	33.306.348.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	115.600.000	219.100.000	103.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	232.907.919.000	266.110.767.500	33.202.848.500	
Jumlah Pendapatan											233.023.519.000	266.329.867.500	33.306.348.500	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	651.237.033.614	661.018.482.643	9.781.449.029	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	74.474.837.290	73.082.605.293	(1.392.231.997)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	41.277.922.894	34.849.333.761	(6.428.589.133)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Pengembangan Rumah Sakit	1.955.822.600	1.955.822.600	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	57.243.000	57.243.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	57.243.000	57.243.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2			BELANJA MODAL	1.898.579.600	1.898.579.600	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.117.579.600	1.117.579.600	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	781.000.000	781.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	247.000.000	247.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2			BELANJA MODAL	247.000.000	247.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	247.000.000	247.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	10					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	27.611.996.794	27.611.996.794	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	10	5	2			BELANJA MODAL	27.611.996.794	27.611.996.794	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.611.996.794	27.611.996.794	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	315.459.862	315.459.862	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	1	BELANJA OPERASI	300.459.862	300.459.862	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.459.862	300.459.862	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	2	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	11.147.643.638	4.719.054.505	(6.428.589.133)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	1	BELANJA OPERASI	11.147.643.638	4.719.054.505	(6.428.589.133)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.147.643.638	4.719.054.505	(6.428.589.133)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	32.447.595.296	38.150.976.032	5.703.380.736	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.779.162.080	2.951.458.880	172.296.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.779.162.080	2.951.458.880	172.296.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.779.162.080	2.951.458.880	172.296.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	910.780.800	9.012.557.500	8.101.776.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	910.780.800	8.245.343.000	7.334.562.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	910.780.800	8.245.343.000	7.334.562.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	BELANJA MODAL	0	767.214.500	767.214.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	767.214.500	767.214.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	822.475.800	307.851.600	(514.624.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	822.475.800	307.851.600	(514.624.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	822.475.800	307.851.600	(514.624.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.000.000	36.490.000	(13.510.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	36.490.000	(13.510.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	36.490.000	(13.510.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	470.062.200	32.780.000	(437.282.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	470.062.200	32.780.000	(437.282.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	470.062.200	32.780.000	(437.282.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37.730.580	2.730.580	(35.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	2.730.580	2.730.580	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.730.580	2.730.580	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	2	BELANJA MODAL	35.000.000	0	(35.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.000.000	0	(35.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	638.440.900	432.146.500	(206.294.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	517.940.900	311.646.500	(206.294.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	517.940.900	311.646.500	(206.294.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2	BELANJA MODAL	120.500.000	120.500.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.500.000	120.500.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.646.584.536	1.245.831.572	(2.400.752.964)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	2.879.370.036	1.245.831.572	(1.633.538.464)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.879.370.036	1.245.831.572	(1.633.538.464)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	2	BELANJA MODAL	767.214.500	0	(767.214.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	767.214.500	0	(767.214.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.009.387.200	24.068.338.200	1.058.951.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	23.009.387.200	24.068.338.200	1.058.951.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.009.387.200	24.068.338.200	1.058.951.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	21			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	33.701.200	23.456.200	(10.245.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	21	5	1	BELANJA OPERASI	33.701.200	23.456.200	(10.245.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.701.200	23.456.200	(10.245.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	25				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	49.270.000	37.335.000	(11.935.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	25	5	1		BELANJA OPERASI	49.270.000	37.335.000	(11.935.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.270.000	37.335.000	(11.935.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	42.768.000	19.083.000	(23.685.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	42.768.000	19.083.000	(23.685.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	42.768.000	19.083.000	(23.685.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.768.000	19.083.000	(23.685.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	00				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	706.551.100	63.212.500	(643.338.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	49.636.000	30.317.400	(19.318.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	49.636.000	30.317.400	(19.318.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.636.000	30.317.400	(19.318.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	656.915.100	32.895.100	(624.020.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	656.915.100	32.895.100	(624.020.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	656.915.100	32.895.100	(624.020.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.021.509.500	1.364.253.300	(657.256.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00				Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.494.400	9.454.400	(3.040.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.494.400	9.454.400	(3.040.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.494.400	9.454.400	(3.040.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.494.400	9.454.400	(3.040.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	00				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.009.015.100	1.354.798.900	(654.216.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.871.629.200	1.307.400.000	(564.229.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.871.629.200	1.307.400.000	(564.229.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.871.629.200	1.307.400.000	(564.229.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	137.385.900	47.398.900	(89.987.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	137.385.900	47.398.900	(89.987.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	137.385.900	47.398.900	(89.987.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	728.589.000	120.151.000	(608.438.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	00				Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	324.497.600	72.472.600	(252.025.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	324.497.600	72.472.600	(252.025.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	324.497.600	72.472.600	(252.025.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	324.497.600	72.472.600	(252.025.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	00				Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	404.091.400	47.678.400	(356.413.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	404.091.400	47.678.400	(356.413.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	404.091.400	47.678.400	(356.413.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	404.091.400	47.678.400	(356.413.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	852.631.000	778.665.000	(73.966.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	603.785.000	603.785.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	603.785.000	603.785.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	603.785.000	603.785.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	603.785.000	603.785.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	00				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	248.846.000	174.880.000	(73.966.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	248.846.000	174.880.000	(73.966.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	248.846.000	174.880.000	(73.966.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	248.846.000	174.880.000	(73.966.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	573.159.466.824	585.672.808.050	12.513.341.226	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.952.800	36.117.800	(29.835.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.004.000	27.084.000	(16.920.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	44.004.000	27.084.000	(16.920.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.004.000	27.084.000	(16.920.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.948.800	9.033.800	(12.915.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	21.948.800	9.033.800	(12.915.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.948.800	9.033.800	(12.915.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	229.823.996.834	212.248.943.673	(17.575.053.161)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	229.772.607.934	212.203.930.973	(17.568.676.961)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	229.772.607.934	212.203.930.973	(17.568.676.961)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	229.772.607.934	212.203.930.973	(17.568.676.961)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.388.900	45.012.700	(6.376.200)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	51.388.900	45.012.700	(6.376.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.388.900	45.012.700	(6.376.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.594.596.348	4.159.784.548	(434.811.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.964.382.700	1.640.212.500	(324.170.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.476.500	48.996.500	(480.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.476.500	48.996.500	(480.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	1.914.906.200	1.591.216.000	(323.690.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.907.578.200	1.583.888.000	(323.690.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.328.000	7.328.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.630.213.648	2.519.572.048	(110.641.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.600.218.648	2.519.572.048	(80.646.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.218.648	2.519.572.048	(80.646.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	2		BELANJA MODAL	29.995.000	0	(29.995.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.995.000	0	(29.995.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.351.574.000	341.674.000	(1.009.900.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05				Pengadaan Mebel	103.124.000	84.774.000	(18.350.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2		BELANJA MODAL	103.124.000	84.774.000	(18.350.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.124.000	84.774.000	(18.350.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.248.450.000	256.900.000	(991.550.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	1.248.450.000	256.900.000	(991.550.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.248.450.000	256.900.000	(991.550.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.928.153.842	99.192.718.479	(735.435.363)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.523.110.402	6.796.789.535	(726.320.867)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.523.110.402	6.796.789.535	(726.320.867)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.523.110.402	6.796.789.535	(726.320.867)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.405.043.440	92.395.928.944	(9.114.496)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	92.405.043.440	92.395.928.944	(9.114.496)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	92.405.043.440	92.395.928.944	(9.114.496)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.533.725.600	3.072.510.800	(1.461.214.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	521.775.000	521.775.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	521.775.000	521.775.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	521.775.000	521.775.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.500.000	145.500.000	(120.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	265.500.000	145.500.000	(120.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	265.500.000	145.500.000	(120.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	725.560.700	593.415.100	(132.145.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	725.560.700	593.415.100	(132.145.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	725.560.700	593.415.100	(132.145.600)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.020.889.900	1.811.820.700	(1.209.069.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.137.554.900	1.647.876.700	(489.678.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.137.554.900	1.647.876.700	(489.678.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	883.335.000	163.944.000	(719.391.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	883.335.000	163.944.000	(719.391.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	00				Peningkatan Pelayanan BLUD	232.861.467.400	266.621.058.750	33.759.591.350	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	232.861.467.400	266.621.058.750	33.759.591.350	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1		BELANJA OPERASI	185.589.506.791	218.422.366.037	32.832.859.246	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1	01	Belanja Pegawai	77.752.817.600	89.004.157.000	11.251.339.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.836.689.191	129.418.209.037	21.581.519.846	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2		BELANJA MODAL	47.271.960.609	48.198.692.713	926.732.104	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.980.372.054	27.665.592.064	685.220.010	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.791.588.555	20.148.100.649	356.512.094	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	180.000.000	(320.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	205.000.000	205.000.000	
									Jumlah Belanja	651.237.033.614	661.018.482.643	9.781.449.029	
									Total Surplus/(Defisit)	(418.213.514.614)	(394.688.615.143)	23.524.899.471	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4			PENDAPATAN DAERAH				
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.730.691.000	34.820.691.000	5.090.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	353.600.000	503.600.000	150.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	29.377.091.000	34.317.091.000	4.940.000.000	
Jumlah Pendapatan										29.730.691.000	34.820.691.000	5.090.000.000	
0	00	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	5			BELANJA				
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	835.668.611.237	898.389.687.461	62.721.076.224	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	29.950.739.156	28.412.841.206	(1.537.897.950)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	00				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.370.238.736	2.768.840.547	(1.601.398.189)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.018.072.236	531.574.247	(486.497.989)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	618.072.236	152.409.200	(465.663.036)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	618.072.236	152.409.200	(465.663.036)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	400.000.000	379.165.047	(20.834.953)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000	379.165.047	(20.834.953)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09				Pembangunan Tanggul Sungai	3.113.542.300	1.998.642.100	(1.114.900.200)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	53.542.300	42.142.100	(11.400.200)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.542.300	42.142.100	(11.400.200)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	2		BELANJA MODAL	3.060.000.000	1.956.500.000	(1.103.500.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.060.000.000	1.956.500.000	(1.103.500.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	238.624.200	238.624.200	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	5	1		BELANJA OPERASI	238.624.200	188.624.200	(50.000.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	238.624.200	188.624.200	(50.000.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	5	2	BELANJA MODAL	0	50.000.000	50.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	5	2 01	Belanja Modal Tanah	0	50.000.000	50.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	00			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.580.500.420	25.644.000.659	63.500.239	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.914.769.936	1.563.586.791	(351.183.145)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	658.131.936	656.948.791	(1.183.145)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	658.131.936	656.948.791	(1.183.145)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	1.256.638.000	906.638.000	(350.000.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.256.638.000	906.638.000	(350.000.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	20.551.944.688	20.552.480.976	536.288	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	1	BELANJA OPERASI	308.400.688	308.936.976	536.288	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	308.400.688	308.936.976	536.288	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	2	BELANJA MODAL	20.243.544.000	20.243.544.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.243.544.000	20.243.544.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.113.785.796	3.527.932.892	414.147.096	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	1	BELANJA OPERASI	2.514.805.796	3.009.220.892	494.415.096	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.514.805.796	3.009.220.892	494.415.096	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	2	BELANJA MODAL	598.980.000	518.712.000	(80.268.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	598.980.000	518.712.000	(80.268.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	41.474.726.668	44.296.741.186	2.822.014.518	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	00			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	41.474.726.668	44.296.741.186	2.822.014.518	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.272.499.732	1.574.184.584	(698.315.148)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.972.499.732	1.377.791.074	(594.708.658)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.972.499.732	1.377.791.074	(594.708.658)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	300.000.000	196.393.510	(103.606.490)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000	196.393.510	(103.606.490)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	535.432.900	507.872.130	(27.560.770)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	185.432.900	157.872.130	(27.560.770)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.432.900	24.346.900	(11.086.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	150.000.000	133.525.230	(16.474.770)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	2	BELANJA MODAL	350.000.000	350.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	350.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	9.264.682.600	9.434.382.600	169.700.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	88.682.600	88.382.600	(300.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.682.600	88.382.600	(300.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	2	BELANJA MODAL	9.176.000.000	9.346.000.000	170.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	2 01	Belanja Modal Tanah	10.000.000	10.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.166.000.000	9.336.000.000	170.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.141.218.100	965.365.200	(175.852.900)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.141.218.100	965.365.200	(175.852.900)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.218.100	77.217.800	(300)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05	5	1 05	Belanja Hibah	1.064.000.000	888.147.400	(175.852.600)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	28.260.893.336	31.814.936.672	3.554.043.336	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	24.675.749.626	27.653.292.962	2.977.543.336	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	1 01	Belanja Pegawai	4.736.847.290	381.721.573	(4.355.125.717)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.938.902.336	27.271.571.389	7.332.669.053	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	2	BELANJA MODAL	3.585.143.710	4.161.643.710	576.500.000	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.711.100.000	2.287.600.000	576.500.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.874.043.710	1.874.043.710	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.686.241.600	12.936.063.650	1.249.822.050	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	00				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	11.686.241.600	12.936.063.650	1.249.822.050	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	307.012.100	290.289.860	(16.722.240)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	107.012.100	91.819.430	(15.192.670)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.012.100	91.819.430	(15.192.670)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	200.000.000	198.470.430	(1.529.570)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	198.470.430	(1.529.570)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.042.332.600	977.579.200	(64.753.400)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	42.332.600	37.202.600	(5.130.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.332.600	37.202.600	(5.130.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	1.000.000.000	940.376.600	(59.623.400)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000	940.376.600	(59.623.400)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05				Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	232.012.100	163.309.790	(68.702.310)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.012.100	7.011.800	(300)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.012.100	7.011.800	(300)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	5	2		BELANJA MODAL	225.000.000	156.297.990	(68.702.010)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.000.000	156.297.990	(68.702.010)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10.104.884.800	11.504.884.800	1.400.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	10.104.884.800	11.504.884.800	1.400.000.000	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	5	1	01	Belanja Pegawai	509.660.000	509.660.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.595.224.800	10.995.224.800	1.400.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	0.00	00				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	458.050.968.263	514.737.168.060	56.686.199.797	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	00				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	458.050.968.263	514.737.168.060	56.686.199.797	
	1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.178.251.100	1.359.097.366	180.846.266	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	428.251.100	416.072.352	(12.178.748)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	148.251.100	138.756.612	(9.494.488)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	280.000.000	277.315.740	(2.684.260)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	750.000.000	943.025.014	193.025.014	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	30.000.000	30.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000.000	913.025.014	163.025.014	
	1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3.743.783.300	3.553.805.222	(189.978.078)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.053.783.300	888.833.144	(164.950.156)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.783.300	62.127.300	(11.656.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	980.000.000	826.705.844	(153.294.156)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	2.690.000.000	2.664.972.078	(25.027.922)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.690.000.000	2.664.972.078	(25.027.922)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03				Penataan Bangunan dan Lingkungan	453.128.933.863	509.824.265.472	56.695.331.609	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	227.956.103.761	288.756.913.831	60.800.810.070	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.076.985.640	2.603.781.640	526.796.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	225.879.118.121	286.153.132.191	60.274.014.070	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	225.172.830.102	221.067.351.641	(4.105.478.461)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2	01	Belanja Modal Tanah	166.610.380.555	156.345.297.948	(10.265.082.607)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.167.720.000	5.942.750.000	4.775.030.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.394.729.547	58.779.303.693	1.384.574.146	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	251.321.165.931	259.577.032.112	8.255.866.181	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	00				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	251.321.165.931	259.577.032.112	8.255.866.181	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.706.964.200	4.470.433.986	2.763.469.786	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.081.964.200	968.113.646	(113.850.554)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.081.964.200	968.113.646	(113.850.554)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	625.000.000	3.502.320.340	2.877.320.340	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	2	01	Belanja Modal Tanah	0	2.545.900.000	2.545.900.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	625.000.000	956.420.340	331.420.340	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.728.414.000	1.240.506.231	(487.907.769)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.728.414.000	1.240.506.231	(487.907.769)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.728.414.000	1.240.506.231	(487.907.769)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05				Pembangunan Jalan	65.300.139.850	77.129.954.049	11.829.814.199	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	5	2		BELANJA MODAL	65.300.139.850	77.129.954.049	11.829.814.199	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.300.139.850	77.129.954.049	11.829.814.199	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06				Pelebaran Jalan Menuju Standar	85.860.253.672	80.790.060.264	(5.070.193.408)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	519.859.432	485.622.264	(34.237.168)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	519.859.432	485.622.264	(34.237.168)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	85.340.394.240	80.304.438.000	(5.035.956.240)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.340.394.240	80.304.438.000	(5.035.956.240)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10				Pemeliharaan Berkala Jalan	68.987.253.391	65.194.832.069	(3.792.421.322)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	15.200.000	17.100.000	1.900.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000	17.100.000	1.900.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	2		BELANJA MODAL	68.972.053.391	65.177.732.069	(3.794.321.322)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.972.053.391	65.177.732.069	(3.794.321.322)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11				Pemeliharaan Rutin Jalan	19.781.835.767	19.769.557.087	(12.278.680)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	17.217.069.026	17.204.790.346	(12.278.680)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.217.069.026	17.204.790.346	(12.278.680)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	2		BELANJA MODAL	2.564.766.741	2.564.766.741	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.000.000	265.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.299.766.741	2.299.766.741	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.642.452.183	7.135.813.983	3.493.361.800	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	82.244.000	49.393.800	(32.850.200)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.244.000	49.393.800	(32.850.200)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	2		BELANJA MODAL	3.560.208.183	7.086.420.183	3.526.212.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.560.208.183	7.086.420.183	3.526.212.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4.313.852.868	3.845.874.443	(467.978.425)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	1		BELANJA OPERASI	232.022.240	232.469.480	447.240	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	232.022.240	232.469.480	447.240	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	2		BELANJA MODAL	4.081.830.628	3.613.404.963	(468.425.665)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.081.830.628	3.613.404.963	(468.425.665)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.341.171.148	2.686.534.896	(2.654.636.252)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	00				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	924.324.840	703.588.180	(220.736.660)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	924.324.840	703.588.180	(220.736.660)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	924.324.840	703.588.180	(220.736.660)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	924.324.840	703.588.180	(220.736.660)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	00			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	737.311.880	595.756.360	(141.555.520)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	737.311.880	595.756.360	(141.555.520)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	737.311.880	595.756.360	(141.555.520)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	737.311.880	595.756.360	(141.555.520)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	00			Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	3.679.534.428	1.387.190.356	(2.292.344.072)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3.679.534.428	1.387.190.356	(2.292.344.072)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	845.292.428	794.190.356	(51.102.072)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	845.292.428	794.190.356	(51.102.072)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02	5	2	BELANJA MODAL	2.834.242.000	593.000.000	(2.241.242.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.834.242.000	593.000.000	(2.241.242.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.247.998.960	1.463.357.100	(784.641.860)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02	00			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	863.795.332	742.441.544	(121.353.788)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02	03			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	863.795.332	742.441.544	(121.353.788)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	863.795.332	742.441.544	(121.353.788)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	863.795.332	742.441.544	(121.353.788)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	00			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	610.907.740	305.981.380	(304.926.360)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	610.907.740	305.981.380	(304.926.360)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	610.907.740	305.981.380	(304.926.360)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	610.907.740	305.981.380	(304.926.360)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	00			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	773.295.888	414.934.176	(358.361.712)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	577.499.492	237.579.284	(339.920.208)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	577.499.492	237.579.284	(339.920.208)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	577.499.492	237.579.284	(339.920.208)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	195.796.396	177.354.892	(18.441.504)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	195.796.396	177.354.892	(18.441.504)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	195.796.396	177.354.892	(18.441.504)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.595.599.511	34.279.949.251	(1.315.650.260)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	836.553.366	801.593.582	(34.959.784)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	448.699.780	437.434.260	(11.265.520)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	448.699.780	437.434.260	(11.265.520)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	448.699.780	437.434.260	(11.265.520)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.853.586	364.159.322	(23.694.264)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	387.853.586	364.159.322	(23.694.264)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	387.853.586	364.159.322	(23.694.264)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.811.918.513	26.608.450.103	(1.203.468.410)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.811.918.513	26.608.450.103	(1.203.468.410)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	27.811.918.513	26.608.450.103	(1.203.468.410)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	27.811.918.513	26.608.450.103	(1.203.468.410)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	849.741.930	828.458.595	(21.283.335)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.176.800	36.176.800	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	36.176.800	36.176.800	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.176.800	36.176.800	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.159.230	63.159.230	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	63.159.230	63.159.230	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.159.230	63.159.230	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	90.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	90.000.000	90.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	90.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.125.900	90.125.900	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	90.125.900	90.125.900	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.125.900	90.125.900	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	37.520.000	35.436.665	(2.083.335)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	37.520.000	35.436.665	(2.083.335)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.520.000	35.436.665	(2.083.335)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.500.000	43.290.000	(12.210.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	55.500.000	43.290.000	(12.210.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000	43.290.000	(12.210.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.260.000	470.270.000	(6.990.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	477.260.000	470.270.000	(6.990.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	477.260.000	470.270.000	(6.990.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	682.364.100	670.364.100	(12.000.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	682.364.100	670.364.100	(12.000.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	682.364.100	670.364.100	(12.000.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	482.364.100	470.364.100	(12.000.000)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	200.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.152.166.448	1.152.255.896	89.448	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Daerah				
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.090.000	4.090.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.090.000	4.090.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000	4.090.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.850.000	549.850.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	549.850.000	549.850.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	549.850.000	549.850.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	200.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	200.000.000	0	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.226.448	398.315.896	89.448	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	398.226.448	398.315.896	89.448	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	398.226.448	398.315.896	89.448	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.262.855.154	4.218.826.975	(44.028.179)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.945.228.988	1.918.915.076	(26.313.912)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.945.228.988	1.918.915.076	(26.313.912)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.945.228.988	1.918.915.076	(26.313.912)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.808.452	300.056.796	(17.751.656)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	317.808.452	300.056.796	(17.751.656)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	317.808.452	300.056.796	(17.751.656)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.999.817.714	1.999.855.103	37.389	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	824.481.856	826.449.712	1.967.856	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	824.481.856	826.449.712	1.967.856	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	1.175.335.858	1.173.405.391	(1.930.467)	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.175.335.858	1.173.405.391	(1.930.467)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.160.753.864	1.869.131.020	(291.622.844)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	777.939.776	722.688.804	(55.250.972)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	00			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	355.192.688	315.925.038	(39.267.650)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	27.533.700	10.244.700	(17.289.000)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	27.533.700	10.244.700	(17.289.000)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.700	10.244.700	(17.289.000)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	327.658.988	305.680.338	(21.978.650)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	327.658.988	305.680.338	(21.978.650)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	327.658.988	305.680.338	(21.978.650)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	00			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088	406.763.766	(15.983.322)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088	406.763.766	(15.983.322)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	422.747.088	406.763.766	(15.983.322)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	422.747.088	406.763.766	(15.983.322)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.382.814.088	1.146.442.216	(236.371.872)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	00			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.382.814.088	1.146.442.216	(236.371.872)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	302.095.100	291.322.540	(10.772.560)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	302.095.100	291.322.540	(10.772.560)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	302.095.100	291.322.540	(10.772.560)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.062.492.088	848.642.776	(213.849.312)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.062.492.088	848.642.776	(213.849.312)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	242.492.088	232.663.776	(9.828.312)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	820.000.000	615.979.000	(204.021.000)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	18.226.900	6.476.900	(11.750.000)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	18.226.900	6.476.900	(11.750.000)	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.226.900	6.476.900	(11.750.000)	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	311.272.200	200.595.300	(110.676.900)	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	0.00	00				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	311.272.200	200.595.300	(110.676.900)	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	00				Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	311.272.200	200.595.300	(110.676.900)	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	311.272.200	200.595.300	(110.676.900)	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	311.272.200	200.595.300	(110.676.900)	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	311.272.200	200.595.300	(110.676.900)	
Jumlah Belanja										838.140.637.301	900.459.413.781	62.318.776.480	
Total Surplus/(Defisit)										(808.409.946.301)	(865.638.722.781)	(57.228.776.480)	
0	00	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	1.05.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	44.839.275.749	44.660.448.129	(178.827.620)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.364.308.880	21.569.200.928	204.892.048	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.812.245.084	21.082.506.236	270.261.152	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.697.318.408	4.001.331.216	304.012.808	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.697.318.408	4.001.331.216	304.012.808	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.697.318.408	4.001.331.216	304.012.808	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	206.475.300	198.675.300	(7.800.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	206.475.300	198.675.300	(7.800.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	206.475.300	198.675.300	(7.800.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448	37.565.896	89.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	37.476.448	37.565.896	89.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	37.565.896	89.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	37.476.448	37.565.896	89.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	37.476.448	37.565.896	89.448	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	37.565.896	89.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06				Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	37.476.448	37.565.896	89.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	37.476.448	37.565.896	89.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	37.565.896	89.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.796.022.032	16.769.802.032	(26.220.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	16.796.022.032	16.769.802.032	(26.220.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.796.022.032	16.769.802.032	(26.220.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	419.663.796	419.192.692	(471.104)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	419.663.796	419.192.692	(471.104)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	419.663.796	419.192.692	(471.104)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	419.663.796	419.192.692	(471.104)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	132.400.000	67.502.000	(64.898.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	132.400.000	67.502.000	(64.898.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	132.400.000	67.502.000	(64.898.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.400.000	67.502.000	(64.898.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.474.966.869	23.091.247.201	(383.719.668)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.000.000	14.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	14.000.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.433.726.487	19.619.254.547	(814.471.940)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.433.726.487	19.619.254.547	(814.471.940)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.433.726.487	19.619.254.547	(814.471.940)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	20.433.726.487	19.619.254.547	(814.471.940)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.786.510	357.786.510	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.043.310	37.043.310	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	37.043.310	37.043.310	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.043.310	37.043.310	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.364.200	180.364.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	43.837.700	43.837.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.837.700	43.837.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	136.526.500	136.526.500	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.526.500	136.526.500	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.400.000	60.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	60.400.000	60.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.400.000	60.400.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.584.000	25.584.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	25.584.000	25.584.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.584.000	25.584.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.395.000	54.395.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	54.395.000	54.395.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	54.395.000	54.395.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	100.000.000	100.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	100.000.000	100.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	1			BELANJA OPERASI	0	100.000.000	100.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	100.000.000	100.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.473.824	1.089.636.648	1.162.824	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.970.000	2.970.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.970.000	2.970.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.970.000	2.970.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000	142.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1			BELANJA OPERASI	142.000.000	142.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	142.000.000	142.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.310.000	56.310.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	56.310.000	56.310.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	56.310.000	56.310.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	887.193.824	888.356.648	1.162.824	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	887.193.824	888.356.648	1.162.824	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	887.193.824	888.356.648	1.162.824	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.577.980.048	1.907.569.496	329.589.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.379.980.048	1.579.569.496	199.589.448	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.379.980.048	1.579.569.496	199.589.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.379.980.048	1.579.569.496	199.589.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.000.000	328.000.000	130.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	0	130.000.000	130.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	130.000.000	130.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	198.000.000	198.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000	198.000.000	0	
Jumlah Belanja										44.839.275.749	44.660.448.129	(178.827.620)	
Total Surplus/(Defisit)										(44.839.275.749)	(44.660.448.129)	178.827.620	
0	00	1.05.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	24.954.833.546	24.150.540.953	(804.292.593)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.015.214.960	3.001.069.960	(14.145.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	00					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	458.734.000	458.304.000	(430.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	458.734.000	458.304.000	(430.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	458.734.000	458.304.000	(430.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	458.734.000	458.304.000	(430.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	00					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.616.960	771.586.960	(11.030.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.616.960	771.586.960	(11.030.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	782.616.960	771.586.960	(11.030.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	782.616.960	771.586.960	(11.030.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	00					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.773.864.000	1.771.179.000	(2.685.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04					Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.745.500.000	1.745.290.000	(210.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	1			BELANJA OPERASI	275.500.000	275.290.000	(210.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	275.500.000	275.290.000	(210.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	2			BELANJA MODAL	1.470.000.000	1.470.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.470.000.000	1.470.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	05					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	28.364.000	25.889.000	(2.475.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	28.364.000	25.889.000	(2.475.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.364.000	25.889.000	(2.475.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.939.618.586	21.149.470.993	(790.147.593)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.680.700	29.680.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.554.700	2.554.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.554.700	2.554.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.554.700	2.554.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.126.000	27.126.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	27.126.000	27.126.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.126.000	27.126.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.330.947.180	12.552.648.811	(778.298.369)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.330.947.180	12.552.648.811	(778.298.369)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.330.947.180	12.552.648.811	(778.298.369)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.330.947.180	12.552.648.811	(778.298.369)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.972.600	118.972.600	6.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.983.200	27.983.200	6.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.983.200	16.983.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.983.200	16.983.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	2		BELANJA MODAL	5.000.000	11.000.000	6.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000	11.000.000	6.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.939.100	13.939.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.939.100	13.939.100	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.939.100	13.939.100	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	75.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.050.300	2.050.300	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.050.300	2.050.300	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.300	2.050.300	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	734.638.600	766.752.600	32.114.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	734.638.600	766.752.600	32.114.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	226.638.600	197.138.600	(29.500.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	226.638.600	197.138.600	(29.500.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	508.000.000	569.614.000	61.614.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	508.000.000	419.114.000	(88.886.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	150.500.000	150.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.126.048.382	1.111.458.414	(14.589.968)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.000.750	347.000.750	13.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	334.000.750	347.000.750	13.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	334.000.750	347.000.750	13.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.047.632	764.457.664	(27.589.968)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	792.047.632	764.457.664	(27.589.968)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	792.047.632	764.457.664	(27.589.968)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.605.331.124	6.569.957.868	(35.373.256)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.335.111.124	6.299.737.868	(35.373.256)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.335.111.124	6.299.737.868	(35.373.256)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.335.111.124	6.299.737.868	(35.373.256)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.220.000	270.220.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	270.220.000	270.220.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	270.220.000	270.220.000	0	
Jumlah Belanja										24.954.833.546	24.150.540.953	(804.292.593)	
Total Surplus/(Defisit)										(24.954.833.546)	(24.150.540.953)	804.292.593	
0	00	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.200.000	9.600.000	2.400.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	0	3.600.000	3.600.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	7.200.000	6.000.000	(1.200.000)	
Jumlah Pendapatan											7.200.000	9.600.000	2.400.000	
0	00	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	33.755.847.529	32.323.395.210	(1.432.452.319)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	42.141.300	41.971.300	(170.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	00					Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.530.000	3.530.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.000	3.530.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.530.000	3.530.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.530.000	3.530.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	00					Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	38.611.300	38.441.300	(170.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	38.611.300	38.441.300	(170.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	38.611.300	38.441.300	(170.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	38.611.300	38.441.300	(170.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	0.00	00					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.726.120.168	4.538.992.968	(187.127.200)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	00					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	56.624.300	56.284.300	(340.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01					Penyediaan Permakanan	28.699.700	28.469.700	(230.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	28.699.700	28.469.700	(230.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.699.700	28.469.700	(230.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	27.924.600	27.814.600	(110.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	27.924.600	27.814.600	(110.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.924.600	27.814.600	(110.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	00			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.307.314.568	1.242.468.568	(64.846.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01			Pengasuhan	40.000.000	40.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02			Penyediaan Makanan	583.986.000	644.230.000	60.244.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	583.986.000	644.230.000	60.244.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	583.986.000	644.230.000	60.244.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03			Penyediaan Sandang	89.750.000	89.750.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	89.750.000	89.750.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	89.750.000	89.750.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000	10.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.950.000	256.950.000	(16.000.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	272.950.000	256.950.000	(16.000.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	272.950.000	256.950.000	(16.000.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.914.000	47.914.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	47.914.000	47.914.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.914.000	47.914.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	208.840.668	100.140.668	(108.700.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	208.840.668	100.140.668	(108.700.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	208.840.668	100.140.668	(108.700.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000	17.140.000	(340.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	17.480.000	17.140.000	(340.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.480.000	17.140.000	(340.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	36.393.900	36.343.900	(50.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12	5	1	BELANJA OPERASI	36.393.900	36.343.900	(50.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.393.900	36.343.900	(50.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	00			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	970.534.000	835.952.800	(134.581.200)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01			Penyediaan Permakanan	465.000.000	465.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	465.000.000	465.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	465.000.000	465.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000	15.568.800	(44.431.200)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	60.000.000	15.568.800	(44.431.200)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	15.568.800	(44.431.200)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.798.800	125.998.800	16.200.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07	5	1	BELANJA OPERASI	109.798.800	125.998.800	16.200.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	109.798.800	125.998.800	16.200.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	192.001.000	85.651.000	(106.350.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10	5	1	BELANJA OPERASI	192.001.000	85.651.000	(106.350.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	192.001.000	85.651.000	(106.350.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12			Pemulasaraan	143.734.200	143.734.200	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12	5	1	BELANJA OPERASI	143.734.200	143.734.200	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.734.200	143.734.200	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	00			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.384.397.800	2.397.037.800	12.640.000	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10			Pemulangan ke Daerah Asal	2.384.397.800	2.397.037.800	12.640.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10	5	1	BELANJA OPERASI	2.384.397.800	2.397.037.800	12.640.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.384.397.800	2.397.037.800	12.640.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	00			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.249.500	7.249.500	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02			Penyediaan Sandang	7.249.500	7.249.500	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	7.249.500	7.249.500	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.249.500	7.249.500	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	0.00	00			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.614.900	3.614.900	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	00			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.614.900	3.614.900	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.614.900	3.614.900	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.614.900	3.614.900	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.614.900	3.614.900	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	255.937.800	255.937.800	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	00			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	255.937.800	255.937.800	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.937.800	255.937.800	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	255.937.800	255.937.800	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	255.937.800	255.937.800	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	127.163.700	126.983.700	(180.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	00			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.700	126.983.700	(180.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.700	126.983.700	(180.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	127.163.700	126.983.700	(180.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	127.163.700	126.983.700	(180.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.600.869.661	27.355.894.542	(1.244.975.119)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.315.900	16.931.900	(10.384.000)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.591.900	4.397.900	(14.194.000)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	18.591.900	4.397.900	(14.194.000)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.591.900	4.397.900	(14.194.000)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.603.000	3.603.000	0		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.603.000	3.603.000	0		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.603.000	3.603.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.121.000	8.931.000	3.810.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	5.121.000	8.931.000	3.810.000		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.121.000	8.931.000	3.810.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.501.001.824	18.168.889.835	(1.332.111.989)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.501.001.824	18.168.889.835	(1.332.111.989)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	19.501.001.824	18.168.889.835	(1.332.111.989)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	19.501.001.824	18.168.889.835	(1.332.111.989)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	463.899.098	440.829.900	(23.069.198)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.500.300	19.500.300	0		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	19.500.300	19.500.300	0		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.300	19.500.300	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.779.198	73.638.000	(39.141.198)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	112.779.198	73.638.000	(39.141.198)		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.779.198	73.638.000	(39.141.198)	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	260.925.000	260.925.000	0		

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	260.925.000	260.925.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	260.925.000	260.925.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.287.600	8.287.600	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1			BELANJA OPERASI	8.287.600	8.287.600	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.287.600	8.287.600	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	08					Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.660.000	3.660.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	08	5	1			BELANJA OPERASI	3.660.000	3.660.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.660.000	3.660.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.747.000	74.819.000	16.072.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	58.747.000	74.819.000	16.072.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	58.747.000	74.819.000	16.072.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.500.000	27.500.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	06	5	2			BELANJA MODAL	7.500.000	7.500.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	7.500.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11	5	2			BELANJA MODAL	20.000.000	20.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.704.840	642.140.740	51.435.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	500.000	500.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.100.000	424.500.000	43.400.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	381.100.000	424.500.000	43.400.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	381.100.000	424.500.000	43.400.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.104.840	217.140.740	8.035.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	209.104.840	217.140.740	8.035.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.104.840	217.140.740	8.035.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.990.447.999	8.059.602.167	69.154.168	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.281.316.912	1.329.780.528	48.463.616	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.281.316.912	1.329.780.528	48.463.616	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.281.316.912	1.329.780.528	48.463.616	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.351.364.555	4.352.706.275	1.341.720	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	579.913.720	581.255.440	1.341.720	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	579.913.720	581.255.440	1.341.720	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	3.771.450.835	3.771.450.835	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.771.450.835	3.771.450.835	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.357.766.532	2.377.115.364	19.348.832	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	2.312.766.532	2.332.115.364	19.348.832	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.312.766.532	2.332.115.364	19.348.832	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	2	BELANJA MODAL	45.000.000	45.000.000	0	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.000.000	45.000.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.306.400.192	2.306.074.984	(325.208)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	739.892.500	739.472.500	(420.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	00			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	739.892.500	739.472.500	(420.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	439.973.600	439.593.600	(380.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	439.973.600	439.593.600	(380.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	439.973.600	439.593.600	(380.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	299.918.900	299.878.900	(40.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	299.918.900	299.878.900	(40.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	299.918.900	299.878.900	(40.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	0.00	00			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	316.190.000	315.930.000	(260.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	00			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	93.750.000	93.750.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	93.750.000	93.750.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	93.750.000	93.750.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.750.000	93.750.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	00			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	222.440.000	222.180.000	(260.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.940.000	4.680.000	(260.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.940.000	4.680.000	(260.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000	4.680.000	(260.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	217.500.000	217.500.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	217.500.000	217.500.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.500.000	217.500.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	19.999.000	(1.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	00				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	20.000.000	19.999.000	(1.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	20.000.000	19.999.000	(1.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	19.999.000	(1.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	19.999.000	(1.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	0.00	00				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	653.097.700	653.095.700	(2.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	00				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.097.700	653.095.700	(2.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.097.700	653.095.700	(2.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	653.097.700	653.095.700	(2.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	653.097.700	653.095.700	(2.000)	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	0.00	00				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	63.750.000	63.750.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	63.750.000	63.750.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	63.750.000	63.750.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	63.750.000	63.750.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.750.000	63.750.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	513.469.992	513.827.784	357.792	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.338.200	2.338.200	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.537.400	1.537.400	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.537.400	1.537.400	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.537.400	1.537.400	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	800.800	800.800	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	800.800	800.800	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.800	800.800	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	5.000.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	5.000.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.131.792	506.489.584	357.792	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	118.938.696	119.117.592	178.896	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Lapangan				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	118.938.696	119.117.592	178.896	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	118.938.696	119.117.592	178.896	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.767.648	38.857.096	89.448	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	38.767.648	38.857.096	89.448	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.767.648	38.857.096	89.448	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.425.448	348.514.896	89.448	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	348.425.448	348.514.896	89.448	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	348.425.448	348.514.896	89.448	
Jumlah Belanja										36.062.247.721	34.629.470.194	(1.432.777.527)	
Total Surplus/(Defisit)										(36.055.047.721)	(34.619.870.194)	1.435.177.527	
0	00	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.443.600.000	4.503.600.000	60.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	4.443.600.000	4.503.600.000	60.000.000	
Jumlah Pendapatan									4.443.600.000	4.503.600.000	60.000.000	
0	00	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	34.372.062.496	32.556.773.470	(1.815.289.026)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.109.025.700	1.106.625.700	(2.400.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	00			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.078.028.100	1.075.628.100	(2.400.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.078.028.100	1.075.628.100	(2.400.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.049.528.100	1.047.128.100	(2.400.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	999.528.100	997.128.100	(2.400.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	1 05	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	28.500.000	28.500.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.500.000	28.500.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04	00			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600	30.997.600	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04	01			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	30.997.600	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	30.997.600	30.997.600	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.997.600	30.997.600	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	176.010.100	173.576.800	(2.433.300)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	00			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	173.010.100	173.010.100	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	05			Perluasan Kesempatan Kerja	173.010.100	173.010.100	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	173.010.100	173.010.100	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	173.010.100	173.010.100	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03	00			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3.000.000	566.700	(2.433.300)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03	03			Job Fair/Bursa Kerja	3.000.000	566.700	(2.433.300)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	3.000.000	566.700	(2.433.300)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	566.700	(2.433.300)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	54.500.100	31.730.900	(22.769.200)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02	00			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.747.500	4.228.300	(2.519.200)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02	02			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.747.500	4.228.300	(2.519.200)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	6.747.500	4.228.300	(2.519.200)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.747.500	4.228.300	(2.519.200)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	00			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	47.752.600	27.502.600	(20.250.000)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	01			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	45.191.600	24.941.600	(20.250.000)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	45.191.600	24.941.600	(20.250.000)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.191.600	24.941.600	(20.250.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	03			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	2.561.000	2.561.000	0		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.561.000	2.561.000	0		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.561.000	2.561.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	149.527.902	149.527.902	0		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	00			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	149.527.902	149.527.902	0		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	11.279.900	11.279.900	0		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	11.279.900	11.279.900	0		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.279.900	11.279.900	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	138.248.002	138.248.002	0		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	138.248.002	138.248.002	0		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	138.248.002	138.248.002	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.882.998.694	31.095.312.168	(1.787.686.526)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.148.776.822	26.647.358.024	(1.501.418.798)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.148.776.822	26.647.358.024	(1.501.418.798)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	28.148.776.822	26.647.358.024	(1.501.418.798)		

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	28.148.776.822	26.647.358.024	(1.501.418.798)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.462.200	229.124.900	(122.337.300)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.162.200	19.945.500	(2.216.700)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.162.200	19.945.500	(2.216.700)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.162.200	19.945.500	(2.216.700)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.649.600	68.929.600	(21.720.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	68.929.600	68.929.600	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	68.929.600	68.929.600	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	21.720.000	0	(21.720.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.720.000	0	(21.720.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.450.000	91.450.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	91.450.000	91.450.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.450.000	91.450.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.513.400	16.137.800	(21.375.600)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	37.513.400	16.137.800	(21.375.600)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.513.400	16.137.800	(21.375.600)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	4.200.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.200.000	4.200.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	4.200.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.945.000	1.500.000	(2.445.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	3.945.000	1.500.000	(2.445.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000	1.500.000	(2.445.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.542.000	26.962.000	(74.580.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	101.542.000	26.962.000	(74.580.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.542.000	26.962.000	(74.580.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.751.000	22.682.000	(51.069.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.751.000	22.682.000	(51.069.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	73.751.000	22.682.000	(51.069.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.751.000	22.682.000	(51.069.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.480.767.320	1.482.109.040	1.341.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.740.000	2.740.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.740.000	2.740.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000	2.740.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.600.000	612.600.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	612.600.000	612.600.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	612.600.000	612.600.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	865.427.320	866.769.040	1.341.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	865.427.320	866.769.040	1.341.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	865.427.320	866.769.040	1.341.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.828.241.352	2.714.038.204	(114.203.148)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.122.542.720	1.123.884.440	1.341.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.122.542.720	1.123.884.440	1.341.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.122.542.720	1.123.884.440	1.341.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	294.712.392	295.070.184	357.792	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	189.905.792	190.263.584	357.792	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	189.905.792	190.263.584	357.792	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	104.806.600	104.806.600	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.831.600	40.831.600	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.975.000	63.975.000	0	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.410.986.240	1.295.083.580	(115.902.660)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	1.275.546.740	1.236.930.180	(38.616.560)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.546.740	1.236.930.180	(38.616.560)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	135.439.500	58.153.400	(77.286.100)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.439.500	58.153.400	(77.286.100)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.036.141.800	58.137.800	(978.004.000)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	8.000.000	4.293.200	(3.706.800)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01	00		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000	4.293.200	(3.706.800)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01	03		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000	4.293.200	(3.706.800)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01	03	5	BELANJA OPERASI	8.000.000	4.293.200	(3.706.800)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	4.293.200	(3.706.800)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	8.000.000	7.430.000	(570.000)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03	00		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	7.430.000	(570.000)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03	03		Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	7.430.000	(570.000)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03	03	5	BELANJA OPERASI	8.000.000	7.430.000	(570.000)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03	03	5	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	7.430.000	(570.000)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.020.141.800	46.414.600	(973.727.200)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	00		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.020.141.800	46.414.600	(973.727.200)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07		Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	1.020.141.800	46.414.600	(973.727.200)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	BELANJA OPERASI	520.141.800	46.414.600	(473.727.200)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	Belanja Barang dan Jasa	520.141.800	46.414.600	(473.727.200)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	BELANJA MODAL	500.000.000	0	(500.000.000)	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	0	(500.000.000)	
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	60.159.000	32.367.000	(27.792.000)	
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	0.00	00		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	60.159.000	32.367.000	(27.792.000)	
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	00		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60.159.000	32.367.000	(27.792.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	18				Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	60.159.000	32.367.000	(27.792.000)	
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	18	5	1		BELANJA OPERASI	60.159.000	32.367.000	(27.792.000)	
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.159.000	32.367.000	(27.792.000)	
Jumlah Belanja										35.468.363.296	32.647.278.270	(2.821.085.026)	
Total Surplus/(Defisit)										(31.024.763.296)	(28.143.678.270)	2.881.085.026	
0	00	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.12.2.14.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.868.988	368.128.476	41.259.488	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	186.673.244	232.224.388	45.551.144	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	00			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	186.673.244	232.224.388	45.551.144	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04			Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	186.673.244	232.224.388	45.551.144	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	186.673.244	232.224.388	45.551.144	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	186.673.244	232.224.388	45.551.144	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	140.195.744	135.904.088	(4.291.656)	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	00			Pelayanan Pencatatan Sipil	140.195.744	135.904.088	(4.291.656)	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	140.195.744	135.904.088	(4.291.656)	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	140.195.744	135.904.088	(4.291.656)	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	140.195.744	135.904.088	(4.291.656)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.329.967.154	32.235.482.143	(1.094.485.011)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	163.208.344	150.556.688	(12.651.656)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	00			Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	163.208.344	150.556.688	(12.651.656)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	163.208.344	150.556.688	(12.651.656)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	163.208.344	150.556.688	(12.651.656)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	163.208.344	150.556.688	(12.651.656)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	990.754.632	877.868.768	(112.885.864)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	00			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	990.754.632	877.868.768	(112.885.864)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02			Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	513.318.792	408.521.688	(104.797.104)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.12.2.14.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	513.318.792	408.521.688	(104.797.104)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	513.318.792	408.521.688	(104.797.104)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	477.435.840	469.347.080	(8.088.760)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	477.435.840	469.347.080	(8.088.760)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	477.435.840	469.347.080	(8.088.760)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	15.339.034.760	17.766.397.420	2.427.362.660	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	00			Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.339.034.760	17.766.397.420	2.427.362.660	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	247.835.892	238.677.984	(9.157.908)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	247.835.892	238.677.984	(9.157.908)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	247.835.892	238.677.984	(9.157.908)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	877.999.292	462.453.084	(415.546.208)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	877.999.292	462.453.084	(415.546.208)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	877.999.292	462.453.084	(415.546.208)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	583.427.544	549.589.288	(33.838.256)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	583.427.544	549.589.288	(33.838.256)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	583.427.544	549.589.288	(33.838.256)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.12.2.14.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	13.629.772.032	16.515.677.064	2.885.905.032	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	13.629.772.032	16.515.677.064	2.885.905.032	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.064.852.032	8.065.657.064	805.032	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	5	1	05	Belanja Hibah	5.564.920.000	8.450.020.000	2.885.100.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.836.969.418	13.440.659.267	(3.396.310.151)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.383.044	218.216.988	(53.166.056)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.188.300	14.188.300	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.188.300	14.188.300	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.188.300	14.188.300	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257.194.744	204.028.688	(53.166.056)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	257.194.744	204.028.688	(53.166.056)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	257.194.744	204.028.688	(53.166.056)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.367.342.508	10.913.426.509	(3.453.915.999)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.236.963.864	10.782.779.521	(3.454.184.343)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.236.963.864	10.782.779.521	(3.454.184.343)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	14.236.963.864	10.782.779.521	(3.454.184.343)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.378.644	130.646.988	268.344	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	130.378.644	130.646.988	268.344	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	130.378.644	130.646.988	268.344	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.718.962	339.233.562	56.514.600	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.481.500	5.481.500	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.12.2.14.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.481.500	5.481.500	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.481.500	5.481.500	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.657.762	87.902.362	(13.755.400)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	10.441.800	10.213.400	(228.400)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.441.800	10.213.400	(228.400)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	91.215.962	77.688.962	(13.527.000)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.215.962	77.688.962	(13.527.000)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000	75.500.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	75.500.000	75.500.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.500.000	75.500.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.648.700	5.648.700	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	5.648.700	5.648.700	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.648.700	5.648.700	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	4.200.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	4.200.000	4.200.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	4.200.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.255.000	12.255.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	12.255.000	12.255.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.255.000	12.255.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.976.000	148.246.000	70.270.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	77.976.000	148.246.000	70.270.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.976.000	148.246.000	70.270.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.340.000	6.340.000	(1.000.000)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	7.340.000	6.340.000	(1.000.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.12.2.14.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Bangunan Lainnya				
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	7.340.000	6.340.000	(1.000.000)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.340.000	6.340.000	(1.000.000)	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.785.176	659.858.552	43.073.376	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.400.000	179.400.000	42.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	137.400.000	179.400.000	42.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	137.400.000	179.400.000	42.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.385.176	480.458.552	1.073.376	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	479.385.176	480.458.552	1.073.376	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	479.385.176	480.458.552	1.073.376	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.291.399.728	1.303.583.656	12.183.928	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.252.799.728	1.264.983.656	12.183.928	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.252.799.728	1.264.983.656	12.183.928	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.252.799.728	1.264.983.656	12.183.928	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.600.000	38.600.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	27.600.000	27.600.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000	27.600.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	2	BELANJA MODAL	11.000.000	11.000.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000	1.000.000	0	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000	10.000.000	0	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	603.494.588	537.575.276	(65.919.312)	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	603.494.588	537.575.276	(65.919.312)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.12.2.14.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	00				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.494.588	537.575.276	(65.919.312)	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02				Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.494.588	537.575.276	(65.919.312)	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	603.494.588	537.575.276	(65.919.312)	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	603.494.588	537.575.276	(65.919.312)	
Jumlah Belanja										34.260.330.730	33.141.185.895	(1.119.144.835)	
Total Surplus/(Defisit)										(34.260.330.730)	(33.141.185.895)	1.119.144.835	
0	00	2.13.2.12.2.14.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	219.600.000	219.600.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	9.600.000	9.600.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	210.000.000	210.000.000	0	
Jumlah Pendapatan											219.600.000	219.600.000	0	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	48.498.555.226	48.309.852.629	(188.702.597)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.051.884.461	22.204.594.156	(847.290.305)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.780.669.897	1.780.802.336	132.439	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.083.409.142	1.108.139.934	24.730.792	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	214.901.392	239.632.184	24.730.792	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	214.901.392	189.632.184	(25.269.208)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	05		Belanja Hibah	0	50.000.000	50.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2			BELANJA MODAL	868.507.750	868.507.750	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	868.507.750	868.507.750	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	697.260.755	672.662.402	(24.598.353)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1			BELANJA OPERASI	216.367.692	672.662.402	456.294.710	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	216.367.692	672.662.402	456.294.710	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2			BELANJA MODAL	480.893.063	0	(480.893.063)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	480.893.063	0	(480.893.063)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	00					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.441.762.188	2.191.562.076	(250.200.112)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	662.311.584	663.027.168	715.584	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1			BELANJA OPERASI	662.311.584	663.027.168	715.584	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	662.311.584	663.027.168	715.584	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	694.000.000	494.000.000	(200.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	494.000.000	494.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	494.000.000	494.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	2		BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	0	(200.000.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	981.698.404	979.797.708	(1.900.696)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	981.698.404	979.797.708	(1.900.696)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	981.698.404	979.797.708	(1.900.696)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	05				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	103.752.200	54.737.200	(49.015.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	103.752.200	54.737.200	(49.015.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	103.752.200	54.737.200	(49.015.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	00				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	38.598.100	19.883.100	(18.715.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	19.127.500	16.277.500	(2.850.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	19.127.500	16.277.500	(2.850.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.127.500	16.277.500	(2.850.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	19.470.600	3.605.600	(15.865.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	19.470.600	3.605.600	(15.865.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.470.600	3.605.600	(15.865.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07	00				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	833.990.728	537.184.656	(296.806.072)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07	02				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	833.990.728	537.184.656	(296.806.072)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07	02	5	1		BELANJA OPERASI	833.990.728	537.184.656	(296.806.072)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	833.990.728	537.184.656	(296.806.072)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	00					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.709.770.648	17.461.485.088	(248.285.560)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.709.770.648	17.461.485.088	(248.285.560)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1			BELANJA OPERASI	8.298.088.648	8.049.803.088	(248.285.560)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.298.088.648	8.049.803.088	(248.285.560)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	2			BELANJA MODAL	9.411.682.000	9.411.682.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.826.000.000	7.826.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.585.682.000	1.585.682.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	00					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	56.207.200	31.721.200	(24.486.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	56.207.200	31.721.200	(24.486.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02	5	1			BELANJA OPERASI	56.207.200	31.721.200	(24.486.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	56.207.200	31.721.200	(24.486.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	00					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	190.885.700	181.955.700	(8.930.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	190.885.700	181.955.700	(8.930.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01	5	1			BELANJA OPERASI	190.885.700	31.955.700	(158.930.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	190.885.700	31.955.700	(158.930.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01	5	2			BELANJA MODAL	0	150.000.000	150.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01	5	2	06		Belanja Modal Aset Lainnya	0	150.000.000	150.000.000	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.010.768.040	992.485.280	(18.282.760)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	00			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.000.688.040	985.295.280	(15.392.760)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.000.688.040	985.295.280	(15.392.760)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.000.688.040	235.295.280	(765.392.760)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.688.040	235.295.280	(765.392.760)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	5	2	BELANJA MODAL	0	750.000.000	750.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	5	2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	750.000.000	750.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	00			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.080.000	7.190.000	(2.890.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.080.000	7.190.000	(2.890.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04	5	1	BELANJA OPERASI	10.080.000	7.190.000	(2.890.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000	7.190.000	(2.890.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	758.242.788	252.894.476	(505.348.312)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	758.242.788	252.894.476	(505.348.312)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	758.242.788	252.894.476	(505.348.312)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	758.242.788	252.894.476	(505.348.312)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	758.242.788	252.894.476	(505.348.312)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.677.659.937	24.859.878.717	1.182.218.780	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.463.900	30.779.900	(27.684.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.265.200	15.383.200	(10.882.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	26.265.200	15.383.200	(10.882.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.265.200	15.383.200	(10.882.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.631.300	3.749.300	(5.882.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	9.631.300	3.749.300	(5.882.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.631.300	3.749.300	(5.882.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.162.000	2.162.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.162.000	2.162.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.162.000	2.162.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.709.800	1.809.800	(1.900.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	3.709.800	1.809.800	(1.900.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.709.800	1.809.800	(1.900.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.776.800	1.776.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.776.800	1.776.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.776.800	1.776.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.276.800	1.476.800	(3.800.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.276.800	1.476.800	(3.800.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.276.800	1.476.800	(3.800.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.642.000	4.422.000	(5.220.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	9.642.000	4.422.000	(5.220.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.642.000	4.422.000	(5.220.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.805.735.001	16.582.630.200	(1.223.104.801)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.778.679.801	16.555.575.000	(1.223.104.801)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	17.778.679.801	16.555.575.000	(1.223.104.801)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	17.778.679.801	16.555.575.000	(1.223.104.801)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.055.200	27.055.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	27.055.200	27.055.200	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.055.200	27.055.200	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.482.840.380	1.321.639.760	(161.200.620)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.883.000	6.883.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.883.000	6.883.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.883.000	6.883.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	563.653.900	451.283.400	(112.370.500)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	64.448.000	64.448.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.448.000	64.448.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	499.205.900	386.835.400	(112.370.500)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.205.900	386.835.400	(112.370.500)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.277.600	121.151.600	(17.126.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	138.277.600	121.151.600	(17.126.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	138.277.600	121.151.600	(17.126.000)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.688.600	7.025.000	(663.600)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	7.688.600	7.025.000	(663.600)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.688.600	7.025.000	(663.600)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	23.000.000	23.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	23.000.000	23.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000	23.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	743.337.280	712.296.760	(31.040.520)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	743.337.280	712.296.760	(31.040.520)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	743.337.280	712.296.760	(31.040.520)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	896.360.800	3.486.360.800	2.590.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	635.500.000	3.225.500.000	2.590.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	5	1	BELANJA OPERASI	550.000.000	3.140.000.000	2.590.000.000	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	5	1 05	Belanja Hibah	550.000.000	3.140.000.000	2.590.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	5	2	BELANJA MODAL	85.500.000	85.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.500.000	85.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05			Pengadaan Mebel	220.647.000	220.647.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2	BELANJA MODAL	220.647.000	220.647.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.647.000	220.647.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.213.800	40.213.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	40.213.800	40.213.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.213.800	40.213.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.213.800	40.213.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.740.128	726.728.201	988.073	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.700.000	7.700.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.700.000	7.700.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000	7.700.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.360.000	250.364.145	4.145	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	250.360.000	250.364.145	4.145	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.360.000	250.364.145	4.145	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.680.128	468.664.056	983.928	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	467.680.128	468.664.056	983.928	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	467.680.128	468.664.056	983.928	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.708.519.728	2.711.739.856	3.220.128	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.413.096	213.591.992	178.896	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	213.413.096	213.591.992	178.896	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	213.413.096	213.591.992	178.896	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.332.101.880	1.332.996.360	894.480	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.332.101.880	1.332.996.360	894.480	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.332.101.880	1.332.996.360	894.480	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.760.000	85.760.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	85.760.000	85.760.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	85.760.000	85.760.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.077.244.752	1.079.391.504	2.146.752	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	899.434.752	901.581.504	2.146.752	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	899.434.752	901.581.504	2.146.752	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2			BELANJA MODAL	177.810.000	177.810.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.810.000	177.810.000	0	
Jumlah Belanja											48.498.555.226	48.309.852.629	(188.702.597)	
Total Surplus/(Defisit)											(48.278.955.226)	(48.090.252.629)	188.702.597	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	454.479.788.507	468.272.525.758	13.792.737.251	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	26.455.837.080	40.009.778.752	13.553.941.672	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	26.455.837.080	40.009.778.752	13.553.941.672	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.137.971.336	2.385.711.072	247.739.736	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.968.121.336	2.212.061.072	243.939.736	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.968.121.336	2.212.061.072	243.939.736	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	2			BELANJA MODAL	169.850.000	173.650.000	3.800.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.850.000	173.650.000	3.800.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.547.640.140	25.685.084.440	13.137.444.300	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	12.517.960.140	25.468.220.240	12.950.260.100	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	12.517.960.140	25.468.220.240	12.950.260.100	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	2			BELANJA MODAL	29.680.000	216.864.200	187.184.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.680.000	216.864.200	187.184.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06					Pelayanan Informasi Publik	4.568.356.588	4.568.833.276	476.688	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	4.339.073.588	4.284.450.276	(54.623.312)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.339.073.588	4.284.450.276	(54.623.312)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	2			BELANJA MODAL	229.283.000	284.383.000	55.100.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.283.000	284.383.000	55.100.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	3.341.745.728	3.342.649.656	903.928	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	1			BELANJA OPERASI	3.237.886.728	3.187.837.156	(50.049.572)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	737.886.728	687.837.156	(50.049.572)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	1 05	Belanja Hibah	2.500.000.000	2.500.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	2	BELANJA MODAL	103.859.000	154.812.500	50.953.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.859.000	154.812.500	50.953.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.160.636.988	2.161.132.676	495.688	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	1.914.906.988	1.897.506.676	(17.400.312)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.914.906.988	1.897.506.676	(17.400.312)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	2	BELANJA MODAL	245.730.000	263.626.000	17.896.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.730.000	263.626.000	17.896.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.699.486.300	1.866.367.632	166.881.332	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	1.487.836.300	1.720.484.300	232.648.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.487.836.300	1.720.484.300	232.648.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	2	BELANJA MODAL	211.650.000	145.883.332	(65.766.668)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.650.000	145.883.332	(65.766.668)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	408.375.868.418	408.375.273.985	(594.433)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	00			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	408.375.868.418	408.375.273.985	(594.433)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	381.256.875.549	383.552.921.893	2.296.046.344	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.208.749.468	1.208.185.812	(563.656)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.749.468	1.208.185.812	(563.656)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2	BELANJA MODAL	380.048.126.081	382.344.736.081	2.296.610.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2 01	Belanja Modal Tanah	16.344.425.421	18.628.475.421	2.284.050.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.000.000	157.560.000	(137.440.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	363.408.700.660	363.408.700.660	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	150.000.000	150.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	15.848.234.821	13.451.504.596	(2.396.730.225)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	15.721.534.821	13.376.504.596	(2.345.030.225)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.721.534.821	13.376.504.596	(2.345.030.225)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	2	BELANJA MODAL	126.700.000	75.000.000	(51.700.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.700.000	75.000.000	(51.700.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	11.270.758.048	11.370.847.496	100.089.448	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	9.571.136.048	9.628.392.496	57.256.448	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.571.136.048	9.628.392.496	57.256.448	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	2	BELANJA MODAL	1.699.622.000	1.742.455.000	42.833.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.699.622.000	1.742.455.000	42.833.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.648.083.009	19.887.473.021	239.390.012	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.400	29.990.400	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.384.200	18.384.200	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	18.384.200	18.384.200	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.384.200	18.384.200	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.437.600	5.437.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.437.600	5.437.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.437.600	5.437.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.168.600	6.168.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	6.168.600	6.168.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.168.600	6.168.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.782.929.713	15.017.847.325	234.917.612	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.429.264.313	12.424.182.325	(1.005.081.988)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	13.429.264.313	12.424.182.325	(1.005.081.988)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	13.429.264.313	12.424.182.325	(1.005.081.988)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.353.665.400	2.593.665.000	1.239.999.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.353.665.400	2.593.665.000	1.239.999.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.665.400	58.665.000	(400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	1.295.000.000	2.535.000.000	1.240.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.124.400	604.124.400	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.244.600	5.244.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.244.600	5.244.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.244.600	5.244.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.892.500	254.892.500	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	21.942.500	21.942.500	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.942.500	21.942.500	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	232.950.000	232.950.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.950.000	232.950.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000	87.500.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	87.500.000	87.500.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000	87.500.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.247.300	22.247.300	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	22.247.300	22.247.300	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.247.300	22.247.300	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39.900.000	39.900.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	39.900.000	39.900.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000	39.900.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.340.000	194.340.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	194.340.000	194.340.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	194.340.000	194.340.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.410.800	85.410.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	05				Pengadaan Mebel	28.160.000	28.160.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	05	5	2		BELANJA MODAL	28.160.000	28.160.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.160.000	28.160.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.250.800	57.250.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	57.250.800	57.250.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.250.800	57.250.800	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.989.000	486.989.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.355.000	3.355.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.355.000	3.355.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000	3.355.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.634.000	348.634.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	348.634.000	348.634.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	348.634.000	348.634.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	135.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	135.000.000	135.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	135.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.658.638.696	3.663.111.096	4.472.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.848.366.568	1.849.618.840	1.252.272	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.848.366.568	1.849.618.840	1.252.272	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.848.366.568	1.849.618.840	1.252.272	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	7.120.000	7.120.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05	5	1	BELANJA OPERASI	7.120.000	7.120.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000	7.120.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.890.000	172.890.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	172.890.000	172.890.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	172.890.000	172.890.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.519.152.128	1.522.372.256	3.220.128	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.519.152.128	1.522.372.256	3.220.128	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.519.152.128	1.522.372.256	3.220.128	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.110.000	111.110.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	111.110.000	111.110.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.110.000	111.110.000	0	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	773.511.440	773.875.680	364.240	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	773.511.440	773.875.680	364.240	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	00			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	773.511.440	773.875.680	364.240	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	270.872.848	299.804.296	28.931.448	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	211.129.848	205.774.296	(5.355.552)	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	211.129.848	205.774.296	(5.355.552)	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	59.743.000	94.030.000	34.287.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.743.000	94.030.000	34.287.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03			Membangun Metadata Statistik Sektoral	275.848.396	261.772.292	(14.076.104)	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	189.411.396	187.660.292	(1.751.104)	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	189.411.396	187.660.292	(1.751.104)	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	2	BELANJA MODAL	86.437.000	74.112.000	(12.325.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.437.000	74.112.000	(12.325.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	226.790.196	212.299.092	(14.491.104)	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	146.791.196	146.970.092	178.896	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	146.791.196	146.970.092	178.896	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	79.999.000	65.329.000	(14.670.000)	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.999.000	65.329.000	(14.670.000)	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.154.914.696	1.154.942.992	28.296	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.154.914.696	1.154.942.992	28.296	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	00				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	670.323.048	670.412.096	89.048	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	338.188.048	338.277.496	89.448	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	326.288.048	326.377.496	89.448	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	326.288.048	326.377.496	89.448	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	11.900.000	11.900.000	0	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.900.000	11.900.000	0	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	332.135.000	332.134.600	(400)	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	332.135.000	332.134.600	(400)	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	332.135.000	332.134.600	(400)	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	00				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	484.591.648	484.530.896	(60.752)	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	484.591.648	484.530.896	(60.752)	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	212.530.648	212.469.896	(60.752)	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	212.530.648	212.469.896	(60.752)	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	272.061.000	272.061.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.061.000	272.061.000	0	
									Jumlah Belanja	456.408.214.643	470.201.344.430	13.793.129.787	
									Total Surplus/(Defisit)	(456.408.214.643)	(470.201.344.430)	(13.793.129.787)	
0	00	2.16.2.20.2.21.02.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	2.17.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	32.498.517.374	21.543.645.124	(10.954.872.250)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	275.064.140	259.249.380	(15.814.760)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.956.000	20.636.000	(7.320.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.956.000	20.636.000	(7.320.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	27.956.000	20.636.000	(7.320.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.956.000	20.636.000	(7.320.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00					Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	247.108.140	238.613.380	(8.494.760)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01					Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	247.108.140	238.613.380	(8.494.760)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	247.108.140	238.613.380	(8.494.760)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	222.108.140	213.613.380	(8.494.760)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	04		Belanja Subsidi	25.000.000	25.000.000	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.999.800	46.919.800	(3.080.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.999.800	17.119.800	(2.880.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02					Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang	19.999.800	17.119.800	(2.880.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	19.999.800	17.119.800	(2.880.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800	17.119.800	(2.880.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	00			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	29.800.000	(200.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	30.000.000	29.800.000	(200.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000	29.800.000	(200.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	29.800.000	(200.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.552.496	118.491.392	(61.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	00			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.552.496	118.491.392	(61.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.552.496	118.491.392	(61.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	118.552.496	118.491.392	(61.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	118.552.496	118.491.392	(61.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.962.539.110	3.962.718.006	178.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.962.539.110	3.962.718.006	178.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.962.539.110	3.962.718.006	178.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.962.539.110	3.962.718.006	178.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.962.539.110	3.962.718.006	178.896	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	327.995.940	316.561.180	(11.434.760)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	00				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	327.995.940	316.561.180	(11.434.760)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01				Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	204.997.544	200.525.888	(4.471.656)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	204.997.544	200.525.888	(4.471.656)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	204.997.544	150.525.888	(54.471.656)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	0	50.000.000	50.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	122.998.396	116.035.292	(6.963.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	122.998.396	116.035.292	(6.963.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	122.998.396	116.035.292	(6.963.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	0.00	00				PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.947.746.880	822.315.360	(10.125.431.520)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	00				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	10.947.746.880	822.315.360	(10.125.431.520)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10.947.746.880	822.315.360	(10.125.431.520)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.947.746.880	822.315.360	(10.125.431.520)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	947.746.880	822.315.360	(125.431.520)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	0	(10.000.000.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.816.619.008	16.017.390.006	(799.229.002)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.172.896	81.196.792	(4.976.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.809.396	78.873.292	(1.936.104)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	80.809.396	78.873.292	(1.936.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.809.396	78.873.292	(1.936.104)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.363.500	2.323.500	(3.040.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	5.363.500	2.323.500	(3.040.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.363.500	2.323.500	(3.040.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.823.127.248	13.142.384.786	(680.742.462)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.823.127.248	13.142.384.786	(680.742.462)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	13.823.127.248	13.142.384.786	(680.742.462)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	13.823.127.248	13.142.384.786	(680.742.462)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.354.800	200.674.400	(55.680.400)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.665.500	10.665.500	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.665.500	10.665.500	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.665.500	10.665.500	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.024.600	47.024.600	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	47.024.600	47.024.600	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.024.600	47.024.600	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	55.000.000	(25.000.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	80.000.000	55.000.000	(25.000.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	55.000.000	(25.000.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.187.700	12.873.300	(314.400)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	13.187.700	12.873.300	(314.400)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.187.700	12.873.300	(314.400)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.977.000	70.611.000	(30.366.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	100.977.000	70.611.000	(30.366.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.977.000	70.611.000	(30.366.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.950.800	56.940.000	(10.800)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.950.800	56.940.000	(10.800)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	56.950.800	56.940.000	(10.800)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.950.800	56.940.000	(10.800)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.449.474.492	1.390.402.984	(59.071.508)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.000	2.992.000	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.992.000	2.992.000	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.992.000	2.992.000	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.700.000	261.500.000	(58.200.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	319.700.000	261.500.000	(58.200.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	319.700.000	261.500.000	(58.200.000)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.126.782.492	1.125.910.984	(871.508)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.126.782.492	1.125.910.984	(871.508)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.126.782.492	1.125.910.984	(871.508)	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.144.538.772	1.145.791.044	1.252.272	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	845.243.584	845.959.168	715.584	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	845.243.584	845.959.168	715.584	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	845.243.584	845.959.168	715.584	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.850.000	52.850.000	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	52.850.000	52.850.000	0	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.850.000	52.850.000	0	

PROVINSI BALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.445.188	246.981.876	536.688	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	246.445.188	246.981.876	536.688	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	246.445.188	246.981.876	536.688	
Jumlah Belanja										32.498.517.374	21.543.645.124	(10.954.872.250)	
Total Surplus/(Defisit)										(32.498.517.374)	(21.543.645.124)	10.954.872.250	
0	00	2.17.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.600.000	3.600.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	3.600.000	3.600.000	0	
Jumlah Pendapatan											3.600.000	3.600.000	0	
0	00	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.651.527.160	18.450.969.438	(1.200.557.722)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	319.549.344	319.817.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	112.429.344	112.697.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	112.429.344	112.697.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	112.429.344	112.697.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	112.429.344	112.697.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	207.120.000	207.120.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	207.120.000	207.120.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	207.120.000	207.120.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	207.120.000	207.120.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	566.255.792	566.613.584	357.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	566.255.792	566.613.584	357.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	122.320.000	122.320.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	122.320.000	122.320.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	122.320.000	122.320.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	443.935.792	444.293.584	357.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	443.935.792	444.293.584	357.792	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	443.935.792	444.293.584	357.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	840.609.616	842.130.232	1.520.616	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	00				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	840.609.616	842.130.232	1.520.616	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	670.770.272	672.022.544	1.252.272	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	670.770.272	672.022.544	1.252.272	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	670.770.272	672.022.544	1.252.272	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	169.839.344	170.107.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	169.839.344	170.107.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	169.839.344	170.107.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	818.049.344	818.317.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	818.049.344	818.317.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	121.549.344	121.817.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	121.549.344	121.817.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.549.344	121.817.688	268.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	559.091.000	453.240.000	(105.851.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	559.091.000	453.240.000	(105.851.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	559.091.000	453.240.000	(105.851.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	137.409.000	243.260.000	105.851.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	137.409.000	243.260.000	105.851.000	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	137.409.000	243.260.000	105.851.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	97.028.096	97.206.992	178.896	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	00				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	97.028.096	97.206.992	178.896	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	97.028.096	97.206.992	178.896	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	97.028.096	97.206.992	178.896	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	97.028.096	97.206.992	178.896	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.010.034.968	15.806.883.254	(1.203.151.714)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.558.209.816	12.401.576.350	(1.156.633.466)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.558.209.816	12.401.576.350	(1.156.633.466)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.558.209.816	12.401.576.350	(1.156.633.466)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.558.209.816	12.401.576.350	(1.156.633.466)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.880.400	555.215.400	(31.665.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.048.600	21.048.600	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.048.600	21.048.600	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.048.600	21.048.600	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.424.000	49.424.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.424.000	49.424.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.424.000	49.424.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.000.000	76.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	76.000.000	76.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000	76.000.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.005.800	23.005.800	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	23.005.800	23.005.800	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.005.800	23.005.800	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.402.000	385.737.000	(31.665.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	417.402.000	385.737.000	(31.665.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	417.402.000	385.737.000	(31.665.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	609.410.000	592.410.000	(17.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	609.410.000	592.410.000	(17.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	2.840.000	2.840.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000	2.840.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	606.570.000	589.570.000	(17.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	446.570.000	429.570.000	(17.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000	90.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000	70.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.380.052.512	1.381.752.024	1.699.512	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000	178.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	178.000.000	178.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000	178.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.198.052.512	1.199.752.024	1.699.512	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.198.052.512	1.199.752.024	1.699.512	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.052.512	1.199.752.024	1.699.512	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.482.240	875.929.480	447.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	831.482.240	831.929.480	447.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	831.482.240	831.929.480	447.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	831.482.240	831.929.480	447.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000	44.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	44.000.000	44.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000	44.000.000	0	
Jumlah Belanja										19.651.527.160	18.450.969.438	(1.200.557.722)	
Total Surplus/(Defisit)										(19.647.927.160)	(18.447.369.438)	1.200.557.722	
0	00	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.073.792.000	1.985.492.000	(88.300.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.690.532.000	1.602.232.000	(88.300.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	383.260.000	383.260.000	0	
Jumlah Pendapatan											2.073.792.000	1.985.492.000	(88.300.000)	
0	00	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	116.047.565.671	135.230.757.125	19.183.191.454	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	70.158.487.248	90.124.075.796	19.965.588.548	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	33.842.686.392	33.469.324.584	(373.361.808)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.719.707.688	3.742.082.376	(977.625.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.719.707.688	3.742.082.376	(977.625.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.719.707.688	3.742.082.376	(977.625.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	29.122.978.704	29.727.242.208	604.263.504	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	29.122.978.704	29.727.242.208	604.263.504	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	29.122.978.704	29.727.242.208	604.263.504	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	17.976.319.276	23.208.875.152	5.232.555.876	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	16.229.823.136	21.541.474.272	5.311.651.136	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	16.229.823.136	21.541.474.272	5.311.651.136	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.229.823.136	21.541.474.272	5.311.651.136	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03					Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.746.496.140	1.667.400.880	(79.095.260)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	1.746.496.140	1.667.400.880	(79.095.260)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.496.140	1.667.400.880	(79.095.260)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18.339.481.580	33.445.876.060	15.106.394.480	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	18.339.481.580	33.445.876.060	15.106.394.480	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	18.339.481.580	33.445.876.060	15.106.394.480	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	465.881.580	466.776.060	894.480	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	05	Belanja Hibah	17.873.600.000	32.979.100.000	15.105.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	884.750.200	1.469.954.380	585.204.180	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	884.750.200	1.469.954.380	585.204.180	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	496.429.600	1.082.157.100	585.727.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	496.429.600	1.082.157.100	585.727.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	496.429.600	1.082.157.100	585.727.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	388.320.600	387.797.280	(523.320)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	388.320.600	387.797.280	(523.320)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	388.320.600	387.797.280	(523.320)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	117.634.800	216.191.400	98.556.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	00				Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	117.634.800	216.191.400	98.556.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03				Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	117.634.800	216.191.400	98.556.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	117.634.800	216.191.400	98.556.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.634.800	216.191.400	98.556.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	902.713.036	548.303.572	(354.409.464)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	423.452.840	373.625.080	(49.827.760)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02			Penetapan Cagar Budaya	423.452.840	373.625.080	(49.827.760)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	423.452.840	373.625.080	(49.827.760)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	423.452.840	373.625.080	(49.827.760)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	00			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	479.260.196	174.678.492	(304.581.704)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01			Pelindungan Cagar Budaya	247.008.696	83.940.092	(163.068.604)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	247.008.696	83.940.092	(163.068.604)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	247.008.696	83.940.092	(163.068.604)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02			Pengembangan Cagar Budaya	121.038.400	89.288.400	(31.750.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	121.038.400	89.288.400	(31.750.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	121.038.400	89.288.400	(31.750.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	04			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	111.213.100	1.450.000	(109.763.100)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	111.213.100	1.450.000	(109.763.100)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.213.100	1.450.000	(109.763.100)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.000.000.000	4.000.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	00			Pengelolaan Museum Provinsi	4.000.000.000	4.000.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1.287.424.600	1.287.424.600	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.287.424.600	1.287.424.600	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.287.424.600	1.287.424.600	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.102.670.000	2.305.270.000	202.600.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.102.670.000	2.305.270.000	202.600.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.102.670.000	2.305.270.000	202.600.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	609.905.400	407.305.400	(202.600.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	562.390.200	407.305.400	(155.084.800)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	562.390.200	407.305.400	(155.084.800)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	2	BELANJA MODAL	47.515.200	0	(47.515.200)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.515.200	0	(47.515.200)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.983.980.387	38.872.231.977	(1.111.748.410)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.397.746	170.576.642	178.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.908.596	151.087.492	178.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	150.908.596	151.087.492	178.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.908.596	151.087.492	178.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.489.150	19.489.150	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	19.489.150	19.489.150	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.489.150	19.489.150	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.085.567.129	21.275.993.851	(1.809.573.278)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.595.849.753	20.785.203.099	(1.810.646.654)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	22.595.849.753	20.785.203.099	(1.810.646.654)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	22.595.849.753	20.785.203.099	(1.810.646.654)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	479.717.376	480.790.752	1.073.376	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	479.717.376	480.790.752	1.073.376	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	479.717.376	480.790.752	1.073.376	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	10.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.736.555.640	1.670.072.140	(66.483.500)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	366.619.340	346.989.340	(19.630.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	366.619.340	346.989.340	(19.630.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	366.619.340	346.989.340	(19.630.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	570.295.900	550.295.900	(20.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	16.505.000	16.505.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.505.000	16.505.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	553.790.900	533.790.900	(20.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553.790.900	533.790.900	(20.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.500.000	307.850.000	(4.650.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	312.500.000	307.850.000	(4.650.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	312.500.000	307.850.000	(4.650.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.118.500	61.564.000	(4.554.500)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	66.118.500	61.564.000	(4.554.500)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.118.500	61.564.000	(4.554.500)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.985.900	43.985.900	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	43.985.900	43.985.900	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.985.900	43.985.900	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	15.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	362.036.000	344.387.000	(17.649.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	362.036.000	344.387.000	(17.649.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	362.036.000	344.387.000	(17.649.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	302.218.400	853.551.000	551.332.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.858.400	13.215.000	(36.643.400)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	13.215.000	13.215.000	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.215.000	13.215.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	36.643.400	0	(36.643.400)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5 2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.643.400	0	(36.643.400)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.360.000	840.336.000	587.976.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	BELANJA OPERASI	81.612.000	81.768.000	156.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.612.000	81.768.000	156.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	BELANJA MODAL	170.748.000	758.568.000	587.820.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5 2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.748.000	758.568.000	587.820.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.813.619.712	7.950.549.024	136.929.312	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.893.000	9.893.000	(5.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	14.893.000	9.893.000	(5.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.893.000	9.893.000	(5.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.952.850.000	2.072.850.000	120.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.952.850.000	2.072.850.000	120.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.952.850.000	2.072.850.000	120.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	658.360.500	701.023.500	42.663.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	264.860.500	327.523.500	62.663.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	264.860.500	327.523.500	62.663.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	2	BELANJA MODAL	393.500.000	373.500.000	(20.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5 2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	393.500.000	373.500.000	(20.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.187.516.212	5.166.782.524	(20.733.688)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	5.179.918.212	5.166.782.524	(13.135.688)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5 1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.179.918.212	5.166.782.524	(13.135.688)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	2	BELANJA MODAL	7.598.000	0	(7.598.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5 2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.598.000	0	(7.598.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.875.621.760	6.951.489.320	75.867.560	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.579.872.888	1.543.299.576	(36.573.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.579.872.888	1.543.299.576	(36.573.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.579.872.888	1.543.299.576	(36.573.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	367.945.000	282.425.000	(85.520.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	302.945.000	257.425.000	(45.520.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	302.945.000	257.425.000	(45.520.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2			BELANJA MODAL	65.000.000	25.000.000	(40.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000	0	(40.000.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000	25.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.927.803.872	5.125.764.744	197.960.872	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	3.957.803.872	4.155.764.744	197.960.872	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.957.803.872	4.155.764.744	197.960.872	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2			BELANJA MODAL	970.000.000	970.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	870.000.000	870.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000	100.000.000	0	
Jumlah Belanja											116.047.565.671	135.230.757.125	19.183.191.454	
Total Surplus/(Defisit)											(113.973.773.671)	(133.245.265.125)	(19.271.491.454)	
0	00	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	2.22.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	484.888.276.903	486.434.229.335	1.545.952.432	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	0.00	00					PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	469.391.182.940	472.474.219.724	3.083.036.784	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	00					Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	467.923.363.960	471.058.358.064	3.134.994.104	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01					Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	467.521.683.416	470.751.239.176	3.229.555.760	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	467.521.683.416	470.751.239.176	3.229.555.760	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.194.592.660	5.024.148.420	2.829.555.760	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01	5	1	05		Belanja Hibah	465.327.090.756	465.727.090.756	400.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	02					Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	401.680.544	307.118.888	(94.561.656)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	401.680.544	307.118.888	(94.561.656)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	401.680.544	307.118.888	(94.561.656)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	00					Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	889.435.088	565.044.776	(324.390.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	01					Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	444.049.500	222.647.500	(221.402.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	444.049.500	222.647.500	(221.402.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	444.049.500	222.647.500	(221.402.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	02					Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	445.385.588	342.397.276	(102.988.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	445.385.588	342.397.276	(102.988.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	445.385.588	342.397.276	(102.988.312)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	00					Penyelenggaraan Desa Adat	578.383.892	850.816.884	272.432.992	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	03					Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	578.383.892	850.816.884	272.432.992	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	03	5	1			BELANJA OPERASI	578.383.892	850.816.884	272.432.992	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	578.383.892	675.816.884	97.432.992	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	03	5	1	05		Belanja Hibah	0	175.000.000	175.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.497.093.963	13.960.009.611	(1.537.084.352)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.224.800	20.389.800	(2.835.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.160.200	15.325.200	(2.835.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	18.160.200	15.325.200	(2.835.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.160.200	15.325.200	(2.835.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.600	5.064.600	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.064.600	5.064.600	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.064.600	5.064.600	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.335.459.359	9.390.526.983	(944.932.376)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.335.459.359	9.390.526.983	(944.932.376)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.335.459.359	9.390.526.983	(944.932.376)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	10.335.459.359	9.390.526.983	(944.932.376)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	668.699.400	546.764.400	(121.935.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.432.900	6.432.900	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.432.900	6.432.900	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.432.900	6.432.900	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.303.800	34.303.800	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	34.303.800	34.303.800	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.303.800	34.303.800	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.095.700	5.095.700	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.095.700	5.095.700	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.095.700	5.095.700	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.867.000	500.932.000	(121.935.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	622.867.000	500.932.000	(121.935.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	622.867.000	500.932.000	(121.935.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.172.704.200	715.015.200	(457.689.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.704.200	715.015.200	(457.689.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	1.172.704.200	715.015.200	(457.689.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.172.704.200	715.015.200	(457.689.000)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.278.380	550.278.380	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.278.380	550.278.380	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	550.278.380	550.278.380	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	550.278.380	550.278.380	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.746.727.824	2.737.034.848	(9.692.976)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	816.923.896	860.090.792	43.166.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	816.923.896	860.090.792	43.166.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	816.923.896	860.090.792	43.166.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.929.803.928	1.876.944.056	(52.859.872)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	1.529.803.928	1.476.944.056	(52.859.872)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.529.803.928	1.476.944.056	(52.859.872)	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	400.000.000	400.000.000	0	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	400.000.000	0	
Jumlah Belanja										484.888.276.903	486.434.229.335	1.545.952.432	
Total Surplus/(Defisit)										(484.888.276.903)	(486.434.229.335)	(1.545.952.432)	
0	00	2.22.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.613.600.000	44.458.600.000	(6.155.000.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	50.613.600.000	44.458.600.000	(6.155.000.000)	
Jumlah Pendapatan											50.613.600.000	44.458.600.000	(6.155.000.000)	
0	00	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.065.115.361	27.668.412.255	(396.703.106)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	178.952.896	399.961.792	221.008.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100.000.000	320.830.000	220.830.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000	320.830.000	220.830.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	100.000.000	320.830.000	220.830.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	320.830.000	220.830.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78.952.896	79.131.792	178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78.952.896	79.131.792	178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	78.952.896	79.131.792	178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	78.952.896	79.131.792	178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	700.822.396	1.301.001.292	600.178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	624.822.396	1.225.001.292	600.178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	624.822.396	1.225.001.292	600.178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	624.822.396	1.225.001.292	600.178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	99.822.396	100.001.292	178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	05		Belanja Hibah	525.000.000	1.125.000.000	600.000.000	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.06	00				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	76.000.000	76.000.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.06	01				Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	76.000.000	76.000.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	76.000.000	76.000.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000	76.000.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	234.998.800	234.998.800	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	00				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	234.998.800	234.998.800	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	05				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	234.998.800	234.998.800	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	234.998.800	234.998.800	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	234.998.800	234.998.800	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.101.400	178.321.400	136.220.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	42.101.400	178.321.400	136.220.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	24.000.000	160.220.000	136.220.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	24.000.000	160.220.000	136.220.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	160.220.000	136.220.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	18.101.400	18.101.400	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	18.101.400	18.101.400	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.101.400	18.101.400	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.160.117.696	2.560.296.592	(599.821.104)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	00				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan	3.160.117.696	2.560.296.592	(599.821.104)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Besar				
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.155.617.696	2.555.796.592	(599.821.104)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	355.617.696	355.796.592	178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	355.617.696	355.796.592	178.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	2.800.000.000	2.200.000.000	(600.000.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.800.000.000	2.200.000.000	(600.000.000)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	4.500.000	4.500.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.748.122.173	22.993.832.379	(754.289.794)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.045.100	40.045.100	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.689.600	19.689.600	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.689.600	19.689.600	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.689.600	19.689.600	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000	1.350.000	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	1.350.000	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.955.500	14.955.500	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	14.955.500	14.955.500	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.955.500	14.955.500	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.089.377.096	18.971.643.714	(1.117.733.382)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.089.377.096	18.971.643.714	(1.117.733.382)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	20.089.377.096	18.971.643.714	(1.117.733.382)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	20.089.377.096	18.971.643.714	(1.117.733.382)	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.908.200	200.878.600	49.970.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.219.600	6.219.600	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	6.219.600	6.219.600	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.219.600	6.219.600	0	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.688.600	194.659.000	49.970.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	144.688.600	194.659.000	49.970.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	144.688.600	194.659.000	49.970.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.467.791.777	3.781.264.965	313.473.188	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.757.384	582.572.968	145.815.584	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	436.757.384	582.572.968	145.815.584	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	436.757.384	582.572.968	145.815.584	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	420.048.592	420.406.384	357.792	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Lapangan				
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	420.048.592	420.406.384	357.792	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	420.048.592	420.406.384	357.792	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.610.985.801	2.778.285.613	167.299.812	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.537.485.801	2.618.285.613	80.799.812	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.537.485.801	2.618.285.613	80.799.812	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	73.500.000	160.000.000	86.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.500.000	160.000.000	86.500.000	
Jumlah Belanja										28.065.115.361	27.668.412.255	(396.703.106)	
Total Surplus/(Defisit)										22.548.484.639	16.790.187.745	(5.758.296.894)	
0	00	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan											0	0	0	
0	00	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.151.817.368	14.188.468.756	(963.348.612)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	602.476.980	572.167.960	(30.309.020)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	47.715.600	45.555.100	(2.160.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	47.715.600	45.555.100	(2.160.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	47.715.600	45.555.100	(2.160.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.715.600	45.555.100	(2.160.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	428.022.184	422.954.768	(5.067.416)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02					Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	428.022.184	422.954.768	(5.067.416)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	428.022.184	422.954.768	(5.067.416)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	428.022.184	422.954.768	(5.067.416)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	00					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	126.739.196	103.658.092	(23.081.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04					Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	108.040.396	90.089.292	(17.951.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1			BELANJA OPERASI	108.040.396	90.089.292	(17.951.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	108.040.396	90.089.292	(17.951.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05					Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	18.698.800	13.568.800	(5.130.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1			BELANJA OPERASI	18.698.800	13.568.800	(5.130.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.698.800	13.568.800	(5.130.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	555.588.532	541.311.564	(14.276.968)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	555.588.532	541.311.564	(14.276.968)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	184.913.244	178.681.588	(6.231.656)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	184.913.244	178.681.588	(6.231.656)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	184.913.244	178.681.588	(6.231.656)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	170.527.792	162.525.584	(8.002.208)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	170.527.792	162.525.584	(8.002.208)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	170.527.792	162.525.584	(8.002.208)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	200.147.496	200.104.392	(43.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	200.147.496	200.104.392	(43.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.147.496	200.104.392	(43.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	264.380.192	229.914.784	(34.465.408)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	00				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	137.623.196	119.182.092	(18.441.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	31.823.200	24.603.200	(7.220.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	31.823.200	24.603.200	(7.220.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.823.200	24.603.200	(7.220.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	105.799.996	94.578.892	(11.221.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	105.799.996	94.578.892	(11.221.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.799.996	94.578.892	(11.221.104)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	00				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	126.756.996	110.732.692	(16.024.304)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	126.756.996	110.732.692	(16.024.304)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	126.756.996	110.732.692	(16.024.304)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.756.996	110.732.692	(16.024.304)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	570.296.980	591.765.460	21.468.480	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	570.296.980	591.765.460	21.468.480	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	176.049.944	174.038.288	(2.011.656)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	176.049.944	174.038.288	(2.011.656)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	176.049.944	174.038.288	(2.011.656)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	175.663.144	175.931.488	268.344	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	175.663.144	175.931.488	268.344	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.663.144	175.931.488	268.344	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	09				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	218.583.892	241.795.684	23.211.792	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	218.583.892	241.795.684	23.211.792	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	218.583.892	241.795.684	23.211.792	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.159.074.684	12.253.308.988	(905.765.696)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.205.094	116.418.538	(1.786.556)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.666.848	39.315.296	(1.351.552)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.666.848	39.315.296	(1.351.552)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.666.848	39.315.296	(1.351.552)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.538.246	77.103.242	(435.004)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	77.538.246	77.103.242	(435.004)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.538.246	77.103.242	(435.004)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.181.934.940	10.206.695.140	(975.239.800)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.181.934.940	10.206.695.140	(975.239.800)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.181.934.940	10.206.695.140	(975.239.800)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	11.181.934.940	10.206.695.140	(975.239.800)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.330.350	235.933.350	64.603.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.112.000	5.112.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.112.000	5.112.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.112.000	5.112.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.886.050	41.836.050	22.950.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	18.886.050	18.886.050	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.886.050	18.886.050	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	0	22.950.000	22.950.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	22.950.000	22.950.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.000.000	63.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	63.000.000	63.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000	63.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.174.300	9.174.300	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	9.174.300	9.174.300	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.174.300	9.174.300	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.220.000	2.220.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.220.000	2.220.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000	2.220.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.938.000	114.591.000	41.653.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	72.938.000	114.591.000	41.653.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.938.000	114.591.000	41.653.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.350.000	427.573.000	21.223.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.350.000	2.350.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.350.000	2.350.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000	2.350.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.000.000	116.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	116.000.000	116.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000	116.000.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.000.000	309.223.000	21.223.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	288.000.000	309.223.000	21.223.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000	309.223.000	21.223.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.281.254.300	1.266.688.960	(14.565.340)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.743.100	304.941.560	(16.801.540)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	321.743.100	304.941.560	(16.801.540)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	321.743.100	304.941.560	(16.801.540)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	936.911.200	939.147.400	2.236.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	936.911.200	939.147.400	2.236.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	936.911.200	939.147.400	2.236.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.600.000	22.600.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	22.600.000	22.600.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000	22.600.000	0	
Jumlah Belanja									15.151.817.368	14.188.468.756	(963.348.612)	
Total Surplus/(Defisit)									(15.151.817.368)	(14.188.468.756)	963.348.612	
0	00	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	896.404.500	815.150.500	(81.254.000)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	887.304.500	794.179.500	(93.125.000)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	9.100.000	20.971.000	11.871.000	
Jumlah Pendapatan											896.404.500	815.150.500	(81.254.000)	
0	00	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.965.255.704	2.813.995.008	(151.260.696)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	715.463.576	701.906.952	(13.556.624)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	00					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	715.463.576	701.906.952	(13.556.624)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02					Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	715.463.576	701.906.952	(13.556.624)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	715.463.576	701.906.952	(13.556.624)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	533.463.576	519.906.952	(13.556.624)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	05		Belanja Hibah	182.000.000	182.000.000	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	537.181.024	519.416.048	(17.764.976)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	00					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	212.369.440	203.753.880	(8.615.560)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	212.369.440	203.753.880	(8.615.560)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	212.369.440	203.753.880	(8.615.560)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	212.369.440	203.753.880	(8.615.560)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	00					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	324.811.584	315.662.168	(9.149.416)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	324.811.584	315.662.168	(9.149.416)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	324.811.584	315.662.168	(9.149.416)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	324.811.584	315.662.168	(9.149.416)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.009.850.468	890.055.636	(119.794.832)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	00				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.009.850.468	890.055.636	(119.794.832)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	155.166.444	155.434.788	268.344	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	155.166.444	155.434.788	268.344	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	155.166.444	155.434.788	268.344	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	667.744.332	547.773.364	(119.970.968)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	667.744.332	547.773.364	(119.970.968)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	667.744.332	547.773.364	(119.970.968)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	186.939.692	186.847.484	(92.208)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	186.939.692	186.847.484	(92.208)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.939.692	186.847.484	(92.208)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	702.760.636	702.616.372	(144.264)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.216.200	59.445.800	(770.400)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.016.600	5.016.600	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.016.600	5.016.600	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.016.600	5.016.600	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.508.800	13.508.800	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.508.800	13.508.800	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.508.800	13.508.800	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	32.500.000	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	32.500.000	32.500.000	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000	32.500.000	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.190.800	8.420.400	(770.400)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	9.190.800	8.420.400	(770.400)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.190.800	8.420.400	(770.400)	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.462.644	320.730.988	268.344	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.224.000	202.224.000	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	202.224.000	202.224.000	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	202.224.000	202.224.000	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.238.644	118.506.988	268.344	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	118.238.644	118.506.988	268.344	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	118.238.644	118.506.988	268.344	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.081.792	322.439.584	357.792	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.772.896	198.951.792	178.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	198.772.896	198.951.792	178.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	198.772.896	198.951.792	178.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.976.000	8.976.000	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	8.976.000	8.976.000	0	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.976.000	8.976.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.332.896	114.511.792	178.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	114.332.896	114.511.792	178.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.332.896	114.511.792	178.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	92.650.653.662	91.982.940.203	(667.713.459)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27.051.417.008	29.997.279.936	2.945.862.928	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	00			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	10.434.636.890	10.473.712.130	39.075.240	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	10.434.636.890	10.473.712.130	39.075.240	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.434.636.890	10.473.712.130	39.075.240	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	259.636.890	238.712.130	(20.924.760)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1 04	Belanja Subsidi	10.000.000.000	10.000.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1 05	Belanja Hibah	175.000.000	235.000.000	60.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	00			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	8.486.357.208	8.516.304.216	29.947.008	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	2.359.748.116	2.351.008.732	(8.739.384)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	685.249.416	676.510.032	(8.739.384)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	685.249.416	676.510.032	(8.739.384)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2	BELANJA MODAL	1.674.498.700	1.674.498.700	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.674.498.700	1.674.498.700	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	2.257.556.372	2.294.558.644	37.002.272	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.237.556.372	2.274.558.644	37.002.272	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.163.306.372	2.150.308.644	(12.997.728)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1 05	Belanja Hibah	74.250.000	124.250.000	50.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	BELANJA MODAL	20.000.000	20.000.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.333.306.152	1.335.452.904	2.146.752	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.311.506.152	1.313.652.904	2.146.752	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.016.756.152	1.018.902.904	2.146.752	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	294.750.000	294.750.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	2		BELANJA MODAL	21.800.000	21.800.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.800.000	21.800.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2.535.746.568	2.535.283.936	(462.632)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.535.746.568	2.535.283.936	(462.632)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.485.746.568	2.485.283.936	(462.632)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	05	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.288.314.530	1.280.144.530	(8.170.000)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.288.314.530	1.280.144.530	(8.170.000)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.288.314.530	1.280.144.530	(8.170.000)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.288.314.530	1.280.144.530	(8.170.000)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	00				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.842.108.380	9.727.119.060	2.885.010.680	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01				Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.430.748.380	7.313.522.860	2.882.774.480	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.430.748.380	7.313.522.860	2.882.774.480	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	735.748.380	706.022.860	(29.725.520)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	05	Belanja Hibah	3.695.000.000	6.607.500.000	2.912.500.000	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.411.360.000	2.413.596.200	2.236.200	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.411.360.000	2.413.596.200	2.236.200	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.411.360.000	2.413.596.200	2.236.200	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.319.824.232	1.316.330.464	(3.493.768)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	00				Penataan Prasarana Pertanian	1.319.824.232	1.316.330.464	(3.493.768)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.123.328.992	1.124.022.984	693.992	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.123.328.992	1.124.022.984	693.992	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.828.992	1.096.522.984	693.992	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	27.500.000	27.500.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	196.495.240	192.307.480	(4.187.760)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	196.495.240	192.307.480	(4.187.760)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	196.495.240	192.307.480	(4.187.760)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	8.026.603.524	7.493.536.348	(533.067.176)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	00				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.341.410.244	6.813.548.588	(527.861.656)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01				Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	7.341.410.244	6.813.548.588	(527.861.656)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.341.410.244	6.813.548.588	(527.861.656)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.341.410.244	6.813.548.588	(527.861.656)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	00				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha	632.106.832	629.471.864	(2.634.968)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								Produk Hewan				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	296.553.840	293.561.080	(2.992.760)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	296.553.840	293.561.080	(2.992.760)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	296.553.840	293.561.080	(2.992.760)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	335.552.992	335.910.784	357.792	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	335.552.992	335.910.784	357.792	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	335.552.992	335.910.784	357.792	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	00			Kesejahteraan Hewan	53.086.448	50.515.896	(2.570.552)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02			Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	53.086.448	50.515.896	(2.570.552)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	53.086.448	50.515.896	(2.570.552)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.086.448	50.515.896	(2.570.552)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	4.307.471.268	4.289.855.636	(17.615.632)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	00			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4.307.471.268	4.289.855.636	(17.615.632)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.136.922.076	3.128.061.452	(8.860.624)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	676.026.076	661.568.952	(14.457.124)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	676.026.076	661.568.952	(14.457.124)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	2.460.896.000	2.466.492.500	5.596.500	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.460.896.000	2.466.492.500	5.596.500	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	712.954.464	709.037.528	(3.916.936)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	712.954.464	709.037.528	(3.916.936)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	712.954.464	709.037.528	(3.916.936)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	457.594.728	452.756.656	(4.838.072)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	457.594.728	452.756.656	(4.838.072)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	457.594.728	452.756.656	(4.838.072)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	0.00	00				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	338.762.336	335.788.472	(2.973.864)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	00				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	338.762.336	335.788.472	(2.973.864)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	338.762.336	335.788.472	(2.973.864)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	338.762.336	335.788.472	(2.973.864)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	338.762.336	335.788.472	(2.973.864)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.606.575.294	48.550.149.347	(3.056.425.947)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	701.484.668	685.225.836	(16.258.832)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	320.239.284	318.704.868	(1.534.416)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	320.239.284	318.704.868	(1.534.416)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	320.239.284	318.704.868	(1.534.416)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	381.245.384	366.520.968	(14.724.416)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	381.245.384	366.520.968	(14.724.416)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	381.245.384	366.520.968	(14.724.416)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.067.867.866	41.019.203.191	(3.048.664.675)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.669.999.186	40.621.390.031	(3.048.609.155)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	43.669.999.186	40.621.390.031	(3.048.609.155)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	43.669.999.186	40.621.390.031	(3.048.609.155)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	397.868.680	397.813.160	(55.520)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	397.868.680	397.813.160	(55.520)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	397.868.680	397.813.160	(55.520)	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.176.000	368.176.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.498.300	56.498.300	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	56.498.300	56.498.300	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.498.300	56.498.300	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.551.000	68.551.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	48.551.000	48.551.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.551.000	48.551.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	20.000.000	20.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	20.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.000.000	205.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	205.000.000	205.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000	205.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.126.700	38.126.700	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	38.126.700	38.126.700	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.126.700	38.126.700	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.927.736.100	1.929.972.300	2.236.200	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	941.976.000	941.976.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	941.976.000	941.976.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	941.976.000	941.976.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.760.100	987.996.300	2.236.200	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	985.760.100	987.996.300	2.236.200	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	985.760.100	987.996.300	2.236.200	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	4.541.310.660	4.547.572.020	6.261.360	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									Pemerintahan Daerah				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.524.632.604	2.526.689.908	2.057.304	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.524.632.604	2.526.689.908	2.057.304	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.524.632.604	2.526.689.908	2.057.304	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.745.240.160	1.749.265.320	4.025.160	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.715.240.160	1.719.265.320	4.025.160	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.715.240.160	1.719.265.320	4.025.160	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	30.000.000	30.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000	30.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271.437.896	271.616.792	178.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	211.437.896	211.616.792	178.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	211.437.896	211.616.792	178.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	60.000.000	60.000.000	0	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000	60.000.000	0	
Jumlah Belanja										95.615.909.366	94.796.935.211	(818.974.155)	
Total Surplus/(Defisit)										(94.719.504.866)	(93.981.784.711)	737.720.155	
0	00	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : 3.28.2.11.0.00.01 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.321.800.000	1.223.470.000	(98.330.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	129.200.000	16.870.000	(112.330.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	1.192.600.000	1.206.600.000	14.000.000	
Jumlah Pendapatan											1.321.800.000	1.223.470.000	(98.330.000)	
0	00	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.182.201.471	11.676.720.495	7.494.519.024	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	391.102.096	377.044.992	(14.057.104)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	00					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	391.102.096	377.044.992	(14.057.104)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	02					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	391.102.096	377.044.992	(14.057.104)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	391.102.096	377.044.992	(14.057.104)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	391.102.096	377.044.992	(14.057.104)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	145.838.400	139.188.400	(6.650.000)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	00					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	145.838.400	139.188.400	(6.650.000)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	37.392.200	35.112.200	(2.280.000)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	37.392.200	35.112.200	(2.280.000)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.392.200	35.112.200	(2.280.000)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	02					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	108.446.200	104.076.200	(4.370.000)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	108.446.200	104.076.200	(4.370.000)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	108.446.200	104.076.200	(4.370.000)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN	192.343.892	186.811.684	(5.532.208)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : 3.28.2.11.0.00.01 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
									PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	00				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	192.343.892	186.811.684	(5.532.208)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	192.343.892	186.811.684	(5.532.208)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	192.343.892	186.811.684	(5.532.208)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.343.892	186.811.684	(5.532.208)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.259.206.996	9.781.051.404	7.521.844.408	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	00				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.259.206.996	9.781.051.404	7.521.844.408	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03				Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	2.259.206.996	9.781.051.404	7.521.844.408	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.259.206.996	9.765.051.404	7.505.844.408	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.259.206.996	9.765.051.404	7.505.844.408	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	0	16.000.000	16.000.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	16.000.000	16.000.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.193.710.087	1.192.624.015	(1.086.072)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.392.900	76.392.900	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.492.000	5.492.000	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.492.000	5.492.000	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.492.000	5.492.000	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.651.700	16.651.700	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	16.651.700	16.651.700	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.651.700	16.651.700	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.400.000	45.400.000	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	45.400.000	45.400.000	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000	45.400.000	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.849.200	8.849.200	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : 3.28.2.11.0.00.01 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	8.849.200	8.849.200	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.849.200	8.849.200	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.653.659	448.653.659	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	448.653.659	448.653.659	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	BELANJA OPERASI	342.167.379	342.167.379	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	342.167.379	342.167.379	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	BELANJA MODAL	106.486.280	106.486.280	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.486.280	106.486.280	0	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.663.528	667.577.456	(1.086.072)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.941.288	324.477.976	536.688	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	323.941.288	324.477.976	536.688	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	323.941.288	324.477.976	536.688	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	344.722.240	343.099.480	(1.622.760)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	344.722.240	343.099.480	(1.622.760)	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	344.722.240	343.099.480	(1.622.760)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	41.896.350.384	49.201.317.975	7.304.967.591	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	122.507.596	10.546.633.232	10.424.125.636	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	00			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	122.507.596	10.546.633.232	10.424.125.636	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	122.507.596	10.546.633.232	10.424.125.636	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04	5	1	BELANJA OPERASI	122.507.596	10.546.633.232	10.424.125.636	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	122.507.596	10.546.633.232	10.424.125.636	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : 3.28.2.11.0.00.01 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	137.661.648	127.997.096	(9.664.552)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	00			Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	137.661.648	127.997.096	(9.664.552)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	137.661.648	127.997.096	(9.664.552)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	137.661.648	127.997.096	(9.664.552)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	137.661.648	127.997.096	(9.664.552)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.636.181.140	38.526.687.647	(3.109.493.493)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.827.300	31.327.300	(4.500.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.827.300	31.327.300	(4.500.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	35.827.300	31.327.300	(4.500.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.827.300	31.327.300	(4.500.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.511.646.002	33.474.863.421	(2.036.782.581)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.470.116.602	33.433.334.021	(2.036.782.581)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	35.470.116.602	33.433.334.021	(2.036.782.581)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	35.470.116.602	33.433.334.021	(2.036.782.581)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.529.400	41.529.400	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	41.529.400	41.529.400	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.529.400	41.529.400	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	746.892.700	660.702.700	(86.190.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.910.500	29.910.500	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	29.910.500	29.910.500	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.910.500	29.910.500	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.441.600	105.441.600	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : 3.28.2.11.0.00.01 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	105.441.600	105.441.600	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.441.600	105.441.600	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	233.250.000	233.250.000	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	233.250.000	233.250.000	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	233.250.000	233.250.000	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.818.600	47.818.600	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	47.818.600	47.818.600	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.818.600	47.818.600	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.150.000	61.650.000	(16.500.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	78.150.000	61.650.000	(16.500.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.150.000	61.650.000	(16.500.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.322.000	182.632.000	(69.690.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	252.322.000	182.632.000	(69.690.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	252.322.000	182.632.000	(69.690.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.248.700	113.912.700	(253.336.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	367.248.700	113.912.700	(253.336.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	BELANJA OPERASI	29.875.000	41.875.000	12.000.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.875.000	41.875.000	12.000.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	BELANJA MODAL	337.373.700	72.037.700	(265.336.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.373.700	72.037.700	(265.336.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.627.530	927.879.802	1.252.272	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.644.758	269.644.758	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	269.644.758	269.644.758	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	269.644.758	269.644.758	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : 3.28.2.11.0.00.01 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.982.772	658.235.044	1.252.272	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	656.982.772	658.235.044	1.252.272	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	656.982.772	658.235.044	1.252.272	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.047.938.908	3.318.001.724	(729.937.184)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.141.058.364	2.067.536.636	(73.521.728)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.141.058.364	2.067.536.636	(73.521.728)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.141.058.364	2.067.536.636	(73.521.728)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.000.000	0	(345.000.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	345.000.000	0	(345.000.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.000.000	0	(345.000.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.561.880.544	1.250.465.088	(311.415.456)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	1.261.880.544	1.250.465.088	(11.415.456)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.880.544	1.250.465.088	(11.415.456)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	2	BELANJA MODAL	300.000.000	0	(300.000.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000	0	(300.000.000)	
Jumlah Belanja									46.078.551.855	60.878.038.470	14.799.486.615	
Total Surplus/(Defisit)									(44.756.751.855)	(59.654.568.470)	(14.897.816.615)	
0	00	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.000.000	26.000.000	0	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	26.000.000	26.000.000	0	
Jumlah Pendapatan											26.000.000	26.000.000	0	
0	00	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	21.596.630.840	19.708.789.868	(1.887.840.972)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	263.962.088	257.658.776	(6.303.312)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	00					Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	263.962.088	257.658.776	(6.303.312)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	263.962.088	257.658.776	(6.303.312)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01	5	1			BELANJA OPERASI	263.962.088	257.658.776	(6.303.312)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	263.962.088	257.658.776	(6.303.312)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	111.485.500	108.065.500	(3.420.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	00					Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	111.485.500	108.065.500	(3.420.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02					Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	111.485.500	108.065.500	(3.420.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	111.485.500	108.065.500	(3.420.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	111.485.500	108.065.500	(3.420.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	14.629.700	8.405.700	(6.224.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	00					Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	14.629.700	8.405.700	(6.224.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05					Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	14.629.700	8.405.700	(6.224.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	14.629.700	8.405.700	(6.224.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.629.700	8.405.700	(6.224.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	0.00	00				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	793.063.540	766.581.780	(26.481.760)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	00				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	499.555.448	499.644.896	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01				Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000	456.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	456.000.000	456.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	456.000.000	456.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	02				Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	43.555.448	43.644.896	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	43.555.448	43.644.896	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.555.448	43.644.896	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	00				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	219.456.244	192.795.588	(26.660.656)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02				Pengembangan Layanan Pengujian	219.456.244	192.795.588	(26.660.656)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	219.456.244	192.795.588	(26.660.656)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	219.456.244	192.795.588	(26.660.656)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	00				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	74.051.848	74.141.296	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01				Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	74.051.848	74.141.296	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	74.051.848	74.141.296	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.051.848	74.141.296	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	0.00	00				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.385.448	48.474.896	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	00				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.385.448	48.474.896	89.448	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01				Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	48.385.448	48.474.896	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	48.385.448	48.474.896	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.385.448	48.474.896	89.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.365.104.564	18.519.603.216	(1.845.501.348)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.079.300	105.079.300	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.079.300	105.079.300	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	105.079.300	105.079.300	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.079.300	105.079.300	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.232.479.704	14.195.749.219	(2.036.730.485)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.232.479.704	14.195.749.219	(2.036.730.485)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.232.479.704	14.195.749.219	(2.036.730.485)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	16.232.479.704	14.195.749.219	(2.036.730.485)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.261.780.750	1.627.753.375	365.972.625	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.396.500	18.396.500	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.396.500	18.396.500	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.396.500	18.396.500	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	789.202.950	1.107.124.575	317.921.625	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	121.134.950	123.634.950	2.500.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.134.950	123.634.950	2.500.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	668.068.000	983.489.625	315.421.625	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	668.068.000	983.489.625	315.421.625	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.500.000	117.500.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	117.500.000	117.500.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.500.000	117.500.000	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.254.300	21.924.300	(330.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	22.254.300	21.924.300	(330.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.254.300	21.924.300	(330.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000	5.840.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.840.000	5.840.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000	5.840.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.587.000	356.968.000	48.381.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	308.587.000	356.968.000	48.381.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	308.587.000	356.968.000	48.381.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.043.000	0	(62.043.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.043.000	0	(62.043.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07	09	5	2	BELANJA MODAL	62.043.000	0	(62.043.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.043.000	0	(62.043.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.067.967.328	1.058.951.256	(9.016.072)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.000.000	322.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	322.000.000	322.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	322.000.000	322.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	512.510.928	513.494.856	983.928	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	512.510.928	513.494.856	983.928	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	512.510.928	513.494.856	983.928	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.456.400	223.456.400	(10.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	233.456.400	223.456.400	(10.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	233.456.400	223.456.400	(10.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.635.754.482	1.532.070.066	(103.684.416)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.189.201.586	1.185.338.274	(3.863.312)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.189.201.586	1.185.338.274	(3.863.312)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.189.201.586	1.185.338.274	(3.863.312)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.552.896	346.731.792	(99.821.104)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	146.552.896	146.731.792	178.896	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	146.552.896	146.731.792	178.896	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	300.000.000	200.000.000	(100.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000	200.000.000	(100.000.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.578.014.368	8.897.410.136	319.395.768	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	0.00	00				PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.056.153.372	8.387.470.644	331.317.272	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	00				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	8.056.153.372	8.387.470.644	331.317.272	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	269.057.048	269.146.496	89.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	269.057.048	269.146.496	89.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.057.048	94.146.496	89.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	05	Belanja Hibah	175.000.000	175.000.000	0	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.787.096.324	8.118.324.148	331.227.824	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.787.096.324	8.118.324.148	331.227.824	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.787.096.324	8.118.324.148	331.227.824	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	271.576.400	271.576.000	(400)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	00				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	271.576.400	271.576.000	(400)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01			Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	271.576.400	271.576.000	(400)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	271.576.400	271.576.000	(400)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	271.576.400	271.576.000	(400)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.284.596	238.363.492	(11.921.104)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.641.700	86.541.700	(9.100.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.981.700	79.851.700	(5.130.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	33.437.700	33.437.700	0	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.437.700	33.437.700	0	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	51.544.000	46.414.000	(5.130.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.544.000	46.414.000	(5.130.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000	2.100.000	0	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.100.000	2.100.000	0	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000	2.100.000	0	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	2.310.000	(1.690.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000	2.310.000	(1.690.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	2.310.000	(1.690.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.560.000	2.280.000	(2.280.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	4.560.000	2.280.000	(2.280.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000	2.280.000	(2.280.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.166.448	49.255.896	(2.910.552)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.166.448	49.255.896	(2.910.552)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	52.166.448	49.255.896	(2.910.552)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.166.448	49.255.896	(2.910.552)	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.476.448	102.565.896	89.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.476.448	102.565.896	89.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	102.476.448	102.565.896	89.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	102.476.448	102.565.896	89.448	
Jumlah Belanja										30.174.645.208	28.606.200.004	(1.568.445.204)	
Total Surplus/(Defisit)										(30.148.645.208)	(28.580.200.004)	1.568.445.204	
0	00	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	810.711.860.000	808.120.019.322	(2.591.840.678)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	810.711.860.000	808.120.019.322	(2.591.840.678)	
Jumlah Pendapatan											810.711.860.000	808.120.019.322	(2.591.840.678)	
0	00	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	717.052.284	587.451.764	(129.600.520)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	717.052.284	587.451.764	(129.600.520)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	572.702.536	476.819.568	(95.882.968)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01					Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	49.849.648	49.939.096	89.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	49.849.648	49.939.096	89.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	49.849.648	49.939.096	89.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	89.976.148	77.335.596	(12.640.552)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	89.976.148	77.335.596	(12.640.552)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	89.976.148	77.335.596	(12.640.552)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07					Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	220.400.292	236.978.980	16.578.688	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	220.400.292	236.978.980	16.578.688	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	220.400.292	236.978.980	16.578.688	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	212.476.448	112.565.896	(99.910.552)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	1			BELANJA OPERASI	37.476.448	37.565.896	89.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	37.565.896	89.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	2			BELANJA MODAL	175.000.000	75.000.000	(100.000.000)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	175.000.000	75.000.000	(100.000.000)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	00					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	144.349.748	110.632.196	(33.717.552)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	144.349.748	110.632.196	(33.717.552)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1			BELANJA OPERASI	144.349.748	110.632.196	(33.717.552)	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	144.349.748	110.632.196	(33.717.552)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	570.198.832	523.603.864	(46.594.968)	

PROVINSI BALI													
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN													
TAHUN ANGGARAN 2023													

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	570.198.832	523.603.864	(46.594.968)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	00			Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	262.363.992	253.421.784	(8.942.208)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	262.363.992	253.421.784	(8.942.208)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	262.363.992	253.421.784	(8.942.208)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	262.363.992	253.421.784	(8.942.208)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	00			Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	307.834.840	270.182.080	(37.652.760)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	40.758.200	5.958.200	(34.800.000)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	40.758.200	5.958.200	(34.800.000)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.758.200	5.958.200	(34.800.000)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	267.076.640	264.223.880	(2.852.760)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	267.076.640	264.223.880	(2.852.760)	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	267.076.640	264.223.880	(2.852.760)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00			SEKRETARIAT DAERAH	229.081.014.264	252.254.933.447	23.173.919.183	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	967.599.996	892.836.892	(74.763.104)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	00			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	409.917.448	389.750.896	(20.166.552)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	90.668.100	84.786.100	(5.882.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	75.668.100	69.786.100	(5.882.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.668.100	69.786.100	(5.882.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	2	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	85.640.000	85.640.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	70.640.000	70.640.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.640.000	70.640.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	2	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03			Penataan Analisis Jabatan	233.609.348	219.324.796	(14.284.552)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	218.609.348	204.324.796	(14.284.552)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	218.609.348	204.324.796	(14.284.552)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	00				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	557.682.548	503.085.996	(54.596.552)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	189.218.000	171.731.000	(17.487.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	189.218.000	171.731.000	(17.487.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	189.218.000	171.731.000	(17.487.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	127.751.300	119.962.300	(7.789.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	127.751.300	119.962.300	(7.789.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.751.300	119.962.300	(7.789.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	23.192.600	17.310.600	(5.882.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	23.192.600	17.310.600	(5.882.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.192.600	17.310.600	(5.882.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	87.524.900	75.760.900	(11.764.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	87.524.900	75.760.900	(11.764.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.524.900	75.760.900	(11.764.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	129.995.748	118.321.196	(11.674.552)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	129.995.748	118.321.196	(11.674.552)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.995.748	118.321.196	(11.674.552)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.790.033.828	1.687.510.156	(102.523.672)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	00				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	650.186.136	577.530.672	(72.655.464)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01				Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	462.201.436	457.785.972	(4.415.464)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	462.201.436	457.785.972	(4.415.464)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	462.201.436	457.785.972	(4.415.464)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03				Fasilitasi Penataan Wilayah	187.984.700	119.744.700	(68.240.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	187.984.700	119.744.700	(68.240.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	187.984.700	119.744.700	(68.240.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	00				Pelaksanaan Otonomi Daerah	374.943.300	374.553.300	(390.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01				Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	199.943.400	199.553.400	(390.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	199.943.400	199.553.400	(390.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	199.943.400	199.553.400	(390.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	174.999.900	174.999.900	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	174.999.900	174.999.900	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	174.999.900	174.999.900	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	00			Fasilitas Kerja Sama Daerah	764.904.392	735.426.184	(29.478.208)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01			Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	349.905.292	326.847.084	(23.058.208)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	349.905.292	326.847.084	(23.058.208)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	349.905.292	326.847.084	(23.058.208)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	414.999.100	408.579.100	(6.420.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	414.999.100	408.579.100	(6.420.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	414.999.100	408.579.100	(6.420.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	46.154.077.136	75.811.614.672	29.657.537.536	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	00			Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	17.249.908.952	23.902.023.704	6.652.114.752	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	16.549.576.216	23.272.814.832	6.723.238.616	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	16.549.576.216	23.272.814.832	6.723.238.616	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.549.576.216	23.272.814.832	6.723.238.616	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02			Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	700.332.736	629.208.872	(71.123.864)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	700.332.736	629.208.872	(71.123.864)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.332.736	629.208.872	(71.123.864)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	00			Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	28.904.168.184	51.909.590.968	23.005.422.784	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03			Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	28.904.168.184	51.909.590.968	23.005.422.784	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	28.904.168.184	51.909.590.968	23.005.422.784	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.024.718.184	3.244.740.968	220.022.784	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	5	1 05	Belanja Hibah	25.879.450.000	48.664.850.000	22.785.400.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.321.980.588	4.642.753.476	320.772.888	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	00			Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	2.133.619.504	2.135.676.808	2.057.304	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.276.799.392	1.277.157.184	357.792	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.276.799.392	1.277.157.184	357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.276.799.392	1.277.157.184	357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.550.792	161.908.584	357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	161.550.792	161.908.584	357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	161.550.792	161.908.584	357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	238.508.388	239.045.076	536.688	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	238.508.388	239.045.076	536.688	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	238.508.388	239.045.076	536.688	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	456.760.932	457.565.964	805.032	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	456.760.932	457.565.964	805.032	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	456.760.932	457.565.964	805.032	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	00			Fasilitasi Bantuan Hukum	2.188.361.084	2.507.076.668	318.715.584	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.962.905.792	2.281.263.584	318.357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.962.905.792	2.281.263.584	318.357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.962.905.792	2.281.263.584	318.357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.455.292	225.813.084	357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	225.455.292	225.813.084	357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	225.455.292	225.813.084	357.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	629.076.000	627.688.000	(1.388.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	00			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	74.814.000	74.814.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	74.814.000	74.814.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	74.814.000	74.814.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.814.000	74.814.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	00			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	482.510.000	481.654.000	(856.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	482.510.000	481.654.000	(856.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	482.510.000	481.654.000	(856.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	482.510.000	481.654.000	(856.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	00			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	71.752.000	71.220.000	(532.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	71.752.000	71.220.000	(532.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	71.752.000	71.220.000	(532.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.752.000	71.220.000	(532.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	0.00	00			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.426.645.000	3.725.179.000	(8.701.466.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	00			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	11.989.783.000	3.338.447.000	(8.651.336.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.760.000	24.680.000	(80.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	24.760.000	24.680.000	(80.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.760.000	24.680.000	(80.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	11.940.343.000	3.289.267.000	(8.651.076.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.785.344.000	999.484.000	(785.860.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.344.000	75.344.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	1.710.000.000	924.140.000	(785.860.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	2	BELANJA MODAL	10.154.999.000	2.289.783.000	(7.865.216.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.154.999.000	2.289.783.000	(7.865.216.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.680.000	24.500.000	(180.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	24.680.000	24.500.000	(180.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.680.000	24.500.000	(180.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	00			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99.608.000	99.598.000	(10.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	50.062.000	50.052.000	(10.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	50.062.000	50.052.000	(10.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.062.000	50.052.000	(10.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.546.000	49.546.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	49.546.000	49.546.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.546.000	49.546.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	00			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	337.254.000	287.134.000	(50.120.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	149.662.000	149.662.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	149.662.000	149.662.000	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.662.000	149.662.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02				Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	24.960.000	24.840.000	(120.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.960.000	24.840.000	(120.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.960.000	24.840.000	(120.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	162.632.000	112.632.000	(50.000.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	162.632.000	112.632.000	(50.000.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	162.632.000	112.632.000	(50.000.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	0.00	00				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75.060.000	73.660.000	(1.400.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	00				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.100.000	24.780.000	(320.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	25.100.000	24.780.000	(320.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	25.100.000	24.780.000	(320.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000	24.780.000	(320.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	00				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	48.880.000	(1.080.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	48.880.000	(1.080.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.960.000	48.880.000	(1.080.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.960.000	48.880.000	(1.080.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	162.716.541.716	164.793.691.251	2.077.149.535	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.083.473.190	1.082.334.390	(1.138.800)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.083.473.190	1.082.334.390	(1.138.800)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.083.473.190	1.082.334.390	(1.138.800)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.473.190	1.082.334.390	(1.138.800)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.127.088.681	59.305.552.681	(6.821.536.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.391.314.469	58.568.078.957	(6.823.235.512)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	65.391.314.469	58.568.078.957	(6.823.235.512)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	65.391.314.469	58.568.078.957	(6.823.235.512)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	735.774.212	737.473.724	1.699.512	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	735.774.212	737.473.724	1.699.512	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	735.774.212	737.473.724	1.699.512	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	00			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	504.654.924	505.817.748	1.162.824	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	504.654.924	505.817.748	1.162.824	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	504.654.924	505.817.748	1.162.824	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	504.654.924	505.817.748	1.162.824	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.383.800	4.383.800	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.383.800	4.383.800	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04	5	1	BELANJA OPERASI	4.383.800	4.383.800	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.383.800	4.383.800	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.795.706.856	28.753.901.392	6.958.194.536	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	714.618.800	684.943.792	(29.675.008)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	714.618.800	684.943.792	(29.675.008)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	714.618.800	684.943.792	(29.675.008)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.330.377.024	5.354.609.264	24.232.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	4.006.949.950	4.012.338.190	5.388.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.006.949.950	4.012.338.190	5.388.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	1.323.427.074	1.342.271.074	18.844.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.323.427.074	1.342.271.074	18.844.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.715.500	109.715.500	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	109.715.500	109.715.500	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	109.715.500	109.715.500	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.931.628.980	7.303.757.132	372.128.152	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	6.931.628.980	7.303.757.132	372.128.152	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.931.628.980	7.303.757.132	372.128.152	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.094.946.280	14.685.203.160	6.590.256.880	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	8.094.946.280	14.685.203.160	6.590.256.880	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.094.946.280	14.685.203.160	6.590.256.880	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	614.420.272	615.672.544	1.252.272	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11	5	1	BELANJA OPERASI	614.420.272	615.672.544	1.252.272	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	614.420.272	615.672.544	1.252.272	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.234.400.907	24.301.608.259	2.067.207.352	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.011.354.999	1.881.354.999	(130.000.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.011.354.999	1.881.354.999	(130.000.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.354.999	1.881.354.999	(130.000.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.252.346.500	17.438.730.644	2.186.384.144	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	15.252.346.500	17.438.730.644	2.186.384.144	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.252.346.500	17.438.730.644	2.186.384.144	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.970.699.408	4.981.522.616	10.823.208	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.970.699.408	4.981.522.616	10.823.208	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.970.699.408	4.981.522.616	10.823.208	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.901.842.925	16.509.160.852	607.317.927	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.435.620.888	2.444.068.128	8.447.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.435.620.888	2.444.068.128	8.447.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.435.620.888	2.444.068.128	8.447.240	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.861.106.038	8.339.245.806	478.139.768	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.861.106.038	8.339.245.806	478.139.768	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.861.106.038	8.339.245.806	478.139.768	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	05				Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.540.000	325.580.000	(18.960.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	344.540.000	325.580.000	(18.960.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	344.540.000	325.580.000	(18.960.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.195.575.999	5.335.266.918	139.690.919	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	1.126.444.298	4.257.766.918	3.131.322.620	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	1	01	Belanja Pegawai	6.120.000	0	(6.120.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.324.298	4.257.766.918	3.137.442.620	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	4.069.131.701	1.077.500.000	(2.991.631.701)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.282.297.117	858.500.000	(423.797.117)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.689.834.584	12.000.000	(2.677.834.584)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.000.000	207.000.000	110.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	0	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	00				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.344.477.833	7.809.506.222	465.028.389	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060	247.336.742	(12.318)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01	5	1		BELANJA OPERASI	247.349.060	247.336.742	(12.318)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01	5	1	01	Belanja Pegawai	247.349.060	247.336.742	(12.318)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.097.128.773	7.562.169.480	465.040.707	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04	5	1		BELANJA OPERASI	7.097.128.773	7.562.169.480	465.040.707	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04	5	1	01	Belanja Pegawai	7.097.128.773	7.562.169.480	465.040.707	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	00				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	24.548.756.752	23.348.134.411	(1.200.622.341)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	17.718.485.145	18.365.468.324	646.983.179	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.339.890.145	17.347.768.399	1.007.878.254	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.339.890.145	17.347.768.399	1.007.878.254	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2		BELANJA MODAL	1.378.595.000	1.017.699.925	(360.895.075)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.595.000	451.675.300	87.080.300	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	965.000.000	432.024.625	(532.975.375)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.000.000	34.000.000	(15.000.000)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	100.000.000	100.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.520.771.607	4.673.166.087	(1.847.605.520)	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.299.771.607	4.535.465.887	(1.764.305.720)	

PROVINSI BALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023														
Urusan Pemerintahan		: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH												
Organisasi		: 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah												
Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.299.771.607	4.535.465.887	(1.764.305.720)		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	2		BELANJA MODAL	221.000.000	137.700.200	(83.299.800)		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000	137.700.200	12.700.200		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.000.000	0	(96.000.000)		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	309.500.000	309.500.000	0		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03	5	1		BELANJA OPERASI	309.500.000	309.500.000	0		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	309.500.000	309.500.000	0		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	00				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	721.914.600	721.564.600	(350.000)		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	721.914.600	721.564.600	(350.000)		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02	5	1		BELANJA OPERASI	721.914.600	721.564.600	(350.000)		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	721.914.600	721.564.600	(350.000)		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	00				Fasilitasi Keprotokolan	2.449.841.248	2.451.726.896	1.885.648		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.449.841.248	2.451.726.896	1.885.648		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.449.841.248	2.451.726.896	1.885.648		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.449.841.248	2.451.726.896	1.885.648		
Jumlah Belanja										230.368.265.380	253.365.989.075	22.997.723.695		
Total Surplus/(Defisit)										580.343.594.620	554.754.030.247	(25.589.564.373)		
0	00	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0		

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI

PROVINSI BALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023															
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD															
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD															
Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
								Jumlah Pendapatan	0	0	0				
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA							
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			SEKRETARIAT DPRD	245.203.051.335	213.080.890.557	(32.122.160.778)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	156.766.477.312	121.570.324.226	(35.196.153.086)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	46.300.359.136	15.450.473.272	(30.849.885.864)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.861.127.896	1.680.007.792	(181.120.104)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.861.127.896	1.680.007.792	(181.120.104)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.861.127.896	1.680.007.792	(181.120.104)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02			Pembahasan Rancangan Perda	14.952.807.344	12.904.237.688	(2.048.569.656)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	14.952.807.344	12.904.237.688	(2.048.569.656)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	14.952.807.344	12.904.237.688	(2.048.569.656)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	28.620.375.000	0	(28.620.375.000)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	28.620.375.000	0	(28.620.375.000)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	28.620.375.000	0	(28.620.375.000)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04			Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	866.048.896	866.227.792	178.896				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	866.048.896	866.227.792	178.896				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	866.048.896	866.227.792	178.896				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00			Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.272.642.240	3.481.581.480	(4.791.060.760)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01			Pembahasan KUA dan PPAS	1.649.216.448	686.124.896	(963.091.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.649.216.448	686.124.896	(963.091.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.649.216.448	686.124.896	(963.091.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.655.856.448	113.410.896	(1.542.445.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.655.856.448	113.410.896	(1.542.445.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.655.856.448	113.410.896	(1.542.445.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03			Pembahasan APBD	1.655.856.448	1.655.945.896	89.448				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.655.856.448	1.655.945.896	89.448				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.655.856.448	1.655.945.896	89.448				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04			Pembahasan Perubahan APBD	1.655.856.448	37.565.896	(1.618.290.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.655.856.448	37.565.896	(1.618.290.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.655.856.448	37.565.896	(1.618.290.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.655.856.448	988.533.896	(667.322.552)				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	1.655.856.448	988.533.896	(667.322.552)				

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.856.448	988.533.896	(667.322.552)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	35.074.081.584	34.248.472.168	(825.609.416)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8.443.432.792	8.591.439.584	148.006.792	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.443.432.792	8.591.439.584	148.006.792	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.443.432.792	8.591.439.584	148.006.792	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8.203.947.000	7.939.499.000	(264.448.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	8.203.947.000	7.939.499.000	(264.448.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.203.947.000	7.939.499.000	(264.448.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.448.064.896	8.243.164.792	(204.900.104)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	8.448.064.896	8.243.164.792	(204.900.104)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.448.064.896	8.243.164.792	(204.900.104)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.360.256.896	8.356.584.792	(3.672.104)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	8.360.256.896	8.356.584.792	(3.672.104)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.360.256.896	8.356.584.792	(3.672.104)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.618.380.000	1.117.784.000	(500.596.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	1.618.380.000	1.117.784.000	(500.596.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.618.380.000	1.117.784.000	(500.596.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	00				Peningkatan Kapasitas DPRD	14.206.353.976	14.136.069.554	(70.284.422)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02				Pendalaman Tugas DPRD	3.946.975.344	3.702.612.688	(244.362.656)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.946.975.344	3.702.612.688	(244.362.656)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.946.975.344	3.702.612.688	(244.362.656)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.394.891.736	3.835.057.872	440.166.136	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.394.891.736	3.835.057.872	440.166.136	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.394.891.736	3.835.057.872	440.166.136	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.240.000.000	3.252.898.332	12.898.332	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	3.240.000.000	3.252.898.332	12.898.332	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000.000	3.252.898.332	12.898.332	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	900.000.000	903.582.870	3.582.870	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	900.000.000	903.582.870	3.582.870	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000	903.582.870	3.582.870	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07				Penyusunan Program Kerja DPRD	2.724.486.896	2.441.917.792	(282.569.104)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.724.486.896	2.441.917.792	(282.569.104)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.724.486.896	2.441.917.792	(282.569.104)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	00			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	39.424.297.240	40.015.618.480	591.321.240		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01			Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.285.401.896	3.285.457.792	55.896		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.285.401.896	3.285.457.792	55.896		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.285.401.896	3.285.457.792	55.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.748.616.000	2.339.613.000	590.997.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.748.616.000	2.339.613.000	590.997.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.748.616.000	2.339.613.000	590.997.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03			Pelaksanaan Reses	34.390.279.344	34.390.547.688	268.344		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1	BELANJA OPERASI	34.390.279.344	34.390.547.688	268.344		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.390.279.344	34.390.547.688	268.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	00			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	817.218.896	1.063.159.792	245.940.896		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02			Pengawasan Kode Etik DPRD	817.218.896	1.063.159.792	245.940.896		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	817.218.896	1.063.159.792	245.940.896		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	817.218.896	1.063.159.792	245.940.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	00			Fasilitasi Tugas DPRD	12.671.524.240	13.174.949.480	503.425.240		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.228.871.344	12.440.395.688	2.211.524.344		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.228.871.344	12.440.395.688	2.211.524.344		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.228.871.344	12.440.395.688	2.211.524.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.442.652.896	734.553.792	(1.708.099.104)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.442.652.896	734.553.792	(1.708.099.104)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.442.652.896	734.553.792	(1.708.099.104)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.436.574.023	91.510.566.331	3.073.992.308		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	273.534.896	382.801.792	109.266.896		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.122.448	259.779.896	103.657.448		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	156.122.448	259.779.896	103.657.448		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	156.122.448	259.779.896	103.657.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	117.412.448	123.021.896	5.609.448		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	117.412.448	123.021.896	5.609.448		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.412.448	123.021.896	5.609.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.047.632.768	9.983.108.702	(64.524.066)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.826.825.372	9.754.849.910	(71.975.462)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.826.825.372	9.754.849.910	(71.975.462)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	9.826.825.372	9.754.849.910	(71.975.462)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.662.448	118.618.896	7.956.448		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	110.662.448	118.618.896	7.956.448		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.662.448	118.618.896	7.956.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	110.144.948	109.639.896	(505.052)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	110.144.948	109.639.896	(505.052)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.144.948	109.639.896	(505.052)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.190.497.044	10.528.838.688	2.338.341.644		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.178.700	132.178.700	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	132.178.700	132.178.700	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.178.700	132.178.700	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	964.176.800	964.176.800	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	964.176.800	964.176.800	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	964.176.800	964.176.800	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.348.620.000	1.348.620.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.348.620.000	1.348.620.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.348.620.000	1.348.620.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.494.200	88.883.500	(46.610.700)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	135.494.200	88.883.500	(46.610.700)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.494.200	88.883.500	(46.610.700)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	954.480.000	954.480.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	954.480.000	954.480.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	954.480.000	954.480.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.655.547.344	7.040.499.688	2.384.952.344		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	4.655.547.344	7.040.499.688	2.384.952.344		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.655.547.344	7.040.499.688	2.384.952.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	761.591.000	486.176.000	(275.415.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	761.591.000	486.176.000	(275.415.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	5.000.000	0	(5.000.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	0	(5.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	756.591.000	486.176.000	(270.415.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	756.591.000	486.176.000	(270.415.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.587.479.532	2.593.520.764	6.041.232		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	13.000.000	3.000.000		

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	13.000.000	3.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	13.000.000	3.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000	900.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	900.000.000	900.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000	900.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.677.479.532	1.680.520.764	3.041.232	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.677.479.532	1.680.520.764	3.041.232	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.479.532	1.680.520.764	3.041.232	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.270.461.896	5.021.628.642	751.166.746	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.413.751.896	3.416.166.992	2.415.096	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.413.751.896	3.416.166.992	2.415.096	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.413.751.896	3.416.166.992	2.415.096	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.640.000	917.391.650	738.751.650	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	178.640.000	238.499.000	59.859.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	178.640.000	238.499.000	59.859.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	0	678.892.650	678.892.650	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	678.892.650	678.892.650	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.070.000	688.070.000	10.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	678.070.000	688.070.000	10.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	678.070.000	688.070.000	10.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	00			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60.382.611.479	60.600.467.927	217.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.289.033.531	58.289.033.531	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	5	1	BELANJA OPERASI	58.289.033.531	58.289.033.531	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	5	1 01	Belanja Pegawai	58.289.033.531	58.289.033.531	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.820.224.500	2.049.220.500	228.996.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.820.224.500	2.049.220.500	228.996.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.820.224.500	2.049.220.500	228.996.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	273.353.448	262.213.896	(11.139.552)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	5	1	BELANJA OPERASI	273.353.448	262.213.896	(11.139.552)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	273.353.448	262.213.896	(11.139.552)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	00			Layanan Administrasi DPRD	1.922.765.408	1.914.023.816	(8.741.592)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02			Fasilitasi Fraksi DPRD	209.882.240	187.829.480	(22.052.760)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	5	1	BELANJA OPERASI	209.882.240	187.829.480	(22.052.760)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.882.240	187.829.480	(22.052.760)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.712.883.168	1.726.194.336	13.311.168	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.712.883.168	1.726.194.336	13.311.168	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.712.883.168	1.726.194.336	13.311.168	
Jumlah Belanja									245.203.051.335	213.080.890.557	(32.122.160.778)	
Total Surplus/(Defisit)									(245.203.051.335)	(213.080.890.557)	32.122.160.778	
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	5.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					PERENCANAAN	28.078.374.619	24.650.120.464	(3.428.254.155)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.125.180.372	4.084.069.344	(1.041.111.028)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.603.064.240	2.251.735.680	(351.328.560)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Pelaksanaan Konsultasi Publik	85.343.500	29.958.200	(55.385.300)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	85.343.500	29.958.200	(55.385.300)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	85.343.500	29.958.200	(55.385.300)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05					Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	85.140.900	33.121.600	(52.019.300)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	85.140.900	33.121.600	(52.019.300)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	85.140.900	33.121.600	(52.019.300)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.432.579.840	2.188.655.880	(243.923.960)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	2.432.579.840	2.188.655.880	(243.923.960)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.432.579.840	2.188.655.880	(243.923.960)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	744.624.244	635.504.088	(109.120.156)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	720.582.444	611.462.288	(109.120.156)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	720.582.444	611.462.288	(109.120.156)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	720.582.444	611.462.288	(109.120.156)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24.041.800	24.041.800	0	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1			BELANJA OPERASI	24.041.800	24.041.800	0	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.041.800	24.041.800	0	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	00					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.467.417.840	1.060.483.280	(406.934.560)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	532.405.200	348.510.600	(183.894.600)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	532.405.200	348.510.600	(183.894.600)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	532.405.200	348.510.600	(183.894.600)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	649.658.240	501.365.880	(148.292.360)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	649.658.240	501.365.880	(148.292.360)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	649.658.240	501.365.880	(148.292.360)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	285.354.400	210.606.800	(74.747.600)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	285.354.400	210.606.800	(74.747.600)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	285.354.400	210.606.800	(74.747.600)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	00			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	310.074.048	136.346.296	(173.727.752)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	310.074.048	136.346.296	(173.727.752)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	310.074.048	136.346.296	(173.727.752)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	310.074.048	136.346.296	(173.727.752)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.426.874.336	2.313.147.072	(113.727.264)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	823.391.428	788.301.156	(35.090.272)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.406.796	93.962.492	(12.444.304)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	106.406.796	93.962.492	(12.444.304)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	106.406.796	93.962.492	(12.444.304)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	86.756.396	86.472.092	(284.304)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	86.756.396	86.472.092	(284.304)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.756.396	86.472.092	(284.304)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	418.518.244	403.652.588	(14.865.656)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	418.518.244	403.652.588	(14.865.656)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	418.518.244	403.652.588	(14.865.656)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	211.709.992	204.213.984	(7.496.008)		

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	211.709.992	204.213.984	(7.496.008)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	211.709.992	204.213.984	(7.496.008)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	00			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	869.580.780	841.786.060	(27.794.720)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196.838.544	184.567.888	(12.270.656)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	196.838.544	184.567.888	(12.270.656)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	196.838.544	184.567.888	(12.270.656)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	279.870.192	433.777.784	153.907.592	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	279.870.192	433.777.784	153.907.592	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	279.870.192	433.777.784	153.907.592	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.231.748	89.456.196	(5.775.552)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	95.231.748	89.456.196	(5.775.552)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.231.748	89.456.196	(5.775.552)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	297.640.296	133.984.192	(163.656.104)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	297.640.296	133.984.192	(163.656.104)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	297.640.296	133.984.192	(163.656.104)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	00			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	733.902.128	683.059.856	(50.842.272)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.300.388	288.562.076	(16.738.312)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	305.300.388	288.562.076	(16.738.312)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	305.300.388	288.562.076	(16.738.312)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	80.429.100	72.106.100	(8.323.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	80.429.100	72.106.100	(8.323.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.429.100	72.106.100	(8.323.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	266.186.440	266.633.680	447.240	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	266.186.440	266.633.680	447.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	266.186.440	266.633.680	447.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	81.986.200	55.758.000	(26.228.200)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08	5	1	BELANJA OPERASI	81.986.200	55.758.000	(26.228.200)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.986.200	55.758.000	(26.228.200)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.526.319.911	18.252.904.048	(2.273.415.863)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.053.940	279.138.780	(90.915.160)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	238.824.240	236.163.480	(2.660.760)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	238.824.240	236.163.480	(2.660.760)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	238.824.240	236.163.480	(2.660.760)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.028.000	11.453.000	(1.575.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	13.028.000	11.453.000	(1.575.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.028.000	11.453.000	(1.575.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.028.000	6.728.000	(6.300.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	13.028.000	6.728.000	(6.300.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.028.000	6.728.000	(6.300.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.137.000	8.987.000	(3.150.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	12.137.000	8.987.000	(3.150.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.137.000	8.987.000	(3.150.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.485.600	6.335.600	(3.150.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	9.485.600	6.335.600	(3.150.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.485.600	6.335.600	(3.150.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.457.700	3.291.700	(37.166.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	40.457.700	3.291.700	(37.166.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.457.700	3.291.700	(37.166.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.093.400	6.180.000	(36.913.400)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	43.093.400	6.180.000	(36.913.400)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.093.400	6.180.000	(36.913.400)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.973.912.997	12.725.596.216	(1.248.316.781)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.653.611.913	12.404.579.548	(1.249.032.365)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.653.611.913	12.404.579.548	(1.249.032.365)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.653.611.913	12.404.579.548	(1.249.032.365)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.113.540	196.560.780	447.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	196.113.540	196.560.780	447.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	196.113.540	196.560.780	447.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	124.187.544	124.455.888	268.344	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	124.187.544	124.455.888	268.344	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.187.544	124.455.888	268.344	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.600.924.736	1.571.430.872	(29.493.864)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.411.148	47.500.596	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	47.411.148	47.500.596	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.411.148	47.500.596	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	597.109.048	534.578.496	(62.530.552)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	55.739.048	55.828.496	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.739.048	55.828.496	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	541.370.000	478.750.000	(62.620.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	541.370.000	478.750.000	(62.620.000)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.766.248	144.855.696	30.089.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	114.766.248	144.855.696	30.089.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	114.766.248	144.855.696	30.089.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.429.948	72.019.396	2.589.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	69.429.948	72.019.396	2.589.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.429.948	72.019.396	2.589.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	74.916.448	75.005.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	74.916.448	75.005.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.916.448	75.005.896	89.448	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.476.448	103.565.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	103.476.448	103.565.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	103.476.448	103.565.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.815.448	593.904.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	593.815.448	593.904.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	593.815.448	593.904.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.476.448	123.565.896	33.089.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05			Pengadaan Mebel	43.000.000	76.000.000	33.000.000		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2	BELANJA MODAL	43.000.000	76.000.000	33.000.000		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.000.000	76.000.000	33.000.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.476.448	47.565.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	37.476.448	37.565.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	37.565.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	10.000.000	10.000.000	0		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	0	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	960.327.916	961.848.532	1.520.616		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.466.448	40.555.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	40.466.448	40.555.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.466.448	40.555.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.076.448	337.165.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	337.076.448	337.165.896	89.448		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	337.076.448	337.165.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.785.020	584.126.740	1.341.720		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	582.785.020	584.126.740	1.341.720		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	582.785.020	584.126.740	1.341.720	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.530.623.874	2.591.323.752	(939.300.122)		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	812.564.480	1.013.091.960	200.527.480		

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	812.564.480	1.013.091.960	200.527.480	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	812.564.480	1.013.091.960	200.527.480	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.126.448	168.215.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	138.626.448	138.715.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	138.626.448	138.715.896	89.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2		BELANJA MODAL	29.500.000	29.500.000	0	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.500.000	29.500.000	0	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.549.932.946	1.410.015.896	(1.139.917.050)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	57.476.448	312.565.896	255.089.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.476.448	312.565.896	255.089.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	2.492.456.498	1.097.450.000	(1.395.006.498)	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.492.456.498	1.097.450.000	(1.395.006.498)	
Jumlah Belanja										28.078.374.619	24.650.120.464	(3.428.254.155)	
Total Surplus/(Defisit)										(28.078.374.619)	(24.650.120.464)	3.428.254.155	
0	00	5.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	578.937.000.000	576.277.730.202	(2.659.269.798)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	46.800.000	43.200.000	(3.600.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	578.890.200.000	576.234.530.202	(2.655.669.798)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2			PENDAPATAN TRANSFER	2.146.820.137.794	2.152.312.055.794	5.491.918.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2	01		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.146.820.137.794	2.152.312.055.794	5.491.918.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	55.708.000.000	55.194.800.000	(513.200.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	3	01		Pendapatan Hibah	55.708.000.000	55.194.800.000	(513.200.000)	
Jumlah Pendapatan											2.781.465.137.794	2.783.784.585.996	2.319.448.202	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00					KEUANGAN	1.794.724.850.634	2.080.952.836.735	286.227.986.101	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.766.331.275.332	2.054.881.447.191	288.550.171.859	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	00					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.866.178.792	1.433.522.584	(432.656.208)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	01					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	51.617.800	23.441.400	(28.176.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	51.617.800	23.441.400	(28.176.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	51.617.800	23.441.400	(28.176.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.240.000	24.318.000	(18.922.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	43.240.000	24.318.000	(18.922.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	43.240.000	24.318.000	(18.922.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	03					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.363.700	36.063.700	(311.300.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	347.363.700	36.063.700	(311.300.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	347.363.700	36.063.700	(311.300.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	04					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	80.598.400	14.098.400	(66.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	80.598.400	14.098.400	(66.500.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	80.598.400	14.098.400	(66.500.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	691.430.696	802.613.992	111.183.296	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	691.430.696	802.613.992	111.183.296	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	691.430.696	802.613.992	111.183.296	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	651.928.196	532.987.092	(118.941.104)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	651.928.196	532.987.092	(118.941.104)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	651.928.196	532.987.092	(118.941.104)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	00				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	823.865.900	775.761.900	(48.104.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	153.315.500	153.315.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	153.315.500	153.315.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	153.315.500	153.315.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	03				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	141.674.500	141.674.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	141.674.500	141.674.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	141.674.500	141.674.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	04				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	156.031.400	156.031.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	156.031.400	156.031.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	156.031.400	156.031.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	05				Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	372.844.500	324.740.500	(48.104.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	372.844.500	324.740.500	(48.104.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	372.844.500	324.740.500	(48.104.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	00			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	299.997.500	299.997.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	299.997.500	299.997.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1	BELANJA OPERASI	299.997.500	299.997.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	299.997.500	299.997.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	00			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	716.462.940	716.434.180	(28.760)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	645.759.640	645.730.880	(28.760)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	645.759.640	645.730.880	(28.760)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	645.759.640	645.730.880	(28.760)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	70.703.300	70.703.300	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1	BELANJA OPERASI	70.703.300	70.703.300	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.703.300	70.703.300	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	00			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.761.472.252.400	2.051.071.213.227	289.598.960.827	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.775.000.000	2.775.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04	5	1	BELANJA OPERASI	2.775.000.000	2.775.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000.000	2.775.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	521.974.803.508	522.374.803.508	400.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08	5	4	BELANJA TRANSFER	521.974.803.508	522.374.803.508	400.000.000	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08	5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	521.974.803.508	522.374.803.508	400.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000	15.828.456.983	(34.171.543.017)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09	5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000	15.828.456.983	(34.171.543.017)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09	5	3	01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	15.828.456.983	(34.171.543.017)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.186.722.448.892	1.510.092.952.736	323.370.503.844	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10	5	4		BELANJA TRANSFER	1.186.722.448.892	1.510.092.952.736	323.370.503.844	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10	5	4	01	Belanja Bagi Hasil	1.186.722.448.892	1.510.092.952.736	323.370.503.844	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06	00				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.152.517.800	584.517.800	(568.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06	02				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.152.517.800	584.517.800	(568.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.152.517.800	584.517.800	(568.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.517.800	584.517.800	(568.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.845.994.488	3.979.530.776	133.536.288	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	00				Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.845.994.488	3.979.530.776	133.536.288	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01				Penyusunan Standar Harga	217.599.200	217.599.200	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	217.599.200	217.599.200	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.599.200	217.599.200	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05				Penatausahaan Barang Milik Daerah	517.668.800	517.668.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	517.668.800	517.668.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	517.668.800	517.668.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07				Pengamanan Barang Milik Daerah	2.349.085.900	2.082.085.500	(267.000.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.349.085.900	2.082.085.500	(267.000.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.349.085.900	2.082.085.500	(267.000.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	761.640.588	1.162.177.276	400.536.688	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	761.640.588	762.177.276	536.688	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	761.640.588	762.177.276	536.688	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	5	2	BELANJA MODAL	0	400.000.000	400.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	400.000.000	400.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.547.580.814	22.091.858.768	(2.455.722.046)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.049.400	35.049.200	(200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.049.400	35.049.200	(200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	35.049.400	35.049.200	(200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.049.400	35.049.200	(200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.363.298.334	18.130.223.150	(1.233.075.184)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.121.709.534	17.888.634.750	(1.233.074.784)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	19.121.709.534	17.888.634.750	(1.233.074.784)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	19.121.709.534	17.888.634.750	(1.233.074.784)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	241.588.800	241.588.400	(400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	241.588.800	241.588.400	(400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	241.588.800	241.588.400	(400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.521.329.628	1.520.027.714	(1.301.914)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.372.500	17.372.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	17.372.500	17.372.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.372.500	17.372.500	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.273.200	457.650.200	(1.623.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2	BELANJA MODAL	459.273.200	457.650.200	(1.623.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.273.200	457.650.200	(1.623.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	684.786.328	659.817.414	(24.968.914)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	684.786.328	659.817.414	(24.968.914)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	684.786.328	659.817.414	(24.968.914)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.179.600	31.179.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	31.179.600	31.179.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.179.600	31.179.600	0	
	5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.200.000	17.200.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	17.200.000	17.200.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000	17.200.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.385.000	88.305.000	25.920.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	62.385.000	88.305.000	25.920.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.385.000	88.305.000	25.920.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.133.000	248.503.000	(630.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	249.133.000	248.503.000	(630.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	249.133.000	248.503.000	(630.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.200.000	336.200.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.200.000	4.200.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	4.200.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332.000.000	332.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	332.000.000	332.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	332.000.000	332.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.291.703.452	2.070.358.704	(1.221.344.748)	
	5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	781.378.644	884.121.388	102.742.744	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	781.378.644	884.121.388	102.742.744	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	781.378.644	884.121.388	102.742.744	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	05				Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.337.100	150.896.200	(7.440.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	158.337.100	150.896.200	(7.440.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	158.337.100	150.896.200	(7.440.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.341.987.708	1.025.341.116	(1.316.646.592)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	969.029.708	979.617.116	10.587.408	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	969.029.708	979.617.116	10.587.408	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	1.372.958.000	45.724.000	(1.327.234.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	5.000.000	5.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.372.958.000	40.724.000	(1.332.234.000)	
									Jumlah Belanja	1.794.724.850.634	2.080.952.836.735	286.227.986.101	
									Total Surplus/(Defisit)	986.740.287.160	702.831.749.261	(283.908.537.899)	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.025.945.729.031	1.079.721.253.120	53.775.524.089	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.025.945.729.031	330.133.723.425	(695.812.005.606)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	02	Pencairan Dana Cadangan	0	78.829.667.200	78.829.667.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	670.757.862.495	670.757.862.495	
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.025.945.729.031	1.079.721.253.120	53.775.524.089	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	437.500.000.000	395.788.065.929	(41.711.934.071)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	01	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000	150.000.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000	100.000.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	187.500.000.000	145.788.065.929	(41.711.934.071)	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	437.500.000.000	395.788.065.929	(41.711.934.071)	

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.010.993.183.589	3.289.543.075.629	278.549.892.040	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	01		Pajak Daerah	2.960.437.850.589	3.238.968.237.629	278.530.387.040	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	75.600.000	76.100.000	500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	50.479.733.000	50.498.738.000	19.005.000	
Jumlah Pendapatan											3.010.993.183.589	3.289.543.075.629	278.549.892.040	
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00					KEUANGAN	167.146.292.718	166.504.107.018	(642.185.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	94.900.900	57.880.900	(37.020.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	00					Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	94.900.900	57.880.900	(37.020.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	94.900.900	57.880.900	(37.020.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	94.900.900	57.880.900	(37.020.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	94.900.900	57.880.900	(37.020.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.927.930.532	17.728.917.764	(199.012.768)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	00					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.927.930.532	17.728.917.764	(199.012.768)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	506.755.600	386.786.600	(119.969.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	506.755.600	386.786.600	(119.969.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	506.755.600	386.786.600	(119.969.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	385.828.800	282.276.800	(103.552.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	385.828.800	282.276.800	(103.552.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	385.828.800	282.276.800	(103.552.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	141.625.000	141.625.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	141.625.000	141.625.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	141.625.000	141.625.000	0	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.178.576.728	10.199.686.456	21.109.728	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	10.178.576.728	10.199.686.456	21.109.728	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.178.576.728	10.199.686.456	21.109.728	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10			Penagihan Pajak Daerah	6.465.124.304	6.530.397.608	65.273.304	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	6.465.124.304	6.530.397.608	65.273.304	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.465.124.304	6.530.397.608	65.273.304	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	213.116.600	174.174.200	(38.942.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	213.116.600	174.174.200	(38.942.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	213.116.600	174.174.200	(38.942.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	36.903.500	13.971.100	(22.932.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	36.903.500	13.971.100	(22.932.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.903.500	13.971.100	(22.932.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	149.123.461.286	148.717.308.354	(406.152.932)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.913.400	37.913.400	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.867.800	18.867.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	18.867.800	18.867.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.867.800	18.867.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.045.600	19.045.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	19.045.600	19.045.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.045.600	19.045.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	119.490.088.012	120.088.284.223	598.196.211	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119.490.088.012	120.088.284.223	598.196.211	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	119.490.088.012	120.088.284.223	598.196.211	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	119.490.088.012	120.088.284.223	598.196.211	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05	09	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.059.537.770	5.378.009.670	318.471.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.437.890	85.339.690	3.901.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	81.437.890	85.339.690	3.901.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.437.890	85.339.690	3.901.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.693.716.980	1.909.946.080	216.229.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.693.716.980	1.909.946.080	216.229.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.693.716.980	1.909.946.080	216.229.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	300.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	300.000.000	300.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	300.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.602.357.900	1.602.298.900	(59.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.602.357.900	1.602.298.900	(59.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.602.357.900	1.602.298.900	(59.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.497.000	55.497.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	55.497.000	55.497.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.497.000	55.497.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	178.353.000	179.853.000	1.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	178.353.000	179.853.000	1.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	178.353.000	179.853.000	1.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.148.175.000	1.245.075.000	96.900.000	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.148.175.000	1.245.075.000	96.900.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.148.175.000	1.245.075.000	96.900.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.424.636.000	5.723.124.680	2.298.488.680	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	559.614.000	1.068.354.000	508.740.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02	5	2	BELANJA MODAL	559.614.000	1.068.354.000	508.740.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	559.614.000	1.068.354.000	508.740.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.123.829.000	1.268.829.000	145.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06	5	2	BELANJA MODAL	1.123.829.000	1.268.829.000	145.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.123.829.000	1.268.829.000	145.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.741.193.000	3.385.941.680	1.644.748.680	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	13.000.000	25.762.181	12.762.181	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	25.762.181	12.762.181	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	1.728.193.000	3.360.179.499	1.631.986.499	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.589.053.000	2.743.170.800	1.154.117.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.140.000	593.008.699	477.868.699	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.000.000	24.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.685.718.903	4.765.718.903	80.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.656.000	14.656.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	14.656.000	14.656.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.656.000	14.656.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.620.759.304	2.700.759.304	80.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.620.759.304	2.700.759.304	80.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.620.759.304	2.700.759.304	80.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.050.303.599	2.050.303.599	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	2.050.303.599	2.050.303.599	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.303.599	2.050.303.599	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.375.567.201	12.674.257.478	(3.701.309.723)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	535.718.348	535.807.796	89.448	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	535.718.348	535.807.796	89.448	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	535.718.348	535.807.796	89.448	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.651.416.668	3.106.642.140	455.225.472	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.651.416.668	3.106.642.140	455.225.472	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.651.416.668	3.106.642.140	455.225.472	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.076.565.408	1.096.693.816	20.128.408	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	1.076.565.408	1.096.693.816	20.128.408	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.076.565.408	1.096.693.816	20.128.408	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.468.945.881	6.223.777.734	(4.245.168.147)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	4.529.448.328	4.912.197.024	382.748.696	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.529.448.328	4.912.197.024	382.748.696	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	5.939.497.553	1.311.580.710	(4.627.916.843)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.939.497.553	1.285.580.710	(4.653.916.843)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	26.000.000	26.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.642.920.896	1.711.335.992	68.415.096	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	1.642.920.896	1.711.335.992	68.415.096	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.642.920.896	1.711.335.992	68.415.096	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Belanja	167.146.292.718	166.504.107.018	(642.185.700)	
										Total Surplus/(Defisit)	2.843.846.890.871	3.123.038.968.611	279.192.077.740	
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0	

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.959.832.000	11.595.824.000	4.635.992.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	6.959.832.000	11.595.824.000	4.635.992.000	
Jumlah Pendapatan											6.959.832.000	11.595.824.000	4.635.992.000	
0	00	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00					KEPEGAWAIAN	48.958.880.999	49.299.876.939	340.995.940	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	12.811.586.528	9.627.556.426	(3.184.030.102)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	00					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6.363.294.904	3.258.314.578	(3.104.980.326)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.072.000	8.072.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	8.072.000	8.072.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.072.000	8.072.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04					Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	6.032.281.568	2.927.475.106	(3.104.806.462)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	6.032.281.568	2.927.475.106	(3.104.806.462)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.032.281.568	2.927.475.106	(3.104.806.462)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	143.236.544	143.124.888	(111.656)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	143.236.544	143.124.888	(111.656)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	143.236.544	143.124.888	(111.656)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	179.704.792	179.642.584	(62.208)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10	5	1			BELANJA OPERASI	179.704.792	179.642.584	(62.208)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	179.704.792	179.642.584	(62.208)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	00					Mutasi dan Promosi ASN	5.324.193.044	4.475.253.388	(848.939.656)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01					Pengelolaan Mutasi ASN	82.773.148	82.862.596	89.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	82.773.148	82.862.596	89.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	82.773.148	82.862.596	89.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	109.176.448	109.145.896	(30.552)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	109.176.448	109.145.896	(30.552)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	109.176.448	109.145.896	(30.552)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03			Pengelolaan Promosi ASN	5.132.243.448	4.283.244.896	(848.998.552)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	5.132.243.448	4.283.244.896	(848.998.552)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.132.243.448	4.283.244.896	(848.998.552)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	00			Pengembangan Kompetensi ASN	598.499.692	1.429.947.484	831.447.792	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02			Pengelolaan Assessment Center	321.477.900	1.152.567.900	831.090.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	271.477.900	1.102.567.900	831.090.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	271.477.900	1.102.567.900	831.090.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	2	BELANJA MODAL	50.000.000	50.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	09			Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	113.558.896	113.737.792	178.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	09	5	1	BELANJA OPERASI	113.558.896	113.737.792	178.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.558.896	113.737.792	178.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.462.896	163.641.792	178.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14	5	1	BELANJA OPERASI	163.462.896	163.641.792	178.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	163.462.896	163.641.792	178.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	00			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	525.598.888	464.040.976	(61.557.912)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	212.495.344	168.747.288	(43.748.056)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	212.495.344	168.747.288	(43.748.056)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	212.495.344	168.747.288	(43.748.056)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	184.742.648	172.283.896	(12.458.752)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	184.742.648	172.283.896	(12.458.752)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	184.742.648	172.283.896	(12.458.752)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07			Pembinaan Disiplin ASN	109.952.896	104.601.792	(5.351.104)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07	5	1	BELANJA OPERASI	109.952.896	104.601.792	(5.351.104)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.952.896	104.601.792	(5.351.104)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.408.000	18.408.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08	5	1		BELANJA OPERASI	18.408.000	18.408.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.408.000	18.408.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.147.294.471	39.672.320.513	3.525.026.042	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.923.500	67.639.900	(7.283.600)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.000	4.500.000	(750.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.250.000	4.500.000	(750.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000	4.500.000	(750.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.168.300	3.168.300	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.168.300	3.168.300	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.168.300	3.168.300	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.250.000	2.250.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.250.000	2.250.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000	2.250.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	231.600	0	(231.600)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	231.600	0	(231.600)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	231.600	0	(231.600)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	231.600	231.600	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	231.600	231.600	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	231.600	231.600	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.292.000	29.410.000	(5.882.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	35.292.000	29.410.000	(5.882.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.292.000	29.410.000	(5.882.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.500.000	28.080.000	(420.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	28.500.000	28.080.000	(420.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000	28.080.000	(420.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.470.189.305	24.691.146.335	220.957.030	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.470.189.305	24.691.146.335	220.957.030	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	24.470.189.305	24.691.146.335	220.957.030	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	24.470.189.305	24.691.146.335	220.957.030	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.476.104	157.176.104	(192.300.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	349.476.104	157.176.104	(192.300.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05	09	5	1	BELANJA OPERASI	349.476.104	157.176.104	(192.300.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	349.476.104	157.176.104	(192.300.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.840.350	615.511.350	(179.329.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.717.500	12.717.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	12.717.500	12.717.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.717.500	12.717.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.090.050	163.090.050	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	163.090.050	163.090.050	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	163.090.050	163.090.050	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.475.000	98.475.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	98.475.000	98.475.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	98.475.000	98.475.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.677.800	20.677.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	20.677.800	20.677.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.677.800	20.677.800	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	4.800.000	(17.700.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	22.500.000	4.800.000	(17.700.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000	4.800.000	(17.700.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.380.000	315.751.000	(161.629.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	477.380.000	315.751.000	(161.629.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	477.380.000	315.751.000	(161.629.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	314.058.900	279.667.500	(34.391.400)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	314.058.900	279.667.500	(34.391.400)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	264.058.900	229.667.500	(34.391.400)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.058.900	229.667.500	(34.391.400)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.532.331.136	1.535.193.472	2.862.336	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.000.000	259.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	259.000.000	259.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	259.000.000	259.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.270.331.136	1.273.193.472	2.862.336	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.270.331.136	1.273.193.472	2.862.336	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.270.331.136	1.273.193.472	2.862.336	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.651.643.176	1.523.161.852	(128.481.324)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.142.204.176	1.023.722.852	(118.481.324)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.142.204.176	1.023.722.852	(118.481.324)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.142.204.176	1.023.722.852	(118.481.324)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	221.119.000	211.119.000	(10.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07	5	1		BELANJA OPERASI	221.119.000	211.119.000	(10.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	221.119.000	211.119.000	(10.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	150.000.000	150.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000	150.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.320.000	138.320.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	117.720.000	117.720.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.720.000	117.720.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	20.600.000	20.600.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.600.000	20.600.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	00				Peningkatan Pelayanan BLUD	6.959.832.000	10.802.824.000	3.842.992.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.959.832.000	10.802.824.000	3.842.992.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.509.832.000	10.002.824.000	3.492.992.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.509.832.000	10.002.824.000	3.492.992.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	2		BELANJA MODAL	450.000.000	800.000.000	350.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000	500.000.000	250.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000	300.000.000	120.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000	0	(20.000.000)	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	877.977.592	536.780.384	(341.197.208)	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	877.977.592	536.780.384	(341.197.208)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	00			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	877.977.592	536.780.384	(341.197.208)	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	94.092.448	94.181.896	89.448	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	94.092.448	94.181.896	89.448	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.092.448	94.181.896	89.448	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	355.699.448	294.232.896	(61.466.552)	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	355.699.448	294.232.896	(61.466.552)	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	355.699.448	294.232.896	(61.466.552)	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05			Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	428.185.696	148.365.592	(279.820.104)	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	428.185.696	148.365.592	(279.820.104)	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	428.185.696	148.365.592	(279.820.104)	
Jumlah Belanja									49.836.858.591	49.836.657.323	(201.268)	
Total Surplus/(Defisit)									(42.877.026.591)	(38.240.833.323)	4.636.193.268	
0	00	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	0	0	0	
0	00	5.05.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.859.700.589	21.300.966.174	(4.558.734.415)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.887.645.500	8.495.949.300	(3.391.696.200)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	00					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	9.787.646.500	6.883.490.500	(2.904.156.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	8.170.000.000	5.467.942.000	(2.702.058.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	8.170.000.000	5.467.942.000	(2.702.058.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.170.000.000	5.467.942.000	(2.702.058.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	850.000.000	713.786.000	(136.214.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	5	1			BELANJA OPERASI	850.000.000	713.786.000	(136.214.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	850.000.000	713.786.000	(136.214.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	12					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	379.334.600	313.450.600	(65.884.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	12	5	1			BELANJA OPERASI	379.334.600	313.450.600	(65.884.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	379.334.600	313.450.600	(65.884.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	13					Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	388.311.900	388.311.900	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	13	5	1			BELANJA OPERASI	388.311.900	388.311.900	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	388.311.900	388.311.900	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	00					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.250.000.000	1.128.685.800	(121.314.200)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	02					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	102.295.400	33.567.200	(68.728.200)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	102.295.400	33.567.200	(68.728.200)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	102.295.400	33.567.200	(68.728.200)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	04				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	500.000.000	477.560.000	(22.440.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	500.000.000	477.560.000	(22.440.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	477.560.000	(22.440.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	06				Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	300.000.000	291.390.000	(8.610.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	291.390.000	(8.610.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	291.390.000	(8.610.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	347.704.600	326.168.600	(21.536.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	347.704.600	326.168.600	(21.536.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	347.704.600	326.168.600	(21.536.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	00				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	849.999.000	483.773.000	(366.226.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	02				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	300.000.000	172.136.000	(127.864.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	172.136.000	(127.864.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	172.136.000	(127.864.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	219.999.000	62.732.000	(157.267.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	219.999.000	62.732.000	(157.267.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	219.999.000	62.732.000	(157.267.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	330.000.000	248.905.000	(81.095.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	330.000.000	248.905.000	(81.095.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000	248.905.000	(81.095.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.972.055.089	12.805.016.874	(1.167.038.215)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.271.800	36.461.800	(19.810.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.259.700	27.699.700	(17.560.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	45.259.700	27.699.700	(17.560.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.259.700	27.699.700	(17.560.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.012.100	8.762.100	(2.250.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	11.012.100	8.762.100	(2.250.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.012.100	8.762.100	(2.250.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.110.306.125	9.111.021.746	(999.284.379)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.094.047.225	9.094.762.846	(999.284.379)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.094.047.225	9.094.762.846	(999.284.379)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	10.094.047.225	9.094.762.846	(999.284.379)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.592.200	7.592.200	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	7.592.200	7.592.200	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.592.200	7.592.200	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.199.600	5.199.600	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	5.199.600	5.199.600	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.199.600	5.199.600	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.467.100	3.467.100	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	3.467.100	3.467.100	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.467.100	3.467.100	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.451.600	386.980.600	(75.471.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.958.000	21.958.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	21.958.000	21.958.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.958.000	21.958.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.749.600	54.749.600	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	54.749.600	54.749.600	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.749.600	54.749.600	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.495.000	107.495.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	107.495.000	107.495.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.495.000	107.495.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.424.000	20.424.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	20.424.000	20.424.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.424.000	20.424.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	15.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	15.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.825.000	167.354.000	(75.471.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	242.825.000	167.354.000	(75.471.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	242.825.000	167.354.000	(75.471.000)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	602.180.000	525.860.900	(76.319.100)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	05				Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	05	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	587.180.000	510.860.900	(76.319.100)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	584.180.000	507.860.900	(76.319.100)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	534.180.000	457.860.900	(76.319.100)	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	50.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.009.436	550.635.572	626.136	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	226.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	226.000.000	226.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	226.000.000	226.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.009.436	324.635.572	626.136	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	324.009.436	324.635.572	626.136	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	324.009.436	324.635.572	626.136	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.190.836.128	2.194.056.256	3.220.128	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	837.232.032	838.037.064	805.032	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	837.232.032	838.037.064	805.032	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	837.232.032	838.037.064	805.032	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.353.604.096	1.356.019.192	2.415.096	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.153.604.096	1.156.019.192	2.415.096	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.153.604.096	1.156.019.192	2.415.096	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2	BELANJA MODAL	200.000.000	200.000.000	0	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	200.000.000	0	
Jumlah Belanja									25.859.700.589	21.300.966.174	(4.558.734.415)	
Total Surplus/(Defisit)									(25.859.700.589)	(21.300.966.174)	4.558.734.415	
0	00	5.05.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94.000.000	50.000.000	(44.000.000)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	94.000.000	50.000.000	(44.000.000)	
Jumlah Pendapatan											94.000.000	50.000.000	(44.000.000)	
0	00	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					PENGELOLAAN PENGHUBUNG	8.699.475.589	9.127.472.065	427.996.476	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.071.865.180	3.326.865.180	255.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.071.865.180	3.326.865.180	255.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	220.569.600	275.569.600	55.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	45.569.600	45.569.600	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	45.569.600	45.569.600	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2			BELANJA MODAL	175.000.000	230.000.000	55.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.000.000	230.000.000	55.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	239.617.116	259.617.116	20.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	239.617.116	259.617.116	20.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	239.617.116	259.617.116	20.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.611.678.464	2.791.678.464	180.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	2.611.678.464	2.781.678.464	170.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.611.678.464	2.781.678.464	170.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2			BELANJA MODAL	0	10.000.000	10.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	10.000.000	10.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.627.610.409	5.800.606.885	172.996.476	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.877.200	4.663.200	(214.000)	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.877.200	4.663.200	(214.000)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.877.200	4.663.200	(214.000)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.877.200	4.663.200	(214.000)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.047.299.557	2.857.809.812	(189.489.745)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.299.557	2.857.809.812	(189.489.745)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.047.299.557	2.857.809.812	(189.489.745)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	3.047.299.557	2.857.809.812	(189.489.745)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.774.300	188.774.300	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.190.500	10.190.500	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.190.500	10.190.500	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.190.500	10.190.500	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.670.500	30.670.500	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	30.670.500	30.670.500	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.670.500	30.670.500	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	80.000.000	80.000.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.425.300	8.425.300	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	8.425.300	8.425.300	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.425.300	8.425.300	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.488.000	59.488.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	59.488.000	59.488.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.488.000	59.488.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.820.100	312.413.999	167.593.899	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144.820.100	312.413.999	167.593.899	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	144.820.100	312.413.999	167.593.899	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.820.100	312.413.999	167.593.899	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.787.508	1.091.793.830	13.006.322	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.990.000	6.990.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.990.000	6.990.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000	6.990.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000	225.000.000	20.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	205.000.000	225.000.000	20.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000	225.000.000	20.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.797.508	859.803.830	(6.993.678)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	866.797.508	859.803.830	(6.993.678)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	866.797.508	859.803.830	(6.993.678)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.163.051.744	1.345.151.744	182.100.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	791.759.628	881.759.628	90.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	791.759.628	881.759.628	90.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	791.759.628	881.759.628	90.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.000.000	340.000.000	60.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	180.000.000	140.000.000	(40.000.000)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	140.000.000	(40.000.000)	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	100.000.000	200.000.000	100.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	100.000.000	100.000.000	

PROVINSI BALI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000	100.000.000	0	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.292.116	123.392.116	32.100.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	91.292.116	123.392.116	32.100.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.292.116	123.392.116	32.100.000	
Jumlah Belanja										8.699.475.589	9.127.472.065	427.996.476	
Total Surplus/(Defisit)										(8.605.475.589)	(9.077.472.065)	(471.996.476)	
0	00	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

INSPEKTORAT PROVINSI BALI

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan											0	0	0	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					INSPEKTORAT DAERAH	43.485.039.356	43.271.815.993	(213.223.363)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.999.442.988	6.023.554.156	24.111.168	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.899.443.658	3.923.517.586	24.073.928	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	599.999.992	600.197.784	197.792	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	599.999.992	600.197.784	197.792	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	599.999.992	600.197.784	197.792	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	384.500.396	384.679.292	178.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	384.500.396	384.679.292	178.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	384.500.396	384.679.292	178.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Reviu Laporan Kinerja	199.999.650	199.999.650	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	199.999.650	199.999.650	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	199.999.650	199.999.650	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Reviu Laporan Keuangan	400.000.048	400.089.496	89.448	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	400.000.048	400.089.496	89.448	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	400.000.048	400.089.496	89.448	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05					Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.024.944.096	1.024.912.992	(31.104)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	1.024.944.096	1.024.912.992	(31.104)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.024.944.096	1.024.912.992	(31.104)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06					Kerjasama Pengawasan Internal	739.999.500	739.459.500	(540.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	689.999.500	689.459.500	(540.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	689.999.500	689.459.500	(540.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2			BELANJA MODAL	50.000.000	50.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	549.999.976	574.178.872	24.178.896	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	549.999.976	574.178.872	24.178.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	549.999.976	574.178.872	24.178.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	00			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.099.999.330	2.100.036.570	37.240	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	149.999.586	150.168.482	168.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	149.999.586	150.168.482	168.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.586	150.168.482	168.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.949.999.744	1.949.868.088	(131.656)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.899.999.744	1.899.868.088	(131.656)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.899.999.744	1.899.868.088	(131.656)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	BELANJA MODAL	50.000.000	50.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.580.184.426	4.206.511.802	626.327.376	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.630.311.832	2.257.780.864	627.469.032	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	530.311.944	485.244.288	(45.067.656)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	530.311.944	485.244.288	(45.067.656)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	530.311.944	485.244.288	(45.067.656)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.099.999.888	1.772.536.576	672.536.688	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.099.999.888	1.772.536.576	672.536.688	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.999.888	1.772.536.576	672.536.688	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	00			Pendampingan dan Asistensi	1.949.872.594	1.948.730.938	(1.141.656)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	649.877.394	649.725.738	(151.656)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	649.877.394	649.725.738	(151.656)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	649.877.394	649.725.738	(151.656)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	349.995.500	349.535.500	(460.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	349.995.500	349.535.500	(460.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	349.995.500	349.535.500	(460.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	799.999.800	799.909.800	(90.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	799.999.800	799.909.800	(90.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	799.999.800	799.909.800	(90.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	149.999.900	149.559.900	(440.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	149.999.900	149.559.900	(440.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.900	149.559.900	(440.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.905.411.942	33.041.750.035	(863.661.907)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.757.200	83.757.200	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.777.500	55.777.500	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	55.777.500	55.777.500	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.777.500	55.777.500	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.979.700	27.979.700	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	27.979.700	27.979.700	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.979.700	27.979.700	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.467.540.274	20.296.862.514	(170.677.760)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.467.540.274	20.296.862.514	(170.677.760)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.467.540.274	20.296.862.514	(170.677.760)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	20.467.540.274	20.296.862.514	(170.677.760)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.284.979.040	1.224.629.040	(60.350.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.992.540	25.992.540	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	25.992.540	25.992.540	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.992.540	25.992.540	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.499.100	76.499.100	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	76.499.100	76.499.100	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.499.100	76.499.100	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.990.400	149.990.400	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	149.990.400	149.990.400	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.990.400	149.990.400	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000	44.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	44.000.000	44.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000	44.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	75.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	75.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.497.000	828.147.000	(60.350.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	888.497.000	828.147.000	(60.350.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	888.497.000	828.147.000	(60.350.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.697.093.301	3.697.093.301	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.697.093.301	3.697.093.301	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	3.697.093.301	3.697.093.301	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.697.093.301	3.697.093.301	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.058.398.988	3.058.935.676	536.688	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	275.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	275.000.000	275.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	275.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.778.398.988	2.778.935.676	536.688	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	349.998.988	350.535.676	536.688	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	349.998.988	350.535.676	536.688	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	2		BELANJA MODAL	2.428.400.000	2.428.400.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.428.400.000	2.428.400.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.313.643.139	4.680.472.304	(633.170.835)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.590.703.139	1.957.085.064	(633.618.075)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.590.703.139	1.957.085.064	(633.618.075)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.590.703.139	1.957.085.064	(633.618.075)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.372.940.000	2.373.118.896	178.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	92.245.000	92.423.896	178.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	92.245.000	92.423.896	178.896	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	2.280.695.000	2.280.695.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.208.695.000	2.208.695.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.000.000	72.000.000	0	

PROVINSI BALI RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	350.268.344	268.344	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	350.000.000	350.268.344	268.344	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	350.268.344	268.344	
Jumlah Belanja										43.485.039.356	43.271.815.993	(213.223.363)	
Total Surplus/(Defisit)										(43.485.039.356)	(43.271.815.993)	213.223.363	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BALI**

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan											0	0	0	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.506.475.368	113.575.445.756	77.068.970.388	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	720.152.896	1.038.264.392	318.111.496	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	00					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	720.152.896	1.038.264.392	318.111.496	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	720.152.896	1.038.264.392	318.111.496	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	720.152.896	1.038.264.392	318.111.496	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	720.152.896	1.038.264.392	318.111.496	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	16.848.269.544	95.781.272.488	78.933.002.944	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	00					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16.848.269.544	95.781.272.488	78.933.002.944	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.848.269.544	95.781.272.488	78.933.002.944	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	16.848.269.544	95.781.272.488	78.933.002.944	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	380.414.544	483.750.288	103.335.744	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	05		Belanja Hibah	16.467.855.000	95.297.522.200	78.829.667.200	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	7.323.441.144	5.719.942.447	(1.603.498.697)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	00				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7.323.441.144	5.719.942.447	(1.603.498.697)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.323.441.144	5.719.942.447	(1.603.498.697)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	7.323.441.144	5.719.942.447	(1.603.498.697)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	410.778.744	451.047.088	40.268.344	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1	05	Belanja Hibah	6.912.662.400	5.268.895.359	(1.643.767.041)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	715.092.192	777.273.188	62.180.996	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	00				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	715.092.192	777.273.188	62.180.996	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	715.092.192	777.273.188	62.180.996	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	715.092.192	777.273.188	62.180.996	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	715.092.192	777.273.188	62.180.996	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.899.519.592	10.258.693.241	(640.826.351)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.754.400	11.754.400	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.717.600	7.717.600	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.717.600	7.717.600	0	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.717.600	7.717.600	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.036.800	4.036.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	4.036.800	4.036.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.036.800	4.036.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.055.633.324	8.030.816.149	(1.024.817.175)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.055.633.324	8.030.816.149	(1.024.817.175)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.055.633.324	8.030.816.149	(1.024.817.175)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	9.055.633.324	8.030.816.149	(1.024.817.175)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.530.800	392.024.800	86.494.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.120.000	5.120.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.120.000	5.120.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000	5.120.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.494.200	112.494.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	19.914.200	19.914.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.914.200	19.914.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	92.580.000	92.580.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.580.000	92.580.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	75.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.142.600	18.142.600	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	18.142.600	18.142.600	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.142.600	18.142.600	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0	(5.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	0	(5.000.000)	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

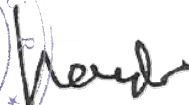
Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	0	(5.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.774.000	181.268.000	91.494.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	89.774.000	181.268.000	91.494.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	89.774.000	181.268.000	91.494.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.896.500	221.730.500	138.834.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.896.500	221.730.500	138.834.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	BELANJA MODAL	82.896.500	221.730.500	138.834.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.896.500	156.730.500	73.834.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	65.000.000	65.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.823.168	837.485.992	29.662.824	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	2.200.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.200.000	2.200.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000	2.200.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	138.500.000	28.500.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	110.000.000	138.500.000	28.500.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	138.500.000	28.500.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.623.168	696.785.992	1.162.824	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	695.623.168	696.785.992	1.162.824	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	695.623.168	696.785.992	1.162.824	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.881.400	764.881.400	129.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449.036.400	581.036.400	132.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	449.036.400	581.036.400	132.000.000	

PROVINSI BALI
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	449.036.400	581.036.400	132.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000	17.040.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	17.040.000	17.040.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000	17.040.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.875.000	149.875.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	149.875.000	149.875.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.875.000	149.875.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.930.000	16.930.000	(3.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	19.930.000	16.930.000	(3.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.930.000	16.930.000	(3.000.000)	
Jumlah Belanja									36.506.475.368	113.575.445.756	77.068.970.388		
Total Surplus/(Defisit)									(36.506.475.368)	(113.575.445.756)	(77.068.970.388)		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0		

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN IV

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.455.921.918.860	965.996.606.919	0	0	3.421.918.525.779	2.487.326.397.396	969.994.800.953	0	0	3.457.321.198.349	35.402.672.570	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.455.871.352.360	373.430.817.880	0	0	1.829.302.170.240	1.418.068.154.778	376.841.358.155	0	0	1.794.909.512.933	(34.392.657.307)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.451.720.092.276	373.310.444.880	0	0	1.825.030.537.156	1.413.913.942.910	376.720.985.155	0	0	1.790.634.928.065	(34.395.609.091)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.071.381.208.978	8.016.424.580	0	0	1.079.397.633.558	1.048.294.696.728	7.429.029.780	0	0	1.055.723.726.508	(23.673.907.050)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.561.300	0	0	0	130.561.300	130.561.300	0	0	0	130.561.300	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.469.400	0	0	0	88.469.400	0	0	0	88.469.400	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.091.900	0	0	0	42.091.900	0	0	0	42.091.900	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.058.013.831.398	0	0	0	1.058.013.831.398	1.034.318.904.068	0	0	0	1.034.318.904.068	(23.694.927.330)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.057.907.216.098	0	0	0	1.057.907.216.098	1.034.212.288.768	0	0	0	1.034.212.288.768	(23.694.927.330)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.252.800	0	0	0	22.252.800	22.252.800	0	0	0	22.252.800	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.362.500	0	0	0	84.362.500	84.362.500	0	0	0	84.362.500	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.100.000	0	0	0	52.100.000	52.100.000	0	0	0	52.100.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	52.100.000	0	0	0	52.100.000	52.100.000	0	0	0	52.100.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.975.000	0	0	0	50.975.000	50.975.000	0	0	0	50.975.000	0	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.975.000	0	0	0	50.975.000	50.975.000	0	0	0	50.975.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	848.588.050	2.267.518.400	0	0	3.116.106.450	1.061.408.050	1.817.123.600	0	0	2.878.531.650	(237.574.800)	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	292.159.400	2.267.518.400	0	0	2.559.677.800	452.159.400	1.817.123.600	0	0	2.269.283.000	(290.394.800)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.746.400	0	0	0	23.746.400	23.746.400	0	0	0	23.746.400	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250	0	0	0	31.526.250	31.526.250	0	0	0	31.526.250	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.156.000	0	0	0	501.156.000	553.976.000	0	0	0	553.976.000	52.820.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.556.750.930	0	0	0	9.556.750.930	9.702.541.210	0	0	0	9.702.541.210	145.790.280	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	716.785.650	0	0	0	716.785.650	841.555.650	0	0	0	841.555.650	124.770.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.839.965.280	0	0	0	8.839.965.280	8.860.985.560	0	0	0	8.860.985.560	21.020.280
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.728.402.300	5.748.906.180	0	0	8.477.308.480	2.978.207.100	5.611.906.180	0	0	8.590.113.280	112.804.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	733.212.800	0	0	0	733.212.800	833.212.800	0	0	0	833.212.800	100.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.412.000.000	5.748.906.180	0	0	7.160.906.180	1.586.804.800	5.611.906.180	0	0	7.198.710.980	37.804.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	583.189.500	0	0	0	583.189.500	558.189.500	0	0	0	558.189.500	(25.000.000)

PROVINSI BALI																
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
						Belanja					Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	380.276.620.398	365.294.020.300	0	0	745.570.640.698	365.556.983.282	369.291.955.375	0	0	734.848.938.657	(10.721.702.041)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	170.736.520.286	218.351.489.200	0	0	389.088.009.486	164.970.284.022	220.891.720.200	0	0	385.862.004.222	(3.226.005.264)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.226.900	116.456.460.000	0	0	116.516.686.900	60.336.900	105.425.590.000	0	0	105.485.926.900	(11.030.760.000)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	15.729.900	11.905.395.000	0	0	11.921.124.900	15.729.900	11.384.933.000	0	0	11.400.662.900	(520.462.000)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	668.000.000	0	0	668.000.000	0	668.000.000	0	0	668.000.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	0	558.578.000	0	0	558.578.000	0	558.578.000	0	0	558.578.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	558.578.000	558.578.000	0	0	1.117.156.000	558.578.000	558.578.000	0	0	1.117.156.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	0	334.906.000	0	0	334.906.000	0	334.906.000	0	0	334.906.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	2.632.733.000	0	0	2.632.733.000	0	3.558.862.229	0	0	3.558.862.229	926.129.229
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	763.164.000	6.088.193.000	0	0	6.851.357.000	763.164.000	11.075.246.841	0	0	11.838.410.841	4.987.053.841
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	365.255.000	0	0	365.255.000	0	1.919.960.930	0	0	1.919.960.930	1.554.705.930
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0	614.200.000	0	0	614.200.000	0	614.200.000	0	0	614.200.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	0	614.200.000	0	0	614.200.000	0	614.200.000	0	0	614.200.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	0	381.582.000	0	0	381.582.000	0	381.582.000	0	0	381.582.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	497.892.000	0	0	497.892.000	0	497.892.000	0	0	497.892.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.528.580.000	0	0	1.528.580.000	0	3.333.023.000	0	0	3.333.023.000	1.804.443.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 36	Pengadaan Mebel Sekolah	32.000.000	1.910.000.000	0	0	1.942.000.000	32.000.000	4.221.000.000	0	0	4.253.000.000	2.311.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.918.007.550	203.892.200	0	0	2.121.899.750	1.918.007.550	203.892.200	0	0	2.121.899.750	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	6.104.998.800	0	0	0	6.104.998.800	6.104.998.800	0	0	0	6.104.998.800	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.339.250.000	0	0	0	8.339.250.000	0	0	0	0	0	(8.339.250.000)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	114.824.800	0	0	0	114.824.800	114.824.800	0	0	0	114.824.800	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.077.887.600	0	0	0	1.077.887.600	1.077.887.600	0	0	0	1.077.887.600	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.236.970.036	0	0	0	53.236.970.036	53.333.752.772	0	0	0	53.333.752.772	96.782.736
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	292.540.000	0	0	0	292.540.000	292.540.000	0	0	0	292.540.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	410.816.500	0	0	0	410.816.500	378.706.500	0	0	0	378.706.500	(32.110.000)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	97.404.715.000	73.033.045.000	0	0	170.437.760.000	99.912.946.000	75.541.276.000	0	0	175.454.222.000	5.016.462.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	42.994.700	0	0	0	42.994.700	42.994.700	0	0	0	42.994.700	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.883.900	0	0	0	39.883.900	39.883.900	0	0	0	39.883.900	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01 62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	0	0	0	323.932.600	323.932.600	0	0	0	323.932.600	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	195.231.054.656	126.689.340.700	0	0	321.920.395.356	186.771.795.290	128.042.085.118	0	0	314.813.880.408	(7.106.514.948)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0	54.752.103.700	0	0	54.752.103.700	0	54.752.103.700	0	0	54.752.103.700	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	0	5.533.000.000	0	0	5.533.000.000	0	5.533.000.000	0	0	5.533.000.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	3.504.000.000	4.887.000.000	0	0	8.391.000.000	3.504.000.000	5.042.689.000	0	0	8.546.689.000	155.689.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	440.808.000	665.000.000	0	0	1.105.808.000	440.808.000	665.000.000	0	0	1.105.808.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0	3.090.716.000	0	0	3.090.716.000	0	3.090.716.000	0	0	3.090.716.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	225.000.000	0	0	225.000.000	0	225.000.000	0	0	225.000.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	380.400.000	1.185.000.000	0	0	1.565.400.000	380.400.000	1.185.000.000	0	0	1.565.400.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	2.475.000.000	0	0	0	2.475.000.000	2.475.000.000	0	0	0	2.475.000.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	12.730.636.600	10.000.000	0	0	12.740.636.600	2.832.136.600	10.000.000	0	0	2.842.136.600	(9.898.500.000)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.813.648.000	5.954.786.000	0	0	12.768.434.000	6.813.648.000	5.799.097.000	0	0	12.612.745.000	(155.689.000)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	142.451.000	0	0	0	142.451.000	78.611.000	0	0	0	78.611.000	(63.840.000)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	968.912.200	0	0	0	968.912.200	1.051.380.600	0	0	0	1.051.380.600	82.468.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	46.949.982.256	0	0	0	46.949.982.256	47.036.478.472	0	0	0	47.036.478.472	86.496.216
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	748.663.900	0	0	0	748.663.900	748.663.900	0	0	0	748.663.900	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	550.682.000	0	0	0	550.682.000	532.053.600	0	0	0	532.053.600	(18.628.400)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	119.164.855.000	50.386.735.000	0	0	169.551.590.000	120.517.599.418	51.739.479.418	0	0	172.257.078.836	2.705.488.836
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.083.100	0	0	0	37.083.100	37.083.100	0	0	0	37.083.100	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	0	0	0	323.932.600	323.932.600	0	0	0	323.932.600	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	14.309.045.456	20.253.190.400	0	0	34.562.235.856	13.814.903.970	20.358.150.057	0	0	34.173.054.027	(389.181.829)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	119.642.600	10.007.314.600	0	0	10.126.957.200	69.642.600	10.007.314.600	0	0	10.076.957.200	(50.000.000)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	0	1.733.000.000	0	0	1.733.000.000	0	1.253.036.589	0	0	1.253.036.589	(479.963.411)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	2.972.042.000	0	0	2.972.042.000	0	3.502.005.411	0	0	3.502.005.411	529.963.411
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	10.080.000	519.283.800	0	0	529.363.800	10.080.000	519.283.800	0	0	529.363.800	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.031.672.000	0	0	0	1.031.672.000	1.036.622.000	0	0	0	1.036.622.000	4.950.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	239.560.000	0	0	0	239.560.000	239.560.000	0	0	0	239.560.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	512.250.000	0	0	0	512.250.000	0	0	0	0	0	(512.250.000)
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	123.582.000	0	0	0	123.582.000	118.632.000	0	0	0	118.632.000	(4.950.000)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.217.700	0	0	0	467.217.700	467.217.700	0	0	0	467.217.700	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.551.968.156	0	0	0	5.551.968.156	5.565.117.012	0	0	0	5.565.117.012	13.148.856
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	259.215.500	0	0	0	259.215.500	259.215.500	0	0	0	259.215.500	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	5.959.750.000	5.021.550.000	0	0	10.981.300.000	6.014.709.658	5.076.509.657	0	0	11.091.219.315	109.919.315
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.547.900	0	0	0	16.547.900	16.547.900	0	0	0	16.547.900	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600	0	0	0	17.559.600	17.559.600	0	0	0	17.559.600	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	62.262.900	0	0	0	62.262.900	62.262.900	0	0	0	62.262.900	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	62.262.900	0	0	0	62.262.900	62.262.900	0	0	0	62.262.900	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.762.500	0	0	0	31.762.500	31.762.500	0	0	0	31.762.500	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	30.500.400	0	0	0	30.500.400	30.500.400	0	0	0	30.500.400	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001				UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	3.238.545.812	120.373.000	0	0	3.358.918.812	3.240.245.324	120.373.000	0	0	3.360.618.324	1.699.512
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	946.324.212	120.373.000	0	0	1.066.697.212	948.023.724	120.373.000	0	0	1.068.396.724	1.699.512
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.521.700	120.373.000	0	0	213.894.700	93.521.700	120.373.000	0	0	213.894.700	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.827.500	120.373.000	0	0	148.200.500	27.827.500	120.373.000	0	0	148.200.500	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.777.200	0	0	0	2.777.200	2.777.200	0	0	0	2.777.200	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.917.000	0	0	0	62.917.000	62.917.000	0	0	0	62.917.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712.052.512	0	0	0	712.052.512	713.752.024	0	0	0	713.752.024	1.699.512
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	712.052.512	0	0	0	712.052.512	713.752.024	0	0	0	713.752.024	1.699.512
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.750.000	0	0	0	140.750.000	140.750.000	0	0	0	140.750.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.340.000	0	0	0	121.340.000	121.340.000	0	0	0	121.340.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.410.000	0	0	0	14.410.000	14.410.000	0	0	0	14.410.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.292.221.600	0	0	0	2.292.221.600	2.292.221.600	0	0	0	2.292.221.600	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.248.220.800	0	0	0	1.248.220.800	1.248.220.800	0	0	0	1.248.220.800	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	554.737.200	0	0	0	554.737.200	554.737.200	0	0	0	554.737.200	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	129.726.800	0	0	0	129.726.800	129.726.800	0	0	0	129.726.800	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01	58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	281.928.100	0	0	0	281.928.100	281.928.100	0	0	0	281.928.100	0

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	281.828.700	0	0	0	281.828.700	281.828.700	0	0	0	281.828.700	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	993.371.300	0	0	0	993.371.300	993.371.300	0	0	0	993.371.300	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	366.887.000	0	0	0	366.887.000	366.887.000	0	0	0	366.887.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02	50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	118.635.500	0	0	0	118.635.500	118.635.500	0	0	0	118.635.500	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02	51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	237.391.800	0	0	0	237.391.800	237.391.800	0	0	0	237.391.800	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02	52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	270.457.000	0	0	0	270.457.000	270.457.000	0	0	0	270.457.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	50.629.500	0	0	0	50.629.500	50.629.500	0	0	0	50.629.500	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.629.500	0	0	0	50.629.500	50.629.500	0	0	0	50.629.500	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002				UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	912.714.272	0	0	0	912.714.272	913.966.544	0	0	0	913.966.544	1.252.272
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	626.607.372	0	0	0	626.607.372	627.859.644	0	0	0	627.859.644	1.252.272
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.461.200	0	0	0	40.461.200	40.461.200	0	0	0	40.461.200	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.384.800	0	0	0	8.384.800	8.384.800	0	0	0	8.384.800	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.567.400	0	0	0	6.567.400	6.567.400	0	0	0	6.567.400	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.509.000	0	0	0	25.509.000	25.509.000	0	0	0	25.509.000	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.670.272	0	0	0	524.670.272	525.922.544	0	0	0	525.922.544	1.252.272
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	524.670.272	0	0	0	524.670.272	525.922.544	0	0	0	525.922.544	1.252.272
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.475.900	0	0	0	61.475.900	61.475.900	0	0	0	61.475.900	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.475.900	0	0	0	61.475.900	61.475.900	0	0	0	61.475.900	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	207.016.500	0	0	0	207.016.500	207.016.500	0	0	0	207.016.500	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	179.548.800	0	0	0	179.548.800	179.548.800	0	0	0	179.548.800	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	132.307.900	0	0	0	132.307.900	132.307.900	0	0	0	132.307.900	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	47.240.900	0	0	0	47.240.900	47.240.900	0	0	0	47.240.900	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.467.700	0	0	0	27.467.700	27.467.700	0	0	0	27.467.700	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.467.700	0	0	0	27.467.700	27.467.700	0	0	0	27.467.700	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	79.090.400	0	0	0	79.090.400	79.090.400	0	0	0	79.090.400	0
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	79.090.400	0	0	0	79.090.400	79.090.400	0	0	0	79.090.400	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	79.090.400	0	0	0	79.090.400	79.090.400	0	0	0	79.090.400	0
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	569.089.971.911	82.147.061.703	0	0	651.237.033.614	580.062.665.036	80.955.817.607	0	0	661.018.482.643	9.781.449.029
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kesehatan	291.076.033.222	2.179.917.000	0	0	293.255.950.222	277.477.771.829	1.505.526.000	0	0	278.983.297.829	(14.272.652.393)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	255.852.190.606	1.412.702.500	0	0	257.264.893.106	238.163.872.677	738.311.500	0	0	238.902.184.177	(18.362.708.929)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.952.800	0	0	0	65.952.800	36.117.800	0	0	0	36.117.800	(29.835.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.004.000	0	0	0	44.004.000	27.084.000	0	0	0	27.084.000	(16.920.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.948.800	0	0	0	21.948.800	9.033.800	0	0	0	9.033.800	(12.915.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	229.823.996.834	0	0	0	229.823.996.834	212.248.943.673	0	0	0	212.248.943.673	(17.575.053.161)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	229.772.607.934	0	0	0	229.772.607.934	212.203.930.973	0	0	0	212.203.930.973	(17.568.676.961)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.388.900	0	0	0	51.388.900	45.012.700	0	0	0	45.012.700	(6.376.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.189.220.500	651.807.500	0	0	1.841.028.000	1.182.380.500	651.807.500	0	0	1.834.188.000	(6.840.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.100.000	651.807.500	0	0	655.907.500	4.100.000	651.807.500	0	0	655.907.500	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.185.120.500	0	0	0	1.185.120.500	1.178.280.500	0	0	0	1.178.280.500	(6.840.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	44.560.000	0	0	44.560.000	0	44.560.000	0	0	44.560.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	44.560.000	0	0	44.560.000	0	44.560.000	0	0	44.560.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.627.457.472	0	0	0	23.627.457.472	23.634.971.104	0	0	0	23.634.971.104	7.513.632
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.627.457.472	0	0	0	23.627.457.472	23.634.971.104	0	0	0	23.634.971.104	7.513.632
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.145.563.000	716.335.000	0	0	1.861.898.000	1.061.459.600	41.944.000	0	0	1.103.403.600	(758.494.400)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	443.200.000	0	0	0	443.200.000	443.200.000	0	0	0	443.200.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.988.500	0	0	0	88.988.500	84.885.100	0	0	0	84.885.100	(4.103.400)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	613.374.500	716.335.000	0	0	1.329.709.500	533.374.500	41.944.000	0	0	575.318.500	(754.391.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.804.176.316	767.214.500	0	0	32.571.390.816	37.063.179.852	767.214.500	0	0	37.830.394.352	5.259.003.536
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	31.054.857.216	767.214.500	0	0	31.822.071.716	36.980.884.352	767.214.500	0	0	37.748.098.852	5.926.027.136
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.779.162.080	0	0	0	2.779.162.080	2.951.458.880	0	0	0	2.951.458.880	172.296.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	910.780.800	0	0	0	910.780.800	8.245.343.000	767.214.500	0	0	9.012.557.500	8.101.776.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	822.475.800	0	0	0	822.475.800	307.851.600	0	0	0	307.851.600	(514.624.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.000.000	0	0	0	50.000.000	36.490.000	0	0	0	36.490.000	(13.510.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	470.062.200	0	0	0	470.062.200	32.780.000	0	0	0	32.780.000	(437.282.200)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	50.647.900	0	0	0	50.647.900	31.999.900	0	0	0	31.999.900	(18.648.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.879.370.036	767.214.500	0	0	3.646.584.536	1.245.831.572	0	0	0	1.245.831.572	(2.400.752.964)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.009.387.200	0	0	0	23.009.387.200	24.068.338.200	0	0	0	24.068.338.200	1.058.951.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	33.701.200	0	0	0	33.701.200	23.456.200	0	0	0	23.456.200	(10.245.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	49.270.000	0	0	0	49.270.000	37.335.000	0	0	0	37.335.000	(11.935.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	42.768.000	0	0	0	42.768.000	19.083.000	0	0	0	19.083.000	(23.685.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	42.768.000	0	0	0	42.768.000	19.083.000	0	0	0	19.083.000	(23.685.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	706.551.100	0	0	0	706.551.100	63.212.500	0	0	0	63.212.500	(643.338.600)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	49.636.000	0	0	0	49.636.000	30.317.400	0	0	0	30.317.400	(19.318.600)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	656.915.100	0	0	0	656.915.100	32.895.100	0	0	0	32.895.100	(624.020.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.838.446.300	0	0	0	1.838.446.300	1.351.903.300	0	0	0	1.351.903.300	(486.543.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.494.400	0	0	0	12.494.400	9.454.400	0	0	0	9.454.400	(3.040.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.494.400	0	0	0	12.494.400	9.454.400	0	0	0	9.454.400	(3.040.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.825.951.900	0	0	0	1.825.951.900	1.342.448.900	0	0	0	1.342.448.900	(483.503.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.688.566.000	0	0	0	1.688.566.000	1.295.050.000	0	0	0	1.295.050.000	(393.516.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	137.385.900	0	0	0	137.385.900	47.398.900	0	0	0	47.398.900	(89.987.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	728.589.000	0	0	0	728.589.000	120.151.000	0	0	0	120.151.000	(608.438.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	324.497.600	0	0	0	324.497.600	72.472.600	0	0	0	72.472.600	(252.025.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	324.497.600	0	0	0	324.497.600	72.472.600	0	0	0	72.472.600	(252.025.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	404.091.400	0	0	0	404.091.400	47.678.400	0	0	0	47.678.400	(356.413.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	404.091.400	0	0	0	404.091.400	47.678.400	0	0	0	47.678.400	(356.413.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	852.631.000	0	0	0	852.631.000	778.665.000	0	0	0	778.665.000	(73.966.000)

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	603.785.000	0	0	0	603.785.000	603.785.000	0	0	0	603.785.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	603.785.000	0	0	0	603.785.000	603.785.000	0	0	0	603.785.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	248.846.000	0	0	0	248.846.000	174.880.000	0	0	0	174.880.000	(73.966.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	248.846.000	0	0	0	248.846.000	174.880.000	0	0	0	174.880.000	(73.966.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001				UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	2.629.636.392	429.266.200	0	0	3.058.902.592	5.570.909.136	539.266.200	0	0	6.110.175.336	3.051.272.744
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.446.573.192	429.266.200	0	0	2.875.839.392	5.558.559.136	539.266.200	0	0	6.097.825.336	3.221.985.944
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.561.348	184.266.200	0	0	339.827.548	142.032.748	184.266.200	0	0	326.298.948	(13.528.600)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.960.800	184.266.200	0	0	200.227.000	15.960.800	184.266.200	0	0	200.227.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.600.548	0	0	0	139.600.548	126.071.948	0	0	0	126.071.948	(13.528.600)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.049.340.544	0	0	0	1.049.340.544	1.051.845.088	0	0	0	1.051.845.088	2.504.544
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.049.340.544	0	0	0	1.049.340.544	1.051.845.088	0	0	0	1.051.845.088	2.504.544
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.671.300	50.000.000	0	0	555.671.300	493.681.300	50.000.000	0	0	543.681.300	(11.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.175.000	0	0	0	39.175.000	39.175.000	0	0	0	39.175.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.900.000	0	0	0	79.900.000	67.910.000	0	0	0	67.910.000	(11.990.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	386.596.300	50.000.000	0	0	436.596.300	386.596.300	50.000.000	0	0	436.596.300	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	736.000.000	195.000.000	0	0	931.000.000	3.871.000.000	305.000.000	0	0	4.176.000.000	3.245.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	736.000.000	195.000.000	0	0	931.000.000	3.871.000.000	305.000.000	0	0	4.176.000.000	3.245.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	183.063.200	0	0	0	183.063.200	12.350.000	0	0	0	12.350.000	(170.713.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	183.063.200	0	0	0	183.063.200	12.350.000	0	0	0	12.350.000	(170.713.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	183.063.200	0	0	0	183.063.200	12.350.000	0	0	0	12.350.000	(170.713.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002				UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	9.399.147.134	1.177.369.470	0	0	10.576.516.604	10.583.258.018	1.208.537.270	0	0	11.791.795.288	1.215.278.684
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.399.147.134	930.369.470	0	0	10.329.516.604	10.583.258.018	961.537.270	0	0	11.544.795.288	1.215.278.684
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	885.619.300	842.031.200	0	0	1.727.650.500	850.319.300	623.199.000	0	0	1.473.518.300	(254.132.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	812.036.200	0	0	812.036.200	0	623.199.000	0	0	623.199.000	(188.837.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	885.619.300	29.995.000	0	0	915.614.300	850.319.300	0	0	0	850.319.300	(65.295.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.191.208.704	0	0	0	4.191.208.704	4.147.209.488	0	0	0	4.147.209.488	(43.999.216)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	572.000.000	0	0	0	572.000.000	572.000.000	0	0	0	572.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.619.208.704	0	0	0	3.619.208.704	3.575.209.488	0	0	0	3.575.209.488	(43.999.216)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.190.000	0	0	0	480.190.000	338.300.000	0	0	0	338.300.000	(141.890.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.700.000	0	0	0	224.700.000	104.700.000	0	0	0	104.700.000	(120.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.490.000	0	0	0	255.490.000	233.600.000	0	0	0	233.600.000	(21.890.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.842.129.130	88.338.270	0	0	3.930.467.400	5.247.429.230	338.338.270	0	0	5.585.767.500	1.655.300.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.842.129.130	88.338.270	0	0	3.930.467.400	5.247.429.230	338.338.270	0	0	5.585.767.500	1.655.300.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	247.000.000	0	0	247.000.000	0	247.000.000	0	0	247.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	247.000.000	0	0	247.000.000	0	247.000.000	0	0	247.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	247.000.000	0	0	247.000.000	0	247.000.000	0	0	247.000.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003				UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.364.197.352	149.250.400	0	0	2.513.447.752	2.326.400.944	155.540.400	0	0	2.481.941.344	(31.506.408)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.291.673.772	114.250.400	0	0	2.405.924.172	2.250.277.764	155.540.400	0	0	2.405.818.164	(106.008)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.623.200	64.250.400	0	0	159.873.600	90.483.200	5.540.400	0	0	96.023.600	(63.850.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.600	64.250.400	0	0	64.372.000	121.600	5.540.400	0	0	5.662.000	(58.710.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.501.600	0	0	0	95.501.600	90.361.600	0	0	0	90.361.600	(5.140.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.950.913.472	0	0	0	1.950.913.472	1.953.507.464	0	0	0	1.953.507.464	2.593.992
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.950.913.472	0	0	0	1.950.913.472	1.953.507.464	0	0	0	1.953.507.464	2.593.992
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.137.100	50.000.000	0	0	295.137.100	206.287.100	50.000.000	0	0	256.287.100	(38.850.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.400.000	0	0	0	39.400.000	39.400.000	0	0	0	39.400.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.110.000	0	0	0	95.110.000	69.960.000	0	0	0	69.960.000	(25.150.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.627.100	50.000.000	0	0	160.627.100	96.927.100	50.000.000	0	0	146.927.100	(13.700.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.523.580	35.000.000	0	0	107.523.580	76.123.180	0	0	0	76.123.180	(31.400.400)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	72.523.580	35.000.000	0	0	107.523.580	76.123.180	0	0	0	76.123.180	(31.400.400)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.730.580	35.000.000	0	0	37.730.580	2.730.580	0	0	0	2.730.580	(35.000.000)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	69.793.000	0	0	0	69.793.000	73.392.600	0	0	0	73.392.600	3.599.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004				RSUD Bali Mandara	161.230.497.441	69.211.144.233	0	0	230.441.641.674	167.210.667.584	67.715.208.087	0	0	234.925.875.671	4.484.233.997
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	161.230.497.441	41.599.147.439	0	0	202.829.644.880	167.210.667.584	40.103.211.293	0	0	207.313.878.877	4.484.233.997
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.829.644.880	0	0	0	52.829.644.880	52.313.878.877	0	0	0	52.313.878.877	(515.766.003)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.837.000.000	0	0	0	5.837.000.000	5.310.679.133	0	0	0	5.310.679.133	(526.320.867)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.992.644.880	0	0	0	46.992.644.880	47.003.199.744	0	0	0	47.003.199.744	10.554.864
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	108.400.852.561	41.599.147.439	0	0	150.000.000.000	114.896.788.707	40.103.211.293	0	0	155.000.000.000	5.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	108.400.852.561	41.599.147.439	0	0	150.000.000.000	114.896.788.707	40.103.211.293	0	0	155.000.000.000	5.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	27.611.996.794	0	0	27.611.996.794	0	27.611.996.794	0	0	27.611.996.794	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	27.611.996.794	0	0	27.611.996.794	0	27.611.996.794	0	0	27.611.996.794	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	27.611.996.794	0	0	27.611.996.794	0	27.611.996.794	0	0	27.611.996.794	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005				Rumah Sakit Jiwa	36.249.362.598	2.906.054.500	0	0	39.155.417.098	36.556.697.334	2.906.054.500	0	0	39.462.751.834	307.334.736
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.192.119.598	1.007.474.900	0	0	37.199.594.498	36.499.454.334	1.007.474.900	0	0	37.506.929.234	307.334.736
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.199.594.498	0	0	0	13.199.594.498	13.006.929.234	0	0	0	13.006.929.234	(192.665.264)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402	0	0	0	1.114.110.402	914.110.402	0	0	0	914.110.402	(200.000.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.085.484.096	0	0	0	12.085.484.096	12.092.818.832	0	0	0	12.092.818.832	7.334.736
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	22.992.525.100	1.007.474.900	0	0	24.000.000.000	23.492.525.100	1.007.474.900	0	0	24.500.000.000	500.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.992.525.100	1.007.474.900	0	0	24.000.000.000	23.492.525.100	1.007.474.900	0	0	24.500.000.000	500.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.243.000	1.898.579.600	0	0	1.955.822.600	57.243.000	1.898.579.600	0	0	1.955.822.600	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	57.243.000	1.898.579.600	0	0	1.955.822.600	57.243.000	1.898.579.600	0	0	1.955.822.600	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	57.243.000	1.898.579.600	0	0	1.955.822.600	57.243.000	1.898.579.600	0	0	1.955.822.600	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006				Rumah Sakit Mata Bali Mandara	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000	70.914.623.000	6.444.668.250	0	0	77.359.291.250	23.359.291.250
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000	70.914.623.000	6.444.668.250	0	0	77.359.291.250	23.359.291.250
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000	70.914.623.000	6.444.668.250	0	0	77.359.291.250	23.359.291.250
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000	70.914.623.000	6.444.668.250	0	0	77.359.291.250	23.359.291.250
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007				UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan	16.523.097.772	1.712.059.900	0	0	18.235.157.672	9.422.337.191	481.016.900	0	0	9.903.354.091	(8.331.803.581)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.677.494.272	1.576.559.900	0	0	6.254.054.172	4.196.568.824	345.516.900	0	0	4.542.085.724	(1.711.968.448)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.670.800	202.545.900	0	0	526.216.700	303.352.800	126.402.900	0	0	429.755.700	(96.461.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.294.100	202.545.900	0	0	231.840.000	28.814.100	126.402.900	0	0	155.217.000	(76.623.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	294.376.700	0	0	0	294.376.700	274.538.700	0	0	0	274.538.700	(19.838.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1.307.014.000	0	0	1.307.014.000	0	197.114.000	0	0	197.114.000	(1.109.900.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	58.564.000	0	0	58.564.000	0	40.214.000	0	0	40.214.000	(18.350.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1.248.450.000	0	0	1.248.450.000	0	156.900.000	0	0	156.900.000	(1.091.550.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.079.994.272	0	0	0	3.079.994.272	3.084.377.224	0	0	0	3.084.377.224	4.382.952
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.079.994.272	0	0	0	3.079.994.272	3.084.377.224	0	0	0	3.084.377.224	4.382.952
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.273.829.200	67.000.000	0	0	1.340.829.200	808.838.800	22.000.000	0	0	830.838.800	(509.990.400)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.800.000	0	0	0	40.800.000	40.800.000	0	0	0	40.800.000	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.072.200	0	0	0	206.072.200	137.060.000	0	0	0	137.060.000	(69.012.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.026.957.000	67.000.000	0	0	1.093.957.000	630.978.800	22.000.000	0	0	652.978.800	(440.978.200)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.845.603.500	135.500.000	0	0	11.981.103.500	5.225.768.367	135.500.000	0	0	5.361.268.367	(6.619.835.133)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.448.103.500	15.000.000	0	0	11.463.103.500	5.019.514.367	15.000.000	0	0	5.034.514.367	(6.428.589.133)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.459.862	15.000.000	0	0	315.459.862	300.459.862	15.000.000	0	0	315.459.862	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	11.147.643.638	0	0	0	11.147.643.638	4.719.054.505	0	0	0	4.719.054.505	(6.428.589.133)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	397.500.000	120.500.000	0	0	518.000.000	206.254.000	120.500.000	0	0	326.754.000	(191.246.000)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	397.500.000	120.500.000	0	0	518.000.000	206.254.000	120.500.000	0	0	326.754.000	(191.246.000)
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	331.524.140.434	504.144.470.803	0	0	835.668.611.237	392.494.791.605	505.894.895.856	0	0	898.389.687.461	62.721.076.224
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001				UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	1.472.592.968	3.373.736.100	0	0	4.846.329.068	1.356.504.201	1.118.563.633	0	0	2.475.067.834	(2.371.261.234)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	627.300.540	539.494.100	0	0	1.166.794.640	562.313.845	525.563.633	0	0	1.087.877.478	(78.917.162)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.920.700	0	0	0	90.920.700	70.357.365	0	0	0	70.357.365	(20.563.335)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.971.200	0	0	0	11.971.200	11.971.200	0	0	0	11.971.200	0
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.853.600	0	0	0	10.853.600	10.853.600	0	0	0	10.853.600	0
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	0	0	0	32.500.000	32.500.000	0	0	0	32.500.000	0

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.125.900	0	0	0	5.125.900	5.125.900	0	0	0	5.125.900	0
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	2.916.665	0	0	0	2.916.665	(2.083.335)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	0	0	0	13.500.000	1.290.000	0	0	0	1.290.000	(12.210.000)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.970.000	0	0	0	11.970.000	5.700.000	0	0	0	5.700.000	(6.270.000)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	357.750.100	0	0	357.750.100	0	345.750.100	0	0	345.750.100	(12.000.000)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	357.750.100	0	0	357.750.100	0	345.750.100	0	0	345.750.100	(12.000.000)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.200.000	0	0	0	134.200.000	134.200.000	0	0	0	134.200.000	0
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.100.000	0	0	0	53.100.000	53.100.000	0	0	0	53.100.000	0
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.179.840	181.744.000	0	0	583.923.840	357.756.480	179.813.533	0	0	537.570.013	(46.353.827)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234.254.048	0	0	0	234.254.048	207.492.896	0	0	0	207.492.896	(26.761.152)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.020.000	0	0	0	18.020.000	0	0	0	0	0	(18.020.000)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.905.792	181.744.000	0	0	331.649.792	150.263.584	179.813.533	0	0	330.077.117	(1.572.675)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	845.292.428	2.834.242.000	0	0	3.679.534.428	794.190.356	593.000.000	0	0	1.387.190.356	(2.292.344.072)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	845.292.428	2.834.242.000	0	0	3.679.534.428	794.190.356	593.000.000	0	0	1.387.190.356	(2.292.344.072)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	845.292.428	2.834.242.000	0	0	3.679.534.428	794.190.356	593.000.000	0	0	1.387.190.356	(2.292.344.072)
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002				UPTD Pengelolaan Air Minum	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336	27.653.292.962	4.161.643.710	0	0	31.814.936.672	3.554.043.336
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336	27.653.292.962	4.161.643.710	0	0	31.814.936.672	3.554.043.336
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336	27.653.292.962	4.161.643.710	0	0	31.814.936.672	3.554.043.336
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336	27.653.292.962	4.161.643.710	0	0	31.814.936.672	3.554.043.336
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003				UPTD Pengelolaan Air Limbah	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800	11.504.884.800	0	0	0	11.504.884.800	1.400.000.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800	11.504.884.800	0	0	0	11.504.884.800	1.400.000.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800	11.504.884.800	0	0	0	11.504.884.800	1.400.000.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800	11.504.884.800	0	0	0	11.504.884.800	1.400.000.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	295.270.913.040	497.185.590.993	0	0	792.456.504.033	351.980.109.642	500.614.688.513	0	0	852.594.798.155	60.138.294.122

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.110.599.013	1.318.205.858	0	0	34.428.804.871	31.873.865.915	1.318.205.858	0	0	33.192.071.773	(1.236.733.098)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	836.553.366	0	0	0	836.553.366	801.593.582	0	0	0	801.593.582	(34.959.784)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	448.699.780	0	0	0	448.699.780	437.434.260	0	0	0	437.434.260	(11.265.520)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.853.586	0	0	0	387.853.586	364.159.322	0	0	0	364.159.322	(23.694.264)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.811.918.513	0	0	0	27.811.918.513	26.608.450.103	0	0	0	26.608.450.103	(1.203.468.410)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.811.918.513	0	0	0	27.811.918.513	26.608.450.103	0	0	0	26.608.450.103	(1.203.468.410)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	758.821.230	0	0	0	758.821.230	758.101.230	0	0	0	758.101.230	(720.000)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.205.600	0	0	0	24.205.600	24.205.600	0	0	0	24.205.600	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.305.630	0	0	0	52.305.630	52.305.630	0	0	0	52.305.630	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000	0	0	0	57.500.000	57.500.000	0	0	0	57.500.000	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	32.520.000	0	0	0	32.520.000	32.520.000	0	0	0	32.520.000	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.000.000	0	0	0	42.000.000	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.290.000	0	0	0	465.290.000	464.570.000	0	0	0	464.570.000	(720.000)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	324.614.000	0	0	324.614.000	0	324.614.000	0	0	324.614.000	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	324.614.000	0	0	324.614.000	0	324.614.000	0	0	324.614.000	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.966.448	0	0	0	1.017.966.448	1.018.055.896	0	0	0	1.018.055.896	89.448
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.990.000	0	0	0	2.990.000	2.990.000	0	0	0	2.990.000	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.750.000	0	0	0	496.750.000	496.750.000	0	0	0	496.750.000	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.226.448	0	0	0	318.226.448	318.315.896	0	0	0	318.315.896	89.448
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.685.339.456	993.591.858	0	0	3.678.931.314	2.687.665.104	993.591.858	0	0	3.681.256.962	2.325.648
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.710.974.940	0	0	0	1.710.974.940	1.711.422.180	0	0	0	1.711.422.180	447.240
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.788.452	0	0	0	299.788.452	300.056.796	0	0	0	300.056.796	268.344
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	674.576.064	993.591.858	0	0	1.668.167.922	676.186.128	993.591.858	0	0	1.669.777.986	1.610.064
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.391.577.156	25.559.162.000	0	0	29.950.739.156	4.358.282.159	24.054.559.047	0	0	28.412.841.206	(1.537.897.950)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	910.238.736	3.460.000.000	0	0	4.370.238.736	383.175.500	2.385.665.047	0	0	2.768.840.547	(1.601.398.189)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	618.072.236	400.000.000	0	0	1.018.072.236	152.409.200	379.165.047	0	0	531.574.247	(486.497.989)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai											
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	53.542.300	3.060.000.000	0	0	3.113.542.300	42.142.100	1.956.500.000	0	0	1.998.642.100	(1.114.900.200)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	238.624.200	0	0	0	238.624.200	188.624.200	50.000.000	0	0	238.624.200	0
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.481.338.420	22.099.162.000	0	0	25.580.500.420	3.975.106.659	21.668.894.000	0	0	25.644.000.659	63.500.239
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	658.131.936	1.256.638.000	0	0	1.914.769.936	656.948.791	906.638.000	0	0	1.563.586.791	(351.183.145)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	308.400.688	20.243.544.000	0	0	20.551.944.688	308.936.976	20.243.544.000	0	0	20.552.480.976	536.288
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.514.805.796	598.980.000	0	0	3.113.785.796	3.009.220.892	518.712.000	0	0	3.527.932.892	414.147.096
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.387.833.332	9.826.000.000	0	0	13.213.833.332	2.589.411.004	9.892.393.510	0	0	12.481.804.514	(732.028.818)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.387.833.332	9.826.000.000	0	0	13.213.833.332	2.589.411.004	9.892.393.510	0	0	12.481.804.514	(732.028.818)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.972.499.732	300.000.000	0	0	2.272.499.732	1.377.791.074	196.393.510	0	0	1.574.184.584	(698.315.148)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	185.432.900	350.000.000	0	0	535.432.900	157.872.130	350.000.000	0	0	507.872.130	(27.560.770)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	88.682.600	9.176.000.000	0	0	9.264.682.600	88.382.600	9.346.000.000	0	0	9.434.382.600	169.700.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.141.218.100	0	0	0	1.141.218.100	965.365.200	0	0	0	965.365.200	(175.852.900)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	156.356.800	1.425.000.000	0	0	1.581.356.800	136.033.830	1.295.145.020	0	0	1.431.178.850	(150.177.950)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	156.356.800	1.425.000.000	0	0	1.581.356.800	136.033.830	1.295.145.020	0	0	1.431.178.850	(150.177.950)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	107.012.100	200.000.000	0	0	307.012.100	91.819.430	198.470.430	0	0	290.289.860	(16.722.240)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	42.332.600	1.000.000.000	0	0	1.042.332.600	37.202.600	940.376.600	0	0	977.579.200	(64.753.400)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	7.012.100	225.000.000	0	0	232.012.100	7.011.800	156.297.990	0	0	163.309.790	(68.702.310)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	229.438.138.161	228.612.830.102	0	0	458.050.968.263	290.061.819.327	224.675.348.733	0	0	514.737.168.060	56.686.199.797
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	229.438.138.161	228.612.830.102	0	0	458.050.968.263	290.061.819.327	224.675.348.733	0	0	514.737.168.060	56.686.199.797
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	428.251.100	750.000.000	0	0	1.178.251.100	416.072.352	943.025.014	0	0	1.359.097.366	180.846.266

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.053.783.300	2.690.000.000	0	0	3.743.783.300	888.833.144	2.664.972.078	0	0	3.553.805.222	(189.978.078)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	227.956.103.761	225.172.830.102	0	0	453.128.933.863	288.756.913.831	221.067.351.641	0	0	509.824.265.472	56.695.331.609
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20.876.772.898	230.444.393.033	0	0	251.321.165.931	20.197.995.767	239.379.036.345	0	0	259.577.032.112	8.255.866.181
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	20.876.772.898	230.444.393.033	0	0	251.321.165.931	20.197.995.767	239.379.036.345	0	0	259.577.032.112	8.255.866.181
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.081.964.200	625.000.000	0	0	1.706.964.200	968.113.646	3.502.320.340	0	0	4.470.433.986	2.763.469.786
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.728.414.000	0	0	0	1.728.414.000	1.240.506.231	0	0	0	1.240.506.231	(487.907.769)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	0	65.300.139.850	0	0	65.300.139.850	0	77.129.954.049	0	0	77.129.954.049	11.829.814.199
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	519.859.432	85.340.394.240	0	0	85.860.253.672	485.622.264	80.304.438.000	0	0	80.790.060.264	(5.070.193.408)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	15.200.000	68.972.053.391	0	0	68.987.253.391	17.100.000	65.177.732.069	0	0	65.194.832.069	(3.792.421.322)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	17.217.069.026	2.564.766.741	0	0	19.781.835.767	17.204.790.346	2.564.766.741	0	0	19.769.557.087	(12.278.680)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	82.244.000	3.560.208.183	0	0	3.642.452.183	49.393.800	7.086.420.183	0	0	7.135.813.983	3.493.361.800
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	232.022.240	4.081.830.628	0	0	4.313.852.868	232.469.480	3.613.404.963	0	0	3.845.874.443	(467.978.425)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.661.636.720	0	0	0	1.661.636.720	1.299.344.540	0	0	0	1.299.344.540	(362.292.180)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	924.324.840	0	0	0	924.324.840	703.588.180	0	0	0	703.588.180	(220.736.660)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	924.324.840	0	0	0	924.324.840	703.588.180	0	0	0	703.588.180	(220.736.660)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPIAKI) Cakupan Daerah Provinsi	737.311.880	0	0	0	737.311.880	595.756.360	0	0	0	595.756.360	(141.555.520)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	737.311.880	0	0	0	737.311.880	595.756.360	0	0	0	595.756.360	(141.555.520)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.247.998.960	0	0	0	2.247.998.960	1.463.357.100	0	0	0	1.463.357.100	(784.641.860)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	863.795.332	0	0	0	863.795.332	742.441.544	0	0	0	742.441.544	(121.353.788)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	863.795.332	0	0	0	863.795.332	742.441.544	0	0	0	742.441.544	(121.353.788)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	610.907.740	0	0	0	610.907.740	305.981.380	0	0	0	305.981.380	(304.926.360)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	610.907.740	0	0	0	610.907.740	305.981.380	0	0	0	305.981.380	(304.926.360)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	773.295.888	0	0	0	773.295.888	414.934.176	0	0	0	414.934.176	(358.361.712)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	577.499.492	0	0	0	577.499.492	237.579.284	0	0	0	237.579.284	(339.920.208)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	195.796.396	0	0	0	195.796.396	177.354.892	0	0	0	177.354.892	(18.441.504)
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.160.753.864	0	0	0	2.160.753.864	1.869.131.020	0	0	0	1.869.131.020	(291.622.844)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.160.753.864	0	0	0	2.160.753.864	1.869.131.020	0	0	0	1.869.131.020	(291.622.844)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	777.939.776	0	0	0	777.939.776	722.688.804	0	0	0	722.688.804	(55.250.972)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	355.192.688	0	0	0	355.192.688	315.925.038	0	0	0	315.925.038	(39.267.650)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	27.533.700	0	0	0	27.533.700	10.244.700	0	0	0	10.244.700	(17.289.000)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	327.658.988	0	0	0	327.658.988	305.680.338	0	0	0	305.680.338	(21.978.650)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088	0	0	0	422.747.088	406.763.766	0	0	0	406.763.766	(15.983.322)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088	0	0	0	422.747.088	406.763.766	0	0	0	406.763.766	(15.983.322)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.382.814.088	0	0	0	1.382.814.088	1.146.442.216	0	0	0	1.146.442.216	(236.371.872)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.382.814.088	0	0	0	1.382.814.088	1.146.442.216	0	0	0	1.146.442.216	(236.371.872)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	302.095.100	0	0	0	302.095.100	291.322.540	0	0	0	291.322.540	(10.772.560)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.062.492.088	0	0	0	1.062.492.088	848.642.776	0	0	0	848.642.776	(213.849.312)
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	18.226.900	0	0	0	18.226.900	6.476.900	0	0	0	6.476.900	(11.750.000)
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	67.476.582.795	2.317.526.500	0	0	69.794.109.295	66.425.848.582	2.385.140.500	0	0	68.810.989.082	(983.120.213)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000				Satuan Polisi Pamong Praja	44.504.749.249	334.526.500	0	0	44.839.275.749	44.325.921.629	334.526.500	0	0	44.660.448.129	(178.827.620)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.140.440.369	334.526.500	0	0	23.474.966.869	22.756.720.701	334.526.500	0	0	23.091.247.201	(383.719.668)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	0	0	0	17.000.000	17.000.000	0	0	0	17.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.433.726.487	0	0	0	20.433.726.487	19.619.254.547	0	0	0	19.619.254.547	(814.471.940)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.433.726.487	0	0	0	20.433.726.487	19.619.254.547	0	0	0	19.619.254.547	(814.471.940)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.260.010	136.526.500	0	0	357.786.510	221.260.010	136.526.500	0	0	357.786.510	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.043.310	0	0	0	37.043.310	37.043.310	0	0	0	37.043.310	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.837.700	136.526.500	0	0	180.364.200	43.837.700	136.526.500	0	0	180.364.200	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.400.000	0	0	0	60.400.000	60.400.000	0	0	0	60.400.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.584.000	0	0	0	25.584.000	25.584.000	0	0	0	25.584.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.395.000	0	0	0	54.395.000	54.395.000	0	0	0	54.395.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.473.824	0	0	0	1.088.473.824	1.089.636.648	0	0	0	1.089.636.648	1.162.824

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.970.000	0	0	0	2.970.000	2.970.000	0	0	0	2.970.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000	0	0	0	142.000.000	142.000.000	0	0	0	142.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.310.000	0	0	0	56.310.000	56.310.000	0	0	0	56.310.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	887.193.824	0	0	0	887.193.824	888.356.648	0	0	0	888.356.648	1.162.824
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.379.980.048	198.000.000	0	0	1.577.980.048	1.709.569.496	198.000.000	0	0	1.907.569.496	329.589.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.379.980.048	0	0	0	1.379.980.048	1.579.569.496	0	0	0	1.579.569.496	199.589.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	198.000.000	0	0	198.000.000	130.000.000	198.000.000	0	0	328.000.000	130.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.364.308.880	0	0	0	21.364.308.880	21.569.200.928	0	0	0	21.569.200.928	204.892.048
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.812.245.084	0	0	0	20.812.245.084	21.082.506.236	0	0	0	21.082.506.236	270.261.152
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.697.318.408	0	0	0	3.697.318.408	4.001.331.216	0	0	0	4.001.331.216	304.012.808
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	206.475.300	0	0	0	206.475.300	198.675.300	0	0	0	198.675.300	(7.800.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448	0	0	0	37.476.448	37.565.896	0	0	0	37.565.896	89.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	37.476.448	0	0	0	37.476.448	37.565.896	0	0	0	37.565.896	89.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	37.476.448	0	0	0	37.476.448	37.565.896	0	0	0	37.565.896	89.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.796.022.032	0	0	0	16.796.022.032	16.769.802.032	0	0	0	16.769.802.032	(26.220.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	419.663.796	0	0	0	419.663.796	419.192.692	0	0	0	419.192.692	(471.104)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	419.663.796	0	0	0	419.663.796	419.192.692	0	0	0	419.192.692	(471.104)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	132.400.000	0	0	0	132.400.000	67.502.000	0	0	0	67.502.000	(64.898.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	132.400.000	0	0	0	132.400.000	67.502.000	0	0	0	67.502.000	(64.898.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.744.059.698	508.000.000	0	0	17.252.059.698	15.876.497.457	569.614.000	0	0	16.446.111.457	(805.948.241)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.715.695.698	508.000.000	0	0	17.223.695.698	15.850.608.457	569.614.000	0	0	16.420.222.457	(803.473.241)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.680.700	0	0	0	29.680.700	29.680.700	0	0	0	29.680.700	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.554.700	0	0	0	2.554.700	2.554.700	0	0	0	2.554.700	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.126.000	0	0	0	27.126.000	27.126.000	0	0	0	27.126.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.330.947.180	0	0	0	13.330.947.180	12.552.648.811	0	0	0	12.552.648.811	(778.298.369)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.330.947.180	0	0	0	13.330.947.180	12.552.648.811	0	0	0	12.552.648.811	(778.298.369)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.941.200	0	0	0	97.941.200	97.941.200	0	0	0	97.941.200	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.951.800	0	0	0	6.951.800	6.951.800	0	0	0	6.951.800	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.939.100	0	0	0	13.939.100	13.939.100	0	0	0	13.939.100	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.050.300	0	0	0	2.050.300	2.050.300	0	0	0	2.050.300	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.638.600	508.000.000	0	0	734.638.600	197.138.600	569.614.000	0	0	766.752.600	32.114.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.638.600	508.000.000	0	0	734.638.600	197.138.600	569.614.000	0	0	766.752.600	32.114.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742.108.190	0	0	0	742.108.190	722.160.430	0	0	0	722.160.430	(19.947.760)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.750	0	0	0	120.000.750	128.000.750	0	0	0	128.000.750	8.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	622.107.440	0	0	0	622.107.440	594.159.680	0	0	0	594.159.680	(27.947.760)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.288.379.828	0	0	0	2.288.379.828	2.251.038.716	0	0	0	2.251.038.716	(37.341.112)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.288.379.828	0	0	0	2.288.379.828	2.251.038.716	0	0	0	2.251.038.716	(37.341.112)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	28.364.000	0	0	0	28.364.000	25.889.000	0	0	0	25.889.000	(2.475.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	28.364.000	0	0	0	28.364.000	25.889.000	0	0	0	25.889.000	(2.475.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	28.364.000	0	0	0	28.364.000	25.889.000	0	0	0	25.889.000	(2.475.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001				UPTD Pengendalian Bencana Daerah	6.227.773.848	1.475.000.000	0	0	7.702.773.848	6.223.429.496	1.481.000.000	0	0	7.704.429.496	1.655.648
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.710.922.888	5.000.000	0	0	4.715.922.888	4.718.248.536	11.000.000	0	0	4.729.248.536	13.325.648
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.031.400	5.000.000	0	0	15.031.400	10.031.400	11.000.000	0	0	21.031.400	6.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.031.400	5.000.000	0	0	15.031.400	10.031.400	11.000.000	0	0	21.031.400	6.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.940.192	0	0	0	383.940.192	389.297.984	0	0	0	389.297.984	5.357.792
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.000.000	0	0	0	214.000.000	219.000.000	0	0	0	219.000.000	5.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.940.192	0	0	0	169.940.192	170.297.984	0	0	0	170.297.984	357.792
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.316.951.296	0	0	0	4.316.951.296	4.318.919.152	0	0	0	4.318.919.152	1.967.856
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	4.046.731.296	0	0	0	4.046.731.296	4.048.699.152	0	0	0	4.048.699.152	1.967.856

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Dinas Operasional atau Lapangan											
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.220.000	0	0	0	270.220.000	270.220.000	0	0	0	270.220.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.516.850.960	1.470.000.000	0	0	2.986.850.960	1.505.180.960	1.470.000.000	0	0	2.975.180.960	(11.670.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	458.734.000	0	0	0	458.734.000	458.304.000	0	0	0	458.304.000	(430.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	458.734.000	0	0	0	458.734.000	458.304.000	0	0	0	458.304.000	(430.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.616.960	0	0	0	782.616.960	771.586.960	0	0	0	771.586.960	(11.030.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.616.960	0	0	0	782.616.960	771.586.960	0	0	0	771.586.960	(11.030.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	275.500.000	1.470.000.000	0	0	1.745.500.000	275.290.000	1.470.000.000	0	0	1.745.290.000	(210.000)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	275.500.000	1.470.000.000	0	0	1.745.500.000	275.290.000	1.470.000.000	0	0	1.745.290.000	(210.000)
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	29.799.117.496	3.956.730.033	0	0	33.755.847.529	28.405.806.375	3.917.588.835	0	0	32.323.395.210	(1.432.452.319)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	26.057.126.712	103.779.198	0	0	26.160.905.910	24.726.688.571	79.500.000	0	0	24.806.188.571	(1.354.717.339)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.537.028.312	103.779.198	0	0	22.640.807.510	21.240.566.171	79.500.000	0	0	21.320.066.171	(1.320.741.339)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.315.900	0	0	0	27.315.900	16.931.900	0	0	0	16.931.900	(10.384.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.591.900	0	0	0	18.591.900	4.397.900	0	0	0	4.397.900	(14.194.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.603.000	0	0	0	3.603.000	3.603.000	0	0	0	3.603.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.121.000	0	0	0	5.121.000	8.931.000	0	0	0	8.931.000	3.810.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.501.001.824	0	0	0	19.501.001.824	18.168.889.835	0	0	0	18.168.889.835	(1.332.111.989)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.501.001.824	0	0	0	19.501.001.824	18.168.889.835	0	0	0	18.168.889.835	(1.332.111.989)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.077.400	58.779.198	0	0	234.856.598	192.149.400	34.500.000	0	0	226.649.400	(8.207.198)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.661.600	0	0	0	9.661.600	9.661.600	0	0	0	9.661.600	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	58.779.198	0	0	58.779.198	0	34.500.000	0	0	34.500.000	(24.279.198)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.925.000	0	0	0	100.925.000	100.925.000	0	0	0	100.925.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.648.800	0	0	0	5.648.800	5.648.800	0	0	0	5.648.800	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.660.000	0	0	0	3.660.000	3.660.000	0	0	0	3.660.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.182.000	0	0	0	56.182.000	72.254.000	0	0	0	72.254.000	16.072.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.497.040	0	0	0	370.497.040	395.897.040	0	0	0	395.897.040	25.400.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	0	0	0	180.000.000	205.400.000	0	0	0	205.400.000	25.400.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.997.040	0	0	0	189.997.040	189.997.040	0	0	0	189.997.040	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.462.136.148	45.000.000	0	0	2.507.136.148	2.466.697.996	45.000.000	0	0	2.511.697.996	4.561.848

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.062.239.368	0	0	0	1.062.239.368	1.063.670.536	0	0	0	1.063.670.536	1.431.168
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.335.136	0	0	0	262.335.136	262.961.272	0	0	0	262.961.272	626.136
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.137.561.644	45.000.000	0	0	1.182.561.644	1.140.066.188	45.000.000	0	0	1.185.066.188	2.504.544
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	42.141.300	0	0	0	42.141.300	41.971.300	0	0	0	41.971.300	(170.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.530.000	0	0	0	3.530.000	3.530.000	0	0	0	3.530.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.000	0	0	0	3.530.000	3.530.000	0	0	0	3.530.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	38.611.300	0	0	0	38.611.300	38.441.300	0	0	0	38.441.300	(170.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	38.611.300	0	0	0	38.611.300	38.441.300	0	0	0	38.441.300	(170.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.091.240.700	0	0	0	3.091.240.700	3.057.614.700	0	0	0	3.057.614.700	(33.626.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	56.624.300	0	0	0	56.624.300	56.284.300	0	0	0	56.284.300	(340.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	28.699.700	0	0	0	28.699.700	28.469.700	0	0	0	28.469.700	(230.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	27.924.600	0	0	0	27.924.600	27.814.600	0	0	0	27.814.600	(110.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	350.833.900	0	0	0	350.833.900	411.027.900	0	0	0	411.027.900	60.194.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	314.440.000	0	0	0	314.440.000	374.684.000	0	0	0	374.684.000	60.244.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	36.393.900	0	0	0	36.393.900	36.343.900	0	0	0	36.343.900	(50.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	292.135.200	0	0	0	292.135.200	186.015.200	0	0	0	186.015.200	(106.120.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	184.401.000	0	0	0	184.401.000	78.281.000	0	0	0	78.281.000	(106.120.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12	Pemulasaraan	107.734.200	0	0	0	107.734.200	107.734.200	0	0	0	107.734.200	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.384.397.800	0	0	0	2.384.397.800	2.397.037.800	0	0	0	2.397.037.800	12.640.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	2.384.397.800	0	0	0	2.384.397.800	2.397.037.800	0	0	0	2.397.037.800	12.640.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.249.500	0	0	0	7.249.500	7.249.500	0	0	0	7.249.500	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	7.249.500	0	0	0	7.249.500	7.249.500	0	0	0	7.249.500	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.614.900	0	0	0	3.614.900	3.614.900	0	0	0	3.614.900	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.614.900	0	0	0	3.614.900	3.614.900	0	0	0	3.614.900	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.614.900	0	0	0	3.614.900	3.614.900	0	0	0	3.614.900	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	255.937.800	0	0	0	255.937.800	255.937.800	0	0	0	255.937.800	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	255.937.800	0	0	0	255.937.800	255.937.800	0	0	0	255.937.800	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.937.800	0	0	0	255.937.800	255.937.800	0	0	0	255.937.800	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	127.163.700	0	0	0	127.163.700	126.983.700	0	0	0	126.983.700	(180.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.700	0	0	0	127.163.700	126.983.700	0	0	0	126.983.700	(180.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.700	0	0	0	127.163.700	126.983.700	0	0	0	126.983.700	(180.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001				UPTD Pelayanan Sosial	3.741.990.784	3.852.950.835	0	0	7.594.941.619	3.679.117.804	3.838.088.835	0	0	7.517.206.639	(77.734.980)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.107.111.316	3.852.950.835	0	0	5.960.062.151	2.197.739.536	3.838.088.835	0	0	6.035.828.371	75.766.220
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.042.500	54.000.000	0	0	229.042.500	175.042.500	39.138.000	0	0	214.180.500	(14.862.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.838.700	0	0	0	9.838.700	9.838.700	0	0	0	9.838.700	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	54.000.000	0	0	54.000.000	0	39.138.000	0	0	39.138.000	(14.862.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	0	0	0	160.000.000	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.638.800	0	0	0	2.638.800	2.638.800	0	0	0	2.638.800	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.565.000	0	0	0	2.565.000	2.565.000	0	0	0	2.565.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	27.500.000	0	0	27.500.000	0	27.500.000	0	0	27.500.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.207.800	0	0	0	220.207.800	246.243.700	0	0	0	246.243.700	26.035.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.100.000	0	0	0	201.100.000	219.100.000	0	0	0	219.100.000	18.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.107.800	0	0	0	19.107.800	27.143.700	0	0	0	27.143.700	8.035.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.711.861.016	3.771.450.835	0	0	5.483.311.851	1.776.453.336	3.771.450.835	0	0	5.547.904.171	64.592.320
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.077.544	0	0	0	219.077.544	266.109.992	0	0	0	266.109.992	47.032.448
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.578.584	3.771.450.835	0	0	4.089.029.419	318.294.168	3.771.450.835	0	0	4.089.745.003	715.584
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.175.204.888	0	0	0	1.175.204.888	1.192.049.176	0	0	0	1.192.049.176	16.844.288
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.634.879.468	0	0	0	1.634.879.468	1.481.378.268	0	0	0	1.481.378.268	(153.501.200)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	956.480.668	0	0	0	956.480.668	831.440.668	0	0	0	831.440.668	(125.040.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	01	Pengasuhan	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	269.546.000	0	0	0	269.546.000	269.546.000	0	0	0	269.546.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	89.750.000	0	0	0	89.750.000	89.750.000	0	0	0	89.750.000	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.950.000	0	0	0	272.950.000	256.950.000	0	0	0	256.950.000	(16.000.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.914.000	0	0	0	47.914.000	47.914.000	0	0	0	47.914.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	208.840.668	0	0	0	208.840.668	100.140.668	0	0	0	100.140.668	(108.700.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000	0	0	0	17.480.000	17.140.000	0	0	0	17.140.000	(340.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	678.398.800	0	0	0	678.398.800	649.937.600	0	0	0	649.937.600	(28.461.200)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	465.000.000	0	0	0	465.000.000	465.000.000	0	0	0	465.000.000	0
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000	0	0	0	60.000.000	15.568.800	0	0	0	15.568.800	(44.431.200)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.798.800	0	0	0	109.798.800	125.998.800	0	0	0	125.998.800	16.200.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.600.000	0	0	0	7.600.000	7.370.000	0	0	0	7.370.000	(230.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	12	Pemulasaraan	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	861.794.519.853	401.023.987.436	0	0	1.262.818.507.289	885.798.642.459	403.473.432.805	0	0	1.289.272.075.264	26.453.567.975
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	34.007.845.396	364.217.100	0	0	34.372.062.496	32.342.631.470	214.142.000	0	0	32.556.773.470	(1.815.289.026)
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001				UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	1.654.408.128	207.057.600	0	0	1.861.465.728	1.635.837.056	155.988.600	0	0	1.791.825.656	(69.640.072)
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	604.880.028	178.557.600	0	0	783.437.628	588.708.956	127.488.600	0	0	716.197.556	(67.240.072)
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.774.100	0	0	0	26.774.100	25.829.100	0	0	0	25.829.100	(945.000)
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.342.800	0	0	0	3.342.800	3.342.800	0	0	0	3.342.800	0
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.986.300	0	0	0	7.986.300	7.986.300	0	0	0	7.986.300	0
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	0	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	945.000	0	0	0	945.000	0	0	0	0	0	(945.000)
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	73.751.000	0	0	73.751.000	0	22.682.000	0	0	22.682.000	(51.069.000)
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	73.751.000	0	0	73.751.000	0	22.682.000	0	0	22.682.000	(51.069.000)
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.732.592	0	0	0	211.732.592	212.090.384	0	0	0	212.090.384	357.792
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	0	0	0	24.000.000	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.732.592	0	0	0	187.732.592	188.090.384	0	0	0	188.090.384	357.792
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.373.336	104.806.600	0	0	471.179.936	350.789.472	104.806.600	0	0	455.596.072	(15.583.864)
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.323.336	0	0	0	324.323.336	324.949.472	0	0	0	324.949.472	626.136
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	104.806.600	0	0	104.806.600	0	104.806.600	0	0	104.806.600	0

PROVINSI BALI																			
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																			
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
						Belanja					Belanja								
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja				
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.050.000	0	0	0	42.050.000	25.840.000	0	0	0	25.840.000	(16.210.000)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.049.528.100	28.500.000	0	0	1.078.028.100	1.047.128.100	28.500.000	0	0	1.075.628.100	(2.400.000)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	1.049.528.100	28.500.000	0	0	1.078.028.100	1.047.128.100	28.500.000	0	0	1.075.628.100	(2.400.000)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.049.528.100	28.500.000	0	0	1.078.028.100	1.047.128.100	28.500.000	0	0	1.075.628.100	(2.400.000)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002				UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	459.403.446	0	0	0	459.403.446	445.595.090	0	0	0	445.595.090	(13.808.356)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	321.155.444	0	0	0	321.155.444	307.347.088	0	0	0	307.347.088	(13.808.356)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.588.400	0	0	0	30.588.400	28.371.700	0	0	0	28.371.700	(2.216.700)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.325.900	0	0	0	5.325.900	3.109.200	0	0	0	3.109.200	(2.216.700)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.612.500	0	0	0	11.612.500	11.612.500	0	0	0	11.612.500	0		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.650.000	0	0	0	13.650.000	13.650.000	0	0	0	13.650.000	0		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.857.296	0	0	0	95.857.296	96.036.192	0	0	0	96.036.192	178.896		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	0	0	0	12.600.000	12.600.000	0	0	0	12.600.000	0		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.007.296	0	0	0	82.007.296	82.186.192	0	0	0	82.186.192	178.896		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.709.748	0	0	0	194.709.748	182.939.196	0	0	0	182.939.196	(11.770.552)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.500.000	0	0	0	74.500.000	74.500.000	0	0	0	74.500.000	0		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.209.748	0	0	0	100.209.748	88.439.196	0	0	0	88.439.196	(11.770.552)		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	138.248.002	0	0	0	138.248.002	138.248.002	0	0	0	138.248.002	0		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	138.248.002	0	0	0	138.248.002	138.248.002	0	0	0	138.248.002	0		
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	138.248.002	0	0	0	138.248.002	138.248.002	0	0	0	138.248.002	0		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	31.894.033.822	157.159.500	0	0	32.051.193.322	30.261.199.324	58.153.400	0	0	30.319.352.724	(1.731.840.598)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.621.246.122	157.159.500	0	0	31.778.405.622	30.013.614.124	58.153.400	0	0	30.071.767.524	(1.706.638.098)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.148.776.822	0	0	0	28.148.776.822	26.647.358.024	0	0	0	26.647.358.024	(1.501.418.798)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.148.776.822	0	0	0	28.148.776.822	26.647.358.024	0	0	0	26.647.358.024	(1.501.418.798)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.379.700	21.720.000	0	0	294.099.700	174.924.100	0	0	0	174.924.100	(119.175.600)		
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.493.500	0	0	0	13.493.500	13.493.500	0	0	0	13.493.500	0		

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.330.800	21.720.000	0	0	71.050.800	49.330.800	0	0	0	49.330.800	(21.720.000)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000	0	0	0	64.800.000	64.800.000	0	0	0	64.800.000	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.013.400	0	0	0	36.013.400	14.637.800	0	0	0	14.637.800	(21.375.600)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	(1.500.000)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.542.000	0	0	0	101.542.000	26.962.000	0	0	0	26.962.000	(74.580.000)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.173.177.432	0	0	0	1.173.177.432	1.173.982.464	0	0	0	1.173.982.464	805.032
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.490.000	0	0	0	1.490.000	1.490.000	0	0	0	1.490.000	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.000.000	0	0	0	576.000.000	576.000.000	0	0	0	576.000.000	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.687.432	0	0	0	595.687.432	596.492.464	0	0	0	596.492.464	805.032
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.026.912.168	135.439.500	0	0	2.162.351.668	2.017.349.536	58.153.400	0	0	2.075.502.936	(86.848.732)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	723.719.384	0	0	0	723.719.384	724.434.968	0	0	0	724.434.968	715.584
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.905.792	0	0	0	169.905.792	170.263.584	0	0	0	170.263.584	357.792
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.133.286.992	135.439.500	0	0	1.268.726.492	1.122.650.984	58.153.400	0	0	1.180.804.384	(87.922.108)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.997.600	0	0	0	30.997.600	30.997.600	0	0	0	30.997.600	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600	0	0	0	30.997.600	30.997.600	0	0	0	30.997.600	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	0	0	0	30.997.600	30.997.600	0	0	0	30.997.600	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	176.010.100	0	0	0	176.010.100	173.576.800	0	0	0	173.576.800	(2.433.300)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	173.010.100	0	0	0	173.010.100	173.010.100	0	0	0	173.010.100	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	173.010.100	0	0	0	173.010.100	173.010.100	0	0	0	173.010.100	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3.000.000	0	0	0	3.000.000	566.700	0	0	0	566.700	(2.433.300)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	3.000.000	0	0	0	3.000.000	566.700	0	0	0	566.700	(2.433.300)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	54.500.100	0	0	0	54.500.100	31.730.900	0	0	0	31.730.900	(22.769.200)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.747.500	0	0	0	6.747.500	4.228.300	0	0	0	4.228.300	(2.519.200)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.747.500	0	0	0	6.747.500	4.228.300	0	0	0	4.228.300	(2.519.200)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum	47.752.600	0	0	0	47.752.600	27.502.600	0	0	0	27.502.600	(20.250.000)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)											
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	45.191.600	0	0	0	45.191.600	24.941.600	0	0	0	24.941.600	(20.250.000)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	2.561.000	0	0	0	2.561.000	2.561.000	0	0	0	2.561.000	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	11.279.900	0	0	0	11.279.900	11.279.900	0	0	0	11.279.900	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	11.279.900	0	0	0	11.279.900	11.279.900	0	0	0	11.279.900	0
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	11.279.900	0	0	0	11.279.900	11.279.900	0	0	0	11.279.900	0
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.306.400.192	0	0	0	2.306.400.192	2.306.074.984	0	0	0	2.306.074.984	(325.208)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.412.990.200	0	0	0	1.412.990.200	1.412.567.200	0	0	0	1.412.567.200	(423.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	739.892.500	0	0	0	739.892.500	739.472.500	0	0	0	739.472.500	(420.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	739.892.500	0	0	0	739.892.500	739.472.500	0	0	0	739.472.500	(420.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	439.973.600	0	0	0	439.973.600	439.593.600	0	0	0	439.593.600	(380.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	299.918.900	0	0	0	299.918.900	299.878.900	0	0	0	299.878.900	(40.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	0	0	0	20.000.000	19.999.000	0	0	0	19.999.000	(1.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	20.000.000	0	0	0	20.000.000	19.999.000	0	0	0	19.999.000	(1.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	20.000.000	0	0	0	20.000.000	19.999.000	0	0	0	19.999.000	(1.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	653.097.700	0	0	0	653.097.700	653.095.700	0	0	0	653.095.700	(2.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.097.700	0	0	0	653.097.700	653.095.700	0	0	0	653.095.700	(2.000)
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.097.700	0	0	0	653.097.700	653.095.700	0	0	0	653.095.700	(2.000)
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0002				UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	893.409.992	0	0	0	893.409.992	893.507.784	0	0	0	893.507.784	97.792
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	513.469.992	0	0	0	513.469.992	513.827.784	0	0	0	513.827.784	357.792
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.338.200	0	0	0	2.338.200	2.338.200	0	0	0	2.338.200	0
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.537.400	0	0	0	1.537.400	1.537.400	0	0	0	1.537.400	0
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	800.800	0	0	0	800.800	800.800	0	0	0	800.800	0
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0

PROVINSI BALI																					
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN																					
TAHUN ANGGARAN 2023																					
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
											Belanja					Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja						
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.131.792	0	0	0	506.131.792	506.489.584	0	0	0	506.489.584	357.792				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.938.696	0	0	0	118.938.696	119.117.592	0	0	0	119.117.592	178.896				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.767.648	0	0	0	38.767.648	38.857.096	0	0	0	38.857.096	89.448				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.425.448	0	0	0	348.425.448	348.514.896	0	0	0	348.514.896	89.448				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	316.190.000	0	0	0	316.190.000	315.930.000	0	0	0	315.930.000	(260.000)				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	93.750.000	0	0	0	93.750.000	93.750.000	0	0	0	93.750.000	0				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	93.750.000	0	0	0	93.750.000	93.750.000	0	0	0	93.750.000	0				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	222.440.000	0	0	0	222.440.000	222.180.000	0	0	0	222.180.000	(260.000)				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.940.000	0	0	0	4.940.000	4.680.000	0	0	0	4.680.000	(260.000)				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	217.500.000	0	0	0	217.500.000	217.500.000	0	0	0	217.500.000	0				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	63.750.000	0	0	0	63.750.000	63.750.000	0	0	0	63.750.000	0				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	63.750.000	0	0	0	63.750.000	63.750.000	0	0	0	63.750.000	0				
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	63.750.000	0	0	0	63.750.000	63.750.000	0	0	0	63.750.000	0				
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.965.255.704	0	0	0	2.965.255.704	2.813.995.008	0	0	0	2.813.995.008	(151.260.696)				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.407.811.044	0	0	0	1.407.811.044	1.376.757.788	0	0	0	1.376.757.788	(31.053.256)				
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	715.463.576	0	0	0	715.463.576	701.906.952	0	0	0	701.906.952	(13.556.624)				
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	715.463.576	0	0	0	715.463.576	701.906.952	0	0	0	701.906.952	(13.556.624)				
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	715.463.576	0	0	0	715.463.576	701.906.952	0	0	0	701.906.952	(13.556.624)				
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	537.181.024	0	0	0	537.181.024	519.416.048	0	0	0	519.416.048	(17.764.976)				

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	212.369.440	0	0	0	212.369.440	203.753.880	0	0	0	203.753.880	(8.615.560)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	212.369.440	0	0	0	212.369.440	203.753.880	0	0	0	203.753.880	(8.615.560)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	324.811.584	0	0	0	324.811.584	315.662.168	0	0	0	315.662.168	(9.149.416)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	324.811.584	0	0	0	324.811.584	315.662.168	0	0	0	315.662.168	(9.149.416)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	155.166.444	0	0	0	155.166.444	155.434.788	0	0	0	155.434.788	268.344
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	155.166.444	0	0	0	155.166.444	155.434.788	0	0	0	155.434.788	268.344
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	155.166.444	0	0	0	155.166.444	155.434.788	0	0	0	155.434.788	268.344
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009				UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1.557.444.660	0	0	0	1.557.444.660	1.437.237.220	0	0	0	1.437.237.220	(120.207.440)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	702.760.636	0	0	0	702.760.636	702.616.372	0	0	0	702.616.372	(144.264)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.216.200	0	0	0	60.216.200	59.445.800	0	0	0	59.445.800	(770.400)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.016.600	0	0	0	5.016.600	5.016.600	0	0	0	5.016.600	0
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.508.800	0	0	0	13.508.800	13.508.800	0	0	0	13.508.800	0
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	0	0	0	32.500.000	32.500.000	0	0	0	32.500.000	0
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.190.800	0	0	0	9.190.800	8.420.400	0	0	0	8.420.400	(770.400)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.462.644	0	0	0	320.462.644	320.730.988	0	0	0	320.730.988	268.344
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.224.000	0	0	0	202.224.000	202.224.000	0	0	0	202.224.000	0
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.238.644	0	0	0	118.238.644	118.506.988	0	0	0	118.506.988	268.344
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.081.792	0	0	0	322.081.792	322.439.584	0	0	0	322.439.584	357.792
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.772.896	0	0	0	198.772.896	198.951.792	0	0	0	198.951.792	178.896
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.976.000	0	0	0	8.976.000	8.976.000	0	0	0	8.976.000	0
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.332.896	0	0	0	114.332.896	114.511.792	0	0	0	114.511.792	178.896
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	854.684.024	0	0	0	854.684.024	734.620.848	0	0	0	734.620.848	(120.063.176)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	854.684.024	0	0	0	854.684.024	734.620.848	0	0	0	734.620.848	(120.063.176)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	667.744.332	0	0	0	667.744.332	547.773.364	0	0	0	547.773.364	(119.970.968)
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	186.939.692	0	0	0	186.939.692	186.847.484	0	0	0	186.847.484	(92.208)

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																
Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
					Belanja					Belanja						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	311.272.200	0	0	0	311.272.200	200.595.300	0	0	0	200.595.300	(110.676.900)
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	311.272.200	0	0	0	311.272.200	200.595.300	0	0	0	200.595.300	(110.676.900)
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	311.272.200	0	0	0	311.272.200	200.595.300	0	0	0	200.595.300	(110.676.900)
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	311.272.200	0	0	0	311.272.200	200.595.300	0	0	0	200.595.300	(110.676.900)
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	311.272.200	0	0	0	311.272.200	200.595.300	0	0	0	200.595.300	(110.676.900)
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.075.715.191	106.486.280	0	0	4.182.201.471	11.554.234.215	122.486.280	0	0	11.676.720.495	7.494.519.024
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000			Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	729.284.388	0	0	0	729.284.388	703.045.076	0	0	0	703.045.076	(26.239.312)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	391.102.096	0	0	0	391.102.096	377.044.992	0	0	0	377.044.992	(14.057.104)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	391.102.096	0	0	0	391.102.096	377.044.992	0	0	0	377.044.992	(14.057.104)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	391.102.096	0	0	0	391.102.096	377.044.992	0	0	0	377.044.992	(14.057.104)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	145.838.400	0	0	0	145.838.400	139.188.400	0	0	0	139.188.400	(6.650.000)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	145.838.400	0	0	0	145.838.400	139.188.400	0	0	0	139.188.400	(6.650.000)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	37.392.200	0	0	0	37.392.200	35.112.200	0	0	0	35.112.200	(2.280.000)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	108.446.200	0	0	0	108.446.200	104.076.200	0	0	0	104.076.200	(4.370.000)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	192.343.892	0	0	0	192.343.892	186.811.684	0	0	0	186.811.684	(5.532.208)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	192.343.892	0	0	0	192.343.892	186.811.684	0	0	0	186.811.684	(5.532.208)
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	192.343.892	0	0	0	192.343.892	186.811.684	0	0	0	186.811.684	(5.532.208)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0006			UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	577.382.919	85.904.080	0	0	663.286.999	577.830.159	85.904.080	0	0	663.734.239	447.240
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	577.382.919	85.904.080	0	0	663.286.999	577.830.159	85.904.080	0	0	663.734.239	447.240
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.573.300	0	0	0	9.573.300	9.573.300	0	0	0	9.573.300	0
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.704.300	0	0	0	7.704.300	7.704.300	0	0	0	7.704.300	0
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.869.000	0	0	0	1.869.000	1.869.000	0	0	0	1.869.000	0
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	342.167.379	85.904.080	0	0	428.071.459	342.167.379	85.904.080	0	0	428.071.459	0
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	342.167.379	85.904.080	0	0	428.071.459	342.167.379	85.904.080	0	0	428.071.459	0
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.642.240	0	0	0	225.642.240	226.089.480	0	0	0	226.089.480	447.240

PROVINSI BALI																				
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																				
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
							Belanja					Belanja								
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja				
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.642.240	0	0	0	225.642.240	226.089.480	0	0	0	226.089.480	447.240			
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0007				UPTD Pengelolaan Sampah	2.769.047.884	20.582.200	0	0	2.789.630.084	10.273.358.980	36.582.200	0	0	10.309.941.180	7.520.311.096			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	509.840.888	20.582.200	0	0	530.423.088	508.307.576	20.582.200	0	0	528.889.776	(1.533.312)			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.819.600	0	0	0	66.819.600	66.819.600	0	0	0	66.819.600	0			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.492.000	0	0	0	5.492.000	5.492.000	0	0	0	5.492.000	0			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.947.400	0	0	0	8.947.400	8.947.400	0	0	0	8.947.400	0			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.400.000	0	0	0	45.400.000	45.400.000	0	0	0	45.400.000	0			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.980.200	0	0	0	6.980.200	6.980.200	0	0	0	6.980.200	0			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	20.582.200	0	0	20.582.200	0	20.582.200	0	0	20.582.200	0			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	20.582.200	0	0	20.582.200	0	20.582.200	0	0	20.582.200	0			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.021.288	0	0	0	443.021.288	441.487.976	0	0	0	441.487.976	(1.533.312)			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.941.288	0	0	0	323.941.288	324.477.976	0	0	0	324.477.976	536.688			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.080.000	0	0	0	119.080.000	117.010.000	0	0	0	117.010.000	(2.070.000)			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.259.206.996	0	0	0	2.259.206.996	9.765.051.404	16.000.000	0	0	9.781.051.404	7.521.844.408			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.259.206.996	0	0	0	2.259.206.996	9.765.051.404	16.000.000	0	0	9.781.051.404	7.521.844.408			
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	2.259.206.996	0	0	0	2.259.206.996	9.765.051.404	16.000.000	0	0	9.781.051.404	7.521.844.408			
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.868.988	0	0	0	326.868.988	368.128.476	0	0	0	368.128.476	41.259.488			
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.868.988	0	0	0	326.868.988	368.128.476	0	0	0	368.128.476	41.259.488			
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	186.673.244	0	0	0	186.673.244	232.224.388	0	0	0	232.224.388	45.551.144			
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	186.673.244	0	0	0	186.673.244	232.224.388	0	0	0	232.224.388	45.551.144			
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	186.673.244	0	0	0	186.673.244	232.224.388	0	0	0	232.224.388	45.551.144			
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	140.195.744	0	0	0	140.195.744	135.904.088	0	0	0	135.904.088	(4.291.656)			
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	140.195.744	0	0	0	140.195.744	135.904.088	0	0	0	135.904.088	(4.291.656)			
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	140.195.744	0	0	0	140.195.744	135.904.088	0	0	0	135.904.088	(4.291.656)			
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.227.751.192	102.215.962	0	0	33.329.967.154	32.146.793.181	88.688.962	0	0	32.235.482.143	(1.094.485.011)			
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.227.751.192	102.215.962	0	0	33.329.967.154	32.146.793.181	88.688.962	0	0	32.235.482.143	(1.094.485.011)			
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.734.753.456	102.215.962	0	0	16.836.969.418	13.351.970.305	88.688.962	0	0	13.440.659.267	(3.396.310.151)			

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.383.044	0	0	0	271.383.044	218.216.988	0	0	0	218.216.988	(53.166.056)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.188.300	0	0	0	14.188.300	14.188.300	0	0	0	14.188.300	0
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257.194.744	0	0	0	257.194.744	204.028.688	0	0	0	204.028.688	(53.166.056)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.367.342.508	0	0	0	14.367.342.508	10.913.426.509	0	0	0	10.913.426.509	(3.453.915.999)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.236.963.864	0	0	0	14.236.963.864	10.782.779.521	0	0	0	10.782.779.521	(3.454.184.343)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.378.644	0	0	0	130.378.644	130.646.988	0	0	0	130.646.988	268.344
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.503.000	91.215.962	0	0	282.718.962	261.544.600	77.688.962	0	0	339.233.562	56.514.600
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.481.500	0	0	0	5.481.500	5.481.500	0	0	0	5.481.500	0
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.441.800	91.215.962	0	0	101.657.762	10.213.400	77.688.962	0	0	87.902.362	(13.755.400)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000	0	0	0	75.500.000	75.500.000	0	0	0	75.500.000	0
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.648.700	0	0	0	5.648.700	5.648.700	0	0	0	5.648.700	0
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.255.000	0	0	0	12.255.000	12.255.000	0	0	0	12.255.000	0
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.976.000	0	0	0	77.976.000	148.246.000	0	0	0	148.246.000	70.270.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.340.000	0	0	0	7.340.000	6.340.000	0	0	0	6.340.000	(1.000.000)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.340.000	0	0	0	7.340.000	6.340.000	0	0	0	6.340.000	(1.000.000)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.785.176	0	0	0	616.785.176	659.858.552	0	0	0	659.858.552	43.073.376
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.400.000	0	0	0	137.400.000	179.400.000	0	0	0	179.400.000	42.000.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.385.176	0	0	0	479.385.176	480.458.552	0	0	0	480.458.552	1.073.376
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.280.399.728	11.000.000	0	0	1.291.399.728	1.292.583.656	11.000.000	0	0	1.303.583.656	12.183.928
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.252.799.728	0	0	0	1.252.799.728	1.264.983.656	0	0	0	1.264.983.656	12.183.928
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.600.000	11.000.000	0	0	38.600.000	27.600.000	11.000.000	0	0	38.600.000	0
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	163.208.344	0	0	0	163.208.344	150.556.688	0	0	0	150.556.688	(12.651.656)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	163.208.344	0	0	0	163.208.344	150.556.688	0	0	0	150.556.688	(12.651.656)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	163.208.344	0	0	0	163.208.344	150.556.688	0	0	0	150.556.688	(12.651.656)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	990.754.632	0	0	0	990.754.632	877.868.768	0	0	0	877.868.768	(112.885.864)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	990.754.632	0	0	0	990.754.632	877.868.768	0	0	0	877.868.768	(112.885.864)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	513.318.792	0	0	0	513.318.792	408.521.688	0	0	0	408.521.688	(104.797.104)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	477.435.840	0	0	0	477.435.840	469.347.080	0	0	0	469.347.080	(8.088.760)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	15.339.034.760	0	0	0	15.339.034.760	17.766.397.420	0	0	0	17.766.397.420	2.427.362.660
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.339.034.760	0	0	0	15.339.034.760	17.766.397.420	0	0	0	17.766.397.420	2.427.362.660
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	247.835.892	0	0	0	247.835.892	238.677.984	0	0	0	238.677.984	(9.157.908)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	877.999.292	0	0	0	877.999.292	462.453.084	0	0	0	462.453.084	(415.546.208)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	583.427.544	0	0	0	583.427.544	549.589.288	0	0	0	549.589.288	(33.838.256)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	13.629.772.032	0	0	0	13.629.772.032	16.515.677.064	0	0	0	16.515.677.064	2.885.905.032
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	603.494.588	0	0	0	603.494.588	537.575.276	0	0	0	537.575.276	(65.919.312)
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	603.494.588	0	0	0	603.494.588	537.575.276	0	0	0	537.575.276	(65.919.312)
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	603.494.588	0	0	0	603.494.588	537.575.276	0	0	0	537.575.276	(65.919.312)
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.494.588	0	0	0	603.494.588	537.575.276	0	0	0	537.575.276	(65.919.312)
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.494.588	0	0	0	603.494.588	537.575.276	0	0	0	537.575.276	(65.919.312)
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36.514.095.713	11.984.459.513	0	0	48.498.555.226	36.218.656.679	12.091.195.950	0	0	48.309.852.629	(188.702.597)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000				Dinas Perhubungan	25.357.931.837	806.808.400	0	0	26.164.740.237	24.865.232.917	1.688.503.400	0	0	26.553.736.317	388.996.080
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.393.868.677	806.808.400	0	0	22.200.677.077	22.721.763.597	788.503.400	0	0	23.510.266.997	1.309.589.920
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.463.900	0	0	0	58.463.900	30.779.900	0	0	0	30.779.900	(27.684.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.265.200	0	0	0	26.265.200	15.383.200	0	0	0	15.383.200	(10.882.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.631.300	0	0	0	9.631.300	3.749.300	0	0	0	3.749.300	(5.882.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.162.000	0	0	0	2.162.000	2.162.000	0	0	0	2.162.000	0

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN																	
TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.709.800	0	0	0	3.709.800	1.809.800	0	0	0	1.809.800	(1.900.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.776.800	0	0	0	1.776.800	1.776.800	0	0	0	1.776.800	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.276.800	0	0	0	5.276.800	1.476.800	0	0	0	1.476.800	(3.800.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.642.000	0	0	0	9.642.000	4.422.000	0	0	0	4.422.000	(5.220.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.805.735.001	0	0	0	17.805.735.001	16.582.630.200	0	0	0	16.582.630.200	(1.223.104.801)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.778.679.801	0	0	0	17.778.679.801	16.555.575.000	0	0	0	16.555.575.000	(1.223.104.801)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.055.200	0	0	0	27.055.200	27.055.200	0	0	0	27.055.200	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.100.700	368.730.400	0	0	818.831.100	435.470.700	350.425.400	0	0	785.896.100	(32.935.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.618.500	0	0	0	4.618.500	4.618.500	0	0	0	4.618.500	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.315.200	368.730.400	0	0	399.045.600	30.315.200	350.425.400	0	0	380.740.600	(18.305.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.375.000	0	0	0	5.375.000	5.375.000	0	0	0	5.375.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.792.000	0	0	0	309.792.000	295.162.000	0	0	0	295.162.000	(14.630.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000	260.268.000	0	0	810.268.000	3.140.000.000	260.268.000	0	0	3.400.268.000	2.590.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	85.500.000	0	0	635.500.000	3.140.000.000	85.500.000	0	0	3.225.500.000	2.590.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	174.768.000	0	0	174.768.000	0	174.768.000	0	0	174.768.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.721.132	0	0	0	622.721.132	623.530.309	0	0	0	623.530.309	809.177
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.000.000	0	0	0	232.000.000	232.004.145	0	0	0	232.004.145	4.145
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.221.132	0	0	0	385.221.132	386.026.164	0	0	0	386.026.164	805.032
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.906.847.944	177.810.000	0	0	2.084.657.944	1.909.352.488	177.810.000	0	0	2.087.162.488	2.504.544
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	953.073.192	0	0	0	953.073.192	953.430.984	0	0	0	953.430.984	357.792
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.340.000	0	0	0	54.340.000	54.340.000	0	0	0	54.340.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	899.434.752	177.810.000	0	0	1.077.244.752	901.581.504	177.810.000	0	0	1.079.391.504	2.146.752
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.205.132.332	0	0	0	2.205.132.332	1.655.279.564	150.000.000	0	0	1.805.279.564	(399.852.768)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.085.450.604	0	0	0	1.085.450.604	1.034.534.908	0	0	0	1.034.534.908	(50.915.696)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	981.698.404	0	0	0	981.698.404	979.797.708	0	0	0	979.797.708	(1.900.696)

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	103.752.200	0	0	0	103.752.200	54.737.200	0	0	0	54.737.200	(49.015.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	38.598.100	0	0	0	38.598.100	19.883.100	0	0	0	19.883.100	(18.715.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	19.127.500	0	0	0	19.127.500	16.277.500	0	0	0	16.277.500	(2.850.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	19.470.600	0	0	0	19.470.600	3.605.600	0	0	0	3.605.600	(15.865.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	833.990.728	0	0	0	833.990.728	537.184.656	0	0	0	537.184.656	(296.806.072)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	833.990.728	0	0	0	833.990.728	537.184.656	0	0	0	537.184.656	(296.806.072)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	56.207.200	0	0	0	56.207.200	31.721.200	0	0	0	31.721.200	(24.486.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	56.207.200	0	0	0	56.207.200	31.721.200	0	0	0	31.721.200	(24.486.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	190.885.700	0	0	0	190.885.700	31.955.700	150.000.000	0	0	181.955.700	(8.930.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	190.885.700	0	0	0	190.885.700	31.955.700	150.000.000	0	0	181.955.700	(8.930.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.000.688.040	0	0	0	1.000.688.040	235.295.280	750.000.000	0	0	985.295.280	(15.392.760)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.000.688.040	0	0	0	1.000.688.040	235.295.280	750.000.000	0	0	985.295.280	(15.392.760)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.000.688.040	0	0	0	1.000.688.040	235.295.280	750.000.000	0	0	985.295.280	(15.392.760)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	758.242.788	0	0	0	758.242.788	252.894.476	0	0	0	252.894.476	(505.348.312)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	758.242.788	0	0	0	758.242.788	252.894.476	0	0	0	252.894.476	(505.348.312)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	758.242.788	0	0	0	758.242.788	252.894.476	0	0	0	252.894.476	(505.348.312)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001				UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	1.359.475.380	231.830.500	0	0	1.591.305.880	1.346.819.860	0	0	0	1.346.819.860	(244.486.020)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	203.163.796	31.830.500	0	0	234.994.296	189.792.692	0	0	0	189.792.692	(45.201.604)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.261.000	31.830.500	0	0	81.091.500	35.711.000	0	0	0	35.711.000	(45.380.500)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.264.500	0	0	0	2.264.500	2.264.500	0	0	0	2.264.500	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.370.500	31.830.500	0	0	43.201.000	11.370.500	0	0	0	11.370.500	(31.830.500)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	600.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.026.000	0	0	0	35.026.000	21.476.000	0	0	0	21.476.000	(13.550.000)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.302.148	0	0	0	44.302.148	44.391.596	0	0	0	44.391.596	89.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	660.000	0	0	0	660.000	660.000	0	0	0	660.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.542.148	0	0	0	42.542.148	42.631.596	0	0	0	42.631.596	89.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.600.648	0	0	0	109.600.648	109.690.096	0	0	0	109.690.096	89.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.170.648	0	0	0	94.170.648	94.260.096	0	0	0	94.260.096	89.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.430.000	0	0	0	15.430.000	15.430.000	0	0	0	15.430.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.156.311.584	200.000.000	0	0	1.356.311.584	1.157.027.168	0	0	0	1.157.027.168	(199.284.416)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.156.311.584	200.000.000	0	0	1.356.311.584	1.157.027.168	0	0	0	1.157.027.168	(199.284.416)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	662.311.584	0	0	0	662.311.584	663.027.168	0	0	0	663.027.168	715.584
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	494.000.000	200.000.000	0	0	694.000.000	494.000.000	0	0	0	494.000.000	(200.000.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002				UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	8.757.467.884	9.456.092.000	0	0	18.213.559.884	8.492.682.460	9.411.682.000	0	0	17.904.364.460	(309.195.424)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	459.379.236	44.410.000	0	0	503.789.236	442.879.372	0	0	0	442.879.372	(60.909.864)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.113.700	44.410.000	0	0	115.523.700	53.987.700	0	0	0	53.987.700	(61.536.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.836.100	44.410.000	0	0	57.246.100	12.836.100	0	0	0	12.836.100	(44.410.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.277.600	0	0	0	58.277.600	41.151.600	0	0	0	41.151.600	(17.126.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.616.848	0	0	0	57.616.848	57.706.296	0	0	0	57.706.296	89.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.700.000	0	0	0	17.700.000	17.700.000	0	0	0	17.700.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.916.848	0	0	0	39.916.848	40.006.296	0	0	0	40.006.296	89.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.648.688	0	0	0	330.648.688	331.185.376	0	0	0	331.185.376	536.688
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.088.688	0	0	0	325.088.688	325.625.376	0	0	0	325.625.376	536.688
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.560.000	0	0	0	5.560.000	5.560.000	0	0	0	5.560.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.298.088.648	9.411.682.000	0	0	17.709.770.648	8.049.803.088	9.411.682.000	0	0	17.461.485.088	(248.285.560)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.298.088.648	9.411.682.000	0	0	17.709.770.648	8.049.803.088	9.411.682.000	0	0	17.461.485.088	(248.285.560)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.298.088.648	9.411.682.000	0	0	17.709.770.648	8.049.803.088	9.411.682.000	0	0	17.461.485.088	(248.285.560)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003				UPTD Perlengkapan Jalan	568.609.032	1.389.614.613	0	0	1.958.223.645	1.048.203.982	908.721.550	0	0	1.956.925.532	(1.298.113)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	137.339.948	40.213.800	0	0	177.553.748	135.909.396	40.213.800	0	0	176.123.196	(1.430.552)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.067.500	0	0	0	13.067.500	11.547.500	0	0	0	11.547.500	(1.520.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.832.700	0	0	0	4.832.700	4.832.700	0	0	0	4.832.700	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.234.800	0	0	0	8.234.800	6.714.800	0	0	0	6.714.800	(1.520.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	40.213.800	0	0	40.213.800	0	40.213.800	0	0	40.213.800	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	40.213.800	0	0	40.213.800	0	40.213.800	0	0	40.213.800	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.272.448	0	0	0	124.272.448	124.361.896	0	0	0	124.361.896	89.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.242.448	0	0	0	119.242.448	119.331.896	0	0	0	119.331.896	89.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000	0	0	0	5.030.000	5.030.000	0	0	0	5.030.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	431.269.084	1.349.400.813	0	0	1.780.669.897	912.294.586	868.507.750	0	0	1.780.802.336	132.439
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	431.269.084	1.349.400.813	0	0	1.780.669.897	912.294.586	868.507.750	0	0	1.780.802.336	132.439
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	214.901.392	868.507.750	0	0	1.083.409.142	239.632.184	868.507.750	0	0	1.108.139.934	24.730.792
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	216.367.692	480.893.063	0	0	697.260.755	672.662.402	0	0	0	672.662.402	(24.598.353)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004				UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	470.611.580	100.114.000	0	0	570.725.580	465.717.460	82.289.000	0	0	548.006.460	(22.719.120)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	460.531.580	100.114.000	0	0	560.645.580	458.527.460	82.289.000	0	0	540.816.460	(19.829.120)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.091.580	54.235.000	0	0	454.326.580	398.087.460	36.410.000	0	0	434.497.460	(19.829.120)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.093.500	54.235.000	0	0	59.328.500	5.093.500	36.410.000	0	0	41.503.500	(17.825.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.713.600	0	0	0	1.713.600	1.050.000	0	0	0	1.050.000	(663.600)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.284.480	0	0	0	390.284.480	388.943.960	0	0	0	388.943.960	(1.340.520)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	45.879.000	0	0	45.879.000	0	45.879.000	0	0	45.879.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	45.879.000	0	0	45.879.000	0	45.879.000	0	0	45.879.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.340.000	0	0	0	59.340.000	59.340.000	0	0	0	59.340.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.940.000	0	0	0	53.940.000	53.940.000	0	0	0	53.940.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000	0	0	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	5.400.000	0
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	10.080.000	0	0	0	10.080.000	7.190.000	0	0	0	7.190.000	(2.890.000)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.080.000	0	0	0	10.080.000	7.190.000	0	0	0	7.190.000	(2.890.000)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.080.000	0	0	0	10.080.000	7.190.000	0	0	0	7.190.000	(2.890.000)
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71.296.927.626	383.182.860.881	0	0	454.479.788.507	82.552.754.845	385.719.770.913	0	0	468.272.525.758	13.792.737.251
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	71.296.927.626	383.182.860.881	0	0	454.479.788.507	82.552.754.845	385.719.770.913	0	0	468.272.525.758	13.792.737.251
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.329.722.209	318.360.800	0	0	19.648.083.009	19.569.112.221	318.360.800	0	0	19.887.473.021	239.390.012
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.400	0	0	0	29.990.400	29.990.400	0	0	0	29.990.400	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.384.200	0	0	0	18.384.200	18.384.200	0	0	0	18.384.200	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.437.600	0	0	0	5.437.600	5.437.600	0	0	0	5.437.600	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.168.600	0	0	0	6.168.600	6.168.600	0	0	0	6.168.600	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.782.929.713	0	0	0	14.782.929.713	15.017.847.325	0	0	0	15.017.847.325	234.917.612
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.429.264.313	0	0	0	13.429.264.313	12.424.182.325	0	0	0	12.424.182.325	(1.005.081.988)
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.353.665.400	0	0	0	1.353.665.400	2.593.665.000	0	0	0	2.593.665.000	1.239.999.600
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.174.400	232.950.000	0	0	604.124.400	371.174.400	232.950.000	0	0	604.124.400	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.244.600	0	0	0	5.244.600	5.244.600	0	0	0	5.244.600	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.942.500	232.950.000	0	0	254.892.500	21.942.500	232.950.000	0	0	254.892.500	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000	0	0	0	87.500.000	87.500.000	0	0	0	87.500.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.247.300	0	0	0	22.247.300	22.247.300	0	0	0	22.247.300	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39.900.000	0	0	0	39.900.000	39.900.000	0	0	0	39.900.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.340.000	0	0	0	194.340.000	194.340.000	0	0	0	194.340.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	85.410.800	0	0	85.410.800	0	85.410.800	0	0	85.410.800	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	28.160.000	0	0	28.160.000	0	28.160.000	0	0	28.160.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	57.250.800	0	0	57.250.800	0	57.250.800	0	0	57.250.800	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.989.000	0	0	0	486.989.000	486.989.000	0	0	0	486.989.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.355.000	0	0	0	3.355.000	3.355.000	0	0	0	3.355.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.634.000	0	0	0	348.634.000	348.634.000	0	0	0	348.634.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	0	0	0	135.000.000	135.000.000	0	0	0	135.000.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.658.638.696	0	0	0	3.658.638.696	3.663.111.096	0	0	0	3.663.111.096	4.472.400
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	1.848.366.568	0	0	0	1.848.366.568	1.849.618.840	0	0	0	1.849.618.840	1.252.272

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	7.120.000	0	0	0	7.120.000	7.120.000	0	0	0	7.120.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.890.000	0	0	0	172.890.000	172.890.000	0	0	0	172.890.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.519.152.128	0	0	0	1.519.152.128	1.522.372.256	0	0	0	1.522.372.256	3.220.128
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.110.000	0	0	0	111.110.000	111.110.000	0	0	0	111.110.000	0
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	25.465.785.080	990.052.000	0	0	26.455.837.080	38.770.559.720	1.239.219.032	0	0	40.009.778.752	13.553.941.672
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	25.465.785.080	990.052.000	0	0	26.455.837.080	38.770.559.720	1.239.219.032	0	0	40.009.778.752	13.553.941.672
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.968.121.336	169.850.000	0	0	2.137.971.336	2.212.061.072	173.650.000	0	0	2.385.711.072	247.739.736
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.517.960.140	29.680.000	0	0	12.547.640.140	25.468.220.240	216.864.200	0	0	25.685.084.440	13.137.444.300
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	4.339.073.588	229.283.000	0	0	4.568.356.588	4.284.450.276	284.383.000	0	0	4.568.833.276	476.688
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	3.237.886.728	103.859.000	0	0	3.341.745.728	3.187.837.156	154.812.500	0	0	3.342.649.656	903.928
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.914.906.988	245.730.000	0	0	2.160.636.988	1.897.506.676	263.626.000	0	0	2.161.132.676	495.688
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.487.836.300	211.650.000	0	0	1.699.486.300	1.720.484.300	145.883.332	0	0	1.866.367.632	166.881.332
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	26.501.420.337	381.874.448.081	0	0	408.375.868.418	24.213.082.904	384.162.191.081	0	0	408.375.273.985	(594.433)
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	26.501.420.337	381.874.448.081	0	0	408.375.868.418	24.213.082.904	384.162.191.081	0	0	408.375.273.985	(594.433)
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.208.749.468	380.048.126.081	0	0	381.256.875.549	1.208.185.812	382.344.736.081	0	0	383.552.921.893	2.296.046.344
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	15.721.534.821	126.700.000	0	0	15.848.234.821	13.376.504.596	75.000.000	0	0	13.451.504.596	(2.396.730.225)
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	9.571.136.048	1.699.622.000	0	0	11.270.758.048	9.628.392.496	1.742.455.000	0	0	11.370.847.496	100.089.448
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	32.441.566.574	56.950.800	0	0	32.498.517.374	21.486.705.124	56.940.000	0	0	21.543.645.124	(10.954.872.250)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28.061.679.128	56.950.800	0	0	28.118.629.928	17.109.792.546	56.940.000	0	0	17.166.732.546	(10.951.897.382)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.342.319.872	56.950.800	0	0	16.399.270.672	15.546.255.434	56.940.000	0	0	15.603.195.434	(796.075.238)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.172.896	0	0	0	86.172.896	81.196.792	0	0	0	81.196.792	(4.976.104)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.809.396	0	0	0	80.809.396	78.873.292	0	0	0	78.873.292	(1.936.104)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.363.500	0	0	0	5.363.500	2.323.500	0	0	0	2.323.500	(3.040.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.823.127.248	0	0	0	13.823.127.248	13.142.384.786	0	0	0	13.142.384.786	(680.742.462)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.823.127.248	0	0	0	13.823.127.248	13.142.384.786	0	0	0	13.142.384.786	(680.742.462)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.962.500	0	0	0	251.962.500	196.596.500	0	0	0	196.596.500	(55.366.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.100	0	0	0	9.999.100	9.999.100	0	0	0	9.999.100	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.298.700	0	0	0	44.298.700	44.298.700	0	0	0	44.298.700	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000	55.000.000	0	0	0	55.000.000	(25.000.000)

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.187.700	0	0	0	12.187.700	12.187.700	0	0	0	12.187.700	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.977.000	0	0	0	100.977.000	70.611.000	0	0	0	70.611.000	(30.366.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	56.950.800	0	0	56.950.800	0	56.940.000	0	0	56.940.000	(10.800)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	56.950.800	0	0	56.950.800	0	56.940.000	0	0	56.940.000	(10.800)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.210.102.200	0	0	0	1.210.102.200	1.154.138.400	0	0	0	1.154.138.400	(55.963.800)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.991.000	0	0	0	1.991.000	1.991.000	0	0	0	1.991.000	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.200.000	0	0	0	271.200.000	213.000.000	0	0	0	213.000.000	(58.200.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	936.911.200	0	0	0	936.911.200	939.147.400	0	0	0	939.147.400	2.236.200
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.955.028	0	0	0	970.955.028	971.938.956	0	0	0	971.938.956	983.928
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.462.736	0	0	0	749.462.736	750.088.872	0	0	0	750.088.872	626.136
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.492.292	0	0	0	171.492.292	171.850.084	0	0	0	171.850.084	357.792
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	275.064.140	0	0	0	275.064.140	259.249.380	0	0	0	259.249.380	(15.814.760)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.956.000	0	0	0	27.956.000	20.636.000	0	0	0	20.636.000	(7.320.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.956.000	0	0	0	27.956.000	20.636.000	0	0	0	20.636.000	(7.320.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	247.108.140	0	0	0	247.108.140	238.613.380	0	0	0	238.613.380	(8.494.760)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	247.108.140	0	0	0	247.108.140	238.613.380	0	0	0	238.613.380	(8.494.760)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.999.800	0	0	0	49.999.800	46.919.800	0	0	0	46.919.800	(3.080.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.999.800	0	0	0	19.999.800	17.119.800	0	0	0	17.119.800	(2.880.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	19.999.800	0	0	0	19.999.800	17.119.800	0	0	0	17.119.800	(2.880.000)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	0	0	0	30.000.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	(200.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	30.000.000	0	0	0	30.000.000	29.800.000	0	0	0	29.800.000	(200.000)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.552.496	0	0	0	118.552.496	118.491.392	0	0	0	118.491.392	(61.104)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.552.496	0	0	0	118.552.496	118.491.392	0	0	0	118.491.392	(61.104)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.552.496	0	0	0	118.552.496	118.491.392	0	0	0	118.491.392	(61.104)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	327.995.940	0	0	0	327.995.940	316.561.180	0	0	0	316.561.180	(11.434.760)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	327.995.940	0	0	0	327.995.940	316.561.180	0	0	0	316.561.180	(11.434.760)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	204.997.544	0	0	0	204.997.544	200.525.888	0	0	0	200.525.888	(4.471.656)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	122.998.396	0	0	0	122.998.396	116.035.292	0	0	0	116.035.292	(6.963.104)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.947.746.880	0	0	0	10.947.746.880	822.315.360	0	0	0	822.315.360	(10.125.431.520)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	10.947.746.880	0	0	0	10.947.746.880	822.315.360	0	0	0	822.315.360	(10.125.431.520)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10.947.746.880	0	0	0	10.947.746.880	822.315.360	0	0	0	822.315.360	(10.125.431.520)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001				UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.379.887.446	0	0	0	4.379.887.446	4.376.912.578	0	0	0	4.376.912.578	(2.974.868)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	417.348.336	0	0	0	417.348.336	414.194.572	0	0	0	414.194.572	(3.153.764)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.392.300	0	0	0	4.392.300	4.077.900	0	0	0	4.077.900	(314.400)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	666.400	0	0	0	666.400	666.400	0	0	0	666.400	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.725.900	0	0	0	2.725.900	2.725.900	0	0	0	2.725.900	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	0	0	0	1.000.000	685.600	0	0	0	685.600	(314.400)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.372.292	0	0	0	239.372.292	236.264.584	0	0	0	236.264.584	(3.107.708)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.001.000	0	0	0	1.001.000	1.001.000	0	0	0	1.001.000	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000	0	0	0	48.500.000	48.500.000	0	0	0	48.500.000	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.871.292	0	0	0	189.871.292	186.763.584	0	0	0	186.763.584	(3.107.708)
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.583.744	0	0	0	173.583.744	173.852.088	0	0	0	173.852.088	268.344
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.780.848	0	0	0	95.780.848	95.870.296	0	0	0	95.870.296	89.448
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.850.000	0	0	0	2.850.000	2.850.000	0	0	0	2.850.000	0
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.952.896	0	0	0	74.952.896	75.131.792	0	0	0	75.131.792	178.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.962.539.110	0	0	0	3.962.539.110	3.962.718.006	0	0	0	3.962.718.006	178.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.962.539.110	0	0	0	3.962.539.110	3.962.718.006	0	0	0	3.962.718.006	178.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.962.539.110	0	0	0	3.962.539.110	3.962.718.006	0	0	0	3.962.718.006	178.896
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.044.957.160	606.570.000	0	0	19.651.527.160	17.861.399.438	589.570.000	0	0	18.450.969.438	(1.200.557.722)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.044.957.160	606.570.000	0	0	19.651.527.160	17.861.399.438	589.570.000	0	0	18.450.969.438	(1.200.557.722)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.403.464.968	606.570.000	0	0	17.010.034.968	15.217.313.254	589.570.000	0	0	15.806.883.254	(1.203.151.714)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.558.209.816	0	0	0	13.558.209.816	12.401.576.350	0	0	0	12.401.576.350	(1.156.633.466)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.558.209.816	0	0	0	13.558.209.816	12.401.576.350	0	0	0	12.401.576.350	(1.156.633.466)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.880.400	0	0	0	586.880.400	555.215.400	0	0	0	555.215.400	(31.665.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.048.600	0	0	0	21.048.600	21.048.600	0	0	0	21.048.600	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.424.000	0	0	0	49.424.000	49.424.000	0	0	0	49.424.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.000.000	0	0	0	76.000.000	76.000.000	0	0	0	76.000.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.005.800	0	0	0	23.005.800	23.005.800	0	0	0	23.005.800	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.402.000	0	0	0	417.402.000	385.737.000	0	0	0	385.737.000	(31.665.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.840.000	606.570.000	0	0	609.410.000	2.840.000	589.570.000	0	0	592.410.000	(17.000.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.840.000	606.570.000	0	0	609.410.000	2.840.000	589.570.000	0	0	592.410.000	(17.000.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.380.052.512	0	0	0	1.380.052.512	1.381.752.024	0	0	0	1.381.752.024	1.699.512
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000	0	0	0	178.000.000	178.000.000	0	0	0	178.000.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.198.052.512	0	0	0	1.198.052.512	1.199.752.024	0	0	0	1.199.752.024	1.699.512

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.482.240	0	0	0	875.482.240	875.929.480	0	0	0	875.929.480	447.240
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	831.482.240	0	0	0	831.482.240	831.929.480	0	0	0	831.929.480	447.240
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000	0	0	0	44.000.000	44.000.000	0	0	0	44.000.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	319.549.344	0	0	0	319.549.344	319.817.688	0	0	0	319.817.688	268.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	112.429.344	0	0	0	112.429.344	112.697.688	0	0	0	112.697.688	268.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	112.429.344	0	0	0	112.429.344	112.697.688	0	0	0	112.697.688	268.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	207.120.000	0	0	0	207.120.000	207.120.000	0	0	0	207.120.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	207.120.000	0	0	0	207.120.000	207.120.000	0	0	0	207.120.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	566.255.792	0	0	0	566.255.792	566.613.584	0	0	0	566.613.584	357.792
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	566.255.792	0	0	0	566.255.792	566.613.584	0	0	0	566.613.584	357.792
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	122.320.000	0	0	0	122.320.000	122.320.000	0	0	0	122.320.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	443.935.792	0	0	0	443.935.792	444.293.584	0	0	0	444.293.584	357.792
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	840.609.616	0	0	0	840.609.616	842.130.232	0	0	0	842.130.232	1.520.616
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	840.609.616	0	0	0	840.609.616	842.130.232	0	0	0	842.130.232	1.520.616
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	670.770.272	0	0	0	670.770.272	672.022.544	0	0	0	672.022.544	1.252.272
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	169.839.344	0	0	0	169.839.344	170.107.688	0	0	0	170.107.688	268.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	818.049.344	0	0	0	818.049.344	818.317.688	0	0	0	818.317.688	268.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	818.049.344	0	0	0	818.049.344	818.317.688	0	0	0	818.317.688	268.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	121.549.344	0	0	0	121.549.344	121.817.688	0	0	0	121.817.688	268.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	559.091.000	0	0	0	559.091.000	453.240.000	0	0	0	453.240.000	(105.851.000)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	137.409.000	0	0	0	137.409.000	243.260.000	0	0	0	243.260.000	105.851.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	97.028.096	0	0	0	97.028.096	97.206.992	0	0	0	97.206.992	178.896
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang	97.028.096	0	0	0	97.028.096	97.206.992	0	0	0	97.206.992	178.896

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi											
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	97.028.096	0	0	0	97.028.096	97.206.992	0	0	0	97.206.992	178.896
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.023.489.203	117.587.200	0	0	25.141.076.403	25.072.543.803	222.332.600	0	0	25.294.876.403	153.800.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	25.023.489.203	117.587.200	0	0	25.141.076.403	25.072.543.803	222.332.600	0	0	25.294.876.403	153.800.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.471.199.600	0	0	0	3.471.199.600	1.499.999.600	0	0	0	1.499.999.600	(1.971.200.000)
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.471.199.600	0	0	0	3.471.199.600	1.499.999.600	0	0	0	1.499.999.600	(1.971.200.000)
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	2.571.199.800	0	0	0	2.571.199.800	599.999.800	0	0	0	599.999.800	(1.971.200.000)
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	799.999.800	0	0	0	799.999.800	799.999.800	0	0	0	799.999.800	0
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.052.289.603	117.587.200	0	0	21.169.876.803	23.072.544.203	222.332.600	0	0	23.294.876.803	2.125.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	12.902.289.603	117.587.200	0	0	13.019.876.803	12.797.544.203	222.332.600	0	0	13.019.876.803	0
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	12.902.289.603	117.587.200	0	0	13.019.876.803	12.797.544.203	222.332.600	0	0	13.019.876.803	0
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.150.000.000	0	0	0	8.150.000.000	10.275.000.000	0	0	0	10.275.000.000	2.125.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	8.150.000.000	0	0	0	8.150.000.000	10.275.000.000	0	0	0	10.275.000.000	2.125.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440	540.404.680	233.471.000	0	0	773.875.680	364.240
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440	540.404.680	233.471.000	0	0	773.875.680	364.240
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440	540.404.680	233.471.000	0	0	773.875.680	364.240
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440	540.404.680	233.471.000	0	0	773.875.680	364.240
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	211.129.848	59.743.000	0	0	270.872.848	205.774.296	94.030.000	0	0	299.804.296	28.931.448
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	189.411.396	86.437.000	0	0	275.848.396	187.660.292	74.112.000	0	0	261.772.292	(14.076.104)
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	146.791.196	79.999.000	0	0	226.790.196	146.970.092	65.329.000	0	0	212.299.092	(14.491.104)
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696	870.981.992	283.961.000	0	0	1.154.942.992	28.296

PROVINSI BALI																				
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN																				
TAHUN ANGGARAN 2023																				
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
										Belanja					Belanja					
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696	870.981.992	283.961.000	0	0	1.154.942.992	28.296			
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696	870.981.992	283.961.000	0	0	1.154.942.992	28.296			
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	658.423.048	11.900.000	0	0	670.323.048	658.512.096	11.900.000	0	0	670.412.096	89.048			
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	326.288.048	11.900.000	0	0	338.188.048	326.377.496	11.900.000	0	0	338.277.496	89.448			
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	332.135.000	0	0	0	332.135.000	332.134.600	0	0	0	332.134.600	(400)			
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	212.530.648	272.061.000	0	0	484.591.648	212.469.896	272.061.000	0	0	484.530.896	(60.752)			
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	212.530.648	272.061.000	0	0	484.591.648	212.469.896	272.061.000	0	0	484.530.896	(60.752)			
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	597.118.342.874	3.817.499.700	0	0	600.935.842.574	617.889.112.360	3.775.874.100	0	0	621.664.986.460	20.729.143.886			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kebudayaan	98.406.175.739	785.545.900	0	0	99.191.721.639	116.897.088.101	785.545.900	0	0	117.682.634.001	18.490.912.362			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.772.590.455	785.545.900	0	0	28.558.136.355	25.968.562.953	785.545.900	0	0	26.754.108.853	(1.804.027.502)			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.397.746	0	0	0	170.397.746	170.576.642	0	0	0	170.576.642	178.896			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.908.596	0	0	0	150.908.596	151.087.492	0	0	0	151.087.492	178.896			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.489.150	0	0	0	19.489.150	19.489.150	0	0	0	19.489.150	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.085.567.129	0	0	0	23.085.567.129	21.275.993.851	0	0	0	21.275.993.851	(1.809.573.278)			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.595.849.753	0	0	0	22.595.849.753	20.785.203.099	0	0	0	20.785.203.099	(1.810.646.654)			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	479.717.376	0	0	0	479.717.376	480.790.752	0	0	0	480.790.752	1.073.376			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.249.700	375.545.900	0	0	860.795.600	485.249.700	375.545.900	0	0	860.795.600	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.109.700	0	0	0	42.109.700	42.109.700	0	0	0	42.109.700	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	375.545.900	0	0	375.545.900	0	375.545.900	0	0	375.545.900	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	0	0	0	110.000.000	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.643.000	0	0	0	19.643.000	19.643.000	0	0	0	19.643.000	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273.497.000	0	0	0	273.497.000	273.497.000	0	0	0	273.497.000	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.385.276.520	110.000.000	0	0	1.495.276.520	1.386.618.240	110.000.000	0	0	1.496.618.240	1.341.720			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0			
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0			

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN																	
TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						dan Listrik											
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.150.000	110.000.000	0	0	223.150.000	113.150.000	110.000.000	0	0	223.150.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	766.626.520	0	0	0	766.626.520	767.968.240	0	0	0	767.968.240	1.341.720
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.646.099.360	300.000.000	0	0	2.946.099.360	2.650.124.520	300.000.000	0	0	2.950.124.520	4.025.160
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.154.202.888	0	0	0	1.154.202.888	1.154.739.576	0	0	0	1.154.739.576	536.688
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.315.000	0	0	0	30.315.000	30.315.000	0	0	0	30.315.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.461.581.472	300.000.000	0	0	1.761.581.472	1.465.069.944	300.000.000	0	0	1.765.069.944	3.488.472
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	68.728.487.248	0	0	0	68.728.487.248	88.694.075.796	0	0	0	88.694.075.796	19.965.588.548
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.412.686.392	0	0	0	32.412.686.392	32.039.324.584	0	0	0	32.039.324.584	(373.361.808)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.719.707.688	0	0	0	4.719.707.688	3.742.082.376	0	0	0	3.742.082.376	(977.625.312)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	27.692.978.704	0	0	0	27.692.978.704	28.297.242.208	0	0	0	28.297.242.208	604.263.504
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	17.976.319.276	0	0	0	17.976.319.276	23.208.875.152	0	0	0	23.208.875.152	5.232.555.876
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	16.229.823.136	0	0	0	16.229.823.136	21.541.474.272	0	0	0	21.541.474.272	5.311.651.136
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.746.496.140	0	0	0	1.746.496.140	1.667.400.880	0	0	0	1.667.400.880	(79.095.260)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18.339.481.580	0	0	0	18.339.481.580	33.445.876.060	0	0	0	33.445.876.060	15.106.394.480
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	18.339.481.580	0	0	0	18.339.481.580	33.445.876.060	0	0	0	33.445.876.060	15.106.394.480
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	884.750.200	0	0	0	884.750.200	1.469.954.380	0	0	0	1.469.954.380	585.204.180
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	884.750.200	0	0	0	884.750.200	1.469.954.380	0	0	0	1.469.954.380	585.204.180
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	496.429.600	0	0	0	496.429.600	1.082.157.100	0	0	0	1.082.157.100	585.727.500
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	388.320.600	0	0	0	388.320.600	387.797.280	0	0	0	387.797.280	(523.320)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	117.634.800	0	0	0	117.634.800	216.191.400	0	0	0	216.191.400	98.556.600
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	117.634.800	0	0	0	117.634.800	216.191.400	0	0	0	216.191.400	98.556.600
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	117.634.800	0	0	0	117.634.800	216.191.400	0	0	0	216.191.400	98.556.600

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN																	
TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	902.713.036	0	0	0	902.713.036	548.303.572	0	0	0	548.303.572	(354.409.464)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	423.452.840	0	0	0	423.452.840	373.625.080	0	0	0	373.625.080	(49.827.760)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	423.452.840	0	0	0	423.452.840	373.625.080	0	0	0	373.625.080	(49.827.760)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	479.260.196	0	0	0	479.260.196	174.678.492	0	0	0	174.678.492	(304.581.704)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	247.008.696	0	0	0	247.008.696	83.940.092	0	0	0	83.940.092	(163.068.604)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	121.038.400	0	0	0	121.038.400	89.288.400	0	0	0	89.288.400	(31.750.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	111.213.100	0	0	0	111.213.100	1.450.000	0	0	0	1.450.000	(109.763.100)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001				UPTD Taman Budaya	6.098.913.184	514.248.000	0	0	6.613.161.184	6.480.220.168	1.102.068.000	0	0	7.582.288.168	969.126.984
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.668.913.184	514.248.000	0	0	5.183.161.184	5.050.220.168	1.102.068.000	0	0	6.152.288.168	969.126.984
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.873.100	0	0	0	268.873.100	268.873.100	0	0	0	268.873.100	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178.585.000	0	0	0	178.585.000	178.585.000	0	0	0	178.585.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.920.800	0	0	0	7.920.800	7.920.800	0	0	0	7.920.800	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.500.000	0	0	0	47.500.000	47.500.000	0	0	0	47.500.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.921.000	0	0	0	8.921.000	8.921.000	0	0	0	8.921.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.380.300	0	0	0	8.380.300	8.380.300	0	0	0	8.380.300	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.566.000	0	0	0	17.566.000	17.566.000	0	0	0	17.566.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.612.000	170.748.000	0	0	252.360.000	81.768.000	758.568.000	0	0	840.336.000	587.976.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.612.000	170.748.000	0	0	252.360.000	81.768.000	758.568.000	0	0	840.336.000	587.976.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.313.421.092	153.500.000	0	0	2.466.921.092	2.501.978.084	153.500.000	0	0	2.655.478.084	188.556.992
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.331.000	0	0	0	1.331.000	1.331.000	0	0	0	1.331.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	896.000.000	0	0	0	896.000.000	1.016.000.000	0	0	0	1.016.000.000	120.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.390.000	153.500.000	0	0	277.890.000	190.353.000	153.500.000	0	0	343.853.000	65.963.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.291.700.092	0	0	0	1.291.700.092	1.294.294.084	0	0	0	1.294.294.084	2.593.992
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.005.006.992	190.000.000	0	0	2.195.006.992	2.197.600.984	190.000.000	0	0	2.387.600.984	192.593.992
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.800.000	0	0	0	158.800.000	158.800.000	0	0	0	158.800.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.390.000	0	0	0	189.390.000	189.390.000	0	0	0	189.390.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.656.816.992	190.000.000	0	0	1.846.816.992	1.849.410.984	190.000.000	0	0	2.039.410.984	192.593.992
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.430.000.000	0	0	0	1.430.000.000	1.430.000.000	0	0	0	1.430.000.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	1.430.000.000	0	0	0	1.430.000.000	1.430.000.000	0	0	0	1.430.000.000	0

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						(satu) Daerah Provinsi											
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.430.000.000	0	0	0	1.430.000.000	1.430.000.000	0	0	0	1.430.000.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002				UPTD Museum Bali	4.174.393.076	506.756.600	0	0	4.681.149.676	4.180.573.852	415.000.000	0	0	4.595.573.852	(85.575.824)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.221.908.276	459.241.400	0	0	2.681.149.676	2.180.573.852	415.000.000	0	0	2.595.573.852	(85.575.824)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.442.400	0	0	0	245.442.400	227.793.400	0	0	0	227.793.400	(17.649.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.772.800	0	0	0	37.772.800	37.772.800	0	0	0	37.772.800	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.050.000	0	0	0	106.050.000	106.050.000	0	0	0	106.050.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.141.000	0	0	0	25.141.000	25.141.000	0	0	0	25.141.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.505.600	0	0	0	5.505.600	5.505.600	0	0	0	5.505.600	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.973.000	0	0	0	70.973.000	53.324.000	0	0	0	53.324.000	(17.649.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.215.000	36.643.400	0	0	49.858.400	13.215.000	0	0	0	13.215.000	(36.643.400)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.215.000	36.643.400	0	0	49.858.400	13.215.000	0	0	0	13.215.000	(36.643.400)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.705.468	67.598.000	0	0	1.034.303.468	961.141.636	60.000.000	0	0	1.021.141.636	(13.161.832)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.562.000	0	0	0	6.562.000	1.562.000	0	0	0	1.562.000	(5.000.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.850.000	0	0	0	206.850.000	206.850.000	0	0	0	206.850.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.020.500	60.000.000	0	0	84.020.500	24.020.500	60.000.000	0	0	84.020.500	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	729.272.968	7.598.000	0	0	736.870.968	728.709.136	0	0	0	728.709.136	(8.161.832)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.545.408	355.000.000	0	0	1.351.545.408	978.423.816	355.000.000	0	0	1.333.423.816	(18.121.592)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.940.000	0	0	0	117.940.000	117.940.000	0	0	0	117.940.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.200.000	25.000.000	0	0	64.200.000	19.200.000	25.000.000	0	0	44.200.000	(20.000.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	839.405.408	330.000.000	0	0	1.169.405.408	841.283.816	330.000.000	0	0	1.171.283.816	1.878.408
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.952.484.800	47.515.200	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	1.952.484.800	47.515.200	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	687.424.600	0	0	0	687.424.600	687.424.600	0	0	0	687.424.600	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.062.590.000	0	0	0	1.062.590.000	1.062.590.000	0	0	0	1.062.590.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	202.470.200	47.515.200	0	0	249.985.400	249.985.400	0	0	0	249.985.400	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003				UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	5.123.288.172	438.245.000	0	0	5.561.533.172	5.012.016.104	358.245.000	0	0	5.370.261.104	(191.272.068)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.123.288.172	438.245.000	0	0	3.561.533.172	3.012.016.104	358.245.000	0	0	3.370.261.104	(191.272.068)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.199.540	178.245.000	0	0	361.444.540	154.365.040	158.245.000	0	0	312.610.040	(48.834.500)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	108.151.840	0	0	0	108.151.840	88.521.840	0	0	0	88.521.840	(19.630.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.584.200	178.245.000	0	0	186.829.200	8.584.200	158.245.000	0	0	166.829.200	(20.000.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.950.000	0	0	0	48.950.000	44.300.000	0	0	0	44.300.000	(4.650.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.413.500	0	0	0	12.413.500	7.859.000	0	0	0	7.859.000	(4.554.500)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.100.000	0	0	0	5.100.000	5.100.000	0	0	0	5.100.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.747.118.632	70.000.000	0	0	2.817.118.632	2.727.311.064	50.000.000	0	0	2.777.311.064	(39.807.568)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0	350.000.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.300.000	70.000.000	0	0	73.300.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	(23.300.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.392.318.632	0	0	0	2.392.318.632	2.375.811.064	0	0	0	2.375.811.064	(16.507.568)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.970.000	190.000.000	0	0	382.970.000	130.340.000	150.000.000	0	0	280.340.000	(102.630.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.930.000	0	0	0	148.930.000	111.820.000	0	0	0	111.820.000	(37.110.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.040.000	40.000.000	0	0	84.040.000	18.520.000	0	0	0	18.520.000	(65.520.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	600.000.000	0	0	0	600.000.000	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.040.080.000	0	0	0	1.040.080.000	1.242.680.000	0	0	0	1.242.680.000	202.600.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	359.920.000	0	0	0	359.920.000	157.320.000	0	0	0	157.320.000	(202.600.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000				Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	483.315.572.703	1.572.704.200	0	0	484.888.276.903	485.319.214.135	1.115.015.200	0	0	486.434.229.335	1.545.952.432
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.924.389.763	1.572.704.200	0	0	15.497.093.963	12.844.994.411	1.115.015.200	0	0	13.960.009.611	(1.537.084.352)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.224.800	0	0	0	23.224.800	20.389.800	0	0	0	20.389.800	(2.835.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.160.200	0	0	0	18.160.200	15.325.200	0	0	0	15.325.200	(2.835.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.600	0	0	0	5.064.600	5.064.600	0	0	0	5.064.600	0
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.335.459.359	0	0	0	10.335.459.359	9.390.526.983	0	0	0	9.390.526.983	(944.932.376)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.335.459.359	0	0	0	10.335.459.359	9.390.526.983	0	0	0	9.390.526.983	(944.932.376)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	668.699.400	0	0	0	668.699.400	546.764.400	0	0	0	546.764.400	(121.935.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.432.900	0	0	0	6.432.900	6.432.900	0	0	0	6.432.900	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.303.800	0	0	0	34.303.800	34.303.800	0	0	0	34.303.800	0
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.095.700	0	0	0	5.095.700	5.095.700	0	0	0	5.095.700	0
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.867.000	0	0	0	622.867.000	500.932.000	0	0	0	500.932.000	(121.935.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1.172.704.200	0	0	1.172.704.200	0	715.015.200	0	0	715.015.200	(457.689.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1.172.704.200	0	0	1.172.704.200	0	715.015.200	0	0	715.015.200	(457.689.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.278.380	0	0	0	550.278.380	550.278.380	0	0	0	550.278.380	0
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.278.380	0	0	0	550.278.380	550.278.380	0	0	0	550.278.380	0
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.346.727.824	400.000.000	0	0	2.746.727.824	2.337.034.848	400.000.000	0	0	2.737.034.848	(9.692.976)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	816.923.896	0	0	0	816.923.896	860.090.792	0	0	0	860.090.792	43.166.896
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.529.803.928	400.000.000	0	0	1.929.803.928	1.476.944.056	400.000.000	0	0	1.876.944.056	(52.859.872)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	469.391.182.940	0	0	0	469.391.182.940	472.474.219.724	0	0	0	472.474.219.724	3.083.036.784
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	467.923.363.960	0	0	0	467.923.363.960	471.058.358.064	0	0	0	471.058.358.064	3.134.994.104
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	467.521.683.416	0	0	0	467.521.683.416	470.751.239.176	0	0	0	470.751.239.176	3.229.555.760
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	401.680.544	0	0	0	401.680.544	307.118.888	0	0	0	307.118.888	(94.561.656)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	889.435.088	0	0	0	889.435.088	565.044.776	0	0	0	565.044.776	(324.390.312)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	444.049.500	0	0	0	444.049.500	222.647.500	0	0	0	222.647.500	(221.402.000)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	445.385.588	0	0	0	445.385.588	342.397.276	0	0	0	342.397.276	(102.988.312)
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	578.383.892	0	0	0	578.383.892	850.816.884	0	0	0	850.816.884	272.432.992
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	578.383.892	0	0	0	578.383.892	850.816.884	0	0	0	850.816.884	272.432.992
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284	512.451.764	75.000.000	0	0	587.451.764	(129.600.520)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005				Biro Organisasi	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284	512.451.764	75.000.000	0	0	587.451.764	(129.600.520)
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284	512.451.764	75.000.000	0	0	587.451.764	(129.600.520)
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	397.702.536	175.000.000	0	0	572.702.536	401.819.568	75.000.000	0	0	476.819.568	(95.882.968)
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	49.849.648	0	0	0	49.849.648	49.939.096	0	0	0	49.939.096	89.448
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	89.976.148	0	0	0	89.976.148	77.335.596	0	0	0	77.335.596	(12.640.552)
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	220.400.292	0	0	0	220.400.292	236.978.980	0	0	0	236.978.980	16.578.688
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	37.476.448	175.000.000	0	0	212.476.448	37.565.896	75.000.000	0	0	112.565.896	(99.910.552)
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	144.349.748	0	0	0	144.349.748	110.632.196	0	0	0	110.632.196	(33.717.552)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	144.349.748	0	0	0	144.349.748	110.632.196	0	0	0	110.632.196	(33.717.552)
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	570.198.832	0	0	0	570.198.832	523.603.864	0	0	0	523.603.864	(46.594.968)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003				Biro Umum dan Protokol	570.198.832	0	0	0	570.198.832	523.603.864	0	0	0	523.603.864	(46.594.968)
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	570.198.832	0	0	0	570.198.832	523.603.864	0	0	0	523.603.864	(46.594.968)
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	262.363.992	0	0	0	262.363.992	253.421.784	0	0	0	253.421.784	(8.942.208)
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	262.363.992	0	0	0	262.363.992	253.421.784	0	0	0	253.421.784	(8.942.208)
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	307.834.840	0	0	0	307.834.840	270.182.080	0	0	0	270.182.080	(37.652.760)
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	40.758.200	0	0	0	40.758.200	5.958.200	0	0	0	5.958.200	(34.800.000)
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	267.076.640	0	0	0	267.076.640	264.223.880	0	0	0	264.223.880	(2.852.760)
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	199.310.159.383	9.724.723.400	0	0	209.034.882.783	203.760.161.468	7.977.682.525	0	0	211.737.843.993	2.702.961.210
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	25.191.615.361	2.873.500.000	0	0	28.065.115.361	25.308.412.255	2.360.000.000	0	0	27.668.412.255	(396.703.106)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kelautan dan Perikanan	22.213.009.021	0	0	0	22.213.009.021	22.066.648.465	0	0	0	22.066.648.465	(146.360.556)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.342.259.433	0	0	0	21.342.259.433	20.459.142.189	0	0	0	20.459.142.189	(883.117.244)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.045.100	0	0	0	40.045.100	40.045.100	0	0	0	40.045.100	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.689.600	0	0	0	19.689.600	19.689.600	0	0	0	19.689.600	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.350.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.350.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.955.500	0	0	0	14.955.500	14.955.500	0	0	0	14.955.500	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.089.377.096	0	0	0	20.089.377.096	18.971.643.714	0	0	0	18.971.643.714	(1.117.733.382)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.089.377.096	0	0	0	20.089.377.096	18.971.643.714	0	0	0	18.971.643.714	(1.117.733.382)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.212.837.237	0	0	0	1.212.837.237	1.397.453.375	0	0	0	1.397.453.375	184.616.138
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.757.384	0	0	0	436.757.384	582.572.968	0	0	0	582.572.968	145.815.584
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	776.079.853	0	0	0	776.079.853	814.880.407	0	0	0	814.880.407	38.800.554
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	78.952.896	0	0	0	78.952.896	79.131.792	0	0	0	79.131.792	178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78.952.896	0	0	0	78.952.896	79.131.792	0	0	0	79.131.792	178.896

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78.952.896	0	0	0	78.952.896	79.131.792	0	0	0	79.131.792	178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	624.822.396	0	0	0	624.822.396	1.225.001.292	0	0	0	1.225.001.292	600.178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	624.822.396	0	0	0	624.822.396	1.225.001.292	0	0	0	1.225.001.292	600.178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	624.822.396	0	0	0	624.822.396	1.225.001.292	0	0	0	1.225.001.292	600.178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.101.400	0	0	0	42.101.400	178.321.400	0	0	0	178.321.400	136.220.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	42.101.400	0	0	0	42.101.400	178.321.400	0	0	0	178.321.400	136.220.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	24.000.000	0	0	0	24.000.000	160.220.000	0	0	0	160.220.000	136.220.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	18.101.400	0	0	0	18.101.400	18.101.400	0	0	0	18.101.400	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	124.872.896	0	0	0	124.872.896	125.051.792	0	0	0	125.051.792	178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	124.872.896	0	0	0	124.872.896	125.051.792	0	0	0	125.051.792	178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	124.872.896	0	0	0	124.872.896	125.051.792	0	0	0	125.051.792	178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001				UPTD Produksi Perikanan Budidaya	837.661.742	0	0	0	837.661.742	852.656.456	0	0	0	852.656.456	14.994.714
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	602.662.942	0	0	0	602.662.942	617.657.656	0	0	0	617.657.656	14.994.714
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.302.800	0	0	0	34.302.800	34.302.800	0	0	0	34.302.800	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.302.800	0	0	0	34.302.800	34.302.800	0	0	0	34.302.800	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.360.142	0	0	0	568.360.142	583.354.856	0	0	0	583.354.856	14.994.714
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.307.896	0	0	0	152.307.896	152.486.792	0	0	0	152.486.792	178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	416.052.246	0	0	0	416.052.246	430.868.064	0	0	0	430.868.064	14.815.818
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	234.998.800	0	0	0	234.998.800	234.998.800	0	0	0	234.998.800	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	234.998.800	0	0	0	234.998.800	234.998.800	0	0	0	234.998.800	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	234.998.800	0	0	0	234.998.800	234.998.800	0	0	0	234.998.800	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002				UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	765.044.398	2.800.000.000	0	0	3.565.044.398	788.670.534	2.288.000.000	0	0	3.076.670.534	(488.373.864)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	529.799.598	0	0	0	529.799.598	553.425.734	88.000.000	0	0	641.425.734	111.626.136
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.851.300	0	0	0	36.851.300	36.851.300	0	0	0	36.851.300	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.851.300	0	0	0	36.851.300	36.851.300	0	0	0	36.851.300	0

PROVINSI BALI																		
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																		
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
						Belanja					Belanja							
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.948.298	0	0	0	492.948.298	516.574.434	88.000.000	0	0	604.574.434	111.626.136	
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.247.896	0	0	0	123.247.896	123.426.792	0	0	0	123.426.792	178.896
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	369.700.402	0	0	0	369.700.402	393.147.642	88.000.000	0	0	481.147.642	111.447.240
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	235.244.800	2.800.000.000	0	0	3.035.244.800	235.244.800	2.200.000.000	0	0	2.435.244.800	(600.000.000)
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	235.244.800	2.800.000.000	0	0	3.035.244.800	235.244.800	2.200.000.000	0	0	2.435.244.800	(600.000.000)
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	230.744.800	2.800.000.000	0	0	3.030.744.800	230.744.800	2.200.000.000	0	0	2.430.744.800	(600.000.000)
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003				UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	1.111.958.304	73.500.000	0	0	1.185.458.304	1.336.316.008	72.000.000	0	0	1.408.316.008	222.857.704
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.011.958.304	73.500.000	0	0	1.085.458.304	1.015.486.008	72.000.000	0	0	1.087.486.008	2.027.704
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.348.600	0	0	0	40.348.600	40.319.000	0	0	0	40.319.000	(29.600)
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.867.600	0	0	0	2.867.600	2.867.600	0	0	0	2.867.600	0
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.481.000	0	0	0	37.481.000	37.451.400	0	0	0	37.451.400	(29.600)
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	971.609.704	73.500.000	0	0	1.045.109.704	975.167.008	72.000.000	0	0	1.047.167.008	2.057.304
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.422.400	0	0	0	82.422.400	82.422.400	0	0	0	82.422.400	0
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	889.187.304	73.500.000	0	0	962.687.304	892.744.608	72.000.000	0	0	964.744.608	2.057.304
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	100.000.000	0	0	0	100.000.000	320.830.000	0	0	0	320.830.000	220.830.000
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100.000.000	0	0	0	100.000.000	320.830.000	0	0	0	320.830.000	220.830.000
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000	0	0	0	100.000.000	320.830.000	0	0	0	320.830.000	220.830.000
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004				UPTD Pelabuhan Perikanan	263.941.896	0	0	0	263.941.896	264.120.792	0	0	0	264.120.792	178.896
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	187.941.896	0	0	0	187.941.896	188.120.792	0	0	0	188.120.792	178.896
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.405.500	0	0	0	39.405.500	39.405.500	0	0	0	39.405.500	0
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.352.000	0	0	0	3.352.000	3.352.000	0	0	0	3.352.000	0
	3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.053.500	0	0	0	36.053.500	36.053.500	0	0	0	36.053.500	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.536.396	0	0	0	148.536.396	148.715.292	0	0	0	148.715.292	178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.070.400	0	0	0	62.070.400	62.070.400	0	0	0	62.070.400	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.465.996	0	0	0	86.465.996	86.644.892	0	0	0	86.644.892	178.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	76.000.000	0	0	0	76.000.000	76.000.000	0	0	0	76.000.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	03	1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	76.000.000	0	0	0	76.000.000	76.000.000	0	0	0	76.000.000	0
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	03	1.06	01		Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	76.000.000	0	0	0	76.000.000	76.000.000	0	0	0	76.000.000	0
3	26						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	15.151.817.368	0	0	0	15.151.817.368	14.165.518.756	22.950.000	0	0	14.188.468.756	(963.348.612)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000					Dinas Pariwisata	15.151.817.368	0	0	0	15.151.817.368	14.165.518.756	22.950.000	0	0	14.188.468.756	(963.348.612)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.159.074.684	0	0	0	13.159.074.684	12.230.358.988	22.950.000	0	0	12.253.308.988	(905.765.696)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.205.094	0	0	0	118.205.094	116.418.538	0	0	0	116.418.538	(1.786.556)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.666.848	0	0	0	40.666.848	39.315.296	0	0	0	39.315.296	(1.351.552)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.538.246	0	0	0	77.538.246	77.103.242	0	0	0	77.103.242	(435.004)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.181.934.940	0	0	0	11.181.934.940	10.206.695.140	0	0	0	10.206.695.140	(975.239.800)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.181.934.940	0	0	0	11.181.934.940	10.206.695.140	0	0	0	10.206.695.140	(975.239.800)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.330.350	0	0	0	171.330.350	212.983.350	22.950.000	0	0	235.933.350	64.603.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.112.000	0	0	0	5.112.000	5.112.000	0	0	0	5.112.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.886.050	0	0	0	18.886.050	18.886.050	22.950.000	0	0	41.836.050	22.950.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.000.000	0	0	0	63.000.000	63.000.000	0	0	0	63.000.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.174.300	0	0	0	9.174.300	9.174.300	0	0	0	9.174.300	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.220.000	0	0	0	2.220.000	2.220.000	0	0	0	2.220.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.938.000	0	0	0	72.938.000	114.591.000	0	0	0	114.591.000	41.653.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.350.000	0	0	0	406.350.000	427.573.000	0	0	0	427.573.000	21.223.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.350.000	0	0	0	2.350.000	2.350.000	0	0	0	2.350.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.000.000	0	0	0	116.000.000	116.000.000	0	0	0	116.000.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.000.000	0	0	0	288.000.000	309.223.000	0	0	0	309.223.000	21.223.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.281.254.300	0	0	0	1.281.254.300	1.266.688.960	0	0	0	1.266.688.960	(14.565.340)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.743.100	0	0	0	321.743.100	304.941.560	0	0	0	304.941.560	(16.801.540)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	936.911.200	0	0	0	936.911.200	939.147.400	0	0	0	939.147.400	2.236.200
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.600.000	0	0	0	22.600.000	22.600.000	0	0	0	22.600.000	0
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	602.476.980	0	0	0	602.476.980	572.167.960	0	0	0	572.167.960	(30.309.020)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	47.715.600	0	0	0	47.715.600	45.555.100	0	0	0	45.555.100	(2.160.500)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	47.715.600	0	0	0	47.715.600	45.555.100	0	0	0	45.555.100	(2.160.500)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	428.022.184	0	0	0	428.022.184	422.954.768	0	0	0	422.954.768	(5.067.416)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	428.022.184	0	0	0	428.022.184	422.954.768	0	0	0	422.954.768	(5.067.416)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	126.739.196	0	0	0	126.739.196	103.658.092	0	0	0	103.658.092	(23.081.104)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	108.040.396	0	0	0	108.040.396	90.089.292	0	0	0	90.089.292	(17.951.104)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	18.698.800	0	0	0	18.698.800	13.568.800	0	0	0	13.568.800	(5.130.000)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	555.588.532	0	0	0	555.588.532	541.311.564	0	0	0	541.311.564	(14.276.968)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	555.588.532	0	0	0	555.588.532	541.311.564	0	0	0	541.311.564	(14.276.968)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	184.913.244	0	0	0	184.913.244	178.681.588	0	0	0	178.681.588	(6.231.656)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	170.527.792	0	0	0	170.527.792	162.525.584	0	0	0	162.525.584	(8.002.208)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	200.147.496	0	0	0	200.147.496	200.104.392	0	0	0	200.104.392	(43.104)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	264.380.192	0	0	0	264.380.192	229.914.784	0	0	0	229.914.784	(34.465.408)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	137.623.196	0	0	0	137.623.196	119.182.092	0	0	0	119.182.092	(18.441.104)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	31.823.200	0	0	0	31.823.200	24.603.200	0	0	0	24.603.200	(7.220.000)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	105.799.996	0	0	0	105.799.996	94.578.892	0	0	0	94.578.892	(11.221.104)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	126.756.996	0	0	0	126.756.996	110.732.692	0	0	0	110.732.692	(16.024.304)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	126.756.996	0	0	0	126.756.996	110.732.692	0	0	0	110.732.692	(16.024.304)
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	570.296.980	0	0	0	570.296.980	591.765.460	0	0	0	591.765.460	21.468.480
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	570.296.980	0	0	0	570.296.980	591.765.460	0	0	0	591.765.460	21.468.480
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	176.049.944	0	0	0	176.049.944	174.038.288	0	0	0	174.038.288	(2.011.656)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	175.663.144	0	0	0	175.663.144	175.931.488	0	0	0	175.931.488	268.344
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	218.583.892	0	0	0	218.583.892	241.795.684	0	0	0	241.795.684	23.211.792
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	88.363.458.962	4.287.194.700	0	0	92.650.653.662	87.690.149.003	4.292.791.200	0	0	91.982.940.203	(667.713.459)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.924.319.052	60.000.000	0	0	75.984.319.052	75.292.330.713	60.000.000	0	0	75.352.330.713	(631.988.339)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.192.375.802	60.000.000	0	0	48.252.375.802	45.131.119.663	60.000.000	0	0	45.191.119.663	(3.061.256.139)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	701.484.668	0	0	0	701.484.668	685.225.836	0	0	0	685.225.836	(16.258.832)
	3	27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	320.239.284	0	0	0	320.239.284	318.704.868	0	0	0	318.704.868	(1.534.416)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	381.245.384	0	0	0	381.245.384	366.520.968	0	0	0	366.520.968	(14.724.416)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.067.867.866	0	0	0	44.067.867.866	41.019.203.191	0	0	0	41.019.203.191	(3.048.664.675)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.669.999.186	0	0	0	43.669.999.186	40.621.390.031	0	0	0	40.621.390.031	(3.048.609.155)
	3	27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	397.868.680	0	0	0	397.868.680	397.813.160	0	0	0	397.813.160	(55.520)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.952.700	0	0	0	96.952.700	96.952.700	0	0	0	96.952.700	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.755.700	0	0	0	16.755.700	16.755.700	0	0	0	16.755.700	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.597.000	0	0	0	12.597.000	12.597.000	0	0	0	12.597.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000	0	0	0	57.500.000	57.500.000	0	0	0	57.500.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.100.000	0	0	0	10.100.000	10.100.000	0	0	0	10.100.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.448.684	0	0	0	726.448.684	727.164.268	0	0	0	727.164.268	715.584
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	407.000.000	0	0	0	407.000.000	407.000.000	0	0	0	407.000.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.448.684	0	0	0	319.448.684	320.164.268	0	0	0	320.164.268	715.584
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.599.621.884	60.000.000	0	0	2.659.621.884	2.602.573.668	60.000.000	0	0	2.662.573.668	2.951.784
	3	27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.784.154.372	0	0	0	1.784.154.372	1.785.406.644	0	0	0	1.785.406.644	1.252.272
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	730.852.512	0	0	0	730.852.512	732.552.024	0	0	0	732.552.024	1.699.512
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.615.000	60.000.000	0	0	144.615.000	84.615.000	60.000.000	0	0	144.615.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.678.859.990	0	0	0	18.678.859.990	21.645.027.630	0	0	0	21.645.027.630	2.966.167.640
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	10.434.636.890	0	0	0	10.434.636.890	10.473.712.130	0	0	0	10.473.712.130	39.075.240
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	10.434.636.890	0	0	0	10.434.636.890	10.473.712.130	0	0	0	10.473.712.130	39.075.240
	3	27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.813.474.720	0	0	0	3.813.474.720	3.857.792.640	0	0	0	3.857.792.640	44.317.920
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1.767.999.140	0	0	0	1.767.999.140	1.809.326.380	0	0	0	1.809.326.380	41.327.240

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Benih/Bibit Hortikultura											
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	530.455.988	0	0	0	530.455.988	530.992.676	0	0	0	530.992.676	536.688
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.515.019.592	0	0	0	1.515.019.592	1.517.473.584	0	0	0	1.517.473.584	2.453.992
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.430.748.380	0	0	0	4.430.748.380	7.313.522.860	0	0	0	7.313.522.860	2.882.774.480
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.430.748.380	0	0	0	4.430.748.380	7.313.522.860	0	0	0	7.313.522.860	2.882.774.480
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.319.824.232	0	0	0	1.319.824.232	1.316.330.464	0	0	0	1.316.330.464	(3.493.768)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	1.319.824.232	0	0	0	1.319.824.232	1.316.330.464	0	0	0	1.316.330.464	(3.493.768)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.123.328.992	0	0	0	1.123.328.992	1.124.022.984	0	0	0	1.124.022.984	693.992
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	196.495.240	0	0	0	196.495.240	192.307.480	0	0	0	192.307.480	(4.187.760)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7.394.496.692	0	0	0	7.394.496.692	6.864.064.484	0	0	0	6.864.064.484	(530.432.208)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.341.410.244	0	0	0	7.341.410.244	6.813.548.588	0	0	0	6.813.548.588	(527.861.656)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	7.341.410.244	0	0	0	7.341.410.244	6.813.548.588	0	0	0	6.813.548.588	(527.861.656)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	53.086.448	0	0	0	53.086.448	50.515.896	0	0	0	50.515.896	(2.570.552)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	53.086.448	0	0	0	53.086.448	50.515.896	0	0	0	50.515.896	(2.570.552)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	338.762.336	0	0	0	338.762.336	335.788.472	0	0	0	335.788.472	(2.973.864)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	338.762.336	0	0	0	338.762.336	335.788.472	0	0	0	335.788.472	(2.973.864)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	338.762.336	0	0	0	338.762.336	335.788.472	0	0	0	335.788.472	(2.973.864)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009				UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	632.106.832	0	0	0	632.106.832	629.471.864	0	0	0	629.471.864	(2.634.968)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	632.106.832	0	0	0	632.106.832	629.471.864	0	0	0	629.471.864	(2.634.968)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	632.106.832	0	0	0	632.106.832	629.471.864	0	0	0	629.471.864	(2.634.968)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	296.553.840	0	0	0	296.553.840	293.561.080	0	0	0	293.561.080	(2.992.760)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	335.552.992	0	0	0	335.552.992	335.910.784	0	0	0	335.910.784	357.792
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011				UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5.149.654.698	1.716.298.700	0	0	6.865.953.398	5.128.008.266	1.716.298.700	0	0	6.844.306.966	(21.646.432)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	904.756.380	0	0	0	904.756.380	905.650.860	0	0	0	905.650.860	894.480

PROVINSI BALI																					
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																					
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
											Belanja					Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja						
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.947.300	0	0	0	97.947.300	97.947.300	0	0	0	97.947.300	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.521.600	0	0	0	14.521.600	14.521.600	0	0	0	14.521.600	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.521.100	0	0	0	12.521.100	12.521.100	0	0	0	12.521.100	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000	0	0	0	57.500.000	57.500.000	0	0	0	57.500.000	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.404.600	0	0	0	13.404.600	13.404.600	0	0	0	13.404.600	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.201.340	0	0	0	419.201.340	419.648.580	0	0	0	419.648.580	447.240				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.606.000	0	0	0	223.606.000	223.606.000	0	0	0	223.606.000	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.595.340	0	0	0	195.595.340	196.042.580	0	0	0	196.042.580	447.240				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.607.740	0	0	0	387.607.740	388.054.980	0	0	0	388.054.980	447.240				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.754.844	0	0	0	280.754.844	281.023.188	0	0	0	281.023.188	268.344				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.852.896	0	0	0	106.852.896	107.031.792	0	0	0	107.031.792	178.896				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.244.898.318	1.716.298.700	0	0	5.961.197.018	4.222.357.406	1.716.298.700	0	0	5.938.656.106	(22.540.912)				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.956.583.788	1.716.298.700	0	0	4.672.882.488	2.942.212.876	1.716.298.700	0	0	4.658.511.576	(14.370.912)				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	685.249.416	1.674.498.700	0	0	2.359.748.116	676.510.032	1.674.498.700	0	0	2.351.008.732	(8.739.384)				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	469.557.232	20.000.000	0	0	489.557.232	465.232.264	20.000.000	0	0	485.232.264	(4.324.968)				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	781.050.164	21.800.000	0	0	802.850.164	782.660.228	21.800.000	0	0	804.460.228	1.610.064				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.020.726.976	0	0	0	1.020.726.976	1.017.810.352	0	0	0	1.017.810.352	(2.916.624)				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.288.314.530	0	0	0	1.288.314.530	1.280.144.530	0	0	0	1.280.144.530	(8.170.000)				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.288.314.530	0	0	0	1.288.314.530	1.280.144.530	0	0	0	1.280.144.530	(8.170.000)				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012				UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.253.968.116	2.460.896.000	0	0	5.714.864.116	3.233.081.632	2.466.492.500	0	0	5.699.574.132	(15.289.984)				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.407.392.848	0	0	0	1.407.392.848	1.409.718.496	0	0	0	1.409.718.496	2.325.648				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.940.100	0	0	0	79.940.100	79.940.100	0	0	0	79.940.100	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.869.000	0	0	0	4.869.000	4.869.000	0	0	0	4.869.000	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.752.200	0	0	0	8.752.200	8.752.200	0	0	0	8.752.200	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000	0	0	0	57.500.000	57.500.000	0	0	0	57.500.000	0				
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.818.900	0	0	0	8.818.900	8.818.900	0	0	0	8.818.900	0				

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.195.140	0	0	0	409.195.140	409.642.380	0	0	0	409.642.380	447.240
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.170.000	0	0	0	211.170.000	211.170.000	0	0	0	211.170.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.025.140	0	0	0	198.025.140	198.472.380	0	0	0	198.472.380	447.240
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.257.608	0	0	0	918.257.608	920.136.016	0	0	0	920.136.016	1.878.408
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.161.544	0	0	0	225.161.544	225.429.888	0	0	0	225.429.888	268.344
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	679.576.064	0	0	0	679.576.064	681.186.128	0	0	0	681.186.128	1.610.064
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.520.000	0	0	0	13.520.000	13.520.000	0	0	0	13.520.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.846.575.268	2.460.896.000	0	0	4.307.471.268	1.823.363.136	2.466.492.500	0	0	4.289.855.636	(17.615.632)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.846.575.268	2.460.896.000	0	0	4.307.471.268	1.823.363.136	2.466.492.500	0	0	4.289.855.636	(17.615.632)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	676.026.076	2.460.896.000	0	0	3.136.922.076	661.568.952	2.466.492.500	0	0	3.128.061.452	(8.860.624)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	712.954.464	0	0	0	712.954.464	709.037.528	0	0	0	709.037.528	(3.916.936)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	457.594.728	0	0	0	457.594.728	452.756.656	0	0	0	452.756.656	(4.838.072)
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013				UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.403.410.264	50.000.000	0	0	3.453.410.264	3.407.256.528	50.000.000	0	0	3.457.256.528	3.846.264
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	992.050.264	50.000.000	0	0	1.042.050.264	993.660.328	50.000.000	0	0	1.043.660.328	1.610.064
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.335.900	20.000.000	0	0	93.335.900	73.335.900	20.000.000	0	0	93.335.900	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.352.000	0	0	0	20.352.000	20.352.000	0	0	0	20.352.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.680.700	20.000.000	0	0	34.680.700	14.680.700	20.000.000	0	0	34.680.700	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	0	0	0	32.500.000	32.500.000	0	0	0	32.500.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.803.200	0	0	0	5.803.200	5.803.200	0	0	0	5.803.200	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.890.936	0	0	0	372.890.936	373.517.072	0	0	0	373.517.072	626.136
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.200.000	0	0	0	100.200.000	100.200.000	0	0	0	100.200.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.690.936	0	0	0	272.690.936	273.317.072	0	0	0	273.317.072	626.136
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.823.428	30.000.000	0	0	575.823.428	546.807.356	30.000.000	0	0	576.807.356	983.928
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.561.844	0	0	0	234.561.844	234.830.188	0	0	0	234.830.188	268.344

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	304.811.584	30.000.000	0	0	334.811.584	305.527.168	30.000.000	0	0	335.527.168	715.584
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.450.000	0	0	0	6.450.000	6.450.000	0	0	0	6.450.000	0
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.411.360.000	0	0	0	2.411.360.000	2.413.596.200	0	0	0	2.413.596.200	2.236.200
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.411.360.000	0	0	0	2.411.360.000	2.413.596.200	0	0	0	2.413.596.200	2.236.200
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.411.360.000	0	0	0	2.411.360.000	2.413.596.200	0	0	0	2.413.596.200	2.236.200
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	40.913.976.684	982.373.700	0	0	41.896.350.384	49.129.280.275	72.037.700	0	0	49.201.317.975	7.304.967.591
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.456.887.198	645.997.700	0	0	39.102.884.898	46.758.922.453	72.037.700	0	0	46.830.960.153	7.728.075.255
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.196.717.954	645.997.700	0	0	38.842.715.654	36.084.292.125	72.037.700	0	0	36.156.329.825	(2.686.385.829)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.827.300	0	0	0	35.827.300	31.327.300	0	0	0	31.327.300	(4.500.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.827.300	0	0	0	35.827.300	31.327.300	0	0	0	31.327.300	(4.500.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.511.646.002	0	0	0	35.511.646.002	33.474.863.421	0	0	0	33.474.863.421	(2.036.782.581)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.470.116.602	0	0	0	35.470.116.602	33.433.334.021	0	0	0	33.433.334.021	(2.036.782.581)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.529.400	0	0	0	41.529.400	41.529.400	0	0	0	41.529.400	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.041.200	0	0	0	419.041.200	347.671.200	0	0	0	347.671.200	(71.370.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.264.300	0	0	0	16.264.300	16.264.300	0	0	0	16.264.300	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.246.500	0	0	0	32.246.500	32.246.500	0	0	0	32.246.500	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.500.000	0	0	0	92.500.000	92.500.000	0	0	0	92.500.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.718.400	0	0	0	36.718.400	36.718.400	0	0	0	36.718.400	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.950.000	0	0	0	61.950.000	45.450.000	0	0	0	45.450.000	(16.500.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.362.000	0	0	0	179.362.000	124.492.000	0	0	0	124.492.000	(54.870.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.875.000	300.997.700	0	0	330.872.700	41.875.000	72.037.700	0	0	113.912.700	(216.960.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.875.000	300.997.700	0	0	330.872.700	41.875.000	72.037.700	0	0	113.912.700	(216.960.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.538.536	0	0	0	567.538.536	568.164.672	0	0	0	568.164.672	626.136
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.200.000	0	0	0	187.200.000	187.200.000	0	0	0	187.200.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.338.536	0	0	0	380.338.536	380.964.672	0	0	0	380.964.672	626.136
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.632.789.916	345.000.000	0	0	1.977.789.916	1.620.390.532	0	0	0	1.620.390.532	(357.399.384)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.047.498.988	0	0	0	1.047.498.988	1.048.035.676	0	0	0	1.048.035.676	536.688
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	345.000.000	0	0	345.000.000	0	0	0	0	0	(345.000.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	585.290.928	0	0	0	585.290.928	572.354.856	0	0	0	572.354.856	(12.936.072)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	122.507.596	0	0	0	122.507.596	10.546.633.232	0	0	0	10.546.633.232	10.424.125.636
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	122.507.596	0	0	0	122.507.596	10.546.633.232	0	0	0	10.546.633.232	10.424.125.636
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	122.507.596	0	0	0	122.507.596	10.546.633.232	0	0	0	10.546.633.232	10.424.125.636
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	137.661.648	0	0	0	137.661.648	127.997.096	0	0	0	127.997.096	(9.664.552)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	137.661.648	0	0	0	137.661.648	127.997.096	0	0	0	127.997.096	(9.664.552)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	137.661.648	0	0	0	137.661.648	127.997.096	0	0	0	127.997.096	(9.664.552)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	869.872.416	300.000.000	0	0	1.169.872.416	865.313.032	0	0	0	865.313.032	(304.559.384)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	869.872.416	300.000.000	0	0	1.169.872.416	865.313.032	0	0	0	865.313.032	(304.559.384)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.323.700	0	0	0	79.323.700	73.243.700	0	0	0	73.243.700	(6.080.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.059.400	0	0	0	3.059.400	3.059.400	0	0	0	3.059.400	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.904.300	0	0	0	15.904.300	15.904.300	0	0	0	15.904.300	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000	0	0	0	33.000.000	33.000.000	0	0	0	33.000.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.360.000	0	0	0	27.360.000	21.280.000	0	0	0	21.280.000	(6.080.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.406.548	0	0	0	69.406.548	69.495.996	0	0	0	69.495.996	89.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.406.548	0	0	0	39.406.548	39.495.996	0	0	0	39.495.996	89.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.142.168	300.000.000	0	0	1.021.142.168	722.573.336	0	0	0	722.573.336	(298.568.832)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.375.448	0	0	0	149.375.448	149.464.896	0	0	0	149.464.896	89.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	571.766.720	300.000.000	0	0	871.766.720	573.108.440	0	0	0	573.108.440	(298.658.280)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	603.446.232	36.376.000	0	0	639.822.232	604.251.264	0	0	0	604.251.264	(35.570.968)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	603.446.232	36.376.000	0	0	639.822.232	604.251.264	0	0	0	604.251.264	(35.570.968)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.564.100	0	0	0	54.564.100	54.564.100	0	0	0	54.564.100	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.982.400	0	0	0	2.982.400	2.982.400	0	0	0	2.982.400	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.809.700	0	0	0	12.809.700	12.809.700	0	0	0	12.809.700	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.250.000	0	0	0	35.250.000	35.250.000	0	0	0	35.250.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.522.000	0	0	0	3.522.000	3.522.000	0	0	0	3.522.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	36.376.000	0	0	36.376.000	0	0	0	0	0	(36.376.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	36.376.000	0	0	36.376.000	0	0	0	0	0	(36.376.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.572.348	0	0	0	54.572.348	54.661.796	0	0	0	54.661.796	89.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.600.000	0	0	0	14.600.000	14.600.000	0	0	0	14.600.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.972.348	0	0	0	39.972.348	40.061.796	0	0	0	40.061.796	89.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.309.784	0	0	0	494.309.784	495.025.368	0	0	0	495.025.368	715.584
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	484.329.784	0	0	0	484.329.784	485.045.368	0	0	0	485.045.368	715.584
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.980.000	0	0	0	9.980.000	9.980.000	0	0	0	9.980.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	420.278.250	0	0	0	420.278.250	414.556.042	0	0	0	414.556.042	(5.722.208)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	420.278.250	0	0	0	420.278.250	414.556.042	0	0	0	414.556.042	(5.722.208)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.884.300	0	0	0	96.884.300	90.804.300	0	0	0	90.804.300	(6.080.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.192.500	0	0	0	2.192.500	2.192.500	0	0	0	2.192.500	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.749.800	0	0	0	12.749.800	12.749.800	0	0	0	12.749.800	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.742.000	0	0	0	2.742.000	2.742.000	0	0	0	2.742.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.200.000	0	0	0	16.200.000	16.200.000	0	0	0	16.200.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.000.000	0	0	0	38.000.000	31.920.000	0	0	0	31.920.000	(6.080.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.827.502	0	0	0	132.827.502	133.095.846	0	0	0	133.095.846	268.344
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.044.758	0	0	0	15.044.758	15.044.758	0	0	0	15.044.758	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.782.744	0	0	0	117.782.744	118.051.088	0	0	0	118.051.088	268.344
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.566.448	0	0	0	190.566.448	190.655.896	0	0	0	190.655.896	89.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.576.448	0	0	0	180.576.448	180.665.896	0	0	0	180.665.896	89.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	9.990.000	0	0	0	9.990.000	9.990.000	0	0	0	9.990.000	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
					Lainnya												
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004			UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	379.276.440	0	0	0	379.276.440	301.931.888	0	0	0	301.931.888	(77.344.552)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	379.276.440	0	0	0	379.276.440	301.931.888	0	0	0	301.931.888	(77.344.552)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.751.100	0	0	0	55.751.100	53.091.100	0	0	0	53.091.100	(2.660.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.600	0	0	0	2.990.600	2.990.600	0	0	0	2.990.600	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.299.500	0	0	0	10.299.500	10.299.500	0	0	0	10.299.500	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	0	0	0	32.500.000	32.500.000	0	0	0	32.500.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.361.000	0	0	0	2.361.000	2.361.000	0	0	0	2.361.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.600.000	0	0	0	7.600.000	4.940.000	0	0	0	4.940.000	(2.660.000)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.770.648	0	0	0	62.770.648	62.860.096	0	0	0	62.860.096	89.448	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.800.000	0	0	0	22.800.000	22.800.000	0	0	0	22.800.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.970.648	0	0	0	39.970.648	40.060.096	0	0	0	40.060.096	89.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.754.692	0	0	0	260.754.692	185.980.692	0	0	0	185.980.692	(74.774.000)	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.901.796	0	0	0	175.901.796	100.948.900	0	0	0	100.948.900	(74.952.896)
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.852.896	0	0	0	84.852.896	85.031.792	0	0	0	85.031.792	178.896
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005			UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	184.216.148	0	0	0	184.216.148	184.305.596	0	0	0	184.305.596	89.448	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	184.216.148	0	0	0	184.216.148	184.305.596	0	0	0	184.305.596	89.448	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.328.300	0	0	0	41.328.300	41.328.300	0	0	0	41.328.300	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.421.300	0	0	0	2.421.300	2.421.300	0	0	0	2.421.300	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.431.800	0	0	0	21.431.800	21.431.800	0	0	0	21.431.800	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.475.200	0	0	0	2.475.200	2.475.200	0	0	0	2.475.200	0
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.511.948	0	0	0	39.511.948	39.601.396	0	0	0	39.601.396	89.448	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.511.948	0	0	0	39.511.948	39.601.396	0	0	0	39.601.396	89.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.375.900	0	0	0	103.375.900	103.375.900	0	0	0	103.375.900	0	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.375.900	0	0	0	103.375.900	103.375.900	0	0	0	103.375.900	0
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	536.141.800	500.000.000	0	0	1.036.141.800	58.137.800	0	0	0	58.137.800	(978.004.000)	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	536.141.800	500.000.000	0	0	1.036.141.800	58.137.800	0	0	0	58.137.800	(978.004.000)	

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	8.000.000	0	0	0	8.000.000	4.293.200	0	0	0	4.293.200	(3.706.800)
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000	0	0	0	8.000.000	4.293.200	0	0	0	4.293.200	(3.706.800)
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000	0	0	0	8.000.000	4.293.200	0	0	0	4.293.200	(3.706.800)
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	8.000.000	0	0	0	8.000.000	7.430.000	0	0	0	7.430.000	(570.000)
						Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	0	0	0	8.000.000	7.430.000	0	0	0	7.430.000	(570.000)
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03													
						Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	0	0	0	8.000.000	7.430.000	0	0	0	7.430.000	(570.000)
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03	03												
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	520.141.800	500.000.000	0	0	1.020.141.800	46.414.600	0	0	0	46.414.600	(973.727.200)
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	520.141.800	500.000.000	0	0	1.020.141.800	46.414.600	0	0	0	46.414.600	(973.727.200)
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	520.141.800	500.000.000	0	0	1.020.141.800	46.414.600	0	0	0	46.414.600	(973.727.200)
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.566.519.840	1.030.111.000	0	0	21.596.630.840	18.525.300.243	1.183.489.625	0	0	19.708.789.868	(1.887.840.972)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.141.704.200	1.011.361.000	0	0	21.153.065.200	18.137.425.363	1.164.739.625	0	0	19.302.164.988	(1.850.900.212)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.129.634.168	1.011.361.000	0	0	20.140.995.168	17.141.034.299	1.164.739.625	0	0	18.305.773.924	(1.835.221.244)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.079.300	0	0	0	105.079.300	105.079.300	0	0	0	105.079.300	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.079.300	0	0	0	105.079.300	105.079.300	0	0	0	105.079.300	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.232.479.704	0	0	0	16.232.479.704	14.195.749.219	0	0	0	14.195.749.219	(2.036.730.485)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.232.479.704	0	0	0	16.232.479.704	14.195.749.219	0	0	0	14.195.749.219	(2.036.730.485)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.011.250	649.318.000	0	0	1.204.329.250	611.621.250	964.739.625	0	0	1.576.360.875	372.031.625
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.834.100	0	0	0	16.834.100	16.834.100	0	0	0	16.834.100	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.854.850	649.318.000	0	0	756.172.850	109.354.850	964.739.625	0	0	1.074.094.475	317.921.625
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.500.000	0	0	0	102.500.000	102.500.000	0	0	0	102.500.000	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.124.300	0	0	0	20.124.300	20.124.300	0	0	0	20.124.300	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000	0	0	0	5.840.000	5.840.000	0	0	0	5.840.000	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.858.000	0	0	0	302.858.000	356.968.000	0	0	0	356.968.000	54.110.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	62.043.000	0	0	62.043.000	0	0	0	0	0	(62.043.000)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	62.043.000	0	0	62.043.000	0	0	0	0	0	(62.043.000)

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																				
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
										Belanja					Belanja					
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.770.880	0	0	0	1.007.770.880	998.665.360	0	0	0	998.665.360	(9.105.520)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.000.000	0	0	0	310.000.000	310.000.000	0	0	0	310.000.000	0			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	464.314.480	0	0	0	464.314.480	465.208.960	0	0	0	465.208.960	894.480			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.456.400	0	0	0	233.456.400	223.456.400	0	0	0	223.456.400	(10.000.000)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.229.293.034	300.000.000	0	0	1.529.293.034	1.229.919.170	200.000.000	0	0	1.429.919.170	(99.373.864)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.082.740.138	0	0	0	1.082.740.138	1.083.187.378	0	0	0	1.083.187.378	447.240			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.552.896	300.000.000	0	0	446.552.896	146.731.792	200.000.000	0	0	346.731.792	(99.821.104)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	263.962.088	0	0	0	263.962.088	257.658.776	0	0	0	257.658.776	(6.303.312)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	263.962.088	0	0	0	263.962.088	257.658.776	0	0	0	257.658.776	(6.303.312)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	263.962.088	0	0	0	263.962.088	257.658.776	0	0	0	257.658.776	(6.303.312)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	111.485.500	0	0	0	111.485.500	108.065.500	0	0	0	108.065.500	(3.420.000)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	111.485.500	0	0	0	111.485.500	108.065.500	0	0	0	108.065.500	(3.420.000)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	111.485.500	0	0	0	111.485.500	108.065.500	0	0	0	108.065.500	(3.420.000)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	14.629.700	0	0	0	14.629.700	8.405.700	0	0	0	8.405.700	(6.224.000)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	14.629.700	0	0	0	14.629.700	8.405.700	0	0	0	8.405.700	(6.224.000)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	14.629.700	0	0	0	14.629.700	8.405.700	0	0	0	8.405.700	(6.224.000)			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	573.607.296	0	0	0	573.607.296	573.786.192	0	0	0	573.786.192	178.896			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	499.555.448	0	0	0	499.555.448	499.644.896	0	0	0	499.644.896	89.448			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000	0	0	0	456.000.000	456.000.000	0	0	0	456.000.000	0			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	43.555.448	0	0	0	43.555.448	43.644.896	0	0	0	43.644.896	89.448			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	74.051.848	0	0	0	74.051.848	74.141.296	0	0	0	74.141.296	89.448			
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	74.051.848	0	0	0	74.051.848	74.141.296	0	0	0	74.141.296	89.448			

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.385.448	0	0	0	48.385.448	48.474.896	0	0	0	48.474.896	89.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.385.448	0	0	0	48.385.448	48.474.896	0	0	0	48.474.896	89.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	48.385.448	0	0	0	48.385.448	48.474.896	0	0	0	48.474.896	89.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0002				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	424.815.640	18.750.000	0	0	443.565.640	387.874.880	18.750.000	0	0	406.624.880	(36.940.760)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	205.359.396	18.750.000	0	0	224.109.396	195.079.292	18.750.000	0	0	213.829.292	(10.280.104)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.701.500	18.750.000	0	0	57.451.500	32.642.500	18.750.000	0	0	51.392.500	(6.059.000)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.562.400	0	0	0	1.562.400	1.562.400	0	0	0	1.562.400	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.280.100	18.750.000	0	0	33.030.100	14.280.100	18.750.000	0	0	33.030.100	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.130.000	0	0	0	2.130.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000	(330.000)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.729.000	0	0	0	5.729.000	0	0	0	0	0	(5.729.000)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.196.448	0	0	0	60.196.448	60.285.896	0	0	0	60.285.896	89.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.196.448	0	0	0	48.196.448	48.285.896	0	0	0	48.285.896	89.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.461.448	0	0	0	106.461.448	102.150.896	0	0	0	102.150.896	(4.310.552)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.461.448	0	0	0	106.461.448	102.150.896	0	0	0	102.150.896	(4.310.552)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	219.456.244	0	0	0	219.456.244	192.795.588	0	0	0	192.795.588	(26.660.656)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	219.456.244	0	0	0	219.456.244	192.795.588	0	0	0	192.795.588	(26.660.656)
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	219.456.244	0	0	0	219.456.244	192.795.588	0	0	0	192.795.588	(26.660.656)
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.526.470.368	51.544.000	0	0	8.578.014.368	8.850.996.136	46.414.000	0	0	8.897.410.136	319.395.768
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.690.538.972	0	0	0	7.690.538.972	8.091.790.844	0	0	0	8.091.790.844	401.251.872
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.418.962.572	0	0	0	7.418.962.572	7.820.214.844	0	0	0	7.820.214.844	401.252.272
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	7.418.962.572	0	0	0	7.418.962.572	7.820.214.844	0	0	0	7.820.214.844	401.252.272
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	269.057.048	0	0	0	269.057.048	269.146.496	0	0	0	269.146.496	89.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.149.905.524	0	0	0	7.149.905.524	7.551.068.348	0	0	0	7.551.068.348	401.162.824
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	271.576.400	0	0	0	271.576.400	271.576.000	0	0	0	271.576.000	(400)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	271.576.400	0	0	0	271.576.400	271.576.000	0	0	0	271.576.000	(400)
						Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	271.576.400	0	0	0	271.576.400	271.576.000	0	0	0	271.576.000	(400)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001				UPTD Rumah Kreatif	835.931.396	51.544.000	0	0	887.475.396	759.205.292	46.414.000	0	0	805.619.292	(81.856.104)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	198.740.596	51.544.000	0	0	250.284.596	191.949.492	46.414.000	0	0	238.363.492	(11.921.104)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.097.700	51.544.000	0	0	95.641.700	40.127.700	46.414.000	0	0	86.541.700	(9.100.000)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.437.700	51.544.000	0	0	84.981.700	33.437.700	46.414.000	0	0	79.851.700	(5.130.000)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	0	0	0	4.000.000	2.310.000	0	0	0	2.310.000	(1.690.000)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.560.000	0	0	0	4.560.000	2.280.000	0	0	0	2.280.000	(2.280.000)
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.166.448	0	0	0	52.166.448	49.255.896	0	0	0	49.255.896	(2.910.552)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.166.448	0	0	0	52.166.448	49.255.896	0	0	0	49.255.896	(2.910.552)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.476.448	0	0	0	102.476.448	102.565.896	0	0	0	102.565.896	89.448
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.476.448	0	0	0	102.476.448	102.565.896	0	0	0	102.565.896	89.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	637.190.800	0	0	0	637.190.800	567.255.800	0	0	0	567.255.800	(69.935.000)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	637.190.800	0	0	0	637.190.800	567.255.800	0	0	0	567.255.800	(69.935.000)
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	637.190.800	0	0	0	637.190.800	567.255.800	0	0	0	567.255.800	(69.935.000)
3	32					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	60.159.000	0	0	0	60.159.000	32.367.000	0	0	0	32.367.000	(27.792.000)
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	60.159.000	0	0	0	60.159.000	32.367.000	0	0	0	32.367.000	(27.792.000)
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	60.159.000	0	0	0	60.159.000	32.367.000	0	0	0	32.367.000	(27.792.000)
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60.159.000	0	0	0	60.159.000	32.367.000	0	0	0	32.367.000	(27.792.000)
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	60.159.000	0	0	0	60.159.000	32.367.000	0	0	0	32.367.000	(27.792.000)
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	456.335.321.824	17.948.743.775	0	0	474.284.065.599	458.260.801.155	7.075.022.849	0	0	465.335.824.004	(8.948.241.595)
4	01					SEKRETARIAT DAERAH	211.888.861.489	17.192.152.775	0	0	229.081.014.264	246.344.979.248	5.909.954.199	0	0	252.254.933.447	23.173.919.183
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001				Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	49.549.695.496	332.207.274	0	0	49.881.902.770	79.102.139.392	332.207.274	0	0	79.434.346.666	29.552.443.896
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.605.584.532	332.207.274	0	0	1.937.791.806	1.603.014.564	332.207.274	0	0	1.935.221.838	(2.569.968)

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	377.219.932	0	0	0	377.219.932	374.649.964	0	0	0	374.649.964	(2.569.968)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	377.219.932	0	0	0	377.219.932	374.649.964	0	0	0	374.649.964	(2.569.968)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.976.000	332.207.274	0	0	636.183.274	303.976.000	332.207.274	0	0	636.183.274	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.624.000	0	0	0	13.624.000	13.624.000	0	0	0	13.624.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.390.000	332.207.274	0	0	347.597.274	15.390.000	332.207.274	0	0	347.597.274	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.962.000	0	0	0	254.962.000	254.962.000	0	0	0	254.962.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	924.388.600	0	0	0	924.388.600	924.388.600	0	0	0	924.388.600	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	777.498.600	0	0	0	777.498.600	777.498.600	0	0	0	777.498.600	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.890.000	0	0	0	86.890.000	86.890.000	0	0	0	86.890.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.790.033.828	0	0	0	1.790.033.828	1.687.510.156	0	0	0	1.687.510.156	(102.523.672)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	650.186.136	0	0	0	650.186.136	577.530.672	0	0	0	577.530.672	(72.655.464)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	462.201.436	0	0	0	462.201.436	457.785.972	0	0	0	457.785.972	(4.415.464)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	187.984.700	0	0	0	187.984.700	119.744.700	0	0	0	119.744.700	(68.240.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	374.943.300	0	0	0	374.943.300	374.553.300	0	0	0	374.553.300	(390.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	199.943.400	0	0	0	199.943.400	199.553.400	0	0	0	199.553.400	(390.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	174.999.900	0	0	0	174.999.900	174.999.900	0	0	0	174.999.900	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	764.904.392	0	0	0	764.904.392	735.426.184	0	0	0	735.426.184	(29.478.208)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	349.905.292	0	0	0	349.905.292	326.847.084	0	0	0	326.847.084	(23.058.208)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	414.999.100	0	0	0	414.999.100	408.579.100	0	0	0	408.579.100	(6.420.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	46.154.077.136	0	0	0	46.154.077.136	75.811.614.672	0	0	0	75.811.614.672	29.657.537.536
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	17.249.908.952	0	0	0	17.249.908.952	23.902.023.704	0	0	0	23.902.023.704	6.652.114.752
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	16.549.576.216	0	0	0	16.549.576.216	23.272.814.832	0	0	0	23.272.814.832	6.723.238.616
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	700.332.736	0	0	0	700.332.736	629.208.872	0	0	0	629.208.872	(71.123.864)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	28.904.168.184	0	0	0	28.904.168.184	51.909.590.968	0	0	0	51.909.590.968	23.005.422.784
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	28.904.168.184	0	0	0	28.904.168.184	51.909.590.968	0	0	0	51.909.590.968	23.005.422.784
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003				Biro Umum dan Protokol	83.575.349.292	6.060.334.701	0	0	89.635.683.993	95.844.482.961	2.684.440.125	0	0	98.528.923.086	8.893.239.093
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.575.349.292	6.060.334.701	0	0	89.635.683.993	95.844.482.961	2.684.440.125	0	0	98.528.923.086	8.893.239.093
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	692.753.258	0	0	0	692.753.258	694.184.426	0	0	0	694.184.426	1.431.168

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	692.753.258	0	0	0	692.753.258	694.184.426	0	0	0	694.184.426	1.431.168
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	735.774.212	0	0	0	735.774.212	737.473.724	0	0	0	737.473.724	1.699.512
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	735.774.212	0	0	0	735.774.212	737.473.724	0	0	0	737.473.724	1.699.512
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	504.654.924	0	0	0	504.654.924	505.817.748	0	0	0	505.817.748	1.162.824
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	504.654.924	0	0	0	504.654.924	505.817.748	0	0	0	505.817.748	1.162.824
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.841.992.450	391.608.000	0	0	18.233.600.450	24.721.445.154	451.540.000	0	0	25.172.985.154	6.939.384.704
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	668.934.900	0	0	0	668.934.900	639.259.892	0	0	0	639.259.892	(29.675.008)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.153.796.018	391.608.000	0	0	2.545.404.018	2.160.782.426	451.540.000	0	0	2.612.322.426	66.918.408
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.931.628.980	0	0	0	6.931.628.980	7.303.757.132	0	0	0	7.303.757.132	372.128.152
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.473.212.280	0	0	0	7.473.212.280	14.001.973.160	0	0	0	14.001.973.160	6.528.760.880
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	614.420.272	0	0	0	614.420.272	615.672.544	0	0	0	615.672.544	1.252.272
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.234.400.907	0	0	0	22.234.400.907	24.301.608.259	0	0	0	24.301.608.259	2.067.207.352
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.011.354.999	0	0	0	2.011.354.999	1.881.354.999	0	0	0	1.881.354.999	(130.000.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.252.346.500	0	0	0	15.252.346.500	17.438.730.644	0	0	0	17.438.730.644	2.186.384.144
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.970.699.408	0	0	0	4.970.699.408	4.981.522.616	0	0	0	4.981.522.616	10.823.208
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.347.727.168	4.069.131.701	0	0	12.416.858.869	11.955.758.388	1.077.500.000	0	0	13.033.258.388	616.399.519
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.221.282.870	0	0	0	7.221.282.870	7.697.991.470	0	0	0	7.697.991.470	476.708.600
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.126.444.298	4.069.131.701	0	0	5.195.575.999	4.257.766.918	1.077.500.000	0	0	5.335.266.918	139.690.919
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.097.128.773	0	0	0	7.097.128.773	7.562.169.480	0	0	0	7.562.169.480	465.040.707
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.097.128.773	0	0	0	7.097.128.773	7.562.169.480	0	0	0	7.562.169.480	465.040.707
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	22.949.161.752	1.599.595.000	0	0	24.548.756.752	22.192.734.286	1.155.400.125	0	0	23.348.134.411	(1.200.622.341)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16.339.890.145	1.378.595.000	0	0	17.718.485.145	17.347.768.399	1.017.699.925	0	0	18.365.468.324	646.983.179
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.299.771.607	221.000.000	0	0	6.520.771.607	4.535.465.887	137.700.200	0	0	4.673.166.087	(1.847.605.520)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	309.500.000	0	0	0	309.500.000	309.500.000	0	0	0	309.500.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	721.914.600	0	0	0	721.914.600	721.564.600	0	0	0	721.564.600	(350.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	721.914.600	0	0	0	721.914.600	721.564.600	0	0	0	721.564.600	(350.000)
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	2.449.841.248	0	0	0	2.449.841.248	2.451.726.896	0	0	0	2.451.726.896	1.885.648

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.449.841.248	0	0	0	2.449.841.248	2.451.726.896	0	0	0	2.451.726.896	1.885.648
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004				Biro Hukum	5.548.524.800	0	0	0	5.548.524.800	5.870.907.752	0	0	0	5.870.907.752	322.382.952
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.226.544.212	0	0	0	1.226.544.212	1.228.154.276	0	0	0	1.228.154.276	1.610.064
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.390.400	0	0	0	40.390.400	40.390.400	0	0	0	40.390.400	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.998.800	0	0	0	14.998.800	14.998.800	0	0	0	14.998.800	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.392.100	0	0	0	10.392.100	10.392.100	0	0	0	10.392.100	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.500	0	0	0	14.999.500	14.999.500	0	0	0	14.999.500	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.186.153.812	0	0	0	1.186.153.812	1.187.763.876	0	0	0	1.187.763.876	1.610.064
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	491.360.644	0	0	0	491.360.644	491.539.540	0	0	0	491.539.540	178.896
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	639.823.168	0	0	0	639.823.168	641.254.336	0	0	0	641.254.336	1.431.168
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.970.000	0	0	0	49.970.000	49.970.000	0	0	0	49.970.000	0
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.321.980.588	0	0	0	4.321.980.588	4.642.753.476	0	0	0	4.642.753.476	320.772.888
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.133.619.504	0	0	0	2.133.619.504	2.135.676.808	0	0	0	2.135.676.808	2.057.304
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.276.799.392	0	0	0	1.276.799.392	1.277.157.184	0	0	0	1.277.157.184	357.792
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.550.792	0	0	0	161.550.792	161.908.584	0	0	0	161.908.584	357.792
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	238.508.388	0	0	0	238.508.388	239.045.076	0	0	0	239.045.076	536.688
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	456.760.932	0	0	0	456.760.932	457.565.964	0	0	0	457.565.964	805.032
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.188.361.084	0	0	0	2.188.361.084	2.507.076.668	0	0	0	2.507.076.668	318.715.584
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.962.905.792	0	0	0	1.962.905.792	2.281.263.584	0	0	0	2.281.263.584	318.357.792
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.455.292	0	0	0	225.455.292	225.813.084	0	0	0	225.813.084	357.792
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000				Sekretariat Daerah	65.638.663.529	0	0	0	65.638.663.529	58.815.415.699	0	0	0	58.815.415.699	(6.823.247.830)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.638.663.529	0	0	0	65.638.663.529	58.815.415.699	0	0	0	58.815.415.699	(6.823.247.830)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.391.314.469	0	0	0	65.391.314.469	58.568.078.957	0	0	0	58.568.078.957	(6.823.235.512)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.391.314.469	0	0	0	65.391.314.469	58.568.078.957	0	0	0	58.568.078.957	(6.823.235.512)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060	0	0	0	247.349.060	247.336.742	0	0	0	247.336.742	(12.318)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060	0	0	0	247.349.060	247.336.742	0	0	0	247.336.742	(12.318)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005				Biro Organisasi	2.049.710.240	215.179.800	0	0	2.264.890.040	1.967.956.080	238.101.800	0	0	2.206.057.880	(58.832.160)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.127.110.244	170.179.800	0	0	1.297.290.044	1.120.119.188	193.101.800	0	0	1.313.220.988	15.930.944
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.383.800	0	0	0	4.383.800	4.383.800	0	0	0	4.383.800	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.383.800	0	0	0	4.383.800	4.383.800	0	0	0	4.383.800	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.334.400	170.179.800	0	0	521.514.200	346.675.000	193.101.800	0	0	539.776.800	18.262.600
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.061.100	0	0	0	17.061.100	17.061.100	0	0	0	17.061.100	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.945.300	170.179.800	0	0	281.125.100	106.305.900	193.101.800	0	0	299.407.700	18.282.600
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.328.000	0	0	0	223.328.000	223.308.000	0	0	0	223.308.000	(20.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.392.044	0	0	0	771.392.044	769.060.388	0	0	0	769.060.388	(2.331.656)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	666.062.044	0	0	0	666.062.044	666.330.388	0	0	0	666.330.388	268.344
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.330.000	0	0	0	105.330.000	102.730.000	0	0	0	102.730.000	(2.600.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	922.599.996	45.000.000	0	0	967.599.996	847.836.892	45.000.000	0	0	892.836.892	(74.763.104)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	364.917.448	45.000.000	0	0	409.917.448	344.750.896	45.000.000	0	0	389.750.896	(20.166.552)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	75.668.100	15.000.000	0	0	90.668.100	69.786.100	15.000.000	0	0	84.786.100	(5.882.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	70.640.000	15.000.000	0	0	85.640.000	70.640.000	15.000.000	0	0	85.640.000	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	218.609.348	15.000.000	0	0	233.609.348	204.324.796	15.000.000	0	0	219.324.796	(14.284.552)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	557.682.548	0	0	0	557.682.548	503.085.996	0	0	0	503.085.996	(54.596.552)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	189.218.000	0	0	0	189.218.000	171.731.000	0	0	0	171.731.000	(17.487.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	127.751.300	0	0	0	127.751.300	119.962.300	0	0	0	119.962.300	(7.789.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	23.192.600	0	0	0	23.192.600	17.310.600	0	0	0	17.310.600	(5.882.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	87.524.900	0	0	0	87.524.900	75.760.900	0	0	0	75.760.900	(11.764.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	129.995.748	0	0	0	129.995.748	118.321.196	0	0	0	118.321.196	(11.674.552)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007				Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	5.526.918.132	10.584.431.000	0	0	16.111.349.132	4.744.077.364	2.655.205.000	0	0	7.399.282.364	(8.712.066.768)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.551.136.132	429.432.000	0	0	2.980.568.132	2.607.333.364	365.422.000	0	0	2.972.755.364	(7.812.768)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.500.000	0	0	0	13.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.500.000	0	0	0	13.500.000	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.934.586.532	429.432.000	0	0	2.364.018.532	1.999.143.764	365.422.000	0	0	2.364.565.764	547.232
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.716.426.532	429.432.000	0	0	2.145.858.532	1.719.467.764	365.422.000	0	0	2.084.889.764	(60.968.768)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.716.000	0	0	0	74.716.000	74.716.000	0	0	0	74.716.000	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.444.000	0	0	0	143.444.000	204.960.000	0	0	0	204.960.000	61.516.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.049.600	0	0	0	603.049.600	594.689.600	0	0	0	594.689.600	(8.360.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.699.600	0	0	0	500.699.600	508.699.600	0	0	0	508.699.600	8.000.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.350.000	0	0	0	102.350.000	85.990.000	0	0	0	85.990.000	(16.360.000)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	629.076.000	0	0	0	629.076.000	627.688.000	0	0	0	627.688.000	(1.388.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	74.814.000	0	0	0	74.814.000	74.814.000	0	0	0	74.814.000	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	74.814.000	0	0	0	74.814.000	74.814.000	0	0	0	74.814.000	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	482.510.000	0	0	0	482.510.000	481.654.000	0	0	0	481.654.000	(856.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	482.510.000	0	0	0	482.510.000	481.654.000	0	0	0	481.654.000	(856.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	71.752.000	0	0	0	71.752.000	71.220.000	0	0	0	71.220.000	(532.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	71.752.000	0	0	0	71.752.000	71.220.000	0	0	0	71.220.000	(532.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.271.646.000	10.154.999.000	0	0	12.426.645.000	1.435.396.000	2.289.783.000	0	0	3.725.179.000	(8.701.466.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.834.784.000	10.154.999.000	0	0	11.989.783.000	1.048.664.000	2.289.783.000	0	0	3.338.447.000	(8.651.336.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.760.000	0	0	0	24.760.000	24.680.000	0	0	0	24.680.000	(80.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.785.344.000	10.154.999.000	0	0	11.940.343.000	999.484.000	2.289.783.000	0	0	3.289.267.000	(8.651.076.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.680.000	0	0	0	24.680.000	24.500.000	0	0	0	24.500.000	(180.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99.608.000	0	0	0	99.608.000	99.598.000	0	0	0	99.598.000	(10.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	50.062.000	0	0	0	50.062.000	50.052.000	0	0	0	50.052.000	(10.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.546.000	0	0	0	49.546.000	49.546.000	0	0	0	49.546.000	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	337.254.000	0	0	0	337.254.000	287.134.000	0	0	0	287.134.000	(50.120.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	149.662.000	0	0	0	149.662.000	149.662.000	0	0	0	149.662.000	0
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	24.960.000	0	0	0	24.960.000	24.840.000	0	0	0	24.840.000	(120.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	162.632.000	0	0	0	162.632.000	112.632.000	0	0	0	112.632.000	(50.000.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75.060.000	0	0	0	75.060.000	73.660.000	0	0	0	73.660.000	(1.400.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.100.000	0	0	0	25.100.000	24.780.000	0	0	0	24.780.000	(320.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	25.100.000	0	0	0	25.100.000	24.780.000	0	0	0	24.780.000	(320.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	0	0	0	49.960.000	48.880.000	0	0	0	48.880.000	(1.080.000)
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	0	0	0	49.960.000	48.880.000	0	0	0	48.880.000	(1.080.000)
4	02					SEKRETARIAT DPRD	244.446.460.335	756.591.000	0	0	245.203.051.335	211.915.821.907	1.165.068.650	0	0	213.080.890.557	(32.122.160.778)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000				Sekretariat DPRD	244.446.460.335	756.591.000	0	0	245.203.051.335	211.915.821.907	1.165.068.650	0	0	213.080.890.557	(32.122.160.778)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87.679.983.023	756.591.000	0	0	88.436.574.023	90.345.497.681	1.165.068.650	0	0	91.510.566.331	3.073.992.308
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	273.534.896	0	0	0	273.534.896	382.801.792	0	0	0	382.801.792	109.266.896

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Perangkat Daerah											
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.122.448	0	0	0	156.122.448	259.779.896	0	0	0	259.779.896	103.657.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	117.412.448	0	0	0	117.412.448	123.021.896	0	0	0	123.021.896	5.609.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.047.632.768	0	0	0	10.047.632.768	9.983.108.702	0	0	0	9.983.108.702	(64.524.066)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.826.825.372	0	0	0	9.826.825.372	9.754.849.910	0	0	0	9.754.849.910	(71.975.462)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.662.448	0	0	0	110.662.448	118.618.896	0	0	0	118.618.896	7.956.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	110.144.948	0	0	0	110.144.948	109.639.896	0	0	0	109.639.896	(505.052)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.190.497.044	0	0	0	8.190.497.044	10.528.838.688	0	0	0	10.528.838.688	2.338.341.644
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.178.700	0	0	0	132.178.700	132.178.700	0	0	0	132.178.700	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	964.176.800	0	0	0	964.176.800	964.176.800	0	0	0	964.176.800	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.348.620.000	0	0	0	1.348.620.000	1.348.620.000	0	0	0	1.348.620.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.494.200	0	0	0	135.494.200	88.883.500	0	0	0	88.883.500	(46.610.700)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	954.480.000	0	0	0	954.480.000	954.480.000	0	0	0	954.480.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.655.547.344	0	0	0	4.655.547.344	7.040.499.688	0	0	0	7.040.499.688	2.384.952.344
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	756.591.000	0	0	761.591.000	0	486.176.000	0	0	486.176.000	(275.415.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	756.591.000	0	0	761.591.000	0	486.176.000	0	0	486.176.000	(275.415.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.587.479.532	0	0	0	2.587.479.532	2.593.520.764	0	0	0	2.593.520.764	6.041.232
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0	0	0	10.000.000	13.000.000	0	0	0	13.000.000	3.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000	0	0	0	900.000.000	900.000.000	0	0	0	900.000.000	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.677.479.532	0	0	0	1.677.479.532	1.680.520.764	0	0	0	1.680.520.764	3.041.232
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.270.461.896	0	0	0	4.270.461.896	4.342.735.992	678.892.650	0	0	5.021.628.642	751.166.746
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.413.751.896	0	0	0	3.413.751.896	3.416.166.992	0	0	0	3.416.166.992	2.415.096
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.640.000	0	0	0	178.640.000	238.499.000	678.892.650	0	0	917.391.650	738.751.650
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.070.000	0	0	0	678.070.000	688.070.000	0	0	0	688.070.000	10.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60.382.611.479	0	0	0	60.382.611.479	60.600.467.927	0	0	0	60.600.467.927	217.856.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.289.033.531	0	0	0	58.289.033.531	58.289.033.531	0	0	0	58.289.033.531	0
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.820.224.500	0	0	0	1.820.224.500	2.049.220.500	0	0	0	2.049.220.500	228.996.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	273.353.448	0	0	0	273.353.448	262.213.896	0	0	0	262.213.896	(11.139.552)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	1.922.765.408	0	0	0	1.922.765.408	1.914.023.816	0	0	0	1.914.023.816	(8.741.592)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	209.882.240	0	0	0	209.882.240	187.829.480	0	0	0	187.829.480	(22.052.760)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.712.883.168	0	0	0	1.712.883.168	1.726.194.336	0	0	0	1.726.194.336	13.311.168
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	156.766.477.312	0	0	0	156.766.477.312	121.570.324.226	0	0	0	121.570.324.226	(35.196.153.086)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	46.300.359.136	0	0	0	46.300.359.136	15.450.473.272	0	0	0	15.450.473.272	(30.849.885.864)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.861.127.896	0	0	0	1.861.127.896	1.680.007.792	0	0	0	1.680.007.792	(181.120.104)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	14.952.807.344	0	0	0	14.952.807.344	12.904.237.688	0	0	0	12.904.237.688	(2.048.569.656)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	28.620.375.000	0	0	0	28.620.375.000	0	0	0	0	0	(28.620.375.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	866.048.896	0	0	0	866.048.896	866.227.792	0	0	0	866.227.792	178.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.272.642.240	0	0	0	8.272.642.240	3.481.581.480	0	0	0	3.481.581.480	(4.791.060.760)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	1.649.216.448	0	0	0	1.649.216.448	686.124.896	0	0	0	686.124.896	(963.091.552)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.655.856.448	0	0	0	1.655.856.448	113.410.896	0	0	0	113.410.896	(1.542.445.552)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pembahasan APBD	1.655.856.448	0	0	0	1.655.856.448	1.655.945.896	0	0	0	1.655.945.896	89.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	1.655.856.448	0	0	0	1.655.856.448	37.565.896	0	0	0	37.565.896	(1.618.290.552)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.655.856.448	0	0	0	1.655.856.448	988.533.896	0	0	0	988.533.896	(667.322.552)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	35.074.081.584	0	0	0	35.074.081.584	34.248.472.168	0	0	0	34.248.472.168	(825.609.416)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8.443.432.792	0	0	0	8.443.432.792	8.591.439.584	0	0	0	8.591.439.584	148.006.792
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8.203.947.000	0	0	0	8.203.947.000	7.939.499.000	0	0	0	7.939.499.000	(264.448.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.448.064.896	0	0	0	8.448.064.896	8.243.164.792	0	0	0	8.243.164.792	(204.900.104)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.360.256.896	0	0	0	8.360.256.896	8.356.584.792	0	0	0	8.356.584.792	(3.672.104)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.618.380.000	0	0	0	1.618.380.000	1.117.784.000	0	0	0	1.117.784.000	(500.596.000)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	14.206.353.976	0	0	0	14.206.353.976	14.136.069.554	0	0	0	14.136.069.554	(70.284.422)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	3.946.975.344	0	0	0	3.946.975.344	3.702.612.688	0	0	0	3.702.612.688	(244.362.656)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.394.891.736	0	0	0	3.394.891.736	3.835.057.872	0	0	0	3.835.057.872	440.166.136
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.240.000.000	0	0	0	3.240.000.000	3.252.898.332	0	0	0	3.252.898.332	12.898.332
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	900.000.000	0	0	0	900.000.000	903.582.870	0	0	0	903.582.870	3.582.870
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.724.486.896	0	0	0	2.724.486.896	2.441.917.792	0	0	0	2.441.917.792	(282.569.104)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	39.424.297.240	0	0	0	39.424.297.240	40.015.618.480	0	0	0	40.015.618.480	591.321.240
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.285.401.896	0	0	0	3.285.401.896	3.285.457.792	0	0	0	3.285.457.792	55.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.748.616.000	0	0	0	1.748.616.000	2.339.613.000	0	0	0	2.339.613.000	590.997.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	34.390.279.344	0	0	0	34.390.279.344	34.390.547.688	0	0	0	34.390.547.688	268.344
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	817.218.896	0	0	0	817.218.896	1.063.159.792	0	0	0	1.063.159.792	245.940.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	817.218.896	0	0	0	817.218.896	1.063.159.792	0	0	0	1.063.159.792	245.940.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	12.671.524.240	0	0	0	12.671.524.240	13.174.949.480	0	0	0	13.174.949.480	503.425.240
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.228.871.344	0	0	0	10.228.871.344	12.440.395.688	0	0	0	12.440.395.688	2.211.524.344

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.442.652.896	0	0	0	2.442.652.896	734.553.792	0	0	0	734.553.792	(1.708.099.104)
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	299.194.950.089	16.453.350.251	50.000.000.000	1.708.697.252.400	2.074.345.552.740	291.746.386.744	12.329.559.808	15.828.456.983	2.032.467.756.244	2.352.372.159.779	278.026.607.039
5	01					PERENCANAAN	24.962.048.121	3.116.326.498	0	0	28.078.374.619	22.958.420.464	1.691.700.000	0	0	24.650.120.464	(3.428.254.155)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.962.048.121	3.116.326.498	0	0	28.078.374.619	22.958.420.464	1.691.700.000	0	0	24.650.120.464	(3.428.254.155)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.409.993.413	3.116.326.498	0	0	20.526.319.911	16.561.204.048	1.691.700.000	0	0	18.252.904.048	(2.273.415.863)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.053.940	0	0	0	370.053.940	279.138.780	0	0	0	279.138.780	(90.915.160)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	238.824.240	0	0	0	238.824.240	236.163.480	0	0	0	236.163.480	(2.660.760)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.028.000	0	0	0	13.028.000	11.453.000	0	0	0	11.453.000	(1.575.000)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.028.000	0	0	0	13.028.000	6.728.000	0	0	0	6.728.000	(6.300.000)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.137.000	0	0	0	12.137.000	8.987.000	0	0	0	8.987.000	(3.150.000)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.485.600	0	0	0	9.485.600	6.335.600	0	0	0	6.335.600	(3.150.000)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.457.700	0	0	0	40.457.700	3.291.700	0	0	0	3.291.700	(37.166.000)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.093.400	0	0	0	43.093.400	6.180.000	0	0	0	6.180.000	(36.913.400)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.973.912.997	0	0	0	13.973.912.997	12.725.596.216	0	0	0	12.725.596.216	(1.248.316.781)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.653.611.913	0	0	0	13.653.611.913	12.404.579.548	0	0	0	12.404.579.548	(1.249.032.365)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.113.540	0	0	0	196.113.540	196.560.780	0	0	0	196.560.780	447.240
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	124.187.544	0	0	0	124.187.544	124.455.888	0	0	0	124.455.888	268.344
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.059.554.736	541.370.000	0	0	1.600.924.736	1.092.680.872	478.750.000	0	0	1.571.430.872	(29.493.864)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.411.148	0	0	0	47.411.148	47.500.596	0	0	0	47.500.596	89.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.739.048	541.370.000	0	0	597.109.048	55.828.496	478.750.000	0	0	534.578.496	(62.530.552)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.766.248	0	0	0	114.766.248	144.855.696	0	0	0	144.855.696	30.089.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.429.948	0	0	0	69.429.948	72.019.396	0	0	0	72.019.396	2.589.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	74.916.448	0	0	0	74.916.448	75.005.896	0	0	0	75.005.896	89.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.476.448	0	0	0	103.476.448	103.565.896	0	0	0	103.565.896	89.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.815.448	0	0	0	593.815.448	593.904.896	0	0	0	593.904.896	89.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.476.448	53.000.000	0	0	90.476.448	37.565.896	86.000.000	0	0	123.565.896	33.089.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	43.000.000	0	0	43.000.000	0	76.000.000	0	0	76.000.000	33.000.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.476.448	10.000.000	0	0	47.476.448	37.565.896	10.000.000	0	0	47.565.896	89.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	960.327.916	0	0	0	960.327.916	961.848.532	0	0	0	961.848.532	1.520.616
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.466.448	0	0	0	40.466.448	40.555.896	0	0	0	40.555.896	89.448

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.076.448	0	0	0	337.076.448	337.165.896	0	0	0	337.165.896	89.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.785.020	0	0	0	582.785.020	584.126.740	0	0	0	584.126.740	1.341.720
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.667.376	2.521.956.498	0	0	3.530.623.874	1.464.373.752	1.126.950.000	0	0	2.591.323.752	(939.300.122)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	812.564.480	0	0	0	812.564.480	1.013.091.960	0	0	0	1.013.091.960	200.527.480
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.626.448	29.500.000	0	0	168.126.448	138.715.896	29.500.000	0	0	168.215.896	89.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.476.448	2.492.456.498	0	0	2.549.932.946	312.565.896	1.097.450.000	0	0	1.410.015.896	(1.139.917.050)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.125.180.372	0	0	0	5.125.180.372	4.084.069.344	0	0	0	4.084.069.344	(1.041.111.028)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.603.064.240	0	0	0	2.603.064.240	2.251.735.680	0	0	0	2.251.735.680	(351.328.560)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	85.343.500	0	0	0	85.343.500	29.958.200	0	0	0	29.958.200	(55.385.300)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	85.140.900	0	0	0	85.140.900	33.121.600	0	0	0	33.121.600	(52.019.300)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.432.579.840	0	0	0	2.432.579.840	2.188.655.880	0	0	0	2.188.655.880	(243.923.960)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	744.624.244	0	0	0	744.624.244	635.504.088	0	0	0	635.504.088	(109.120.156)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	720.582.444	0	0	0	720.582.444	611.462.288	0	0	0	611.462.288	(109.120.156)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24.041.800	0	0	0	24.041.800	24.041.800	0	0	0	24.041.800	0
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.467.417.840	0	0	0	1.467.417.840	1.060.483.280	0	0	0	1.060.483.280	(406.934.560)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	532.405.200	0	0	0	532.405.200	348.510.600	0	0	0	348.510.600	(183.894.600)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	649.658.240	0	0	0	649.658.240	501.365.880	0	0	0	501.365.880	(148.292.360)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	285.354.400	0	0	0	285.354.400	210.606.800	0	0	0	210.606.800	(74.747.600)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	310.074.048	0	0	0	310.074.048	136.346.296	0	0	0	136.346.296	(173.727.752)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	310.074.048	0	0	0	310.074.048	136.346.296	0	0	0	136.346.296	(173.727.752)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.426.874.336	0	0	0	2.426.874.336	2.313.147.072	0	0	0	2.313.147.072	(113.727.264)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	823.391.428	0	0	0	823.391.428	788.301.156	0	0	0	788.301.156	(35.090.272)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.406.796	0	0	0	106.406.796	93.962.492	0	0	0	93.962.492	(12.444.304)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	86.756.396	0	0	0	86.756.396	86.472.092	0	0	0	86.472.092	(284.304)

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	418.518.244	0	0	0	418.518.244	403.652.588	0	0	0	403.652.588	(14.865.656)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	211.709.992	0	0	0	211.709.992	204.213.984	0	0	0	204.213.984	(7.496.008)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	869.580.780	0	0	0	869.580.780	841.786.060	0	0	0	841.786.060	(27.794.720)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196.838.544	0	0	0	196.838.544	184.567.888	0	0	0	184.567.888	(12.270.656)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	279.870.192	0	0	0	279.870.192	433.777.784	0	0	0	433.777.784	153.907.592
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.231.748	0	0	0	95.231.748	89.456.196	0	0	0	89.456.196	(5.775.552)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	297.640.296	0	0	0	297.640.296	133.984.192	0	0	0	133.984.192	(163.656.104)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	733.902.128	0	0	0	733.902.128	683.059.856	0	0	0	683.059.856	(50.842.272)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.300.388	0	0	0	305.300.388	288.562.076	0	0	0	288.562.076	(16.738.312)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	80.429.100	0	0	0	80.429.100	72.106.100	0	0	0	72.106.100	(8.323.000)
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	266.186.440	0	0	0	266.186.440	266.633.680	0	0	0	266.633.680	447.240
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	81.986.200	0	0	0	81.986.200	55.758.000	0	0	0	55.758.000	(26.228.200)
5	02					KEUANGAN	191.990.526.199	11.183.364.753	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.961.871.143.352	191.248.413.117	7.912.317.409	15.828.456.983	2.032.467.756.244	2.247.456.943.753	285.585.800.401
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	31.171.600.498	1.358.507.200	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.791.227.360.098	28.995.857.036	862.650.200	15.828.456.983	2.032.467.756.244	2.078.154.720.463	286.927.360.365
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.040.668.978	1.358.507.200	0	0	23.399.176.178	20.913.177.796	462.650.200	0	0	21.375.827.996	(2.023.348.182)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.049.400	0	0	0	35.049.400	35.049.200	0	0	0	35.049.200	(200)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.049.400	0	0	0	35.049.400	35.049.200	0	0	0	35.049.200	(200)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.363.298.334	0	0	0	19.363.298.334	18.130.223.150	0	0	0	18.130.223.150	(1.233.075.184)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.121.709.534	0	0	0	19.121.709.534	17.888.634.750	0	0	0	17.888.634.750	(1.233.074.784)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	241.588.800	0	0	0	241.588.800	241.588.400	0	0	0	241.588.400	(400)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	913.934.928	459.273.200	0	0	1.373.208.128	914.256.014	457.650.200	0	0	1.371.906.214	(1.301.914)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.372.500	0	0	0	17.372.500	17.372.500	0	0	0	17.372.500	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	459.273.200	0	0	459.273.200	0	457.650.200	0	0	457.650.200	(1.623.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	643.115.628	0	0	0	643.115.628	618.146.714	0	0	0	618.146.714	(24.968.914)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.179.800	0	0	0	22.179.800	22.179.800	0	0	0	22.179.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000	0	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.385.000	0	0	0	62.385.000	88.305.000	0	0	0	88.305.000	25.920.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.882.000	0	0	0	155.882.000	155.252.000	0	0	0	155.252.000	(630.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.000.000	0	0	0	278.000.000	278.000.000	0	0	0	278.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	0	0	0	275.000.000	275.000.000	0	0	0	275.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.386.316	899.234.000	0	0	2.349.620.316	1.555.649.432	5.000.000	0	0	1.560.649.432	(788.970.884)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	633.846.044	0	0	0	633.846.044	736.588.788	0	0	0	736.588.788	102.742.744
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.077.100	0	0	0	143.077.100	135.636.200	0	0	0	135.636.200	(7.440.900)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	663.463.172	899.234.000	0	0	1.562.697.172	673.424.444	5.000.000	0	0	678.424.444	(884.272.728)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.634.022.932	0	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.766.331.275.332	6.585.233.964	0	15.828.456.983	2.032.467.756.244	2.054.881.447.191	288.550.171.859
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.866.178.792	0	0	0	1.866.178.792	1.433.522.584	0	0	0	1.433.522.584	(432.656.208)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	51.617.800	0	0	0	51.617.800	23.441.400	0	0	0	23.441.400	(28.176.400)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.240.000	0	0	0	43.240.000	24.318.000	0	0	0	24.318.000	(18.922.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.363.700	0	0	0	347.363.700	36.063.700	0	0	0	36.063.700	(311.300.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.598.400	0	0	0	80.598.400	14.098.400	0	0	0	14.098.400	(66.500.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	691.430.696	0	0	0	691.430.696	802.613.992	0	0	0	802.613.992	111.183.296
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	651.928.196	0	0	0	651.928.196	532.987.092	0	0	0	532.987.092	(118.941.104)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	823.865.900	0	0	0	823.865.900	775.761.900	0	0	0	775.761.900	(48.104.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	153.315.500	0	0	0	153.315.500	153.315.500	0	0	0	153.315.500	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	141.674.500	0	0	0	141.674.500	141.674.500	0	0	0	141.674.500	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	156.031.400	0	0	0	156.031.400	156.031.400	0	0	0	156.031.400	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	372.844.500	0	0	0	372.844.500	324.740.500	0	0	0	324.740.500	(48.104.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	299.997.500	0	0	0	299.997.500	299.997.500	0	0	0	299.997.500	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	299.997.500	0	0	0	299.997.500	299.997.500	0	0	0	299.997.500	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	716.462.940	0	0	0	716.462.940	716.434.180	0	0	0	716.434.180	(28.760)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	645.759.640	0	0	0	645.759.640	645.730.880	0	0	0	645.730.880	(28.760)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	70.703.300	0	0	0	70.703.300	70.703.300	0	0	0	70.703.300	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.775.000.000	0	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.761.472.252.400	2.775.000.000	0	15.828.456.983	2.032.467.756.244	2.051.071.213.227	289.598.960.827
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.775.000.000	0	0	0	2.775.000.000	2.775.000.000	0	0	0	2.775.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	521.974.803.508	521.974.803.508	0	0	0	522.374.803.508	522.374.803.508	400.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	50.000.000.000	0	50.000.000.000	0	0	15.828.456.983	0	15.828.456.983	(34.171.543.017)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	0	0	0	1.186.722.448.892	1.186.722.448.892	0	0	0	1.510.092.952.736	1.510.092.952.736	323.370.503.844
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.152.517.800	0	0	0	1.152.517.800	584.517.800	0	0	0	584.517.800	(568.000.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.152.517.800	0	0	0	1.152.517.800	584.517.800	0	0	0	584.517.800	(568.000.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.496.908.588	0	0	0	1.496.908.588	1.497.445.276	400.000.000	0	0	1.897.445.276	400.536.688
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.496.908.588	0	0	0	1.496.908.588	1.497.445.276	400.000.000	0	0	1.897.445.276	400.536.688
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	217.599.200	0	0	0	217.599.200	217.599.200	0	0	0	217.599.200	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	517.668.800	0	0	0	517.668.800	517.668.800	0	0	0	517.668.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	761.640.588	0	0	0	761.640.588	762.177.276	400.000.000	0	0	1.162.177.276	400.536.688
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001				UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.023.766.536	473.724.000	0	0	3.497.490.536	2.757.392.272	40.724.000	0	0	2.798.116.272	(699.374.264)

PROVINSI BALI																					
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN																					
TAHUN ANGGARAN 2023																					
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
											Belanja					Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja						
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	674.680.636	473.724.000	0	0	1.148.404.636	675.306.772	40.724.000	0	0	716.030.772	(432.373.864)				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.121.500	0	0	0	148.121.500	148.121.500	0	0	0	148.121.500	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.670.700	0	0	0	41.670.700	41.670.700	0	0	0	41.670.700	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.800	0	0	0	8.999.800	8.999.800	0	0	0	8.999.800	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	0	0	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.251.000	0	0	0	93.251.000	93.251.000	0	0	0	93.251.000	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.200.000	0	0	0	58.200.000	58.200.000	0	0	0	58.200.000	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000	0	0	0	57.000.000	57.000.000	0	0	0	57.000.000	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.359.136	473.724.000	0	0	942.083.136	468.985.272	40.724.000	0	0	509.709.272	(432.373.864)				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.532.600	0	0	0	147.532.600	147.532.600	0	0	0	147.532.600	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000	0	0	0	15.260.000	15.260.000	0	0	0	15.260.000	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.566.536	473.724.000	0	0	779.290.536	306.192.672	40.724.000	0	0	346.916.672	(432.373.864)				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.349.085.900	0	0	0	2.349.085.900	2.082.085.500	0	0	0	2.082.085.500	(267.000.400)				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.349.085.900	0	0	0	2.349.085.900	2.082.085.500	0	0	0	2.082.085.500	(267.000.400)				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.349.085.900	0	0	0	2.349.085.900	2.082.085.500	0	0	0	2.082.085.500	(267.000.400)				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000				Badan Pendapatan Daerah	127.734.540.345	9.351.133.553	0	0	137.085.673.898	128.454.032.577	7.008.943.209	0	0	135.462.975.786	(1.622.698.112)				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	126.355.409.945	9.351.133.553	0	0	135.706.543.498	127.397.317.977	7.008.943.209	0	0	134.406.261.186	(1.300.282.312)				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.913.400	0	0	0	37.913.400	37.913.400	0	0	0	37.913.400	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.867.800	0	0	0	18.867.800	18.867.800	0	0	0	18.867.800	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.045.600	0	0	0	19.045.600	19.045.600	0	0	0	19.045.600	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	119.490.088.012	0	0	0	119.490.088.012	120.088.284.223	0	0	0	120.088.284.223	598.196.211				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119.490.088.012	0	0	0	119.490.088.012	120.088.284.223	0	0	0	120.088.284.223	598.196.211				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.471.478.390	0	0	0	2.471.478.390	2.603.478.390	0	0	0	2.603.478.390	132.000.000				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.927.590	0	0	0	6.927.590	6.927.590	0	0	0	6.927.590	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.124.700	0	0	0	200.124.700	233.724.700	0	0	0	233.724.700	33.600.000				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.365.432.300	0	0	0	1.365.432.300	1.365.432.300	0	0	0	1.365.432.300	0				

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.437.800	0	0	0	2.437.800	2.437.800	0	0	0	2.437.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.985.000	0	0	0	14.985.000	16.485.000	0	0	0	16.485.000	1.500.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	806.571.000	0	0	0	806.571.000	903.471.000	0	0	0	903.471.000	96.900.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.000.000	3.411.636.000	0	0	3.424.636.000	25.762.181	5.697.362.499	0	0	5.723.124.680	2.298.488.680
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	559.614.000	0	0	559.614.000	0	1.068.354.000	0	0	1.068.354.000	508.740.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1.123.829.000	0	0	1.123.829.000	0	1.268.829.000	0	0	1.268.829.000	145.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000	1.728.193.000	0	0	1.741.193.000	25.762.181	3.360.179.499	0	0	3.385.941.680	1.644.748.680
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.136.703	0	0	0	767.136.703	842.136.703	0	0	0	842.136.703	75.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.740.000	0	0	0	3.740.000	3.740.000	0	0	0	3.740.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.433.104	0	0	0	387.433.104	462.433.104	0	0	0	462.433.104	75.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.963.599	0	0	0	375.963.599	375.963.599	0	0	0	375.963.599	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.525.793.440	5.939.497.553	0	0	9.465.290.993	3.749.743.080	1.311.580.710	0	0	5.061.323.790	(4.403.967.203)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.476.848	0	0	0	115.476.848	115.566.296	0	0	0	115.566.296	89.448
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.233.502.088	0	0	0	1.233.502.088	1.303.358.776	0	0	0	1.303.358.776	69.856.688
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	856.545.408	0	0	0	856.545.408	858.423.816	0	0	0	858.423.816	1.878.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.200.000	5.939.497.553	0	0	5.946.697.553	106.910.000	1.311.580.710	0	0	1.418.490.710	(4.528.206.843)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.313.069.096	0	0	0	1.313.069.096	1.365.484.192	0	0	0	1.365.484.192	52.415.096
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	94.900.900	0	0	0	94.900.900	57.880.900	0	0	0	57.880.900	(37.020.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	94.900.900	0	0	0	94.900.900	57.880.900	0	0	0	57.880.900	(37.020.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	94.900.900	0	0	0	94.900.900	57.880.900	0	0	0	57.880.900	(37.020.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.284.229.500	0	0	0	1.284.229.500	998.833.700	0	0	0	998.833.700	(285.395.800)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.284.229.500	0	0	0	1.284.229.500	998.833.700	0	0	0	998.833.700	(285.395.800)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	506.755.600	0	0	0	506.755.600	386.786.600	0	0	0	386.786.600	(119.969.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	385.828.800	0	0	0	385.828.800	282.276.800	0	0	0	282.276.800	(103.552.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	141.625.000	0	0	0	141.625.000	141.625.000	0	0	0	141.625.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	213.116.600	0	0	0	213.116.600	174.174.200	0	0	0	174.174.200	(38.942.400)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	36.903.500	0	0	0	36.903.500	13.971.100	0	0	0	13.971.100	(22.932.400)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	5.694.574.084	0	0	0	5.694.574.084	5.750.315.068	0	0	0	5.750.315.068	55.740.984
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.746.891.524	0	0	0	1.746.891.524	1.794.134.948	0	0	0	1.794.134.948	47.243.424
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.101.900	0	0	0	344.101.900	390.182.500	0	0	0	390.182.500	46.080.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.121.900	0	0	0	8.121.900	12.023.700	0	0	0	12.023.700	3.901.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.505.200	0	0	0	179.505.200	221.684.000	0	0	0	221.684.000	42.178.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.914.800	0	0	0	15.914.800	15.914.800	0	0	0	15.914.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.760.000	0	0	0	8.760.000	8.760.000	0	0	0	8.760.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.800.000	0	0	0	88.800.000	88.800.000	0	0	0	88.800.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.000.000	0	0	0	491.000.000	491.000.000	0	0	0	491.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.000.000	0	0	0	288.000.000	288.000.000	0	0	0	288.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.789.624	0	0	0	911.789.624	912.952.448	0	0	0	912.952.448	1.162.824
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.037.900	0	0	0	71.037.900	71.037.900	0	0	0	71.037.900	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.774.348	0	0	0	202.774.348	202.863.796	0	0	0	202.863.796	89.448
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.140.000	0	0	0	38.140.000	38.140.000	0	0	0	38.140.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	567.717.376	0	0	0	567.717.376	568.790.752	0	0	0	568.790.752	1.073.376
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.120.000	0	0	0	32.120.000	32.120.000	0	0	0	32.120.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.947.682.560	0	0	0	3.947.682.560	3.956.180.120	0	0	0	3.956.180.120	8.497.560
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.947.682.560	0	0	0	3.947.682.560	3.956.180.120	0	0	0	3.956.180.120	8.497.560
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.713.557.920	0	0	0	1.713.557.920	1.717.135.840	0	0	0	1.717.135.840	3.577.920
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	2.234.124.640	0	0	0	2.234.124.640	2.239.044.280	0	0	0	2.239.044.280	4.919.640
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	2.009.669.838	0	0	0	2.009.669.838	2.362.056.630	0	0	0	2.362.056.630	352.386.792
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.151.612.326	0	0	0	1.151.612.326	1.502.299.606	0	0	0	1.502.299.606	350.687.280
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.342.150	0	0	0	213.342.150	213.342.150	0	0	0	213.342.150	0

PROVINSI BALI																		
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN																		
TAHUN ANGGARAN 2023																		
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
							Belanja					Belanja						
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.115.500	0	0	0	5.115.500	5.115.500	0	0	0	5.115.500		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.276.650	0	0	0	138.276.650	138.276.650	0	0	0	138.276.650	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.750.000	0	0	0	18.750.000	18.750.000	0	0	0	18.750.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.320.000	0	0	0	4.320.000	4.320.000	0	0	0	4.320.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.880.000	0	0	0	21.880.000	21.880.000	0	0	0	21.880.000	0	
	5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.960.000	0	0	0	334.960.000	334.960.000	0	0	0	334.960.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.460.000	0	0	0	185.460.000	185.460.000	0	0	0	185.460.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.500.000	0	0	0	149.500.000	149.500.000	0	0	0	149.500.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.310.176	0	0	0	603.310.176	953.997.456	0	0	0	953.997.456	350.687.280	
	5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.679.400	0	0	0	37.679.400	37.679.400	0	0	0	37.679.400	0
	5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.945.344	0	0	0	123.945.344	452.577.592	0	0	0	452.577.592	328.632.248
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000	0	0	0	8.520.000	26.770.000	0	0	0	26.770.000	18.250.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.288.032	0	0	0	421.288.032	422.093.064	0	0	0	422.093.064	805.032	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.877.400	0	0	0	11.877.400	14.877.400	0	0	0	14.877.400	3.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	858.057.512	0	0	0	858.057.512	859.757.024	0	0	0	859.757.024	1.699.512	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	858.057.512	0	0	0	858.057.512	859.757.024	0	0	0	859.757.024	1.699.512	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	412.339.480	0	0	0	412.339.480	413.233.960	0	0	0	413.233.960	894.480	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	445.718.032	0	0	0	445.718.032	446.523.064	0	0	0	446.523.064	805.032	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	2.425.012.884	0	0	0	2.425.012.884	2.602.964.668	0	0	0	2.602.964.668	177.951.784	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.476.447.476	0	0	0	1.476.447.476	1.652.520.852	0	0	0	1.652.520.852	176.073.376	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.177.600	0	0	0	261.177.600	261.177.600	0	0	0	261.177.600	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.074.700	0	0	0	12.074.700	12.074.700	0	0	0	12.074.700	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.198.900	0	0	0	181.198.900	181.198.900	0	0	0	181.198.900	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.920.000	0	0	0	7.920.000	7.920.000	0	0	0	7.920.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.716.000	0	0	0	4.716.000	4.716.000	0	0	0	4.716.000	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.388.000	0	0	0	8.388.000	8.388.000	0	0	0	8.388.000		

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.880.000	0	0	0	21.880.000	21.880.000	0	0	0	21.880.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.416.200	0	0	0	485.416.200	485.416.200	0	0	0	485.416.200	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.466.200	0	0	0	266.466.200	266.466.200	0	0	0	266.466.200	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.950.000	0	0	0	218.950.000	218.950.000	0	0	0	218.950.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.853.676	0	0	0	729.853.676	905.927.052	0	0	0	905.927.052	176.073.376
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.900.800	0	0	0	38.900.800	38.900.800	0	0	0	38.900.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.139.696	0	0	0	264.139.696	264.318.592	0	0	0	264.318.592	178.896
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.060.000	0	0	0	16.060.000	16.060.000	0	0	0	16.060.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.964.480	0	0	0	378.964.480	554.858.960	0	0	0	554.858.960	175.894.480
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.788.700	0	0	0	31.788.700	31.788.700	0	0	0	31.788.700	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	948.565.408	0	0	0	948.565.408	950.443.816	0	0	0	950.443.816	1.878.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	948.565.408	0	0	0	948.565.408	950.443.816	0	0	0	950.443.816	1.878.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	494.600.928	0	0	0	494.600.928	495.584.856	0	0	0	495.584.856	983.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	453.964.480	0	0	0	453.964.480	454.858.960	0	0	0	454.858.960	894.480
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	4.805.094.052	0	0	0	4.805.094.052	4.852.995.204	0	0	0	4.852.995.204	47.901.152
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.745.953.620	0	0	0	1.745.953.620	1.825.462.340	0	0	0	1.825.462.340	79.508.720
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.330.900	0	0	0	324.330.900	396.397.900	0	0	0	396.397.900	72.067.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.184.900	0	0	0	7.184.900	7.184.900	0	0	0	7.184.900	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.076.000	0	0	0	184.076.000	256.143.000	0	0	0	256.143.000	72.067.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.500.000	0	0	0	41.500.000	41.500.000	0	0	0	41.500.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.600.000	0	0	0	9.600.000	9.600.000	0	0	0	9.600.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.790.000	0	0	0	20.790.000	20.790.000	0	0	0	20.790.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.180.000	0	0	0	36.180.000	36.180.000	0	0	0	36.180.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	921.622.720	0	0	0	921.622.720	929.064.440	0	0	0	929.064.440	7.441.720
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.999.400	0	0	0	29.999.400	29.999.400	0	0	0	29.999.400	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.053.048	0	0	0	176.053.048	182.242.496	0	0	0	182.242.496	6.189.448
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.420.000	0	0	0	55.420.000	55.420.000	0	0	0	55.420.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598.670.272	0	0	0	598.670.272	599.922.544	0	0	0	599.922.544	1.252.272
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.480.000	0	0	0	61.480.000	61.480.000	0	0	0	61.480.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.059.140.432	0	0	0	3.059.140.432	3.027.532.864	0	0	0	3.027.532.864	(31.607.568)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.059.140.432	0	0	0	3.059.140.432	3.027.532.864	0	0	0	3.027.532.864	(31.607.568)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.124.644.368	0	0	0	2.124.644.368	2.128.311.736	0	0	0	2.128.311.736	3.667.368
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	934.496.064	0	0	0	934.496.064	899.221.128	0	0	0	899.221.128	(35.274.936)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	5.112.248.248	0	0	0	5.112.248.248	5.318.388.764	0	0	0	5.318.388.764	206.140.516
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.076.835.304	0	0	0	2.076.835.304	2.187.078.876	0	0	0	2.187.078.876	110.243.572
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.374.500	0	0	0	440.374.500	508.757.800	0	0	0	508.757.800	68.383.300
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.157.000	0	0	0	8.157.000	8.157.000	0	0	0	8.157.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.917.300	0	0	0	186.917.300	255.300.600	0	0	0	255.300.600	68.383.300
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.828.200	0	0	0	108.828.200	108.828.200	0	0	0	108.828.200	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.424.000	0	0	0	6.424.000	6.424.000	0	0	0	6.424.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.994.000	0	0	0	68.994.000	68.994.000	0	0	0	68.994.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.054.000	0	0	0	36.054.000	36.054.000	0	0	0	36.054.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.486.000	0	0	0	701.486.000	701.486.000	0	0	0	701.486.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.000	0	0	0	1.496.000	1.496.000	0	0	0	1.496.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.990.000	0	0	0	199.990.000	199.990.000	0	0	0	199.990.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	934.974.804	0	0	0	934.974.804	976.835.076	0	0	0	976.835.076	41.860.272
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.702.400	0	0	0	62.702.400	62.702.400	0	0	0	62.702.400	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	152.354.996	0	0	0	152.354.996	193.141.892	0	0	0	193.141.892	40.786.896

PROVINSI BALI																				
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																				
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)			
							Belanja					Belanja								
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja				
						Dinas Operasional atau Lapangan														
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000	0	0	0	18.500.000	18.500.000	0	0	0	18.500.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598.307.408	0	0	0	598.307.408	599.380.784	0	0	0	599.380.784				1.073.376
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.110.000	0	0	0	103.110.000	103.110.000	0	0	0	103.110.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.035.412.944	0	0	0	3.035.412.944	3.131.309.888	0	0	0	3.131.309.888				95.896.944
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.035.412.944	0	0	0	3.035.412.944	3.131.309.888	0	0	0	3.131.309.888				95.896.944
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.703.327.808	0	0	0	2.703.327.808	2.709.678.616	0	0	0	2.709.678.616				6.350.808
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	332.085.136	0	0	0	332.085.136	421.631.272	0	0	0	421.631.272				89.546.136
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	3.417.593.788	0	0	0	3.417.593.788	3.463.858.876	0	0	0	3.463.858.876				46.265.088
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.469.583.628	0	0	0	1.469.583.628	1.511.823.556	0	0	0	1.511.823.556				42.239.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.217.200	0	0	0	297.217.200	297.158.200	0	0	0	297.158.200				(59.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.247.500	0	0	0	17.247.500	17.247.500	0	0	0	17.247.500				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.714.700	0	0	0	177.714.700	177.714.700	0	0	0	177.714.700				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.159.000	0	0	0	17.159.000	17.100.000	0	0	0	17.100.000				(59.000)
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.636.000	0	0	0	9.636.000	9.636.000	0	0	0	9.636.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.760.000	0	0	0	23.760.000	23.760.000	0	0	0	23.760.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.700.000	0	0	0	26.700.000	26.700.000	0	0	0	26.700.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.900.000	0	0	0	429.900.000	429.900.000	0	0	0	429.900.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.400.000	0	0	0	228.400.000	228.400.000	0	0	0	228.400.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.100.000	0	0	0	199.100.000	199.100.000	0	0	0	199.100.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742.466.428	0	0	0	742.466.428	784.765.356	0	0	0	784.765.356				42.298.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.727.200	0	0	0	40.727.200	40.727.200	0	0	0	40.727.200				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.447.700	0	0	0	116.447.700	118.847.700	0	0	0	118.847.700				2.400.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.130.000	0	0	0	29.130.000	29.130.000	0	0	0	29.130.000				0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	515.101.528	0	0	0	515.101.528	555.000.456	0	0	0	555.000.456				39.898.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.060.000	0	0	0	41.060.000	41.060.000	0	0	0	41.060.000				0

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.948.010.160	0	0	0	1.948.010.160	1.952.035.320	0	0	0	1.952.035.320	4.025.160
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.948.010.160	0	0	0	1.948.010.160	1.952.035.320	0	0	0	1.952.035.320	4.025.160
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.173.287.648	0	0	0	1.173.287.648	1.175.613.296	0	0	0	1.175.613.296	2.325.648
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	774.722.512	0	0	0	774.722.512	776.422.024	0	0	0	776.422.024	1.699.512
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	2.149.864.354	0	0	0	2.149.864.354	2.173.265.778	0	0	0	2.173.265.778	23.401.424
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.064.500.258	0	0	0	1.064.500.258	1.085.486.586	0	0	0	1.085.486.586	20.986.328
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.199.330	0	0	0	209.199.330	209.199.330	0	0	0	209.199.330	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.700	0	0	0	9.995.700	9.995.700	0	0	0	9.995.700	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.608.830	0	0	0	142.608.830	142.608.830	0	0	0	142.608.830	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.149.600	0	0	0	9.149.600	9.149.600	0	0	0	9.149.600	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.477.200	0	0	0	6.477.200	6.477.200	0	0	0	6.477.200	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.748.000	0	0	0	8.748.000	8.748.000	0	0	0	8.748.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.220.000	0	0	0	7.220.000	7.220.000	0	0	0	7.220.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.020.000	0	0	0	286.020.000	286.020.000	0	0	0	286.020.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.020.000	0	0	0	4.020.000	4.020.000	0	0	0	4.020.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	0	0	0	132.000.000	132.000.000	0	0	0	132.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.280.928	0	0	0	569.280.928	590.267.256	0	0	0	590.267.256	20.986.328
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.525.200	0	0	0	46.525.200	46.525.200	0	0	0	46.525.200	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.185.200	0	0	0	72.185.200	79.187.600	0	0	0	79.187.600	7.002.400
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.600.000	0	0	0	16.600.000	16.600.000	0	0	0	16.600.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	423.740.928	0	0	0	423.740.928	424.724.856	0	0	0	424.724.856	983.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.229.600	0	0	0	10.229.600	23.229.600	0	0	0	23.229.600	13.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.085.364.096	0	0	0	1.085.364.096	1.087.779.192	0	0	0	1.087.779.192	2.415.096
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.085.364.096	0	0	0	1.085.364.096	1.087.779.192	0	0	0	1.087.779.192	2.415.096
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	565.470.272	0	0	0	565.470.272	566.722.544	0	0	0	566.722.544	1.252.272
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	519.893.824	0	0	0	519.893.824	521.056.648	0	0	0	521.056.648	1.162.824
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	2.560.290.476	0	0	0	2.560.290.476	2.563.600.052	0	0	0	2.563.600.052	3.309.576

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.631.115.068	0	0	0	1.631.115.068	1.632.546.236	0	0	0	1.632.546.236	1.431.168
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.972.800	0	0	0	272.972.800	272.972.800	0	0	0	272.972.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.796.800	0	0	0	3.796.800	3.796.800	0	0	0	3.796.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.065.000	0	0	0	152.065.000	152.065.000	0	0	0	152.065.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.544.000	0	0	0	10.544.000	10.544.000	0	0	0	10.544.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.139.000	0	0	0	3.139.000	3.139.000	0	0	0	3.139.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.048.000	0	0	0	6.048.000	6.048.000	0	0	0	6.048.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.380.000	0	0	0	72.380.000	72.380.000	0	0	0	72.380.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.000.000	0	0	0	377.000.000	377.000.000	0	0	0	377.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000	0	0	0	198.000.000	198.000.000	0	0	0	198.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.000.000	0	0	0	179.000.000	179.000.000	0	0	0	179.000.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.142.268	0	0	0	981.142.268	982.573.436	0	0	0	982.573.436	1.431.168
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.049.200	0	0	0	49.049.200	49.049.200	0	0	0	49.049.200	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.933.800	0	0	0	202.933.800	202.933.800	0	0	0	202.933.800	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.610.000	0	0	0	20.610.000	20.610.000	0	0	0	20.610.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	683.623.168	0	0	0	683.623.168	685.054.336	0	0	0	685.054.336	1.431.168
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.926.100	0	0	0	24.926.100	24.926.100	0	0	0	24.926.100	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	929.175.408	0	0	0	929.175.408	931.053.816	0	0	0	931.053.816	1.878.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	929.175.408	0	0	0	929.175.408	931.053.816	0	0	0	931.053.816	1.878.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	482.570.928	0	0	0	482.570.928	483.554.856	0	0	0	483.554.856	983.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	446.604.480	0	0	0	446.604.480	447.498.960	0	0	0	447.498.960	894.480
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	1.886.271.096	0	0	0	1.886.271.096	1.953.686.192	0	0	0	1.953.686.192	67.415.096
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.053.978.584	0	0	0	1.053.978.584	1.119.694.168	0	0	0	1.119.694.168	65.715.584
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.343.000	0	0	0	225.343.000	225.343.000	0	0	0	225.343.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.816.300	0	0	0	2.816.300	2.816.300	0	0	0	2.816.300	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.229.700	0	0	0	151.229.700	151.229.700	0	0	0	151.229.700	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
						Belanja					Belanja						
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.160.000	0	0	0	7.160.000	7.160.000	0	0	0	7.160.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.307.000	0	0	0	4.307.000	4.307.000	0	0	0	4.307.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.320.000	0	0	0	4.320.000	4.320.000	0	0	0	4.320.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.510.000	0	0	0	30.510.000	30.510.000	0	0	0	30.510.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.800.000	0	0	0	312.800.000	317.800.000	0	0	0	317.800.000	5.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	0	0	0	135.000.000	140.000.000	0	0	0	140.000.000	5.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.800.000	0	0	0	177.800.000	177.800.000	0	0	0	177.800.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.835.584	0	0	0	515.835.584	576.551.168	0	0	0	576.551.168	60.715.584
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.620.000	0	0	0	43.620.000	43.620.000	0	0	0	43.620.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.080.448	0	0	0	107.080.448	107.169.896	0	0	0	107.169.896	89.448
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000	0	0	0	17.040.000	17.040.000	0	0	0	17.040.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.835.136	0	0	0	334.835.136	395.461.272	0	0	0	395.461.272	60.626.136
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.260.000	0	0	0	13.260.000	13.260.000	0	0	0	13.260.000	0
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	832.292.512	0	0	0	832.292.512	833.992.024	0	0	0	833.992.024	1.699.512
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	832.292.512	0	0	0	832.292.512	833.992.024	0	0	0	833.992.024	1.699.512
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	508.777.376	0	0	0	508.777.376	509.850.752	0	0	0	509.850.752	1.073.376
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	323.515.136	0	0	0	323.515.136	324.141.272	0	0	0	324.141.272	626.136
5	03					KEPEGAWAIAN	48.024.222.099	934.658.900	0	0	48.958.880.999	48.049.609.439	1.250.267.500	0	0	49.299.876.939	340.995.940
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.827.553.115	223.605.000	0	0	41.051.158.115	36.529.037.871	208.605.000	0	0	36.737.642.871	(4.313.515.244)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.337.444.487	223.605.000	0	0	28.561.049.487	28.054.049.345	208.605.000	0	0	28.262.654.345	(298.395.142)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.923.500	0	0	0	74.923.500	67.639.900	0	0	0	67.639.900	(7.283.600)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.000	0	0	0	5.250.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	(750.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.168.300	0	0	0	3.168.300	3.168.300	0	0	0	3.168.300	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	0	0	2.250.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	231.600	0	0	0	231.600	0	0	0	0	0	(231.600)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	231.600	0	0	0	231.600	231.600	0	0	0	231.600	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.292.000	0	0	0	35.292.000	29.410.000	0	0	0	29.410.000	(5.882.000)

PROVINSI BALI																		
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																		
Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
								Belanja					Belanja					
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.500.000	0	0	0	28.500.000	28.080.000	0	0	0	28.080.000	(420.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.470.189.305	0	0	0	24.470.189.305	24.691.146.335	0	0	0	24.691.146.335	220.957.030
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.470.189.305	0	0	0	24.470.189.305	24.691.146.335	0	0	0	24.691.146.335	220.957.030
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.476.104	0	0	0	349.476.104	157.176.104	0	0	0	157.176.104	(192.300.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	349.476.104	0	0	0	349.476.104	157.176.104	0	0	0	157.176.104	(192.300.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	741.182.850	0	0	0	741.182.850	562.748.850	0	0	0	562.748.850	(178.434.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.717.500	0	0	0	12.717.500	12.717.500	0	0	0	12.717.500	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.998.550	0	0	0	149.998.550	149.998.550	0	0	0	149.998.550	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.475.000	0	0	0	98.475.000	98.475.000	0	0	0	98.475.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.677.800	0	0	0	20.677.800	20.677.800	0	0	0	20.677.800	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	0	0	0	22.500.000	4.800.000	0	0	0	4.800.000	(17.700.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.814.000	0	0	0	436.814.000	276.080.000	0	0	0	276.080.000	(160.734.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	53.005.000	0	0	53.005.000	0	38.005.000	0	0	38.005.000	(15.000.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	53.005.000	0	0	53.005.000	0	38.005.000	0	0	38.005.000	(15.000.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.519.552	0	0	0	1.232.519.552	1.234.666.304	0	0	0	1.234.666.304	2.146.752
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.000.000	0	0	0	259.000.000	259.000.000	0	0	0	259.000.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970.519.552	0	0	0	970.519.552	972.666.304	0	0	0	972.666.304	2.146.752
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.469.153.176	170.600.000	0	0	1.639.753.176	1.340.671.852	170.600.000	0	0	1.511.271.852	(128.481.324)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.142.204.176	0	0	0	1.142.204.176	1.023.722.852	0	0	0	1.023.722.852	(118.481.324)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	221.119.000	0	0	0	221.119.000	211.119.000	0	0	0	211.119.000	(10.000.000)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.830.000	20.600.000	0	0	126.430.000	105.830.000	20.600.000	0	0	126.430.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	12.490.108.628	0	0	0	12.490.108.628	8.474.988.526	0	0	0	8.474.988.526	(4.015.120.102)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6.363.294.904	0	0	0	6.363.294.904	3.258.314.578	0	0	0	3.258.314.578	(3.104.980.326)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.072.000	0	0	0	8.072.000	8.072.000	0	0	0	8.072.000	0
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	6.032.281.568	0	0	0	6.032.281.568	2.927.475.106	0	0	0	2.927.475.106	(3.104.806.462)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	143.236.544	0	0	0	143.236.544	143.124.888	0	0	0	143.124.888	(111.656)

PROVINSI BALI																					
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN																					
TAHUN ANGGARAN 2023																					
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
											Belanja					Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja						
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	179.704.792	0	0	0	179.704.792	179.642.584	0	0	0	179.642.584	(62.208)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	5.324.193.044	0	0	0	5.324.193.044	4.475.253.388	0	0	0	4.475.253.388	(848.939.656)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	82.773.148	0	0	0	82.773.148	82.862.596	0	0	0	82.862.596	89.448				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	109.176.448	0	0	0	109.176.448	109.145.896	0	0	0	109.145.896	(30.552)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	5.132.243.448	0	0	0	5.132.243.448	4.283.244.896	0	0	0	4.283.244.896	(848.998.552)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	277.021.792	0	0	0	277.021.792	277.379.584	0	0	0	277.379.584	357.792				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	113.558.896	0	0	0	113.558.896	113.737.792	0	0	0	113.737.792	178.896				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.462.896	0	0	0	163.462.896	163.641.792	0	0	0	163.641.792	178.896				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	525.598.888	0	0	0	525.598.888	464.040.976	0	0	0	464.040.976	(61.557.912)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	212.495.344	0	0	0	212.495.344	168.747.288	0	0	0	168.747.288	(43.748.056)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	184.742.648	0	0	0	184.742.648	172.283.896	0	0	0	172.283.896	(12.458.752)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	109.952.896	0	0	0	109.952.896	104.601.792	0	0	0	104.601.792	(5.351.104)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.408.000	0	0	0	18.408.000	18.408.000	0	0	0	18.408.000	0				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	686.836.984	261.053.900	0	0	947.890.884	1.517.747.568	241.662.500	0	0	1.759.410.068	811.519.184				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	415.359.084	211.053.900	0	0	626.412.984	415.179.668	191.662.500	0	0	606.842.168	(19.570.816)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.657.500	0	0	0	53.657.500	52.762.500	0	0	0	52.762.500	(895.000)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.091.500	0	0	0	13.091.500	13.091.500	0	0	0	13.091.500	0				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.566.000	0	0	0	40.566.000	39.671.000	0	0	0	39.671.000	(895.000)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	211.053.900	0	0	261.053.900	50.000.000	191.662.500	0	0	241.662.500	(19.391.400)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	211.053.900	0	0	261.053.900	50.000.000	191.662.500	0	0	241.662.500	(19.391.400)				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.811.584	0	0	0	299.811.584	300.527.168	0	0	0	300.527.168	715.584				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.811.584	0	0	0	299.811.584	300.527.168	0	0	0	300.527.168	715.584				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.890.000	0	0	0	11.890.000	11.890.000	0	0	0	11.890.000	0				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.890.000	0	0	0	11.890.000	11.890.000	0	0	0	11.890.000	0				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	271.477.900	50.000.000	0	0	321.477.900	1.102.567.900	50.000.000	0	0	1.152.567.900	831.090.000				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	271.477.900	50.000.000	0	0	321.477.900	1.102.567.900	50.000.000	0	0	1.152.567.900	831.090.000				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	271.477.900	50.000.000	0	0	321.477.900	1.102.567.900	50.000.000	0	0	1.152.567.900	831.090.000				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002				UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000	10.002.824.000	800.000.000	0	0	10.802.824.000	3.842.992.000				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000	10.002.824.000	800.000.000	0	0	10.802.824.000	3.842.992.000				
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000	10.002.824.000	800.000.000	0	0	10.802.824.000	3.842.992.000				

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000	10.002.824.000	800.000.000	0	0	10.802.824.000	3.842.992.000
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	877.977.592	0	0	0	877.977.592	536.780.384	0	0	0	536.780.384	(341.197.208)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	877.977.592	0	0	0	877.977.592	536.780.384	0	0	0	536.780.384	(341.197.208)
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	877.977.592	0	0	0	877.977.592	536.780.384	0	0	0	536.780.384	(341.197.208)
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	877.977.592	0	0	0	877.977.592	536.780.384	0	0	0	536.780.384	(341.197.208)
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	94.092.448	0	0	0	94.092.448	94.181.896	0	0	0	94.181.896	89.448
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	355.699.448	0	0	0	355.699.448	294.232.896	0	0	0	294.232.896	(61.466.552)
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	428.185.696	0	0	0	428.185.696	148.365.592	0	0	0	148.365.592	(279.820.104)
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002				UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.060.520.589	799.180.000	0	0	25.859.700.589	20.578.105.274	722.860.900	0	0	21.300.966.174	(4.558.734.415)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000				Badan Riset dan Inovasi Daerah	25.060.520.589	799.180.000	0	0	25.859.700.589	20.578.105.274	722.860.900	0	0	21.300.966.174	(4.558.734.415)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.172.875.089	799.180.000	0	0	13.972.055.089	12.082.155.974	722.860.900	0	0	12.805.016.874	(1.167.038.215)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.271.800	0	0	0	56.271.800	36.461.800	0	0	0	36.461.800	(19.810.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.259.700	0	0	0	45.259.700	27.699.700	0	0	0	27.699.700	(17.560.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.012.100	0	0	0	11.012.100	8.762.100	0	0	0	8.762.100	(2.250.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.110.306.125	0	0	0	10.110.306.125	9.111.021.746	0	0	0	9.111.021.746	(999.284.379)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.094.047.225	0	0	0	10.094.047.225	9.094.762.846	0	0	0	9.094.762.846	(999.284.379)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.592.200	0	0	0	7.592.200	7.592.200	0	0	0	7.592.200	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.199.600	0	0	0	5.199.600	5.199.600	0	0	0	5.199.600	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.467.100	0	0	0	3.467.100	3.467.100	0	0	0	3.467.100	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.451.600	0	0	0	462.451.600	386.980.600	0	0	0	386.980.600	(75.471.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.958.000	0	0	0	21.958.000	21.958.000	0	0	0	21.958.000	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.749.600	0	0	0	54.749.600	54.749.600	0	0	0	54.749.600	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.495.000	0	0	0	107.495.000	107.495.000	0	0	0	107.495.000	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.424.000	0	0	0	20.424.000	20.424.000	0	0	0	20.424.000	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.825.000	0	0	0	242.825.000	167.354.000	0	0	0	167.354.000	(75.471.000)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	599.180.000	0	0	602.180.000	3.000.000	522.860.900	0	0	525.860.900	(76.319.100)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	584.180.000	0	0	587.180.000	3.000.000	507.860.900	0	0	510.860.900	(76.319.100)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.009.436	0	0	0	550.009.436	550.635.572	0	0	0	550.635.572	626.136
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	0	0	0	226.000.000	226.000.000	0	0	0	226.000.000	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.009.436	0	0	0	324.009.436	324.635.572	0	0	0	324.635.572	626.136
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.990.836.128	200.000.000	0	0	2.190.836.128	1.994.056.256	200.000.000	0	0	2.194.056.256	3.220.128
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	837.232.032	0	0	0	837.232.032	838.037.064	0	0	0	838.037.064	805.032
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.153.604.096	200.000.000	0	0	1.353.604.096	1.156.019.192	200.000.000	0	0	1.356.019.192	2.415.096
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.887.645.500	0	0	0	11.887.645.500	8.495.949.300	0	0	0	8.495.949.300	(3.391.696.200)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	9.787.646.500	0	0	0	9.787.646.500	6.883.490.500	0	0	0	6.883.490.500	(2.904.156.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	8.170.000.000	0	0	0	8.170.000.000	5.467.942.000	0	0	0	5.467.942.000	(2.702.058.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	850.000.000	0	0	0	850.000.000	713.786.000	0	0	0	713.786.000	(136.214.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	379.334.600	0	0	0	379.334.600	313.450.600	0	0	0	313.450.600	(65.884.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	388.311.900	0	0	0	388.311.900	388.311.900	0	0	0	388.311.900	0
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	1.128.685.800	0	0	0	1.128.685.800	(121.314.200)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	102.295.400	0	0	0	102.295.400	33.567.200	0	0	0	33.567.200	(68.728.200)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	500.000.000	0	0	0	500.000.000	477.560.000	0	0	0	477.560.000	(22.440.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	300.000.000	0	0	0	300.000.000	291.390.000	0	0	0	291.390.000	(8.610.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	347.704.600	0	0	0	347.704.600	326.168.600	0	0	0	326.168.600	(21.536.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	849.999.000	0	0	0	849.999.000	483.773.000	0	0	0	483.773.000	(366.226.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	300.000.000	0	0	0	300.000.000	172.136.000	0	0	0	172.136.000	(127.864.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	219.999.000	0	0	0	219.999.000	62.732.000	0	0	0	62.732.000	(157.267.000)
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	330.000.000	0	0	0	330.000.000	248.905.000	0	0	0	248.905.000	(81.095.000)
5	07					PENGLOLAAN PENGHUBUNG	8.279.655.489	419.820.100	0	0	8.699.475.589	8.375.058.066	752.413.999	0	0	9.127.472.065	427.996.476

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000				Badan Penghubung	8.279.655.489	419.820.100	0	0	8.699.475.589	8.375.058.066	752.413.999	0	0	9.127.472.065	427.996.476
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.382.790.309	244.820.100	0	0	5.627.610.409	5.288.192.886	512.413.999	0	0	5.800.606.885	172.996.476
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.877.200	0	0	0	4.877.200	4.663.200	0	0	0	4.663.200	(214.000)
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.877.200	0	0	0	4.877.200	4.663.200	0	0	0	4.663.200	(214.000)
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.047.299.557	0	0	0	3.047.299.557	2.857.809.812	0	0	0	2.857.809.812	(189.489.745)
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.299.557	0	0	0	3.047.299.557	2.857.809.812	0	0	0	2.857.809.812	(189.489.745)
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.774.300	0	0	0	188.774.300	188.774.300	0	0	0	188.774.300	0
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.190.500	0	0	0	10.190.500	10.190.500	0	0	0	10.190.500	0
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.670.500	0	0	0	30.670.500	30.670.500	0	0	0	30.670.500	0
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.425.300	0	0	0	8.425.300	8.425.300	0	0	0	8.425.300	0
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.488.000	0	0	0	59.488.000	59.488.000	0	0	0	59.488.000	0
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	144.820.100	0	0	144.820.100	0	312.413.999	0	0	312.413.999	167.593.899
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	144.820.100	0	0	144.820.100	0	312.413.999	0	0	312.413.999	167.593.899
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.787.508	0	0	0	1.078.787.508	1.091.793.830	0	0	0	1.091.793.830	13.006.322
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.990.000	0	0	0	6.990.000	6.990.000	0	0	0	6.990.000	0
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000	0	0	0	205.000.000	225.000.000	0	0	0	225.000.000	20.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.797.508	0	0	0	866.797.508	859.803.830	0	0	0	859.803.830	(6.993.678)
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.051.744	100.000.000	0	0	1.163.051.744	1.145.151.744	200.000.000	0	0	1.345.151.744	182.100.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	791.759.628	0	0	0	791.759.628	881.759.628	0	0	0	881.759.628	90.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	100.000.000	0	0	280.000.000	140.000.000	200.000.000	0	0	340.000.000	60.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.292.116	0	0	0	91.292.116	123.392.116	0	0	0	123.392.116	32.100.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	2.896.865.180	175.000.000	0	0	3.071.865.180	3.086.865.180	240.000.000	0	0	3.326.865.180	255.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.896.865.180	175.000.000	0	0	3.071.865.180	3.086.865.180	240.000.000	0	0	3.326.865.180	255.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	45.569.600	175.000.000	0	0	220.569.600	45.569.600	230.000.000	0	0	275.569.600	55.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	239.617.116	0	0	0	239.617.116	259.617.116	0	0	0	259.617.116	20.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.611.678.464	0	0	0	2.611.678.464	2.781.678.464	10.000.000	0	0	2.791.678.464	180.000.000
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356	34.765.627.692	8.506.188.301	0	0	43.271.815.993	(213.223.363)

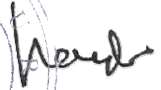
PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
						Belanja					Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356	34.765.627.692	8.506.188.301	0	0	43.271.815.993	(213.223.363)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000			Inspektorat	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356	34.765.627.692	8.506.188.301	0	0	43.271.815.993	(213.223.363)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.499.223.641	8.406.188.301	0	0	33.905.411.942	24.635.561.734	8.406.188.301	0	0	33.041.750.035	(863.661.907)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.757.200	0	0	0	83.757.200	83.757.200	0	0	0	83.757.200	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.777.500	0	0	0	55.777.500	55.777.500	0	0	0	55.777.500	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.979.700	0	0	0	27.979.700	27.979.700	0	0	0	27.979.700	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.467.540.274	0	0	0	20.467.540.274	20.296.862.514	0	0	0	20.296.862.514	(170.677.760)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.467.540.274	0	0	0	20.467.540.274	20.296.862.514	0	0	0	20.296.862.514	(170.677.760)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.284.979.040	0	0	0	1.284.979.040	1.224.629.040	0	0	0	1.224.629.040	(60.350.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.992.540	0	0	0	25.992.540	25.992.540	0	0	0	25.992.540	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.499.100	0	0	0	76.499.100	76.499.100	0	0	0	76.499.100	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.990.400	0	0	0	149.990.400	149.990.400	0	0	0	149.990.400	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000	0	0	0	44.000.000	44.000.000	0	0	0	44.000.000	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.497.000	0	0	0	888.497.000	828.147.000	0	0	0	828.147.000	(60.350.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	3.697.093.301	0	0	3.697.093.301	0	3.697.093.301	0	0	3.697.093.301	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	3.697.093.301	0	0	3.697.093.301	0	3.697.093.301	0	0	3.697.093.301	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.998.988	2.428.400.000	0	0	3.058.398.988	630.535.676	2.428.400.000	0	0	3.058.935.676	536.688
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	0	0	0	275.000.000	275.000.000	0	0	0	275.000.000	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.998.988	2.428.400.000	0	0	2.778.398.988	350.535.676	2.428.400.000	0	0	2.778.935.676	536.688
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.032.948.139	2.280.695.000	0	0	5.313.643.139	2.399.777.304	2.280.695.000	0	0	4.680.472.304	(633.170.835)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.590.703.139	0	0	0	2.590.703.139	1.957.085.064	0	0	0	1.957.085.064	(633.618.075)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.245.000	2.280.695.000	0	0	2.372.940.000	92.423.896	2.280.695.000	0	0	2.373.118.896	178.896
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	0	0	0	350.000.000	350.268.344	0	0	0	350.268.344	268.344
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.899.442.988	100.000.000	0	0	5.999.442.988	5.923.554.156	100.000.000	0	0	6.023.554.156	24.111.168
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.849.443.658	50.000.000	0	0	3.899.443.658	3.873.517.586	50.000.000	0	0	3.923.517.586	24.073.928
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	599.999.992	0	0	0	599.999.992	600.197.784	0	0	0	600.197.784	197.792

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	384.500.396	0	0	0	384.500.396	384.679.292	0	0	0	384.679.292	178.896
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	199.999.650	0	0	0	199.999.650	199.999.650	0	0	0	199.999.650	0
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	400.000.048	0	0	0	400.000.048	400.089.496	0	0	0	400.089.496	89.448
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.024.944.096	0	0	0	1.024.944.096	1.024.912.992	0	0	0	1.024.912.992	(31.104)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	689.999.500	50.000.000	0	0	739.999.500	689.459.500	50.000.000	0	0	739.459.500	(540.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	549.999.976	0	0	0	549.999.976	574.178.872	0	0	0	574.178.872	24.178.896
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.049.999.330	50.000.000	0	0	2.099.999.330	2.050.036.570	50.000.000	0	0	2.100.036.570	37.240
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	149.999.586	0	0	0	149.999.586	150.168.482	0	0	0	150.168.482	168.896
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.899.999.744	50.000.000	0	0	1.949.999.744	1.899.868.088	50.000.000	0	0	1.949.868.088	(131.656)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.580.184.426	0	0	0	3.580.184.426	4.206.511.802	0	0	0	4.206.511.802	626.327.376
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.630.311.832	0	0	0	1.630.311.832	2.257.780.864	0	0	0	2.257.780.864	627.469.032
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	530.311.944	0	0	0	530.311.944	485.244.288	0	0	0	485.244.288	(45.067.656)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.099.999.888	0	0	0	1.099.999.888	1.772.536.576	0	0	0	1.772.536.576	672.536.688
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	1.949.872.594	0	0	0	1.949.872.594	1.948.730.938	0	0	0	1.948.730.938	(1.141.656)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	649.877.394	0	0	0	649.877.394	649.725.738	0	0	0	649.725.738	(151.656)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	349.995.500	0	0	0	349.995.500	349.535.500	0	0	0	349.535.500	(460.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	799.999.800	0	0	0	799.999.800	799.909.800	0	0	0	799.909.800	(90.000)
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	149.999.900	0	0	0	149.999.900	149.559.900	0	0	0	149.559.900	(440.000)
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368	113.111.260.256	464.185.500	0	0	113.575.445.756	77.068.970.388
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368	113.111.260.256	464.185.500	0	0	113.575.445.756	77.068.970.388
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368	113.111.260.256	464.185.500	0	0	113.575.445.756	77.068.970.388
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.574.168.092	325.351.500	0	0	10.899.519.592	9.794.507.741	464.185.500	0	0	10.258.693.241	(640.826.351)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.754.400	0	0	0	11.754.400	11.754.400	0	0	0	11.754.400	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.717.600	0	0	0	7.717.600	7.717.600	0	0	0	7.717.600	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.036.800	0	0	0	4.036.800	4.036.800	0	0	0	4.036.800	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.055.633.324	0	0	0	9.055.633.324	8.030.816.149	0	0	0	8.030.816.149	(1.024.817.175)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.055.633.324	0	0	0	9.055.633.324	8.030.816.149	0	0	0	8.030.816.149	(1.024.817.175)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.950.800	92.580.000	0	0	305.530.800	299.444.800	92.580.000	0	0	392.024.800	86.494.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.120.000	0	0	0	5.120.000	5.120.000	0	0	0	5.120.000	0

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.914.200	92.580.000	0	0	112.494.200	19.914.200	92.580.000	0	0	112.494.200	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.142.600	0	0	0	18.142.600	18.142.600	0	0	0	18.142.600	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	(5.000.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.774.000	0	0	0	89.774.000	181.268.000	0	0	0	181.268.000	91.494.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	82.896.500	0	0	82.896.500	0	221.730.500	0	0	221.730.500	138.834.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	82.896.500	0	0	82.896.500	0	221.730.500	0	0	221.730.500	138.834.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.823.168	0	0	0	807.823.168	837.485.992	0	0	0	837.485.992	29.662.824
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	0	0	0	110.000.000	138.500.000	0	0	0	138.500.000	28.500.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.623.168	0	0	0	695.623.168	696.785.992	0	0	0	696.785.992	1.162.824
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.006.400	149.875.000	0	0	635.881.400	615.006.400	149.875.000	0	0	764.881.400	129.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449.036.400	0	0	0	449.036.400	581.036.400	0	0	0	581.036.400	132.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000	0	0	0	17.040.000	17.040.000	0	0	0	17.040.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	149.875.000	0	0	149.875.000	0	149.875.000	0	0	149.875.000	0
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.930.000	0	0	0	19.930.000	16.930.000	0	0	0	16.930.000	(3.000.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	720.152.896	0	0	0	720.152.896	1.038.264.392	0	0	0	1.038.264.392	318.111.496
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	720.152.896	0	0	0	720.152.896	1.038.264.392	0	0	0	1.038.264.392	318.111.496
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	720.152.896	0	0	0	720.152.896	1.038.264.392	0	0	0	1.038.264.392	318.111.496
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.848.269.544	0	0	0	16.848.269.544	95.781.272.488	0	0	0	95.781.272.488	78.933.002.944
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16.848.269.544	0	0	0	16.848.269.544	95.781.272.488	0	0	0	95.781.272.488	78.933.002.944
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	16.848.269.544	0	0	0	16.848.269.544	95.781.272.488	0	0	0	95.781.272.488	78.933.002.944

PROVINSI BALI																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023																	
Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	7.323.441.144	0	0	0	7.323.441.144	5.719.942.447	0	0	0	5.719.942.447	(1.603.498.697)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7.323.441.144	0	0	0	7.323.441.144	5.719.942.447	0	0	0	5.719.942.447	(1.603.498.697)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.323.441.144	0	0	0	7.323.441.144	5.719.942.447	0	0	0	5.719.942.447	(1.603.498.697)
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	715.092.192	0	0	0	715.092.192	777.273.188	0	0	0	777.273.188	62.180.996
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflrik Sosial	715.092.192	0	0	0	715.092.192	777.273.188	0	0	0	777.273.188	62.180.996
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	715.092.192	0	0	0	715.092.192	777.273.188	0	0	0	777.273.188	62.180.996
TOTAL							4.343.716.844.932	1.419.978.951.582	50.000.000.000	1.708.697.252.400	7.522.393.048.914	4.474.769.277.170	1.409.820.872.741	15.828.456.983	2.032.467.756.244	7.932.886.363.138	410.493.314.224

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN V

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023**

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01				PELAYANAN UMUM											
01	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.072.954.140.562	8.136.797.580	0	0	1.081.090.938.142	1.049.870.580.096	7.549.402.780	0	0	1.057.419.982.876	(23.670.955.266)
01	02	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	521.707.696.015	51.451.770.809	0	0	573.159.466.824	535.377.281.337	50.295.526.713	0	0	585.672.808.050	12.513.341.226
01	03	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	33.737.899.553	1.857.699.958	0	0	35.595.599.511	32.436.179.760	1.843.769.491	0	0	34.279.949.251	(1.315.650.260)
01	04	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	44.567.058.955	847.526.500	0	0	45.414.585.455	43.325.577.694	915.140.500	0	0	44.240.718.194	(1.173.867.261)
01	05	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24.644.139.628	3.956.730.033	0	0	28.600.869.661	23.438.305.707	3.917.588.835	0	0	27.355.894.542	(1.244.975.119)
01	06	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	32.547.281.594	335.717.100	0	0	32.882.998.694	30.909.670.168	185.642.000	0	0	31.095.312.168	(1.787.686.526)
01	07	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	513.469.992	0	0	0	513.469.992	513.827.784	0	0	0	513.827.784	357.792

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				DAN PERLINDUNGAN ANAK											
01	08	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	702.760.636	0	0	0	702.760.636	702.616.372	0	0	0	702.616.372	(144.264)
01	09	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.087.223.807	106.486.280	0	0	1.193.710.087	1.086.137.735	106.486.280	0	0	1.192.624.015	(1.086.072)
01	10	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.868.988	0	0	0	326.868.988	368.128.476	0	0	0	368.128.476	41.259.488
01	11	2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.227.751.192	102.215.962	0	0	33.329.967.154	32.146.793.181	88.688.962	0	0	32.235.482.143	(1.094.485.011)
01	12	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.654.283.237	1.023.376.700	0	0	23.677.659.937	23.948.872.517	911.006.200	0	0	24.859.878.717	1.182.218.780
01	13	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.329.722.209	318.360.800	0	0	19.648.083.009	19.569.112.221	318.360.800	0	0	19.887.473.021	239.390.012
01	14	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN	16.759.668.208	56.950.800	0	0	16.816.619.008	15.960.450.006	56.940.000	0	0	16.017.390.006	(799.229.002)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
01	15	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	16.403.464.968	606.570.000	0	0	17.010.034.968	15.217.313.254	589.570.000	0	0	15.806.883.254	(1.203.151.714)
01	16	2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440	540.404.680	233.471.000	0	0	773.875.680	364.240
01	17	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	51.711.089.850	3.769.984.500	0	0	55.481.074.350	49.056.367.488	3.775.874.100	0	0	52.832.241.588	(2.648.832.762)
01	18	2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	570.198.832	0	0	0	570.198.832	523.603.864	0	0	0	523.603.864	(46.594.968)
01	19	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	23.674.622.173	73.500.000	0	0	23.748.122.173	22.833.832.379	160.000.000	0	0	22.993.832.379	(754.289.794)
01	20	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.159.074.684	0	0	0	13.159.074.684	12.230.358.988	22.950.000	0	0	12.253.308.988	(905.765.696)
01	21	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	51.496.575.294	110.000.000	0	0	51.606.575.294	48.440.149.347	110.000.000	0	0	48.550.149.347	(3.056.425.947)
01	22	3	28	URUSAN PEMERINTAHAN	40.653.807.440	982.373.700	0	0	41.636.181.140	38.454.649.947	72.037.700	0	0	38.526.687.647	(3.109.493.493)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				BIDANG KEHUTANAN											
01	23	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.334.993.564	1.030.111.000	0	0	20.365.104.564	17.336.113.591	1.183.489.625	0	0	18.519.603.216	(1.845.501.348)
01	24	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	198.740.596	51.544.000	0	0	250.284.596	191.949.492	46.414.000	0	0	238.363.492	(11.921.104)
01	25	4	01	SEKRETARIAT DAERAH	207.566.880.901	17.192.152.775	0	0	224.759.033.676	241.702.225.772	5.909.954.199	0	0	247.612.179.971	22.853.146.295
01	26	4	02	SEKRETARIAT DPRD	244.446.460.335	756.591.000	0	0	245.203.051.335	211.915.821.907	1.165.068.650	0	0	213.080.890.557	(32.122.160.778)
01	27	5	01	PERENCANAAN	24.962.048.121	3.116.326.498	0	0	28.078.374.619	22.958.420.464	1.691.700.000	0	0	24.650.120.464	(3.428.254.155)
01	28	5	02	KEUANGAN	191.990.526.199	11.183.364.753	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.961.871.143.352	191.248.413.117	7.912.317.409	15.828.456.983	2.032.467.756.244	2.247.456.943.753	285.585.800.401
01	29	5	03	KEPEGAWAIAN	48.024.222.099	934.658.900	0	0	48.958.880.999	48.049.609.439	1.250.267.500	0	0	49.299.876.939	340.995.940
01	30	5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	877.977.592	0	0	0	877.977.592	536.780.384	0	0	0	536.780.384	(341.197.208)
01	31	5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.060.520.589	799.180.000	0	0	25.859.700.589	20.578.105.274	722.860.900	0	0	21.300.966.174	(4.558.734.415)
01	32	5	07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	8.279.655.489	419.820.100	0	0	8.699.475.589	8.375.058.066	752.413.999	0	0	9.127.472.065	427.996.476
01	33	6	01	INSPEKTORAT DAERAH	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356	34.765.627.692	8.506.188.301	0	0	43.271.815.993	(213.223.363)
01	34	8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368	113.111.260.256	464.185.500	0	0	113.575.445.756	77.068.970.388
03				KETERTIBAN DAN KEAMANAN											
03	01	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	22.909.523.840	1.470.000.000	0	0	24.379.523.840	23.100.270.888	1.470.000.000	0	0	24.570.270.888	190.747.048

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
03	02	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	255.937.800	0	0	0	255.937.800	255.937.800	0	0	0	255.937.800	0
03	03	4	01	SEKRETARIAT DAERAH	4.321.980.588	0	0	0	4.321.980.588	4.642.753.476	0	0	0	4.642.753.476	320.772.888
04				EKONOMI											
04	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	257.213.417.363	487.450.627.135	0	0	744.664.044.498	316.711.632.149	488.701.944.125	0	0	805.413.576.274	60.749.531.776
04	02	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.460.563.802	28.500.000	0	0	1.489.063.802	1.432.961.302	28.500.000	0	0	1.461.461.302	(27.602.500)
04	03	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.262.495.068	0	0	0	2.262.495.068	2.111.378.636	0	0	0	2.111.378.636	(151.116.432)
04	04	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.859.812.476	10.961.082.813	0	0	24.820.895.289	12.269.784.162	11.180.189.750	0	0	23.449.973.912	(1.370.921.377)
04	05	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	51.967.205.417	382.864.500.081	0	0	434.831.705.498	62.983.642.624	385.401.410.113	0	0	448.385.052.737	13.553.347.239
04	06	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	15.681.898.366	0	0	0	15.681.898.366	5.526.255.118	0	0	0	5.526.255.118	(10.155.643.248)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
04	07	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.641.492.192	0	0	0	2.641.492.192	2.644.086.184	0	0	0	2.644.086.184	2.593.992
04	08	2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696	870.981.992	283.961.000	0	0	1.154.942.992	28.296
04	09	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.516.993.188	2.800.000.000	0	0	4.316.993.188	2.474.579.876	2.200.000.000	0	0	4.674.579.876	357.586.688
04	10	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	36.866.883.668	4.177.194.700	0	0	41.044.078.368	39.249.999.656	4.182.791.200	0	0	43.432.790.856	2.388.712.488
04	11	3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	122.507.596	0	0	0	122.507.596	10.546.633.232	0	0	0	10.546.633.232	10.424.125.636
04	12	3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	536.141.800	500.000.000	0	0	1.036.141.800	58.137.800	0	0	0	58.137.800	(978.004.000)
04	13	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.231.526.276	0	0	0	1.231.526.276	1.189.186.652	0	0	0	1.189.186.652	(42.339.624)
04	14	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.327.729.772	0	0	0	8.327.729.772	8.659.046.644	0	0	0	8.659.046.644	331.316.872

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

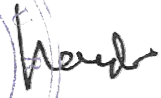
Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
05				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP											
05	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.509.240.560	1.425.000.000	0	0	13.934.240.560	13.104.275.730	1.295.145.020	0	0	14.399.420.750	465.180.190
05	02	2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	311.272.200	0	0	0	311.272.200	200.595.300	0	0	0	200.595.300	(110.676.900)
05	03	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.988.491.384	0	0	0	2.988.491.384	10.468.096.480	16.000.000	0	0	10.484.096.480	7.495.605.096
05	04	3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	137.661.648	0	0	0	137.661.648	127.997.096	0	0	0	127.997.096	(9.664.552)
06				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM											
06	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.063.582.958	13.411.143.710	0	0	41.474.726.668	30.242.703.966	14.054.037.220	0	0	44.296.741.186	2.822.014.518
06	02	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	2.160.753.864	0	0	0	2.160.753.864	1.869.131.020	0	0	0	1.869.131.020	(291.622.844)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
07				KESEHATAN											
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	47.382.275.896	30.695.290.894	0	0	78.077.566.790	44.685.383.699	30.660.290.894	0	0	75.345.674.593	(2.731.892.197)
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	603.494.588	0	0	0	603.494.588	537.575.276	0	0	0	537.575.276	(65.919.312)
08				PARIWISATA											
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.992.742.684	0	0	0	1.992.742.684	1.935.159.768	0	0	0	1.935.159.768	(57.582.916)
10				PENDIDIKAN											
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	382.917.211.798	365.294.020.300	0	0	748.211.232.098	368.197.574.682	369.291.955.375	0	0	737.489.530.057	(10.721.702.041)
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.023.489.203	117.587.200	0	0	25.141.076.403	25.072.543.803	222.332.600	0	0	25.294.876.403	153.800.000
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	545.407.253.024	47.515.200	0	0	545.454.768.224	568.832.744.872	0	0	0	568.832.744.872	23.377.976.648
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284	512.451.764	75.000.000	0	0	587.451.764	(129.600.520)

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
						Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
					BIDANG PERPUSTAKAAN											
11					PERLINDUNGAN SOSIAL											
11	01	1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.899.040.068	0	0	0	4.899.040.068	4.711.562.868	0	0	0	4.711.562.868	(187.477.200)
11	02	2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.792.930.200	0	0	0	1.792.930.200	1.792.247.200	0	0	0	1.792.247.200	(683.000)
11	03	3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	60.159.000	0	0	0	60.159.000	32.367.000	0	0	0	32.367.000	(27.792.000)
TOTAL						4.343.716.844.932	1.419.978.951.582	50.000.000.000	1.708.697.252.400	7.522.393.048.914	4.474.769.277.170	1.409.820.872.741	15.828.456.983	2.032.467.756.244	7.932.886.363.138	410.493.314.224

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	A SPM Bidang Pendidikan					
	Pendidikan Menengah					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	116.516.686.900	105.485.926.900	(11.030.760.000)
			Penambahan Ruang Kelas Baru	11.921.124.900	11.400.662.900	(520.462.000)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.851.357.000	11.838.410.841	4.987.053.841
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	365.255.000	1.919.960.930	1.554.705.930
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	614.200.000	614.200.000	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	614.200.000	614.200.000	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	381.582.000	381.582.000	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	497.892.000	497.892.000	0
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.528.580.000	3.333.023.000	1.804.443.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.121.899.750	2.121.899.750	0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.236.970.036	53.333.752.772	96.782.736
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	129.726.800	129.726.800	0
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.883.900	39.883.900	0
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	323.932.600	0
		Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		195.143.290.886	192.035.054.393	(3.108.236.493)
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	54.752.103.700	54.752.103.700	0
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.533.000.000	5.533.000.000	0
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.090.716.000	3.090.716.000	0
			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.000.000	225.000.000	0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	12.740.636.600	2.842.136.600	(9.898.500.000)
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12.768.434.000	12.612.745.000	(155.689.000)
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	142.451.000	78.611.000	(63.840.000)
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	46.949.982.256	47.036.478.472	86.496.216

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023						
No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	748.663.900	748.663.900	0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	550.682.000	532.053.600	(18.628.400)
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	118.635.500	118.635.500	0
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.083.100	37.083.100	0
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	323.932.600	0
	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			137.981.320.656	127.931.159.472	(10.050.161.184)
		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.762.500	31.762.500	0
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	30.500.400	30.500.400	0
	Jumlah Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			62.262.900	62.262.900	0
	Jumlah Pendidikan Menengah			333.186.874.442	320.028.476.765	(13.158.397.677)
	Pendidikan Khusus					
		Pengelolaan Pendidikan Khusus				
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.126.957.200	10.076.957.200	(50.000.000)
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.733.000.000	1.253.036.589	(479.963.411)
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	512.250.000	0	(512.250.000)
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.551.968.156	5.565.117.012	13.148.856
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.629.500	50.629.500	0
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600	17.559.600	0
	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus			17.992.364.456	16.963.299.901	(1.029.064.555)
	Jumlah Pendidikan Khusus			17.992.364.456	16.963.299.901	(1.029.064.555)
	Jumlah SPM Bidang Pendidikan			351.179.238.898	336.991.776.666	(14.187.462.232)
	B SPM Bidang Kesehatan					
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.779.162.080	2.951.458.880	172.296.800
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			2.779.162.080	2.951.458.880	172.296.800
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			2.779.162.080	2.951.458.880	172.296.800
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi					
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	910.780.800	9.012.557.500	8.101.776.700
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			910.780.800	9.012.557.500	8.101.776.700
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			910.780.800	9.012.557.500	8.101.776.700
	Jumlah SPM Bidang Kesehatan			3.689.942.880	11.964.016.380	8.274.073.500
	C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.272.499.732	1.574.184.584	(698.315.148)
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	535.432.900	507.872.130	(27.560.770)
			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	9.264.682.600	9.434.382.600	169.700.000
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.141.218.100	965.365.200	(175.852.900)
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	28.260.893.336	31.814.936.672	3.554.043.336
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			41.474.726.668	44.296.741.186	2.822.014.518
	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			41.474.726.668	44.296.741.186	2.822.014.518
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	307.012.100	290.289.860	(16.722.240)
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.042.332.600	977.579.200	(64.753.400)
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	232.012.100	163.309.790	(68.702.310)
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10.104.884.800	11.504.884.800	1.400.000.000
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			11.686.241.600	12.936.063.650	1.249.822.050

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	11.686.241.600	12.936.063.650	1.249.822.050
			Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	53.160.968.268	57.232.804.836	4.071.836.568
	D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi					
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	27.533.700	10.244.700	(17.289.000)
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	327.658.988	305.680.338	(21.978.650)
			Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	355.192.688	315.925.038	(39.267.650)
			Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	355.192.688	315.925.038	(39.267.650)
	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi					
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088	406.763.766	(15.983.322)
			Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088	406.763.766	(15.983.322)
			Jumlah Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	422.747.088	406.763.766	(15.983.322)
			Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	777.939.776	722.688.804	(55.250.972)
	E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi					
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.697.318.408	4.001.331.216	304.012.808
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	206.475.300	198.675.300	(7.800.000)
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448	37.565.896	89.448
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	37.476.448	37.565.896	89.448
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.796.022.032	16.769.802.032	(26.220.000)
			Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.774.768.636	21.044.940.340	270.171.704
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	132.400.000	67.502.000	(64.898.000)

PROVINSI BALI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	132.400.000	67.502.000	(64.898.000)
			Jumlah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	20.907.168.636	21.112.442.340	205.273.704
			Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.907.168.636	21.112.442.340	205.273.704
	F SPM Bidang Sosial					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti				
			Penyediaan Permakanan	28.699.700	28.469.700	(230.000)
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	27.924.600	27.814.600	(110.000)
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	56.624.300	56.284.300	(340.000)
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti	56.624.300	56.284.300	(340.000)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti				
			Pengasuhan	40.000.000	40.000.000	0
			Penyediaan Makanan	583.986.000	644.230.000	60.244.000
			Penyediaan Sandang	89.750.000	89.750.000	0
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000	10.000.000	0
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.950.000	256.950.000	(16.000.000)
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.914.000	47.914.000	0
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	208.840.668	100.140.668	(108.700.000)
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000	17.140.000	(340.000)
			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	36.393.900	36.343.900	(50.000)
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	1.307.314.568	1.242.468.568	(64.846.000)
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti	1.307.314.568	1.242.468.568	(64.846.000)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				
			Penyediaan Permakanan	465.000.000	465.000.000	0
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000	15.568.800	(44.431.200)
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.798.800	125.998.800	16.200.000

PROVINSI BALI
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	192.001.000	85.651.000	(106.350.000)
			Pemulasaraan	143.734.200	143.734.200	0
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	970.534.000	835.952.800	(134.581.200)
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti	970.534.000	835.952.800	(134.581.200)
			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
			Pemulangan ke Daerah Asal	2.384.397.800	2.397.037.800	12.640.000
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.384.397.800	2.397.037.800	12.640.000
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.937.800	255.937.800	0
			Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	255.937.800	255.937.800	0
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	2.640.335.600	2.652.975.600	12.640.000
			Jumlah SPM Bidang Sosial	4.974.808.468	4.787.681.268	(187.127.200)

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.800.474.574.507	3.421.918.525.779	3.457.321.198.349	35.402.672.570	1 %
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.596.956.527.330	1.829.302.170.240	1.794.909.512.933	(34.392.657.307)	2 %
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.204.392.783.341	1.081.090.938.142	1.057.419.982.876	(23.670.955.266)	2 %
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.665.137.865.766	747.862.862.298	737.141.160.257	(10.721.702.041)	1 %
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.105.000.000	207.016.500	207.016.500	0	0 %
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.485.000.000	62.262.900	62.262.900	0	0 %
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	27.000.000.000	79.090.400	79.090.400	0	0 %
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.214.237.608.824	651.237.033.614	661.018.482.643	9.781.449.029	2 %
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.938.993.989.936	573.159.466.824	585.672.808.050	12.513.341.226	2 %
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.140.914.389.290	74.474.837.290	73.082.605.293	(1.392.231.997)	2 %
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	59.997.596.618	2.021.509.500	1.364.253.300	(657.256.200)	33 %
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	595.899.128	728.589.000	120.151.000	(608.438.000)	84 %
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.116.264.430	852.631.000	778.665.000	(73.966.000)	9 %
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	860.333.536.016	835.668.611.237	898.389.687.461	62.721.076.224	8 %
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.168.942.588	35.595.599.511	34.279.949.251	(1.315.650.260)	4 %
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14.398.230.945	29.950.739.156	28.412.841.206	(1.537.897.950)	5 %
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	82.798.854.462	41.474.726.668	44.296.741.186	2.822.014.518	7 %
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	25.352.673.012	11.686.241.600	12.936.063.650	1.249.822.050	11 %
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	448.781.001.272	458.050.968.263	514.737.168.060	56.686.199.797	12 %
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	304.735.916.293	251.321.165.931	259.577.032.112	8.255.866.181	3 %
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	7.051.833.806	5.341.171.148	2.686.534.896	(2.654.636.252)	50 %

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.232.235.572	2.247.998.960	1.463.357.100	(784.641.860)	35 %
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.508.667.894	2.160.753.864	1.869.131.020	(291.622.844)	13 %
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	822.862.806	777.939.776	722.688.804	(55.250.972)	7 %
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	685.805.088	1.382.814.088	1.146.442.216	(236.371.872)	17 %
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	85.405.841.764	69.794.109.295	68.810.989.082	(983.120.213)	1 %
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75.472.371.128	45.414.585.455	44.240.718.194	(1.173.867.261)	3 %
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.635.000.000	21.364.308.880	21.569.200.928	204.892.048	1 %
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.000.762.400	3.015.214.960	3.001.069.960	(14.145.000)	0 %
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	42.032.392.679	33.755.847.529	32.323.395.210	(1.432.452.319)	4 %
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.088.958.496	28.600.869.661	27.355.894.542	(1.244.975.119)	4 %
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	430.000.000	42.141.300	41.971.300	(170.000)	0 %
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.633.852.800	4.726.120.168	4.538.992.968	(187.127.200)	4 %
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	365.000.000	3.614.900	3.614.900	0	0 %
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	470.000.000	255.937.800	255.937.800	0	0 %
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	266.000.000	127.163.700	126.983.700	(180.000)	0 %
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.433.924.163.795	1.262.818.507.289	1.289.272.075.264	26.453.567.975	2 %
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	62.074.588.000	34.372.062.496	32.556.773.470	(1.815.289.026)	5 %
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.000.000.000	32.882.998.694	31.095.312.168	(1.787.686.526)	5 %
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	38.000.000.000	1.109.025.700	1.106.625.700	(2.400.000)	0 %
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.600.000.000	176.010.100	173.576.800	(2.433.300)	1 %
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0	54.500.100	31.730.900	(22.769.200)	42 %
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.949.176.000	149.527.902	149.527.902	0	0 %

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.370.695.748	2.306.400.192	2.306.074.984	(325.208)	0 %
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.044.479.248	513.469.992	513.827.784	357.792	0 %
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	110.000.000	739.892.500	739.472.500	(420.000)	0 %
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	298.315.000	316.190.000	315.930.000	(260.000)	0 %
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	125.000.000	20.000.000	19.999.000	(1.000)	0 %
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	672.500.000	653.097.700	653.095.700	(2.000)	0 %
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	55.401.500	63.750.000	63.750.000	0	0 %
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	76.525.440.088	2.965.255.704	2.813.995.008	(151.260.696)	5 %
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.729.204.417	702.760.636	702.616.372	(144.264)	0 %
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.672.353.723	715.463.576	701.906.952	(13.556.624)	2 %
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	568.807.250	537.181.024	519.416.048	(17.764.976)	3 %
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.110.149.396	1.009.850.468	890.055.636	(119.794.832)	12 %
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	162.888.950	311.272.200	200.595.300	(110.676.900)	36 %
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	162.888.950	311.272.200	200.595.300	(110.676.900)	36 %
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	83.414.937.212	4.182.201.471	11.676.720.495	7.494.519.024	179 %
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	117.811.982.982	1.193.710.087	1.192.624.015	(1.086.072)	0 %
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1.256.197.800	391.102.096	377.044.992	(14.057.104)	4 %
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.594.613.721	145.838.400	139.188.400	(6.650.000)	5 %
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.045.000.000	192.343.892	186.811.684	(5.532.208)	3 %
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.871.086.300	2.259.206.996	9.781.051.404	7.521.844.408	333 %
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.175.000.000	326.868.988	368.128.476	41.259.488	13 %
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.185.000.000	186.673.244	232.224.388	45.551.144	24 %

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	990.000.000	140.195.744	135.904.088	(4.291.656)	3 %
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.492.738.037	33.329.967.154	32.235.482.143	(1.094.485.011)	3 %
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.266.603.120	16.836.969.418	13.440.659.267	(3.396.310.151)	20 %
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	247.447.977	163.208.344	150.556.688	(12.651.656)	8 %
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.593.700.000	990.754.632	877.868.768	(112.885.864)	11 %
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	9.384.986.940	15.339.034.760	17.766.397.420	2.427.362.660	16 %
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	864.320.232	603.494.588	537.575.276	(65.919.312)	11 %
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	864.320.232	603.494.588	537.575.276	(65.919.312)	11 %
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	63.107.848.481	48.498.555.226	48.309.852.629	(188.702.597)	0 %
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	170.996.602.270	23.677.659.937	24.859.878.717	1.182.218.780	5 %
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	82.634.112.108	23.051.884.461	22.204.594.156	(847.290.305)	4 %
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	7.000.000.000	1.010.768.040	992.485.280	(18.282.760)	2 %
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	4.750.000.000	758.242.788	252.894.476	(505.348.312)	67 %
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	251.257.120.950	454.479.788.507	468.272.525.758	13.792.737.251	3 %
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.838.179.950	19.648.083.009	19.887.473.021	239.390.012	1 %
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	42.157.941.000	26.455.837.080	40.009.778.752	13.553.941.672	51 %
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	186.261.000.000	408.375.868.418	408.375.273.985	(594.433)	0 %
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	33.499.595.086	32.498.517.374	21.543.645.124	(10.954.872.250)	34 %
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.271.275.875	16.816.619.008	16.017.390.006	(799.229.002)	5 %
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	718.700.000	275.064.140	259.249.380	(15.814.760)	6 %
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	302.500.000	49.999.800	46.919.800	(3.080.000)	6 %

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	261.161.029	118.552.496	118.491.392	(61.104)	0 %
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.294.984.944	3.962.539.110	3.962.718.006	178.896	0 %
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.216.611.176	327.995.940	316.561.180	(11.434.760)	3 %
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.070.000.000	10.947.746.880	822.315.360	(10.125.431.520)	92 %
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.397.551.226	19.651.527.160	18.450.969.438	(1.200.557.722)	6 %
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.739.336.726	17.010.034.968	15.806.883.254	(1.203.151.714)	7 %
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	350.000.000	319.549.344	319.817.688	268.344	0 %
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	580.000.000	566.255.792	566.613.584	357.792	0 %
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.600.000.000	840.609.616	842.130.232	1.520.616	0 %
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	713.214.500	818.049.344	818.317.688	268.344	0 %
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	415.000.000	97.028.096	97.206.992	178.896	0 %
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.431.400.000	25.141.076.403	25.294.876.403	153.800.000	1 %
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10.871.400.000	3.471.199.600	1.499.999.600	(1.971.200.000)	57 %
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	86.560.000.000	21.169.876.803	23.294.876.803	2.125.000.000	10 %
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.000.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0 %
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	827.369.000	773.511.440	773.875.680	364.240	0 %
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	827.369.000	773.511.440	773.875.680	364.240	0 %
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	618.450.000	1.154.914.696	1.154.942.992	28.296	0 %
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	618.450.000	1.154.914.696	1.154.942.992	28.296	0 %
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	670.704.220.785	600.935.842.574	621.664.986.460	20.729.143.886	3 %
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	241.481.502.948	55.481.074.350	52.832.241.588	(2.648.832.762)	5 %
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	41.415.177.822	70.158.487.248	90.124.075.796	19.965.588.548	28 %
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	18.666.575.328	884.750.200	1.469.954.380	585.204.180	66 %
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.629.053.660	117.634.800	216.191.400	98.556.600	84 %

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	6.222.113.570	902.713.036	548.303.572	(354.409.464)	39 %
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.376.021.023	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
2	22	09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	541.695.257.241	469.391.182.940	472.474.219.724	3.083.036.784	1 %
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	717.052.284	587.451.764	(129.600.520)	18 %
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	717.052.284	587.451.764	(129.600.520)	18 %
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	570.198.832	523.603.864	(46.594.968)	8 %
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0	570.198.832	523.603.864	(46.594.968)	8 %
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	346.691.944.176	209.034.882.783	211.737.843.993	2.702.961.210	1 %
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.708.415.886	28.065.115.361	27.668.412.255	(396.703.106)	1 %
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.486.530.000	23.748.122.173	22.993.832.379	(754.289.794)	3 %
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.769.937.866	178.952.896	399.961.792	221.008.896	124 %
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.417.457.078	700.822.396	1.301.001.292	600.178.896	86 %
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.616.659.621	234.998.800	234.998.800	0	0 %
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.000.000	42.101.400	178.321.400	136.220.000	324 %
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.401.505.586	3.160.117.696	2.560.296.592	(599.821.104)	19 %
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	28.945.000.000	15.151.817.368	14.188.468.756	(963.348.612)	6 %
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.000.000.000	13.159.074.684	12.253.308.988	(905.765.696)	7 %
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.325.000.000	602.476.980	572.167.960	(30.309.020)	5 %
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.910.000.000	555.588.532	541.311.564	(14.276.968)	3 %
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	750.000.000	264.380.192	229.914.784	(34.465.408)	13 %
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.960.000.000	570.296.980	591.765.460	21.468.480	4 %
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	140.720.630.883	92.650.653.662	91.982.940.203	(667.713.459)	1 %
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	290.916.817.668	51.606.575.294	48.550.149.347	(3.056.425.947)	6 %

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	136.250.444.007	27.051.417.008	29.997.279.936	2.945.862.928	11 %
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.358.628.723	1.319.824.232	1.316.330.464	(3.493.768)	0 %
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	12.430.964.998	8.026.603.524	7.493.536.348	(533.067.176)	7 %
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.935.700.575	4.307.471.268	4.289.855.636	(17.615.632)	0 %
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.064.800.000	338.762.336	335.788.472	(2.973.864)	1 %
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	100.359.233.591	41.896.350.384	49.201.317.975	7.304.967.591	17 %
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	353.435.948.946	41.636.181.140	38.526.687.647	(3.109.493.493)	7 %
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	24.534.867.000	122.507.596	10.546.633.232	10.424.125.636	8.509 %
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	981.646.600	137.661.648	127.997.096	(9.664.552)	7 %
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.268.447.992	1.036.141.800	58.137.800	(978.004.000)	94 %
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0	8.000.000	4.293.200	(3.706.800)	46 %
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	668.447.992	8.000.000	7.430.000	(570.000)	7 %
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	600.000.000	1.020.141.800	46.414.600	(973.727.200)	95 %
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	24.303.215.824	21.596.630.840	19.708.789.868	(1.887.840.972)	9 %
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.129.600.000	20.365.104.564	18.519.603.216	(1.845.501.348)	9 %
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	506.916.022	263.962.088	257.658.776	(6.303.312)	2 %
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	93.500.000	111.485.500	108.065.500	(3.420.000)	3 %
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	275.000.000	14.629.700	8.405.700	(6.224.000)	43 %
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.000.000.000	793.063.540	766.581.780	(26.481.760)	3 %
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	186.999.802	48.385.448	48.474.896	89.448	0 %
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	33.451.800.000	8.578.014.368	8.897.410.136	319.395.768	4 %
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.064.800.000	250.284.596	238.363.492	(11.921.104)	5 %

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

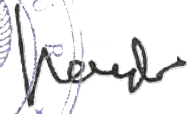
Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	22.400.000.000	8.056.153.372	8.387.470.644	331.317.272	4 %
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	187.000.000	271.576.400	271.576.000	(400)	0 %
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	60.159.000	32.367.000	(27.792.000)	46 %
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	60.159.000	32.367.000	(27.792.000)	46 %
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	660.072.830.949	474.284.065.599	465.335.824.004	(8.948.241.595)	2 %
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	433.939.830.949	229.081.014.264	252.254.933.447	23.173.919.183	10 %
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.405.335.790.178	162.716.541.716	164.793.691.251	2.077.149.535	1 %
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	695.693.020	967.599.996	892.836.892	(74.763.104)	8 %
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.850.000.000	1.790.033.828	1.687.510.156	(102.523.672)	6 %
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.500.000.000	46.154.077.136	75.811.614.672	29.657.537.536	64 %
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	5.494.631.385	4.321.980.588	4.642.753.476	320.772.888	7 %
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.162.524.452	629.076.000	627.688.000	(1.388.000)	0 %
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.862.011.630	12.426.645.000	3.725.179.000	(8.701.466.000)	70 %
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	485.672.099	75.060.000	73.660.000	(1.400.000)	2 %
4	02		SEKRETARIAT DPRD	226.133.000.000	245.203.051.335	213.080.890.557	(32.122.160.778)	13 %
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	88.436.574.023	91.510.566.331	3.073.992.308	3 %
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	127.630.000.000	156.766.477.312	121.570.324.226	(35.196.153.086)	22 %
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.993.007.712.129	2.074.345.552.740	2.352.372.159.779	278.026.607.039	13 %
5	01		PERENCANAAN	31.755.226.743	28.078.374.619	24.650.120.464	(3.428.254.155)	12 %
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.207.027.134	20.526.319.911	18.252.904.048	(2.273.415.863)	11 %
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.586.908.871	5.125.180.372	4.084.069.344	(1.041.111.028)	20 %
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.961.290.738	2.426.874.336	2.313.147.072	(113.727.264)	5 %
5	02		KEUANGAN	1.916.408.304.417	1.961.871.143.352	2.247.456.943.753	285.585.800.401	15 %

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.892.803.168.660	173.671.042.100	170.809.167.122	(2.861.874.978)	2 %
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.700.116.732.880	1.766.426.176.232	2.054.939.328.091	288.513.151.859	16 %
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	13.070.000.000	3.845.994.488	3.979.530.776	133.536.288	3 %
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	204.762.546.710	17.927.930.532	17.728.917.764	(199.012.768)	1 %
5	03		KEPEGAWAIAN	0	48.958.880.999	49.299.876.939	340.995.940	1 %
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	36.147.294.471	39.672.320.513	3.525.026.042	10 %
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0	12.811.586.528	9.627.556.426	(3.184.030.102)	25 %
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	877.977.592	536.780.384	(341.197.208)	39 %
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	877.977.592	536.780.384	(341.197.208)	39 %
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	34.984.802.497	25.859.700.589	21.300.966.174	(4.558.734.415)	18 %
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.284.802.497	13.972.055.089	12.805.016.874	(1.167.038.215)	8 %
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	16.700.000.000	11.887.645.500	8.495.949.300	(3.391.696.200)	29 %
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.859.378.472	8.699.475.589	9.127.472.065	427.996.476	5 %
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.959.378.472	5.627.610.409	5.800.606.885	172.996.476	3 %
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.900.000.000	3.071.865.180	3.326.865.180	255.000.000	8 %
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	36.621.407.234	43.485.039.356	43.271.815.993	(213.223.363)	0 %
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	36.621.407.234	43.485.039.356	43.271.815.993	(213.223.363)	0 %
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.845.325.000	33.905.411.942	33.041.750.035	(863.661.907)	3 %
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.450.681.836	5.999.442.988	6.023.554.156	24.111.168	0 %
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.325.400.398	3.580.184.426	4.206.511.802	626.327.376	17 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	35.035.784.610	36.506.475.368	113.575.445.756	77.068.970.388	211 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.035.784.610	36.506.475.368	113.575.445.756	77.068.970.388	211 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.880.886.446	10.899.519.592	10.258.693.241	(640.826.351)	6 %

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.212.154.896	720.152.896	1.038.264.392	318.111.496	44 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	14.542.743.268	16.848.269.544	95.781.272.488	78.933.002.944	468 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.400.000.000	7.323.441.144	5.719.942.447	(1.603.498.697)	22 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.000.000.000	715.092.192	777.273.188	62.180.996	9 %

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VIII

**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN
RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN DENGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.818.079.389.336	1.818.079.389.336	1.820.204.389.336
1.01.2.19.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.794.909.512.933	1.794.909.512.933	1.794.909.512.933
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.794.909.512.933	1.794.909.512.933	1.794.909.512.933
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.057.419.982.876	1.057.419.982.876	1.057.419.982.876
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.561.300	130.561.300	130.561.300
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.469.400	88.469.400	88.469.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.091.900	42.091.900	42.091.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.034.318.904.068	1.034.318.904.068	1.034.318.904.068
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.034.212.288.768	1.034.212.288.768	1.034.212.288.768
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.252.800	22.252.800	22.252.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.362.500	84.362.500	84.362.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.100.000	52.100.000	52.100.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	52.100.000	52.100.000	52.100.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.975.000	50.975.000	50.975.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.975.000	50.975.000	50.975.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.132.887.550	3.132.887.550	3.132.887.550
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.417.483.500	2.417.483.500	2.417.483.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.384.800	8.384.800	8.384.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.091.000	33.091.000	33.091.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250	31.526.250	31.526.250
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	642.402.000	642.402.000	642.402.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.942.215.778	10.942.215.778	10.942.215.778
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	841.555.650	841.555.650	841.555.650

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.100.660.128	10.100.660.128	10.100.660.128
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.792.339.180	8.792.339.180	8.792.339.180
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.016.028.700	1.016.028.700	1.016.028.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.410.000	14.410.000	14.410.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.198.710.980	7.198.710.980	7.198.710.980
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	558.189.500	558.189.500	558.189.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	737.141.160.257	737.141.160.257	737.141.160.257
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	387.110.225.022	387.110.225.022	387.110.225.022
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	105.485.926.900	105.485.926.900	105.485.926.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	12.372.662.900	11.400.662.900	11.400.662.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	668.000.000	668.000.000	668.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	558.578.000	558.578.000	558.578.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	1.117.156.000	1.117.156.000	1.117.156.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	334.906.000	334.906.000	334.906.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.558.862.229	3.558.862.229	3.558.862.229
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.838.410.841	11.838.410.841	11.838.410.841
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.919.960.930	1.919.960.930	1.919.960.930
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	614.200.000	614.200.000	614.200.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	614.200.000	614.200.000	614.200.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	381.582.000	381.582.000	381.582.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	497.892.000	497.892.000	497.892.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.333.023.000	3.333.023.000	3.333.023.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	3.281.000.000	4.253.000.000	4.253.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.121.899.750	2.121.899.750	2.121.899.750

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	6.104.998.800	6.104.998.800	6.104.998.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	554.737.200	554.737.200	554.737.200
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	114.824.800	114.824.800	114.824.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.077.887.600	1.077.887.600	1.077.887.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.333.752.772	53.333.752.772	53.333.752.772
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	292.540.000	292.540.000	292.540.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	378.706.500	378.706.500	378.706.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	175.454.222.000	175.454.222.000	175.454.222.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	42.994.700	42.994.700	42.994.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	129.726.800	129.726.800	129.726.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	281.928.100	281.928.100	281.928.100
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	281.828.700	281.828.700	281.828.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.883.900	39.883.900	39.883.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	323.932.600	323.932.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	315.807.251.708	315.807.251.708	315.807.251.708
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	54.752.103.700	54.752.103.700	54.752.103.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.533.000.000	5.533.000.000	5.533.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	8.546.689.000	8.546.689.000	8.546.689.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.105.808.000	1.105.808.000	1.105.808.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.090.716.000	3.090.716.000	3.090.716.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.000.000	225.000.000	225.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	1.565.400.000	1.565.400.000	1.565.400.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	2.475.000.000	2.475.000.000	2.475.000.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.842.136.600	2.842.136.600	2.842.136.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12.612.745.000	12.612.745.000	12.612.745.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	366.887.000	366.887.000	366.887.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	78.611.000	78.611.000	78.611.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.051.380.600	1.051.380.600	1.051.380.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	47.036.478.472	47.036.478.472	47.036.478.472
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	748.663.900	748.663.900	748.663.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	532.053.600	532.053.600	532.053.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	172.257.078.836	172.257.078.836	172.257.078.836
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	118.635.500	118.635.500	118.635.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	237.391.800	237.391.800	237.391.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	270.457.000	270.457.000	270.457.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.083.100	37.083.100	37.083.100
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	323.932.600	323.932.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	34.223.683.527	34.223.683.527	34.223.683.527
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.076.957.200	10.076.957.200	10.076.957.200
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.733.000.000	1.253.036.589	1.253.036.589
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.022.042.000	3.502.005.411	3.502.005.411
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	529.363.800	529.363.800	529.363.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.036.622.000	1.036.622.000	1.036.622.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	239.560.000	239.560.000	239.560.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	118.632.000	118.632.000	118.632.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.217.700	467.217.700	467.217.700

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.565.117.012	5.565.117.012	5.565.117.012
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	259.215.500	259.215.500	259.215.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	11.091.219.315	11.091.219.315	11.091.219.315
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.547.900	16.547.900	16.547.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.629.500	50.629.500	50.629.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600	17.559.600	17.559.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	207.016.500	207.016.500	207.016.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	179.548.800	179.548.800	179.548.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	132.307.900	132.307.900	132.307.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	47.240.900	47.240.900	47.240.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.467.700	27.467.700	27.467.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.467.700	27.467.700	27.467.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	62.262.900	62.262.900	62.262.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	62.262.900	62.262.900	62.262.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.762.500	31.762.500	31.762.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	30.500.400	30.500.400	30.500.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	79.090.400	79.090.400	79.090.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	79.090.400	79.090.400	79.090.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	79.090.400	79.090.400	79.090.400

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.169.876.403	23.169.876.403	25.294.876.403
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23.169.876.403	23.169.876.403	25.294.876.403
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.499.999.600	1.499.999.600	1.499.999.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.499.999.600	1.499.999.600	1.499.999.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	599.999.800	599.999.800	599.999.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	799.999.800	799.999.800	799.999.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.169.876.803	21.169.876.803	23.294.876.803
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	13.019.876.803	13.019.876.803	13.019.876.803
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	13.019.876.803	13.019.876.803	13.019.876.803
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.150.000.000	8.150.000.000	10.275.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	8.150.000.000	8.150.000.000	10.275.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	656.277.200.043	656.277.190.043	661.018.482.643
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	656.277.200.043	656.277.190.043	661.018.482.643
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	656.277.200.043	656.277.190.043	661.018.482.643
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	582.064.709.050	582.064.699.050	585.672.808.050
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.117.800	36.117.800	36.117.800

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.084.000	27.084.000	27.084.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.033.800	9.033.800	9.033.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	212.608.943.673	212.608.943.673	212.248.943.673
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	212.563.930.973	212.563.930.973	212.203.930.973
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.012.700	45.012.700	45.012.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.163.384.548	4.163.384.548	4.159.784.548
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.640.212.500	1.640.212.500	1.640.212.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.523.172.048	2.523.172.048	2.519.572.048
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	741.574.000	741.574.000	341.674.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	84.774.000	84.774.000	84.774.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	656.800.000	656.800.000	256.900.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.392.718.479	99.392.718.479	99.192.718.479
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.996.789.535	6.996.789.535	6.796.789.535
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.395.928.944	92.395.928.944	92.395.928.944
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.676.911.800	3.676.901.800	3.072.510.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	521.775.000	521.775.000	521.775.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.500.000	145.500.000	145.500.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	593.425.100	593.415.100	593.415.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.416.211.700	2.416.211.700	1.811.820.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	261.445.058.750	261.445.058.750	266.621.058.750
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	261.445.058.750	261.445.058.750	266.621.058.750
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.934.089.693	71.934.089.693	73.082.605.293
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan	34.849.333.761	34.849.333.761	34.849.333.761

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	1.955.822.600	1.955.822.600	1.955.822.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	247.000.000	247.000.000	247.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	27.611.996.794	27.611.996.794	27.611.996.794
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	315.459.862	315.459.862	315.459.862
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.719.054.505	4.719.054.505	4.719.054.505
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	37.002.460.432	37.002.460.432	38.150.976.032
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.951.458.880	2.951.458.880	2.951.458.880
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.012.557.500	9.012.557.500	9.012.557.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	310.827.000	310.827.000	307.851.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36.490.000	36.490.000	36.490.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32.780.000	32.780.000	32.780.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.730.580	2.730.580	2.730.580
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	395.046.500	395.046.500	432.146.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.245.831.572	1.245.831.572	1.245.831.572
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.953.947.200	22.953.947.200	24.068.338.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	23.456.200	23.456.200	23.456.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	37.335.000	37.335.000	37.335.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	19.083.000	19.083.000	19.083.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	19.083.000	19.083.000	19.083.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	63.212.500	63.212.500	63.212.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.317.400	30.317.400	30.317.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	32.895.100	32.895.100	32.895.100

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.379.585.300	1.379.585.300	1.364.253.300
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	9.454.400	9.454.400	9.454.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.454.400	9.454.400	9.454.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.370.130.900	1.370.130.900	1.354.798.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.307.400.000	1.307.400.000	1.307.400.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	62.730.900	62.730.900	47.398.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	120.151.000	120.151.000	120.151.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	72.472.600	72.472.600	72.472.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	72.472.600	72.472.600	72.472.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	47.678.400	47.678.400	47.678.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	47.678.400	47.678.400	47.678.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	778.665.000	778.665.000	778.665.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	603.785.000	603.785.000	603.785.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	603.785.000	603.785.000	603.785.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	174.880.000	174.880.000	174.880.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	174.880.000	174.880.000	174.880.000
1.03.1.04.2.10.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	948.010.894.981	948.010.894.981	900.459.413.781

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	947.810.299.681	947.810.299.681	900.258.818.481
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	945.940.028.661	945.940.028.661	898.389.687.461
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.286.939.651	34.286.939.651	34.279.949.251
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	801.593.982	801.593.982	801.593.582
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	437.434.260	437.434.260	437.434.260
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	364.159.722	364.159.722	364.159.322
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.608.450.103	26.608.450.103	26.608.450.103
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.608.450.103	26.608.450.103	26.608.450.103
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	835.448.595	835.448.595	828.458.595
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.176.800	36.176.800	36.176.800
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.159.230	63.159.230	63.159.230
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.125.900	90.125.900	90.125.900
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.436.665	35.436.665	35.436.665
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.290.000	43.290.000	43.290.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.260.000	477.260.000	470.270.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	670.364.100	670.364.100	670.364.100
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	670.364.100	670.364.100	670.364.100
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.152.255.896	1.152.255.896	1.152.255.896
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.090.000	4.090.000	4.090.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.850.000	549.850.000	549.850.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.315.896	398.315.896	398.315.896
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.218.826.975	4.218.826.975	4.218.826.975

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.918.915.076	1.918.915.076	1.918.915.076
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.056.796	300.056.796	300.056.796
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.999.855.103	1.999.855.103	1.999.855.103
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	28.412.842.206	28.412.842.206	28.412.841.206
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.768.840.747	2.768.840.747	2.768.840.547
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	531.574.247	531.574.247	531.574.247
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	1.998.642.300	1.998.642.300	1.998.642.100
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	238.624.200	238.624.200	238.624.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.644.001.459	25.644.001.459	25.644.000.659
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.563.587.191	1.563.587.191	1.563.586.791
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	20.552.481.376	20.552.481.376	20.552.480.976
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.527.932.892	3.527.932.892	3.527.932.892
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	44.642.373.486	44.642.373.486	44.296.741.186
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	44.642.373.486	44.642.373.486	44.296.741.186
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.081.850.584	2.081.850.584	1.574.184.584
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	515.538.130	515.538.130	507.872.130
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	9.264.682.600	9.264.682.600	9.434.382.600
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	965.365.500	965.365.500	965.365.200

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	31.814.936.672	31.814.936.672	31.814.936.672
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.936.063.950	12.936.063.950	12.936.063.650
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	12.936.063.950	12.936.063.950	12.936.063.650
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	290.289.860	290.289.860	290.289.860
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	977.579.200	977.579.200	977.579.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	163.310.090	163.310.090	163.309.790
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11.504.884.800	11.504.884.800	11.504.884.800
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	564.032.554.060	564.032.554.060	514.737.168.060
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	564.032.554.060	564.032.554.060	514.737.168.060
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.129.097.366	1.129.097.366	1.359.097.366
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3.561.471.222	3.561.471.222	3.553.805.222
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	559.341.985.472	559.341.985.472	509.824.265.472
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	257.102.562.812	257.102.562.812	259.577.032.112
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	257.102.562.812	257.102.562.812	259.577.032.112
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.259.014.386	3.259.014.386	4.470.433.986
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.400.585.731	1.400.585.731	1.240.506.231
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	77.129.954.049	77.129.954.049	77.129.954.049
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	80.824.980.464	80.824.980.464	80.790.060.264
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	67.694.832.069	67.694.832.069	65.194.832.069
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.328.657.487	19.328.657.487	19.769.557.087
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.618.664.183	3.618.664.183	7.135.813.983

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.845.874.443	3.845.874.443	3.845.874.443
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.063.334.796	3.063.334.796	2.686.534.896
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	913.402.080	913.402.080	703.588.180
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	913.402.080	913.402.080	703.588.180
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	710.656.360	710.656.360	595.756.360
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	710.656.360	710.656.360	595.756.360
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.439.276.356	1.439.276.356	1.387.190.356
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1.439.276.356	1.439.276.356	1.387.190.356
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.463.357.700	1.463.357.700	1.463.357.100
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	742.441.744	742.441.744	742.441.544
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	742.441.744	742.441.744	742.441.544
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	305.981.380	305.981.380	305.981.380
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	305.981.380	305.981.380	305.981.380
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	414.934.576	414.934.576	414.934.176
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	237.579.284	237.579.284	237.579.284
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	177.355.292	177.355.292	177.354.892
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.870.271.020	1.870.271.020	1.869.131.020
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	723.258.804	723.258.804	722.688.804
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	316.495.038	316.495.038	315.925.038
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	10.244.700	10.244.700	10.244.700
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	306.250.338	306.250.338	305.680.338

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	406.763.766	406.763.766	406.763.766
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	406.763.766	406.763.766	406.763.766
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.147.012.216	1.147.012.216	1.146.442.216
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.147.012.216	1.147.012.216	1.146.442.216
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	291.322.540	291.322.540	291.322.540
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	849.212.776	849.212.776	848.642.776
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	6.476.900	6.476.900	6.476.900
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	200.595.300	200.595.300	200.595.300
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	200.595.300	200.595.300	200.595.300
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.595.300	200.595.300	200.595.300
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.595.300	200.595.300	200.595.300
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	200.595.300	200.595.300	200.595.300
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	44.661.708.129	44.661.708.129	44.660.448.129
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44.661.708.129	44.661.708.129	44.660.448.129
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	44.661.708.129	44.661.708.129	44.660.448.129
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.091.247.201	23.091.247.201	23.091.247.201
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000	17.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000	14.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.619.254.547	19.619.254.547	19.619.254.547
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.619.254.547	19.619.254.547	19.619.254.547

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.786.510	357.786.510	357.786.510
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.043.310	37.043.310	37.043.310
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.364.200	180.364.200	180.364.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.400.000	60.400.000	60.400.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.584.000	25.584.000	25.584.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.395.000	54.395.000	54.395.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.089.636.648	1.089.636.648	1.089.636.648
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.970.000	2.970.000	2.970.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000	142.000.000	142.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.310.000	56.310.000	56.310.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	888.356.648	888.356.648	888.356.648
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.907.569.496	1.907.569.496	1.907.569.496
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.579.569.496	1.579.569.496	1.579.569.496
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	328.000.000	328.000.000	328.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.570.460.928	21.570.460.928	21.569.200.928
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	21.083.116.236	21.083.116.236	21.082.506.236
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.001.741.216	4.001.741.216	4.001.331.216
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	198.815.300	198.815.300	198.675.300

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.565.896	37.565.896	37.565.896
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	37.565.896	37.565.896	37.565.896
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	37.565.896	37.565.896	37.565.896
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.769.862.032	16.769.862.032	16.769.802.032
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	419.842.692	419.842.692	419.192.692
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	419.842.692	419.842.692	419.192.692
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	67.502.000	67.502.000	67.502.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	67.502.000	67.502.000	67.502.000
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.151.420.953	24.151.420.953	24.150.540.953
1.05.0.00.0.00.04.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.151.420.953	24.151.420.953	24.150.540.953
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	24.151.420.953	24.151.420.953	24.150.540.953
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.138.680.993	21.138.680.993	21.149.470.993
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.680.700	29.680.700	29.680.700
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.554.700	2.554.700	2.554.700
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.126.000	27.126.000	27.126.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.552.648.811	12.552.648.811	12.552.648.811
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.552.648.811	12.552.648.811	12.552.648.811
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.972.600	112.972.600	118.972.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.983.200	21.983.200	27.983.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.939.100	13.939.100	13.939.100
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	75.000.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.050.300	2.050.300	2.050.300
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	734.638.600	734.638.600	766.752.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	734.638.600	734.638.600	766.752.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.098.668.414	1.098.668.414	1.111.458.414
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.000.750	334.000.750	347.000.750
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.667.664	764.667.664	764.457.664
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.610.071.868	6.610.071.868	6.569.957.868
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.339.851.868	6.339.851.868	6.299.737.868
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.220.000	270.220.000	270.220.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.012.739.960	3.012.739.960	3.001.069.960
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	458.734.000	458.734.000	458.304.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	458.734.000	458.734.000	458.304.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.616.960	782.616.960	771.586.960
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.616.960	782.616.960	771.586.960
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.771.389.000	1.771.389.000	1.771.179.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.745.500.000	1.745.500.000	1.745.290.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	25.889.000	25.889.000	25.889.000
1.06.2.08.0.00.06.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	34.736.892.490	34.736.892.490	34.629.470.194
1.06.2.08.0.00.06.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.430.134.506	32.430.134.506	32.323.395.210
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.430.134.506	32.430.134.506	32.323.395.210
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.427.587.838	27.427.587.838	27.355.894.542

PROVINSI BALI									
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS									
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD									
TAHUN ANGGARAN 2023									

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.021.900	15.021.900	16.931.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.397.900	4.397.900	4.397.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.603.000	3.603.000	3.603.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.021.000	7.021.000	8.931.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.168.889.835	18.168.889.835	18.168.889.835
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.168.889.835	18.168.889.835	18.168.889.835
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.314.700	487.314.700	440.829.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.500.300	19.500.300	19.500.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.234.800	129.234.800	73.638.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	260.925.000	260.925.000	260.925.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.287.600	8.287.600	8.287.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.660.000	3.660.000	3.660.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.707.000	65.707.000	74.819.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.500.000	27.500.000	27.500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.140.740	624.140.740	642.140.740
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	406.500.000	406.500.000	424.500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.140.740	217.140.740	217.140.740
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.104.720.663	8.104.720.663	8.059.602.167
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.374.766.424	1.374.766.424	1.329.780.528
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.352.706.275	4.352.706.275	4.352.706.275
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.377.247.964	2.377.247.964	2.377.115.364

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	42.141.300	42.141.300	41.971.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.530.000	3.530.000	3.530.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.000	3.530.000	3.530.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	38.611.300	38.611.300	38.441.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02	02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	38.611.300	38.611.300	38.441.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.573.688.968	4.573.688.968	4.538.992.968
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	56.624.300	56.624.300	56.284.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	01 Penyediaan Permakanan	28.699.700	28.699.700	28.469.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	27.924.600	27.924.600	27.814.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.276.484.568	1.276.484.568	1.242.468.568
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	01 Pengasuhan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	02 Penyediaan Makanan	644.400.000	644.400.000	644.230.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	03 Penyediaan Sandang	89.750.000	89.750.000	89.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	257.450.000	257.450.000	256.950.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.914.000	47.914.000	47.914.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.140.668	100.140.668	100.140.668
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000	17.480.000	17.140.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	69.349.900	69.349.900	36.343.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	836.292.800	836.292.800	835.952.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	01 Penyediaan Permakanan	465.000.000	465.000.000	465.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	15.568.800	15.568.800	15.568.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	125.998.800	125.998.800	125.998.800

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	85.991.000	85.991.000	85.651.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	143.734.200	143.734.200	143.734.200
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.397.037.800	2.397.037.800	2.397.037.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	2.397.037.800	2.397.037.800	2.397.037.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.249.500	7.249.500	7.249.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	7.249.500	7.249.500	7.249.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.614.900	3.614.900	3.614.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.614.900	3.614.900	3.614.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.614.900	3.614.900	3.614.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	255.937.800	255.937.800	255.937.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	255.937.800	255.937.800	255.937.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.937.800	255.937.800	255.937.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	127.163.700	127.163.700	126.983.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.700	127.163.700	126.983.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.700	127.163.700	126.983.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.306.757.984	2.306.757.984	2.306.074.984
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.306.757.984	2.306.757.984	2.306.074.984
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	513.827.784	513.827.784	513.827.784
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.338.200	2.338.200	2.338.200
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.537.400	1.537.400	1.537.400
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	800.800	800.800	800.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	5.000.000	5.000.000	5.000.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Listrik			
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.489.584	506.489.584	506.489.584
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.117.592	119.117.592	119.117.592
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.857.096	38.857.096	38.857.096
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.514.896	348.514.896	348.514.896
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	739.892.500	739.892.500	739.472.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	739.892.500	739.892.500	739.472.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	439.973.600	439.973.600	439.593.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	299.918.900	299.918.900	299.878.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	316.190.000	316.190.000	315.930.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	93.750.000	93.750.000	93.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	93.750.000	93.750.000	93.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	222.440.000	222.440.000	222.180.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.940.000	4.940.000	4.680.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	217.500.000	217.500.000	217.500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	20.000.000	19.999.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	20.000.000	20.000.000	19.999.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	20.000.000	20.000.000	19.999.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	653.097.700	653.097.700	653.095.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.097.700	653.097.700	653.095.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.097.700	653.097.700	653.095.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	63.750.000	63.750.000	63.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	63.750.000	63.750.000	63.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	63.750.000	63.750.000	63.750.000
2.07.3.29.3.32.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	32.647.278.270	32.647.278.270	32.647.278.270
2.07.3.29.3.32.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.556.773.470	32.556.773.470	32.556.773.470
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	32.556.773.470	32.556.773.470	32.556.773.470
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.095.312.168	31.095.312.168	31.095.312.168
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.647.358.024	26.647.358.024	26.647.358.024
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.647.358.024	26.647.358.024	26.647.358.024
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.124.900	229.124.900	229.124.900
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.945.500	19.945.500	19.945.500
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.929.600	68.929.600	68.929.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.450.000	91.450.000	91.450.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.137.800	16.137.800	16.137.800
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	4.200.000	4.200.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.962.000	26.962.000	26.962.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.682.000	22.682.000	22.682.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.682.000	22.682.000	22.682.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.482.109.040	1.482.109.040	1.482.109.040
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.740.000	2.740.000	2.740.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.600.000	612.600.000	612.600.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.769.040	866.769.040	866.769.040
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.714.038.204	2.714.038.204	2.714.038.204
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.123.884.440	1.123.884.440	1.123.884.440
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.070.184	295.070.184	295.070.184
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.295.083.580	1.295.083.580	1.295.083.580
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.106.625.700	1.106.625.700	1.106.625.700
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.075.628.100	1.075.628.100	1.075.628.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.075.628.100	1.075.628.100	1.075.628.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600	30.997.600	30.997.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	30.997.600	30.997.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	173.576.800	173.576.800	173.576.800
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	173.010.100	173.010.100	173.010.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	173.010.100	173.010.100	173.010.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	566.700	566.700	566.700
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	566.700	566.700	566.700

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	31.730.900	31.730.900	31.730.900
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	4.228.300	4.228.300	4.228.300
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02	02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	4.228.300	4.228.300	4.228.300
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	27.502.600	27.502.600	27.502.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	24.941.600	24.941.600	24.941.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	03 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	2.561.000	2.561.000	2.561.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	149.527.902	149.527.902	149.527.902
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	149.527.902	149.527.902	149.527.902
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	11.279.900	11.279.900	11.279.900
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	138.248.002	138.248.002	138.248.002
2.07.3.29.3.32.01.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	90.504.800	90.504.800	90.504.800
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	58.137.800	58.137.800	58.137.800
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	4.293.200	4.293.200	4.293.200
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4.293.200	4.293.200	4.293.200
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01	03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4.293.200	4.293.200	4.293.200
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	7.430.000	7.430.000	7.430.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	7.430.000	7.430.000	7.430.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03	03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam	7.430.000	7.430.000	7.430.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	46.414.600	46.414.600	46.414.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	46.414.600	46.414.600	46.414.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	46.414.600	46.414.600	46.414.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	32.367.000	32.367.000	32.367.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	32.367.000	32.367.000	32.367.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	32.367.000	32.367.000	32.367.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01	18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	32.367.000	32.367.000	32.367.000
2.13.2.12.2.14.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.012.520.095	30.012.520.095	33.141.185.895
2.13.2.12.2.14.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.012.520.095	30.012.520.095	33.141.185.895
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	304.400.676	304.400.676	368.128.476
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	168.496.588	168.496.588	232.224.388
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	168.496.588	168.496.588	232.224.388
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	168.496.588	168.496.588	232.224.388
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	135.904.088	135.904.088	135.904.088
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	135.904.088	135.904.088	135.904.088
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	135.904.088	135.904.088	135.904.088
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29.170.544.143	29.170.544.143	32.235.482.143
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.260.821.267	13.260.821.267	13.440.659.267
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.216.988	218.216.988	218.216.988
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.188.300	14.188.300	14.188.300
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.028.688	204.028.688	204.028.688
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.913.426.509	10.913.426.509	10.913.426.509

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.782.779.521	10.782.779.521	10.782.779.521
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.646.988	130.646.988	130.646.988
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.395.562	251.395.562	339.233.562
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.481.500	5.481.500	5.481.500
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.902.362	87.902.362	87.902.362
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000	75.500.000	75.500.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.648.700	5.648.700	5.648.700
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	4.200.000	4.200.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.255.000	12.255.000	12.255.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.408.000	60.408.000	148.246.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.340.000	6.340.000	6.340.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.340.000	6.340.000	6.340.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.858.552	617.858.552	659.858.552
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.400.000	137.400.000	179.400.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480.458.552	480.458.552	480.458.552
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.253.583.656	1.253.583.656	1.303.583.656
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.214.983.656	1.214.983.656	1.264.983.656
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.600.000	38.600.000	38.600.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	150.556.688	150.556.688	150.556.688
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	150.556.688	150.556.688	150.556.688
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	150.556.688	150.556.688	150.556.688
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	877.868.768	877.868.768	877.868.768
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	877.868.768	877.868.768	877.868.768

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	408.521.688	408.521.688	408.521.688
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	469.347.080	469.347.080	469.347.080
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	14.881.297.420	14.881.297.420	17.766.397.420
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.881.297.420	14.881.297.420	17.766.397.420
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	238.677.984	238.677.984	238.677.984
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	462.453.084	462.453.084	462.453.084
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	549.589.288	549.589.288	549.589.288
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	13.630.577.064	13.630.577.064	16.515.677.064
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	537.575.276	537.575.276	537.575.276
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	537.575.276	537.575.276	537.575.276
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	537.575.276	537.575.276	537.575.276
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	537.575.276	537.575.276	537.575.276
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	47.680.277.629	47.480.102.629	48.309.852.629
2.15.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	47.680.277.629	47.480.102.629	48.309.852.629

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	47.680.277.629	47.480.102.629	48.309.852.629
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.080.098.717	24.079.928.717	24.859.878.717
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.949.900	30.779.900	30.779.900
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.383.200	15.383.200	15.383.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.749.300	3.749.300	3.749.300
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.162.000	2.162.000	2.162.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.809.800	1.809.800	1.809.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.776.800	1.776.800	1.776.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.476.800	1.476.800	1.476.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.592.000	4.422.000	4.422.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.582.630.200	16.582.630.200	16.582.630.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.555.575.000	16.555.575.000	16.555.575.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.055.200	27.055.200	27.055.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.321.689.760	1.321.689.760	1.321.639.760
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.883.000	6.883.000	6.883.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	451.283.400	451.283.400	451.283.400
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	121.151.600	121.151.600	121.151.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.025.000	7.025.000	7.025.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	23.000.000	23.000.000	23.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	712.346.760	712.346.760	712.296.760
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.706.360.800	2.706.360.800	3.486.360.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.445.500.000	2.445.500.000	3.225.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	220.647.000	220.647.000	220.647.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.213.800	40.213.800	40.213.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.728.201	726.728.201	726.728.201

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.700.000	7.700.000	7.700.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.364.145	250.364.145	250.364.145
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.664.056	468.664.056	468.664.056
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.711.739.856	2.711.739.856	2.711.739.856
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.591.992	213.591.992	213.591.992
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.332.996.360	1.332.996.360	1.332.996.360
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.760.000	85.760.000	85.760.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.079.391.504	1.079.391.504	1.079.391.504
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22.354.739.156	22.154.734.156	22.204.594.156
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.730.802.336	1.730.802.336	1.780.802.336
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.058.139.934	1.058.139.934	1.108.139.934
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	672.662.402	672.662.402	672.662.402
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.191.567.076	2.191.562.076	2.191.562.076
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	663.027.168	663.027.168	663.027.168
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	494.000.000	494.000.000	494.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	979.797.708	979.797.708	979.797.708
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	54.742.200	54.737.200	54.737.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	19.883.100	19.883.100	19.883.100
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16.277.500	16.277.500	16.277.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	3.605.600	3.605.600	3.605.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	737.184.656	537.184.656	537.184.656

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	737.184.656	537.184.656	537.184.656
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.461.485.088	17.461.485.088	17.461.485.088
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.461.485.088	17.461.485.088	17.461.485.088
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	31.861.200	31.861.200	31.721.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	31.861.200	31.861.200	31.721.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	181.955.700	181.955.700	181.955.700
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	181.955.700	181.955.700	181.955.700
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	992.485.280	992.485.280	992.485.280
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	985.295.280	985.295.280	985.295.280
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	985.295.280	985.295.280	985.295.280
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	7.190.000	7.190.000	7.190.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	7.190.000	7.190.000	7.190.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	252.954.476	252.954.476	252.894.476
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	252.954.476	252.954.476	252.894.476
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	252.954.476	252.954.476	252.894.476
2.16.2.20.2.21.02.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	469.537.711.203	469.537.711.203	470.201.344.430

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	469.537.711.203	469.537.711.203	470.201.344.430
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	467.608.658.931	467.608.658.931	468.272.525.758
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.647.473.421	18.647.473.421	19.887.473.021
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.400	29.990.400	29.990.400
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.384.200	18.384.200	18.384.200
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.437.600	5.437.600	5.437.600
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.168.600	6.168.600	6.168.600
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.777.847.725	13.777.847.725	15.017.847.325
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.424.182.325	12.424.182.325	12.424.182.325
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.353.665.400	1.353.665.400	2.593.665.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.124.400	604.124.400	604.124.400
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.244.600	5.244.600	5.244.600
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.892.500	254.892.500	254.892.500
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000	87.500.000	87.500.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.247.300	22.247.300	22.247.300
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39.900.000	39.900.000	39.900.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.340.000	194.340.000	194.340.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.410.800	85.410.800	85.410.800
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	28.160.000	28.160.000	28.160.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.250.800	57.250.800	57.250.800
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.989.000	486.989.000	486.989.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.355.000	3.355.000	3.355.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.634.000	348.634.000	348.634.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	135.000.000	135.000.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.663.111.096	3.663.111.096	3.663.111.096
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.849.618.840	1.849.618.840	1.849.618.840
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	7.120.000	7.120.000	7.120.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.890.000	172.890.000	172.890.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.522.372.256	1.522.372.256	1.522.372.256
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.110.000	111.110.000	111.110.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	40.584.869.852	40.584.869.852	40.009.778.752
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	40.584.869.852	40.584.869.852	40.009.778.752
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.529.546.072	2.529.546.072	2.385.711.072
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	25.685.084.840	25.685.084.840	25.685.084.440
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	4.568.893.276	4.568.893.276	4.568.833.276
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	3.342.729.656	3.342.729.656	3.342.649.656
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.161.173.676	2.161.173.676	2.161.132.676
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.297.442.332	2.297.442.332	1.866.367.632
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	408.376.315.658	408.376.315.658	408.375.273.985
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	408.376.315.658	408.376.315.658	408.375.273.985
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	381.257.143.893	381.257.143.893	383.552.921.893
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	15.848.324.269	15.848.324.269	13.451.504.596
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	11.270.847.496	11.270.847.496	11.370.847.496
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	773.958.680	773.958.680	773.875.680
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	773.958.680	773.958.680	773.875.680
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup	773.958.680	773.958.680	773.875.680

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Daerah Provinsi			
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	270.962.296	270.962.296	299.804.296
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	276.027.292	276.027.292	261.772.292
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	226.969.092	226.969.092	212.299.092
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.155.093.592	1.155.093.592	1.154.942.992
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.155.093.592	1.155.093.592	1.154.942.992
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	670.412.496	670.412.496	670.412.096
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	338.277.496	338.277.496	338.277.496
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	332.135.000	332.135.000	332.134.600
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	484.681.096	484.681.096	484.530.896
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	484.681.096	484.681.096	484.530.896
2.17.0.00.0.00.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31.661.317.124	31.661.317.124	21.543.645.124
2.17.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31.661.317.124	31.661.317.124	21.543.645.124
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	31.661.317.124	31.661.317.124	21.543.645.124
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.124.332.006	16.124.332.006	16.017.390.006
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.196.792	81.196.792	81.196.792
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.873.292	78.873.292	78.873.292
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.323.500	2.323.500	2.323.500
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.142.384.786	13.142.384.786	13.142.384.786
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.142.384.786	13.142.384.786	13.142.384.786
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.416.400	249.416.400	200.674.400

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.665.500	10.665.500	10.665.500
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.024.600	47.024.600	47.024.600
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	55.000.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.873.300	12.873.300	12.873.300
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.353.000	94.353.000	70.611.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.940.000	56.940.000	56.940.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.940.000	56.940.000	56.940.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.448.602.984	1.448.602.984	1.390.402.984
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.000	2.992.000	2.992.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.700.000	319.700.000	261.500.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.125.910.984	1.125.910.984	1.125.910.984
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.145.791.044	1.145.791.044	1.145.791.044
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	845.959.168	845.959.168	845.959.168
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.850.000	52.850.000	52.850.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.981.876	246.981.876	246.981.876
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	259.759.380	259.759.380	259.249.380
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.146.000	21.146.000	20.636.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.146.000	21.146.000	20.636.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	238.613.380	238.613.380	238.613.380

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	238.613.380	238.613.380	238.613.380
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	48.199.800	48.199.800	46.919.800
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18.199.800	18.199.800	17.119.800
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	18.199.800	18.199.800	17.119.800
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	29.800.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	30.000.000	30.000.000	29.800.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.731.392	118.731.392	118.491.392
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.731.392	118.731.392	118.491.392
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.731.392	118.731.392	118.491.392
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.962.718.006	3.962.718.006	3.962.718.006
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.962.718.006	3.962.718.006	3.962.718.006
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.962.718.006	3.962.718.006	3.962.718.006
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	275.231.180	275.231.180	316.561.180
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	275.231.180	275.231.180	316.561.180

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	159.195.888	159.195.888	200.525.888
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	116.035.292	116.035.292	116.035.292
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.872.345.360	10.872.345.360	822.315.360
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	10.872.345.360	10.872.345.360	822.315.360
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10.872.345.360	10.872.345.360	822.315.360
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.450.984.438	18.450.969.438	18.450.969.438
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.450.984.438	18.450.969.438	18.450.969.438
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18.450.984.438	18.450.969.438	18.450.969.438
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.806.898.254	15.806.883.254	15.806.883.254
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.401.576.350	12.401.576.350	12.401.576.350
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.401.576.350	12.401.576.350	12.401.576.350
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.230.400	555.215.400	555.215.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.048.600	21.048.600	21.048.600
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.424.000	49.424.000	49.424.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.000.000	76.000.000	76.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.005.800	23.005.800	23.005.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	385.752.000	385.737.000	385.737.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	592.410.000	592.410.000	592.410.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	592.410.000	592.410.000	592.410.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.381.752.024	1.381.752.024	1.381.752.024
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000	178.000.000	178.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.199.752.024	1.199.752.024	1.199.752.024
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.929.480	875.929.480	875.929.480
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	831.929.480	831.929.480	831.929.480
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000	44.000.000	44.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	319.817.688	319.817.688	319.817.688
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	112.697.688	112.697.688	112.697.688
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	112.697.688	112.697.688	112.697.688
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	207.120.000	207.120.000	207.120.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	207.120.000	207.120.000	207.120.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	566.613.584	566.613.584	566.613.584
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	566.613.584	566.613.584	566.613.584
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	122.320.000	122.320.000	122.320.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	444.293.584	444.293.584	444.293.584
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	842.130.232	842.130.232	842.130.232
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	842.130.232	842.130.232	842.130.232
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	672.022.544	672.022.544	672.022.544

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	170.107.688	170.107.688	170.107.688
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	818.317.688	818.317.688	818.317.688
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	818.317.688	818.317.688	818.317.688
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	121.817.688	121.817.688	121.817.688
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	528.325.600	528.325.600	453.240.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	168.174.400	168.174.400	243.260.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	97.206.992	97.206.992	97.206.992
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	97.206.992	97.206.992	97.206.992
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	97.206.992	97.206.992	97.206.992
2.22.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan	121.450.545.125	121.445.908.125	135.230.757.125
2.22.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	121.450.545.125	121.445.908.125	135.230.757.125
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	121.450.545.125	121.445.908.125	135.230.757.125
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.686.268.977	38.752.231.977	38.872.231.977
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.576.642	170.576.642	170.576.642
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	151.087.492	151.087.492	151.087.492
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.489.150	19.489.150	19.489.150
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.275.993.851	21.275.993.851	21.275.993.851
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.785.203.099	20.785.203.099	20.785.203.099
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	480.790.752	480.790.752	480.790.752
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.670.072.140	1.670.072.140	1.670.072.140
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	346.989.340	346.989.340	346.989.340
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	550.295.900	550.295.900	550.295.900
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.850.000	307.850.000	307.850.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.564.000	61.564.000	61.564.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.985.900	43.985.900	43.985.900
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.387.000	344.387.000	344.387.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	853.551.000	853.551.000	853.551.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.215.000	13.215.000	13.215.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	840.336.000	840.336.000	840.336.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.764.586.024	7.830.549.024	7.950.549.024
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.893.000	9.893.000	9.893.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.952.850.000	1.952.850.000	2.072.850.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	635.060.500	701.023.500	701.023.500
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.166.782.524	5.166.782.524	5.166.782.524
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.951.489.320	6.951.489.320	6.951.489.320
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.543.299.576	1.543.299.576	1.543.299.576
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.425.000	282.425.000	282.425.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.125.764.744	5.125.764.744	5.125.764.744
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	76.480.361.796	76.414.386.796	90.124.075.796
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	34.242.135.584	34.242.135.584	33.469.324.584
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	4.514.893.376	4.514.893.376	3.742.082.376

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Pemajuan Kebudayaan			
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	29.727.242.208	29.727.242.208	29.727.242.208
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	23.897.850.152	23.831.875.152	23.208.875.152
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	22.230.449.272	22.164.474.272	21.541.474.272
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.667.400.880	1.667.400.880	1.667.400.880
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18.340.376.060	18.340.376.060	33.445.876.060
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	18.340.376.060	18.340.376.060	33.445.876.060
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.469.954.380	1.469.954.380	1.469.954.380
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.469.954.380	1.469.954.380	1.469.954.380
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.082.157.100	1.082.157.100	1.082.157.100
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	387.797.280	387.797.280	387.797.280
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	216.191.400	216.191.400	216.191.400
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	216.191.400	216.191.400	216.191.400
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	216.191.400	216.191.400	216.191.400
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	597.768.572	593.143.572	548.303.572
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	423.900.080	419.275.080	373.625.080
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	423.900.080	419.275.080	373.625.080
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	173.868.492	173.868.492	174.678.492
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	83.940.092	83.940.092	83.940.092
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	88.478.400	88.478.400	89.288.400
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga	1.450.000	1.450.000	1.450.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Pelestari Cagar Budaya			
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1.287.424.600	1.287.424.600	1.287.424.600
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.305.270.000	2.305.270.000	2.305.270.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	407.305.400	407.305.400	407.305.400
2.22.0.00.0.00.05.0000						Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	485.869.469.735	485.869.469.735	486.434.229.335
2.22.0.00.0.00.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	485.869.469.735	485.869.469.735	486.434.229.335
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	485.869.469.735	485.869.469.735	486.434.229.335
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.960.009.611	13.960.009.611	13.960.009.611
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.389.800	20.389.800	20.389.800
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.325.200	15.325.200	15.325.200
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.600	5.064.600	5.064.600
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.390.526.983	9.390.526.983	9.390.526.983
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.390.526.983	9.390.526.983	9.390.526.983
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.764.400	546.764.400	546.764.400
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.432.900	6.432.900	6.432.900
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.303.800	34.303.800	34.303.800
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.095.700	5.095.700	5.095.700
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.932.000	500.932.000	500.932.000
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	715.015.200	715.015.200	715.015.200
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	715.015.200	715.015.200	715.015.200
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.278.380	550.278.380	550.278.380
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.278.380	550.278.380	550.278.380

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.737.034.848	2.737.034.848	2.737.034.848
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	860.090.792	860.090.792	860.090.792
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.876.944.056	1.876.944.056	1.876.944.056
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	471.909.460.124	471.909.460.124	472.474.219.724
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	470.668.558.464	470.668.558.464	471.058.358.064
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	470.360.979.576	470.360.979.576	470.751.239.176
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	307.578.888	307.578.888	307.118.888
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	565.084.776	565.084.776	565.044.776
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	222.687.500	222.687.500	222.647.500
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	342.397.276	342.397.276	342.397.276
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	675.816.884	675.816.884	850.816.884
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	675.816.884	675.816.884	850.816.884
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan dan Perikanan	26.928.900.455	26.928.900.455	27.668.412.255
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.928.900.455	26.928.900.455	27.668.412.255
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.928.900.455	26.928.900.455	27.668.412.255
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.990.370.579	22.990.370.579	22.993.832.379
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.045.100	40.045.100	40.045.100
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.689.600	19.689.600	19.689.600
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.955.500	14.955.500	14.955.500
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.971.643.714	18.971.643.714	18.971.643.714
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.971.643.714	18.971.643.714	18.971.643.714

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.878.600	200.878.600	200.878.600
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.219.600	6.219.600	6.219.600
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.659.000	194.659.000	194.659.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.777.803.165	3.777.803.165	3.781.264.965
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.572.968	570.572.968	582.572.968
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.406.384	420.406.384	420.406.384
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.786.823.813	2.786.823.813	2.778.285.613
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	400.131.792	400.131.792	399.961.792
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	321.000.000	321.000.000	320.830.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	321.000.000	321.000.000	320.830.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	79.131.792	79.131.792	79.131.792
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	79.131.792	79.131.792	79.131.792
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	701.001.292	701.001.292	1.301.001.292
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	625.001.292	625.001.292	1.225.001.292
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	625.001.292	625.001.292	1.225.001.292
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	76.000.000	76.000.000	76.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	76.000.000	76.000.000	76.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	234.998.800	234.998.800	234.998.800
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	234.998.800	234.998.800	234.998.800
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	234.998.800	234.998.800	234.998.800

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.101.400	42.101.400	178.321.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	42.101.400	42.101.400	178.321.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	24.000.000	24.000.000	160.220.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	18.101.400	18.101.400	18.101.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.560.296.592	2.560.296.592	2.560.296.592
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2.560.296.592	2.560.296.592	2.560.296.592
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2.555.796.592	2.555.796.592	2.555.796.592
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata	14.188.472.481	14.188.438.356	14.188.468.756
3.26.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	14.188.472.481	14.188.438.356	14.188.468.756
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	14.188.472.481	14.188.438.356	14.188.468.756
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.237.834.513	12.277.263.588	12.253.308.988
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.418.538	116.418.538	116.418.538
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.315.296	39.315.296	39.315.296
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.103.242	77.103.242	77.103.242
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.275.492.925	10.206.695.140	10.206.695.140
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.275.492.925	10.206.695.140	10.206.695.140
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.171.350	289.919.350	235.933.350
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.112.000	5.112.000	5.112.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.836.050	41.836.050	41.836.050

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.000.000	63.000.000	63.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.174.300	9.174.300	9.174.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.220.000	2.220.000	2.220.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.829.000	168.577.000	114.591.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.573.000	427.573.000	427.573.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.350.000	2.350.000	2.350.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.000.000	116.000.000	116.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	309.223.000	309.223.000	309.223.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.178.700	1.236.657.560	1.266.688.960
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.431.300	274.910.160	304.941.560
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	939.147.400	939.147.400	939.147.400
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.600.000	22.600.000	22.600.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	595.427.960	572.167.960	572.167.960
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	45.555.100	45.555.100	45.555.100
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	45.555.100	45.555.100	45.555.100
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	422.954.768	422.954.768	422.954.768
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	422.954.768	422.954.768	422.954.768
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	126.918.092	103.658.092	103.658.092
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	108.219.292	90.089.292	90.089.292
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	18.698.800	13.568.800	13.568.800
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	541.311.564	541.311.564	541.311.564
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	541.311.564	541.311.564	541.311.564

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	178.681.588	178.681.588	178.681.588
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	162.525.584	162.525.584	162.525.584
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	200.104.392	200.104.392	200.104.392
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	246.117.984	229.914.784	229.914.784
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	119.182.092	119.182.092	119.182.092
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	24.603.200	24.603.200	24.603.200
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	94.578.892	94.578.892	94.578.892
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	126.935.892	110.732.692	110.732.692
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	126.935.892	110.732.692	110.732.692
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	567.780.460	567.780.460	591.765.460
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	567.780.460	567.780.460	591.765.460
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	174.038.288	174.038.288	174.038.288
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	175.931.488	175.931.488	175.931.488
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	217.810.684	217.810.684	241.795.684
3.27.2.09.0.00.01.0000						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	92.382.904.411	92.382.904.411	94.796.935.211
3.27.2.09.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.899.599.208	2.899.599.208	2.813.995.008
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.899.599.208	2.899.599.208	2.813.995.008
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	703.386.772	703.386.772	702.616.372
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.216.200	60.216.200	59.445.800
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.016.600	5.016.600	5.016.600
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.508.800	13.508.800	13.508.800

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	32.500.000	32.500.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.190.800	9.190.800	8.420.400
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.730.988	320.730.988	320.730.988
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.224.000	202.224.000	202.224.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.506.988	118.506.988	118.506.988
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.439.584	322.439.584	322.439.584
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.951.792	198.951.792	198.951.792
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.976.000	8.976.000	8.976.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.511.792	114.511.792	114.511.792
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	701.906.952	701.906.952	701.906.952
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	701.906.952	701.906.952	701.906.952
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	701.906.952	701.906.952	701.906.952
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	525.993.848	525.993.848	519.416.048
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	207.686.680	207.686.680	203.753.880
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	207.686.680	207.686.680	203.753.880
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	318.307.168	318.307.168	315.662.168
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	318.307.168	318.307.168	315.662.168
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	968.311.636	968.311.636	890.055.636
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	968.311.636	968.311.636	890.055.636

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	155.434.788	155.434.788	155.434.788
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	625.579.364	625.579.364	547.773.364
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	187.297.484	187.297.484	186.847.484
3.27.2.09.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	89.483.305.203	89.483.305.203	91.982.940.203
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	89.483.305.203	89.483.305.203	91.982.940.203
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.550.389.347	48.550.389.347	48.550.149.347
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	685.465.836	685.465.836	685.225.836
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	318.704.868	318.704.868	318.704.868
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	366.760.968	366.760.968	366.520.968
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.019.203.191	41.019.203.191	41.019.203.191
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.621.390.031	40.621.390.031	40.621.390.031
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	397.813.160	397.813.160	397.813.160
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.176.000	368.176.000	368.176.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.498.300	56.498.300	56.498.300
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.551.000	68.551.000	68.551.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.126.700	38.126.700	38.126.700
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.929.972.300	1.929.972.300	1.929.972.300
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	941.976.000	941.976.000	941.976.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	987.996.300	987.996.300	987.996.300
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.547.572.020	4.547.572.020	4.547.572.020
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.526.689.908	2.526.689.908	2.526.689.908
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.749.265.320	1.749.265.320	1.749.265.320

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271.616.792	271.616.792	271.616.792
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27.493.224.936	27.493.224.936	29.997.279.936
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	10.425.097.130	10.425.097.130	10.473.712.130
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	10.425.097.130	10.425.097.130	10.473.712.130
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	8.470.434.216	8.470.434.216	8.516.304.216
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	2.351.008.732	2.351.008.732	2.351.008.732
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	2.244.558.644	2.244.558.644	2.294.558.644
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.335.452.904	1.335.452.904	1.335.452.904
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2.539.413.936	2.539.413.936	2.535.283.936
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.280.144.530	1.280.144.530	1.280.144.530
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.280.144.530	1.280.144.530	1.280.144.530
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	7.317.549.060	7.317.549.060	9.727.119.060
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.903.952.860	4.903.952.860	7.313.522.860
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.413.596.200	2.413.596.200	2.413.596.200
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.316.330.464	1.316.330.464	1.316.330.464
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	1.316.330.464	1.316.330.464	1.316.330.464
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.124.022.984	1.124.022.984	1.124.022.984
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	192.307.480	192.307.480	192.307.480

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7.494.106.348	7.494.106.348	7.493.536.348
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.813.908.588	6.813.908.588	6.813.548.588
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	6.813.908.588	6.813.908.588	6.813.548.588
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	629.681.864	629.681.864	629.471.864
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	293.771.080	293.771.080	293.561.080
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	335.910.784	335.910.784	335.910.784
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	50.515.896	50.515.896	50.515.896
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	50.515.896	50.515.896	50.515.896
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	4.293.465.636	4.293.465.636	4.289.855.636
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4.293.465.636	4.293.465.636	4.289.855.636
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.128.821.452	3.128.821.452	3.128.061.452
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	711.127.528	711.127.528	709.037.528
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	453.516.656	453.516.656	452.756.656
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	335.788.472	335.788.472	335.788.472
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	335.788.472	335.788.472	335.788.472
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	335.788.472	335.788.472	335.788.472
3.28.2.11.0.00.01.0000						Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	60.887.138.470	60.887.138.470	60.878.038.470
3.28.2.11.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.676.820.495	11.676.820.495	11.676.720.495
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11.676.820.495	11.676.820.495	11.676.720.495

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.192.624.015	1.192.624.015	1.192.624.015
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.392.900	76.392.900	76.392.900
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.492.000	5.492.000	5.492.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.651.700	16.651.700	16.651.700
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.400.000	45.400.000	45.400.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.849.200	8.849.200	8.849.200
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.653.659	448.653.659	448.653.659
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	448.653.659	448.653.659	448.653.659
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.577.456	667.577.456	667.577.456
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.477.976	324.477.976	324.477.976
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	343.099.480	343.099.480	343.099.480
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	377.044.992	377.044.992	377.044.992
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	377.044.992	377.044.992	377.044.992
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	377.044.992	377.044.992	377.044.992
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	139.188.400	139.188.400	139.188.400
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	139.188.400	139.188.400	139.188.400
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35.112.200	35.112.200	35.112.200
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	104.076.200	104.076.200	104.076.200
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	186.811.684	186.811.684	186.811.684
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	186.811.684	186.811.684	186.811.684

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	186.811.684	186.811.684	186.811.684
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.781.151.404	9.781.151.404	9.781.051.404
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	9.781.151.404	9.781.151.404	9.781.051.404
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	9.781.151.404	9.781.151.404	9.781.051.404
3.28.2.11.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	49.210.317.975	49.210.317.975	49.201.317.975
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	49.210.317.975	49.210.317.975	49.201.317.975
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.535.687.647	38.535.687.647	38.526.687.647
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.827.300	35.827.300	31.327.300
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.827.300	35.827.300	31.327.300
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.474.863.421	33.474.863.421	33.474.863.421
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.433.334.021	33.433.334.021	33.433.334.021
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.529.400	41.529.400	41.529.400
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	677.202.700	677.202.700	660.702.700
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.910.500	29.910.500	29.910.500
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.441.600	105.441.600	105.441.600
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	233.250.000	233.250.000	233.250.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.818.600	47.818.600	47.818.600
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.150.000	78.150.000	61.650.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.632.000	182.632.000	182.632.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.912.700	101.912.700	113.912.700
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.912.700	101.912.700	113.912.700
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927.879.802	927.879.802	927.879.802
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.644.758	269.644.758	269.644.758
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	658.235.044	658.235.044	658.235.044

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.318.001.724	3.318.001.724	3.318.001.724
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.067.536.636	2.067.536.636	2.067.536.636
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.250.465.088	1.250.465.088	1.250.465.088
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.546.633.232	10.546.633.232	10.546.633.232
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	10.546.633.232	10.546.633.232	10.546.633.232
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10.546.633.232	10.546.633.232	10.546.633.232
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	127.997.096	127.997.096	127.997.096
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	127.997.096	127.997.096	127.997.096
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	127.997.096	127.997.096	127.997.096
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.614.546.779	28.614.546.779	28.606.200.004
3.31.3.30.0.00.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28.614.546.779	28.614.546.779	28.606.200.004
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.716.816.243	19.716.816.243	19.708.789.868
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.519.614.591	18.519.614.591	18.519.603.216
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.079.300	105.079.300	105.079.300
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.079.300	105.079.300	105.079.300
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.195.749.219	14.195.749.219	14.195.749.219
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.195.749.219	14.195.749.219	14.195.749.219
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.721.750	1.455.721.750	1.627.753.375
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.396.500	18.396.500	18.396.500
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	989.202.950	989.202.950	1.107.124.575
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.500.000	117.500.000	117.500.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.924.300	21.924.300	21.924.300
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000	5.840.000	5.840.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.858.000	302.858.000	356.968.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.043.000	62.043.000	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.043.000	62.043.000	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.068.951.256	1.068.951.256	1.058.951.256
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.000.000	322.000.000	322.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	513.494.856	513.494.856	513.494.856
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.456.400	233.456.400	223.456.400
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.632.070.066	1.632.070.066	1.532.070.066
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.185.338.274	1.185.338.274	1.185.338.274
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.731.792	446.731.792	346.731.792
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	257.658.776	257.658.776	257.658.776
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	257.658.776	257.658.776	257.658.776
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	257.658.776	257.658.776	257.658.776
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	108.065.500	108.065.500	108.065.500
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	108.065.500	108.065.500	108.065.500
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	108.065.500	108.065.500	108.065.500
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	8.405.700	8.405.700	8.405.700
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	8.405.700	8.405.700	8.405.700
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	8.405.700	8.405.700	8.405.700

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	774.596.780	774.596.780	766.581.780
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	499.644.896	499.644.896	499.644.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000	456.000.000	456.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	43.644.896	43.644.896	43.644.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	200.810.588	200.810.588	192.795.588
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	200.810.588	200.810.588	192.795.588
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	74.141.296	74.141.296	74.141.296
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	74.141.296	74.141.296	74.141.296
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.474.896	48.474.896	48.474.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.474.896	48.474.896	48.474.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	48.474.896	48.474.896	48.474.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.897.730.536	8.897.730.536	8.897.410.136
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	238.363.492	238.363.492	238.363.492
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.541.700	86.541.700	86.541.700
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.851.700	79.851.700	79.851.700
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.310.000	2.310.000	2.310.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.280.000	2.280.000	2.280.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.255.896	49.255.896	49.255.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.255.896	49.255.896	49.255.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.565.896	102.565.896	102.565.896

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.565.896	102.565.896	102.565.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.387.790.644	8.387.790.644	8.387.470.644
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	8.387.790.644	8.387.790.644	8.387.470.644
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	269.146.496	269.146.496	269.146.496
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8.118.644.148	8.118.644.148	8.118.324.148
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	271.576.400	271.576.400	271.576.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	271.576.400	271.576.400	271.576.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	271.576.400	271.576.400	271.576.000
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	232.432.571.519	232.432.571.519	253.365.989.075
4.01.2.23.2.24.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.111.055.628	1.111.055.628	1.111.055.628
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	587.451.764	587.451.764	587.451.764
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	587.451.764	587.451.764	587.451.764
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	476.819.568	476.819.568	476.819.568
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	49.939.096	49.939.096	49.939.096
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	77.335.596	77.335.596	77.335.596
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	236.978.980	236.978.980	236.978.980
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	112.565.896	112.565.896	112.565.896
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	110.632.196	110.632.196	110.632.196
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	110.632.196	110.632.196	110.632.196
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	523.603.864	523.603.864	523.603.864

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	523.603.864	523.603.864	523.603.864
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	253.421.784	253.421.784	253.421.784
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	253.421.784	253.421.784	253.421.784
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	270.182.080	270.182.080	270.182.080
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	5.958.200	5.958.200	5.958.200
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	264.223.880	264.223.880	264.223.880
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	231.321.515.891	231.321.515.891	252.254.933.447
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	231.321.515.891	231.321.515.891	252.254.933.447
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	165.016.889.695	165.016.889.695	164.793.691.251
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.082.334.390	1.082.334.390	1.082.334.390
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.082.334.390	1.082.334.390	1.082.334.390
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.355.586.573	59.355.586.573	59.305.552.681
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.618.112.849	58.618.112.849	58.568.078.957
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	737.473.724	737.473.724	737.473.724
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	505.817.748	505.817.748	505.817.748
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	505.817.748	505.817.748	505.817.748
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.383.800	4.383.800	4.383.800
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.383.800	4.383.800	4.383.800
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.691.675.040	29.691.675.040	28.753.901.392
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	684.943.792	684.943.792	684.943.792
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.418.619.612	5.418.619.612	5.354.609.264
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.715.500	109.715.500	109.715.500
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.953.775.732	7.953.775.732	7.303.757.132
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.908.947.860	14.908.947.860	14.685.203.160
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	615.672.544	615.672.544	615.672.544

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.703.492.459	22.703.492.459	24.301.608.259
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.881.354.999	1.881.354.999	1.881.354.999
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.840.614.844	15.840.614.844	17.438.730.644
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.981.522.616	4.981.522.616	4.981.522.616
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.710.760.852	16.710.760.852	16.509.160.852
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.393.068.128	2.393.068.128	2.444.068.128
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.589.245.806	8.589.245.806	8.339.245.806
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	328.180.000	328.180.000	325.580.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.335.266.918	5.335.266.918	5.335.266.918
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.742.122.926	7.742.122.926	7.809.506.222
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	256.855.278	256.855.278	247.336.742
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.485.267.648	7.485.267.648	7.562.169.480
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	24.046.634.411	24.046.634.411	23.348.134.411
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	17.865.468.324	17.865.468.324	18.365.468.324
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	5.871.666.087	5.871.666.087	4.673.166.087
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	309.500.000	309.500.000	309.500.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	721.914.600	721.914.600	721.564.600
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	721.914.600	721.914.600	721.564.600
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	2.452.166.896	2.452.166.896	2.451.726.896
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.452.166.896	2.452.166.896	2.451.726.896
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	892.908.892	892.908.892	892.836.892

PROVINSI BALI									
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS									
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD									
TAHUN ANGGARAN 2023									

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	389.810.896	389.810.896	389.750.896
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	84.786.100	84.786.100	84.786.100
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	85.640.000	85.640.000	85.640.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	219.384.796	219.384.796	219.324.796
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	503.097.996	503.097.996	503.085.996
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	171.736.000	171.736.000	171.731.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	119.969.300	119.969.300	119.962.300
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	17.310.600	17.310.600	17.310.600
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	75.760.900	75.760.900	75.760.900
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	118.321.196	118.321.196	118.321.196
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.689.540.156	1.689.540.156	1.687.510.156
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	578.150.672	578.150.672	577.530.672
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	458.205.972	458.205.972	457.785.972
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	119.944.700	119.944.700	119.744.700
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	374.943.300	374.943.300	374.553.300
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	199.943.400	199.943.400	199.553.400
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	174.999.900	174.999.900	174.999.900
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	736.446.184	736.446.184	735.426.184
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	326.847.084	326.847.084	326.847.084
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	409.599.100	409.599.100	408.579.100
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	48.026.642.672	48.026.642.672	75.811.614.672
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	19.122.177.704	19.122.177.704	23.902.023.704
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	18.492.968.832	18.492.968.832	23.272.814.832
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	629.208.872	629.208.872	629.208.872
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	28.904.464.968	28.904.464.968	51.909.590.968
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	28.904.464.968	28.904.464.968	51.909.590.968
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.324.753.476	4.324.753.476	4.642.753.476
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.135.676.808	2.135.676.808	2.135.676.808
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.277.157.184	1.277.157.184	1.277.157.184

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.908.584	161.908.584	161.908.584
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	239.045.076	239.045.076	239.045.076
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	457.565.964	457.565.964	457.565.964
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.189.076.668	2.189.076.668	2.507.076.668
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.963.263.584	1.963.263.584	2.281.263.584
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.813.084	225.813.084	225.813.084
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	629.076.000	629.076.000	627.688.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	74.814.000	74.814.000	74.814.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	74.814.000	74.814.000	74.814.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	482.510.000	482.510.000	481.654.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	482.510.000	482.510.000	481.654.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	71.752.000	71.752.000	71.220.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	71.752.000	71.752.000	71.220.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	10.666.645.000	10.666.645.000	3.725.179.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	10.279.783.000	10.279.783.000	3.338.447.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.760.000	24.760.000	24.680.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	10.230.343.000	10.230.343.000	3.289.267.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.680.000	24.680.000	24.500.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99.608.000	99.608.000	99.598.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	50.062.000	50.062.000	50.052.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.546.000	49.546.000	49.546.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	287.254.000	287.254.000	287.134.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	149.662.000	149.662.000	149.662.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	24.960.000	24.960.000	24.840.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	112.632.000	112.632.000	112.632.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75.060.000	75.060.000	73.660.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.100.000	25.100.000	24.780.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	25.100.000	25.100.000	24.780.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	49.960.000	48.880.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	49.960.000	48.880.000
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	218.222.243.237	218.222.243.237	213.080.890.557
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	218.222.243.237	218.222.243.237	213.080.890.557
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	218.222.243.237	218.222.243.237	213.080.890.557
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.072.765.213	90.072.765.213	91.510.566.331
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	273.713.792	273.713.792	382.801.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.211.896	156.211.896	259.779.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	117.501.896	117.501.896	123.021.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.065.883.298	10.065.883.298	9.983.108.702
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.844.897.006	9.844.897.006	9.754.849.910
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.751.896	110.751.896	118.618.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	110.234.396	110.234.396	109.639.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.190.765.388	8.190.765.388	10.528.838.688
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.178.700	132.178.700	132.178.700
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	964.176.800	964.176.800	964.176.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.348.620.000	1.348.620.000	1.348.620.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.494.200	135.494.200	88.883.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	954.480.000	954.480.000	954.480.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.655.815.688	4.655.815.688	7.040.499.688
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	761.591.000	761.591.000	486.176.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	761.591.000	761.591.000	486.176.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.590.520.764	2.590.520.764	2.593.520.764
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	13.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000	900.000.000	900.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.680.520.764	1.680.520.764	1.680.520.764
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.882.946.228	5.882.946.228	5.021.628.642
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.416.166.992	3.416.166.992	3.416.166.992
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.788.709.236	1.788.709.236	917.391.650
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.070.000	678.070.000	688.070.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60.382.700.927	60.382.700.927	60.600.467.927
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.289.033.531	58.289.033.531	58.289.033.531
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.820.224.500	1.820.224.500	2.049.220.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	273.442.896	273.442.896	262.213.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	1.924.643.816	1.924.643.816	1.914.023.816
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	210.329.480	210.329.480	187.829.480
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.714.314.336	1.714.314.336	1.726.194.336
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	128.149.478.024	128.149.478.024	121.570.324.226
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	17.680.610.272	17.680.610.272	15.450.473.272
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.861.306.792	1.861.306.792	1.680.007.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	14.953.075.688	14.953.075.688	12.904.237.688
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	866.227.792	866.227.792	866.227.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.273.089.480	8.273.089.480	3.481.581.480
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	1.649.305.896	1.649.305.896	686.124.896

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.655.945.896	1.655.945.896	113.410.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	1.655.945.896	1.655.945.896	1.655.945.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	1.655.945.896	1.655.945.896	37.565.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.655.945.896	1.655.945.896	988.533.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	35.074.555.168	35.074.555.168	34.248.472.168
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8.443.717.584	8.443.717.584	8.591.439.584
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8.203.947.000	8.203.947.000	7.939.499.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.448.186.792	8.448.186.792	8.243.164.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.360.323.792	8.360.323.792	8.356.584.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.618.380.000	1.618.380.000	1.117.784.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	14.207.427.352	14.207.427.352	14.136.069.554
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	3.947.243.688	3.947.243.688	3.702.612.688
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.395.517.872	3.395.517.872	3.835.057.872
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.240.000.000	3.240.000.000	3.252.898.332
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	900.000.000	900.000.000	903.582.870
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.724.665.792	2.724.665.792	2.441.917.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	39.424.744.480	39.424.744.480	40.015.618.480
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.285.580.792	3.285.580.792	3.285.457.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.748.616.000	1.748.616.000	2.339.613.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	34.390.547.688	34.390.547.688	34.390.547.688
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	817.397.792	817.397.792	1.063.159.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	817.397.792	817.397.792	1.063.159.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	12.671.653.480	12.671.653.480	13.174.949.480
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.228.821.688	10.228.821.688	12.440.395.688
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.442.831.792	2.442.831.792	734.553.792
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.818.895.064	24.818.894.664	24.650.120.464
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	24.818.895.064	24.818.894.664	24.650.120.464
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	24.818.895.064	24.818.894.664	24.650.120.464

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.371.168.048	18.371.168.048	18.252.904.048
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.138.780	279.138.780	279.138.780
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	236.163.480	236.163.480	236.163.480
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.453.000	11.453.000	11.453.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.728.000	6.728.000	6.728.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.987.000	8.987.000	8.987.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.335.600	6.335.600	6.335.600
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.291.700	3.291.700	3.291.700
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.180.000	6.180.000	6.180.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.725.596.216	12.725.596.216	12.725.596.216
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.404.579.548	12.404.579.548	12.404.579.548
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.560.780	196.560.780	196.560.780
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	124.455.888	124.455.888	124.455.888
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.592.694.872	1.592.694.872	1.571.430.872
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.500.596	47.500.596	47.500.596
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	558.342.496	558.342.496	534.578.496
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.855.696	144.855.696	144.855.696
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.519.396	69.519.396	72.019.396
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.005.896	75.005.896	75.005.896
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.565.896	103.565.896	103.565.896
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.904.896	593.904.896	593.904.896
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.565.896	90.565.896	123.565.896
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	43.000.000	43.000.000	76.000.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.565.896	47.565.896	47.565.896
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.848.532	961.848.532	961.848.532

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.555.896	40.555.896	40.555.896
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.165.896	337.165.896	337.165.896
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	584.126.740	584.126.740	584.126.740
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.721.323.752	2.721.323.752	2.591.323.752
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.013.091.960	1.013.091.960	1.013.091.960
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.215.896	168.215.896	168.215.896
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.540.015.896	1.540.015.896	1.410.015.896
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.134.069.744	4.134.069.344	4.084.069.344
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.301.735.680	2.301.735.680	2.251.735.680
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	29.958.200	29.958.200	29.958.200
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	33.121.600	33.121.600	33.121.600
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.238.655.880	2.238.655.880	2.188.655.880
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	600.202.488	635.504.088	635.504.088
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	576.160.688	611.462.288	611.462.288
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24.041.800	24.041.800	24.041.800
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.060.483.280	1.060.483.280	1.060.483.280
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	348.510.600	348.510.600	348.510.600
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	501.365.880	501.365.880	501.365.880
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	210.606.800	210.606.800	210.606.800
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	171.648.296	136.346.296	136.346.296
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	171.648.296	136.346.296	136.346.296

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.313.657.272	2.313.657.272	2.313.147.072
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	788.301.156	788.301.156	788.301.156
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93.962.492	93.962.492	93.962.492
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	86.472.092	86.472.092	86.472.092
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	403.652.588	403.652.588	403.652.588
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	204.213.984	204.213.984	204.213.984
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	842.271.060	842.271.060	841.786.060
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	184.807.888	184.807.888	184.567.888
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	433.777.784	433.777.784	433.777.784
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89.696.196	89.696.196	89.456.196
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	133.989.192	133.989.192	133.984.192
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	683.085.056	683.085.056	683.059.856
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	288.582.076	288.582.076	288.562.076
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	72.111.100	72.111.100	72.106.100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	266.633.680	266.633.680	266.633.680

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	55.758.200	55.758.200	55.758.000
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.081.909.280.477	2.081.909.280.477	2.080.952.836.735
5.02.0.00.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.081.909.280.477	2.081.909.280.477	2.080.952.836.735
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	2.081.909.280.477	2.081.909.280.477	2.080.952.836.735
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.130.288.110	22.130.288.110	22.091.858.768
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.049.200	35.049.200	35.049.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.049.200	35.049.200	35.049.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.130.223.150	18.130.223.150	18.130.223.150
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.888.634.750	17.888.634.750	17.888.634.750
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	241.588.400	241.588.400	241.588.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.520.490.556	1.520.490.556	1.520.027.714
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.372.500	17.372.500	17.372.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	457.650.200	457.650.200	457.650.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	685.750.256	685.750.256	659.817.414
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.179.600	31.179.600	31.179.600
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.200.000	17.200.000	17.200.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.385.000	62.385.000	88.305.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.953.000	248.953.000	248.503.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.200.000	336.200.000	336.200.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	4.200.000	4.200.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332.000.000	332.000.000	332.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.108.325.204	2.108.325.204	2.070.358.704
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	781.646.988	781.646.988	884.121.388

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.337.100	158.337.100	150.896.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.158.341.116	1.158.341.116	1.025.341.116
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.055.832.461.191	2.055.832.461.191	2.054.881.447.191
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.866.536.584	1.866.536.584	1.433.522.584
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	51.617.800	51.617.800	23.441.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.240.000	43.240.000	24.318.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.363.700	347.363.700	36.063.700
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.598.400	80.598.400	14.098.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	691.609.592	691.609.592	802.613.992
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	652.107.092	652.107.092	532.987.092
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	775.761.900	775.761.900	775.761.900
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	153.315.500	153.315.500	153.315.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	141.674.500	141.674.500	141.674.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	156.031.400	156.031.400	156.031.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	324.740.500	324.740.500	324.740.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	299.997.500	299.997.500	299.997.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	299.997.500	299.997.500	299.997.500

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	716.434.180	716.434.180	716.434.180
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	645.730.880	645.730.880	645.730.880
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	70.703.300	70.703.300	70.703.300
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.051.071.213.227	2.051.071.213.227	2.051.071.213.227
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.775.000.000	2.775.000.000	2.775.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	522.374.803.508	522.374.803.508	522.374.803.508
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.828.456.983	15.828.456.983	15.828.456.983
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.510.092.952.736	1.510.092.952.736	1.510.092.952.736
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.102.517.800	1.102.517.800	584.517.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.102.517.800	1.102.517.800	584.517.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.946.531.176	3.946.531.176	3.979.530.776
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.946.531.176	3.946.531.176	3.979.530.776
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	217.599.200	217.599.200	217.599.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	517.668.800	517.668.800	517.668.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.049.085.900	2.049.085.900	2.082.085.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.162.177.276	1.162.177.276	1.162.177.276
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	175.849.507.493	175.849.507.493	166.504.107.018
5.02.0.00.0.00.03.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	175.849.507.493	175.849.507.493	166.504.107.018
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02				KEUANGAN	175.849.507.493	175.849.507.493	166.504.107.018
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	157.792.328.029	157.792.328.029	148.717.308.354

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.913.400	37.913.400	37.913.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.867.800	18.867.800	18.867.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.045.600	19.045.600	19.045.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	128.144.195.835	128.144.195.835	120.088.284.223
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	128.144.195.835	128.144.195.835	120.088.284.223
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.059.537.770	5.059.537.770	5.378.009.670
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.437.890	81.437.890	85.339.690
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.693.716.980	1.693.716.980	1.909.946.080
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.602.357.900	1.602.357.900	1.602.298.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.497.000	55.497.000	55.497.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	178.353.000	178.353.000	179.853.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.148.175.000	1.148.175.000	1.245.075.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.424.636.000	3.424.636.000	5.723.124.680
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	559.614.000	559.614.000	1.068.354.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.123.829.000	1.123.829.000	1.268.829.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.741.193.000	1.741.193.000	3.385.941.680
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.685.718.903	4.685.718.903	4.765.718.903
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.656.000	14.656.000	14.656.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.620.759.304	2.620.759.304	2.700.759.304
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.050.303.599	2.050.303.599	2.050.303.599
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.390.326.121	16.390.326.121	12.674.257.478

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	535.807.796	535.807.796	535.807.796
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.652.668.940	2.652.668.940	3.106.642.140
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.078.443.816	1.078.443.816	1.096.693.816
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.478.069.577	10.478.069.577	6.223.777.734
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.645.335.992	1.645.335.992	1.711.335.992
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	94.900.900	94.900.900	57.880.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	94.900.900	94.900.900	57.880.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	94.900.900	94.900.900	57.880.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.962.278.564	17.962.278.564	17.728.917.764
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.962.278.564	17.962.278.564	17.728.917.764
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	506.755.600	506.755.600	386.786.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	385.828.800	385.828.800	282.276.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	141.625.000	141.625.000	141.625.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.199.686.456	10.199.686.456	10.199.686.456
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	6.478.362.608	6.478.362.608	6.530.397.608
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	213.116.600	213.116.600	174.174.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	36.903.500	36.903.500	13.971.100
5.03.5.04.0.00.02.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.275.651.493	50.275.651.493	49.836.657.323
5.03.5.04.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	50.275.651.493	50.275.651.493	49.836.657.323
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	49.691.563.109	49.691.563.109	49.299.876.939
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.598.913.405	39.598.913.405	39.672.320.513
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.059.900	68.059.900	67.639.900

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.168.300	3.168.300	3.168.300
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	231.600	231.600	231.600
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.410.000	29.410.000	29.410.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.500.000	28.500.000	28.080.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.553.372.227	24.553.372.227	24.691.146.335
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.553.372.227	24.553.372.227	24.691.146.335
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.228.104	210.228.104	157.176.104
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	210.228.104	210.228.104	157.176.104
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.406.350	616.406.350	615.511.350
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.717.500	12.717.500	12.717.500
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.090.050	163.090.050	163.090.050
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.475.000	98.475.000	98.475.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.677.800	20.677.800	20.677.800
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	316.646.000	316.646.000	315.751.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.667.500	279.667.500	279.667.500
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	279.667.500	279.667.500	279.667.500
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.535.193.472	1.535.193.472	1.535.193.472
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.000.000	259.000.000	259.000.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.273.193.472	1.273.193.472	1.273.193.472
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.533.161.852	1.533.161.852	1.523.161.852

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.023.722.852	1.023.722.852	1.023.722.852
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	221.119.000	221.119.000	211.119.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.320.000	138.320.000	138.320.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	10.802.824.000	10.802.824.000	10.802.824.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.802.824.000	10.802.824.000	10.802.824.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10.092.649.704	10.092.649.704	9.627.556.426
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.704.139.856	3.704.139.856	3.258.314.578
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.072.000	8.072.000	8.072.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	3.372.500.384	3.372.500.384	2.927.475.106
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	143.504.888	143.504.888	143.124.888
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	180.062.584	180.062.584	179.642.584
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	4.475.723.388	4.475.723.388	4.475.253.388
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	82.862.596	82.862.596	82.862.596
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	109.265.896	109.265.896	109.145.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	4.283.594.896	4.283.594.896	4.283.244.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.430.357.484	1.430.357.484	1.429.947.484
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	1.152.977.900	1.152.977.900	1.152.567.900
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	113.737.792	113.737.792	113.737.792
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.641.792	163.641.792	163.641.792
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	482.428.976	482.428.976	464.040.976
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	169.157.288	169.157.288	168.747.288
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	184.731.896	184.731.896	172.283.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	110.131.792	110.131.792	104.601.792
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.408.000	18.408.000	18.408.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	584.088.384	584.088.384	536.780.384

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	584.088.384	584.088.384	536.780.384
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	584.088.384	584.088.384	536.780.384
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	94.181.896	94.181.896	94.181.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	341.540.896	341.540.896	294.232.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	148.365.592	148.365.592	148.365.592
5.05.0.00.0.00.02.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	23.888.966.174	23.888.966.174	21.300.966.174
5.05.0.00.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	23.888.966.174	23.888.966.174	21.300.966.174
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	23.888.966.174	23.888.966.174	21.300.966.174
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.805.016.874	12.805.016.874	12.805.016.874
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.461.800	36.461.800	36.461.800
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.699.700	27.699.700	27.699.700
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.762.100	8.762.100	8.762.100
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.111.021.746	9.111.021.746	9.111.021.746
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.094.762.846	9.094.762.846	9.094.762.846
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.592.200	7.592.200	7.592.200
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.199.600	5.199.600	5.199.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.467.100	3.467.100	3.467.100
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	386.980.600	386.980.600	386.980.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.958.000	21.958.000	21.958.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.749.600	54.749.600	54.749.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.495.000	107.495.000	107.495.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.424.000	20.424.000	20.424.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	15.000.000	15.000.000	15.000.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Perundang-Undangan			
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.354.000	167.354.000	167.354.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	525.860.900	525.860.900	525.860.900
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	510.860.900	510.860.900	510.860.900
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.635.572	550.635.572	550.635.572
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	226.000.000	226.000.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.635.572	324.635.572	324.635.572
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.194.056.256	2.194.056.256	2.194.056.256
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	838.037.064	838.037.064	838.037.064
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.356.019.192	1.356.019.192	1.356.019.192
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.083.949.300	11.083.949.300	8.495.949.300
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	9.471.490.500	9.471.490.500	6.883.490.500
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	8.055.942.000	8.055.942.000	5.467.942.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	713.786.000	713.786.000	713.786.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	313.450.600	313.450.600	313.450.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	388.311.900	388.311.900	388.311.900
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.128.685.800	1.128.685.800	1.128.685.800
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	33.567.200	33.567.200	33.567.200
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	477.560.000	477.560.000	477.560.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	291.390.000	291.390.000	291.390.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	326.168.600	326.168.600	326.168.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	483.773.000	483.773.000	483.773.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	172.136.000	172.136.000	172.136.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	62.732.000	62.732.000	62.732.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	248.905.000	248.905.000	248.905.000
5.07.0.00.0.00.01.0000						Badan Penghubung	9.127.472.065	9.127.472.065	9.127.472.065
5.07.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.127.472.065	9.127.472.065	9.127.472.065
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07				PENGLOLAAN PENGHUBUNG	9.127.472.065	9.127.472.065	9.127.472.065
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.800.606.885	5.800.606.885	5.800.606.885
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.663.200	4.663.200	4.663.200
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.663.200	4.663.200	4.663.200
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.857.809.812	2.857.809.812	2.857.809.812
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.857.809.812	2.857.809.812	2.857.809.812
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.774.300	188.774.300	188.774.300
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.190.500	10.190.500	10.190.500
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.670.500	30.670.500	30.670.500
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	80.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.425.300	8.425.300	8.425.300
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.488.000	59.488.000	59.488.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	312.413.999	312.413.999	312.413.999
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.413.999	312.413.999	312.413.999
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.091.793.830	1.091.793.830	1.091.793.830
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.990.000	6.990.000	6.990.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000	225.000.000	225.000.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	859.803.830	859.803.830	859.803.830
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.151.744	1.345.151.744	1.345.151.744
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	881.759.628	881.759.628	881.759.628
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.000.000	340.000.000	340.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.392.116	123.392.116	123.392.116
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.326.865.180	3.326.865.180	3.326.865.180
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.326.865.180	3.326.865.180	3.326.865.180
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	275.569.600	275.569.600	275.569.600
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	259.617.116	259.617.116	259.617.116
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.791.678.464	2.791.678.464	2.791.678.464
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	43.318.655.100	43.318.655.100	43.271.815.993
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	43.318.655.100	43.318.655.100	43.271.815.993
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	43.318.655.100	43.318.655.100	43.271.815.993
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.736.523.142	33.736.523.142	33.041.750.035
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.757.200	83.757.200	83.757.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.777.500	55.777.500	55.777.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.979.700	27.979.700	27.979.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.296.862.514	20.296.862.514	20.296.862.514
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.296.862.514	20.296.862.514	20.296.862.514
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.284.979.040	1.284.979.040	1.224.629.040
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.992.540	25.992.540	25.992.540
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.499.100	76.499.100	76.499.100
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.990.400	149.990.400	149.990.400
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000	44.000.000	44.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	75.000.000	75.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.497.000	888.497.000	828.147.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.697.093.301	3.697.093.301	3.697.093.301
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.697.093.301	3.697.093.301	3.697.093.301
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.058.935.676	3.058.935.676	3.058.935.676
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	275.000.000	275.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.778.935.676	2.778.935.676	2.778.935.676
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.314.895.411	5.314.895.411	4.680.472.304
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.591.508.171	2.591.508.171	1.957.085.064
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.373.118.896	2.373.118.896	2.373.118.896
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.268.344	350.268.344	350.268.344
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.000.874.156	6.000.874.156	6.023.554.156
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.900.427.586	3.900.427.586	3.923.517.586
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	600.357.784	600.357.784	600.197.784
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	384.679.292	384.679.292	384.679.292
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	199.999.650	199.999.650	199.999.650
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	400.089.496	400.089.496	400.089.496
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.025.122.992	1.025.122.992	1.024.912.992
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	739.999.500	739.999.500	739.459.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	550.178.872	550.178.872	574.178.872
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.100.446.570	2.100.446.570	2.100.036.570

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

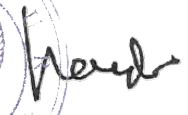
Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	150.178.482	150.178.482	150.168.482
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.950.268.088	1.950.268.088	1.949.868.088
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.581.257.802	3.581.257.802	4.206.511.802
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.631.116.864	1.631.116.864	2.257.780.864
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	530.580.288	530.580.288	485.244.288
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.100.536.576	1.100.536.576	1.772.536.576
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	1.950.140.938	1.950.140.938	1.948.730.938
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	650.145.738	650.145.738	649.725.738
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	349.995.500	349.995.500	349.535.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	799.999.800	799.999.800	799.909.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	149.999.900	149.999.900	149.559.900
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	114.724.520.645	114.724.520.645	113.575.445.756
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	114.724.520.645	114.724.520.645	113.575.445.756
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	114.724.520.645	114.724.520.645	113.575.445.756
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.865.913.741	9.865.913.741	10.258.693.241
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.754.400	11.754.400	11.754.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.717.600	7.717.600	7.717.600
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.036.800	4.036.800	4.036.800
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.030.816.149	8.030.816.149	8.030.816.149
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.030.816.149	8.030.816.149	8.030.816.149
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.530.800	300.530.800	392.024.800
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.120.000	5.120.000	5.120.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.494.200	112.494.200	112.494.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	75.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.142.600	18.142.600	18.142.600

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.774.000	89.774.000	181.268.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.945.000	80.945.000	221.730.500
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.945.000	80.945.000	221.730.500
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.985.992	808.985.992	837.485.992
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	110.000.000	138.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.785.992	696.785.992	696.785.992
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.881.400	632.881.400	764.881.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449.036.400	449.036.400	581.036.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000	17.040.000	17.040.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.875.000	149.875.000	149.875.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.930.000	16.930.000	16.930.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.038.264.392	1.038.264.392	1.038.264.392
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.038.264.392	1.038.264.392	1.038.264.392
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.038.264.392	1.038.264.392	1.038.264.392
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	95.781.272.488	95.781.272.488	95.781.272.488
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	95.781.272.488	95.781.272.488	95.781.272.488

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
						Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	95.781.272.488	95.781.272.488	95.781.272.488
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	7.323.709.488	7.323.709.488	5.719.942.447
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7.323.709.488	7.323.709.488	5.719.942.447
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.323.709.488	7.323.709.488	5.719.942.447
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	715.360.536	715.360.536	777.273.188
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	715.360.536	715.360.536	777.273.188
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	715.360.536	715.360.536	777.273.188

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	118.238.644	0	0	0	118.506.988	0	0	0	118.506.988	100
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	715.463.576	0	0	0	701.906.952	0	0	0	701.906.952	100
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	324.811.584	0	0	0	315.662.168	0	0	0	315.662.168	100
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	667.744.332	0	0	0	547.773.364	0	0	0	547.773.364	100
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	163.208.344	0	0	0	150.556.688	0	0	0	150.556.688	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	247.835.892	0	0	0	238.677.984	0	0	0	238.677.984	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	936.911.200	0	0	0	939.147.400	0	0	0	939.147.400	100
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	247.108.140	0	0	0	238.613.380	0	0	0	238.613.380	100
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.999.800	0	0	0	17.119.800	0	0	0	17.119.800	100
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	118.552.496	0	0	0	118.491.392	0	0	0	118.491.392	100
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.962.539.110	0	0	0	3.962.718.006	0	0	0	3.962.718.006	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	204.997.544	0	0	0	200.525.888	0	0	0	200.525.888	100
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.947.746.880	0	0	0	822.315.360	0	0	0	822.315.360	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Kelautan dan Perikanan	19.689.600	0	0	0	19.689.600	0	0	0	19.689.600	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											
			Dinas Kelautan dan Perikanan	234.998.800	0	0	0	234.998.800	0	0	0	234.998.800	100
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											
			Dinas Kelautan dan Perikanan	24.000.000	0	0	0	160.220.000	0	0	0	160.220.000	100
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
			Dinas Kelautan dan Perikanan	124.872.896	0	0	0	125.051.792	0	0	0	125.051.792	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Pariwisata	321.743.100	0	0	0	304.941.560	0	0	0	304.941.560	100
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											
			Dinas Pariwisata	108.040.396	0	0	0	90.089.292	0	0	0	90.089.292	100
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											
			Dinas Pariwisata	184.913.244	0	0	0	178.681.588	0	0	0	178.681.588	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
			Dinas Pariwisata	31.823.200	0	0	0	24.603.200	0	0	0	24.603.200	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
			Dinas Pariwisata	175.663.144	0	0	0	175.931.488	0	0	0	175.931.488	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.352.000	0	0	0	20.352.000	0	0	0	20.352.000	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	781.050.164	21.800.000	0	0	782.660.228	21.800.000	0	0	804.460.228	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.123.328.992	0	0	0	1.124.022.984	0	0	0	1.124.022.984	100
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	335.552.992	0	0	0	335.910.784	0	0	0	335.910.784	100
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	712.954.464	0	0	0	709.037.528	0	0	0	709.037.528	100
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	338.762.336	0	0	0	335.788.472	0	0	0	335.788.472	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN											
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	520.141.800	500.000.000	0	0	46.414.600	0	0	0	46.414.600	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.232.479.704	0	0	0	14.195.749.219	0	0	0	14.195.749.219	100
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	263.962.088	0	0	0	257.658.776	0	0	0	257.658.776	100
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	48.385.448	0	0	0	48.474.896	0	0	0	48.474.896	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	102.476.448	0	0	0	102.565.896	0	0	0	102.565.896	100
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	269.057.048	0	0	0	269.146.496	0	0	0	269.146.496	100
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	271.576.400	0	0	0	271.576.000	0	0	0	271.576.000	100
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan												
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	513.318.792	0	0	0	408.521.688	0	0	0	408.521.688	5.635
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	88.469.400	0	0	0	88.469.400	0	0	0	88.469.400	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	2.972.042.000	0	0	0	3.502.005.411	0	0	3.502.005.411	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA											
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	79.090.400	0	0	0	79.090.400	0	0	0	79.090.400	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Kesehatan	229.772.607.934	0	0	0	212.203.930.973	0	0	0	212.203.930.973	100
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
			Dinas Kesehatan	397.500.000	120.500.000	0	0	206.254.000	120.500.000	0	0	326.754.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											
			Dinas Kesehatan	12.494.400	0	0	0	9.454.400	0	0	0	9.454.400	100
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											
			Dinas Kesehatan	404.091.400	0	0	0	47.678.400	0	0	0	47.678.400	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
			Dinas Kesehatan	248.846.000	0	0	0	174.880.000	0	0	0	174.880.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	100
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	255.937.800	0	0	0	255.937.800	0	0	0	255.937.800	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	64.800.000	0	0	0	64.800.000	0	0	0	64.800.000	100
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	30.997.600	0	0	0	30.997.600	0	0	0	30.997.600	100
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN											
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	11.279.900	0	0	0	11.279.900	0	0	0	11.279.900	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	38.767.648	0	0	0	38.857.096	0	0	0	38.857.096	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.940.000	0	0	0	4.680.000	0	0	0	4.680.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	40.000.000	0	0	0	39.998.000	0	0	0	39.998.000	100
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	653.097.700	0	0	0	653.095.700	0	0	0	653.095.700	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	658.131.936	1.256.638.000	0	0	656.948.791	906.638.000	0	0	1.563.586.791	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.141.218.100	0	0	0	965.365.200	0	0	0	965.365.200	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.012.100	225.000.000	0	0	7.011.800	156.297.990	0	0	163.309.790	100
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	227.956.103.761	225.172.830.102	0	0	288.756.913.831	221.067.351.641	0	0	509.824.265.472	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	232.022.240	4.081.830.628	0	0	232.469.480	3.613.404.963	0	0	3.845.874.443	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	845.292.428	2.834.242.000	0	0	794.190.356	593.000.000	0	0	1.387.190.356	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	610.907.740	0	0	0	305.981.380	0	0	0	305.981.380	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.533.700	0	0	0	10.244.700	0	0	0	10.244.700	100
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.226.900	0	0	0	6.476.900	0	0	0	6.476.900	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			Satuan Polisi Pamong Praja	132.400.000	0	0	0	67.502.000	0	0	0	67.502.000	100
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH											
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	311.272.200	0	0	0	200.595.300	0	0	0	200.595.300	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Perhubungan	70.052.000	0	0	0	42.952.000	0	0	0	42.952.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
			Dinas Perhubungan	112.414.400	0	0	0	63.442.400	0	0	0	63.442.400	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											
			Dinas Perhubungan	10.080.000	0	0	0	7.190.000	0	0	0	7.190.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN											
			Dinas Perhubungan	2.274.728.364	0	0	0	758.683.428	0	0	0	758.683.428	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.168.600	0	0	0	6.168.600	0	0	0	6.168.600	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.487.836.300	211.650.000	0	0	1.720.484.300	145.883.332	0	0	1.866.367.632	100
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	169.940.192	0	0	0	170.297.984	0	0	0	170.297.984	100
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.364.000	0	0	0	25.889.000	0	0	0	25.889.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.980.200	0	0	0	6.980.200	0	0	0	6.980.200	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN											
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000	0	0	0	4.293.200	0	0	0	4.293.200	100
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA											
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000	0	0	0	7.430.000	0	0	0	7.430.000	100
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik												
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	186.673.244	0	0	0	232.224.388	0	0	0	232.224.388	100
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.195.744	0	0	0	135.904.088	0	0	0	135.904.088	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.378.644	0	0	0	130.646.988	0	0	0	130.646.988	100
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											
			Sekretariat Daerah	89.976.148	0	0	0	77.335.596	0	0	0	77.335.596	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											
			Sekretariat Daerah	262.363.992	0	0	0	253.421.784	0	0	0	253.421.784	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	105.079.300	0	0	0	105.079.300	0	0	0	105.079.300	100
			Sekretariat Daerah	377.219.932	0	0	0	374.649.964	0	0	0	374.649.964	100

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI											
			Sekretariat Daerah	70.640.000	15.000.000	0	0	70.640.000	15.000.000	0	0	85.640.000	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH											
			Sekretariat Daerah	187.984.700	0	0	0	119.744.700	0	0	0	119.744.700	100
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT											
			Sekretariat Daerah	28.904.168.184	0	0	0	51.909.590.968	0	0	0	51.909.590.968	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Sekretariat DPRD	209.882.240	0	0	0	187.829.480	0	0	0	187.829.480	100
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
			Sekretariat DPRD	2.724.486.896	0	0	0	2.441.917.792	0	0	0	2.441.917.792	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.028.000	0	0	0	11.453.000	0	0	0	11.453.000	100
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	720.582.444	0	0	0	611.462.288	0	0	0	611.462.288	100
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	106.406.796	0	0	0	93.962.492	0	0	0	93.962.492	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Badan Pendapatan Daerah	2.437.800	0	0	0	2.437.800	0	0	0	2.437.800	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	1.186.722.448.892	0	0	0	1.510.092.952.736	1.510.092.952.736	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											
			Badan Pendapatan Daerah	332.085.136	0	0	0	421.631.272	0	0	0	421.631.272	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.677.800	0	0	0	20.677.800	0	0	0	20.677.800	100

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	113.558.896	0	0	0	113.737.792	0	0	0	113.737.792	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	355.699.448	0	0	0	294.232.896	0	0	0	294.232.896	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	226.000.000	0	0	0	226.000.000	0	0	0	226.000.000	100
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	500.000.000	0	0	0	477.560.000	0	0	0	477.560.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Badan Penghubung	6.990.000	0	0	0	6.990.000	0	0	0	6.990.000	100
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG											
			Badan Penghubung	2.611.678.464	0	0	0	2.781.678.464	10.000.000	0	0	2.791.678.464	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Inspektorat	92.245.000	2.280.695.000	0	0	92.423.896	2.280.695.000	0	0	2.373.118.896	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											
			Inspektorat	149.999.586	0	0	0	150.168.482	0	0	0	150.168.482	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.717.600	0	0	0	7.717.600	0	0	0	7.717.600	100

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan IV/e	1					6			7
Golongan IV/d		10				18			28
Golongan IV/c		22	1			239			262
Golongan IV/b		6	106			1.331	2		1.445
Golongan IV/a			91	78		1.316	32		1.517
JUMLAH GOLONGAN IV	1	38	198	78	0	2.910	34	0	3.259
Golongan III/e									0
Golongan III/d			18	129		1.164	454		1.765
Golongan III/c				34		661	269		964
Golongan III/b				5		569	541		1.115
Golongan III/a						889	418		1.307
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	18	168	0	3.283	1.682	0	5.151
Golongan II/e									0
Golongan II/d						139	344		483
Golongan II/c						88	429		517

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan II/b						1	52		53
Golongan II/a							20		20
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	228	845	0	1.073
Golongan I/e									0
Golongan I/d							13		13
Golongan I/c							6		6
Golongan I/b							2		2
Golongan I/a									0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Golongan X								82	82
JUMLAH GOLONGAN X	0	0	0	0	0	0	0	82	82
Golongan IX								950	950
JUMLAH GOLONGAN IX	0	0	0	0	0	0	0	950	950
Golongan VII								196	196
JUMLAH GOLONGAN VII	0	0	0	0	0	0	0	196	196
TOTAL	1	38	216	246	0	6.421	2.582	1.228	10.732

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XI

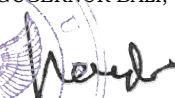
DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2022	Perkiraan Penambahan Tahun 2023	Perkiraan Pengurangan s/d. Desember 2023	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah		49.755.902.471,00	46.878.947.065,00	49.336.745.171,00	47.298.104.365,00
	a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		141.462.300,00	-	-	141.462.300,00
	b. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		277.695.000,00	-	-	277.695.000,00
	c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		48.978.753.989,00	46.526.864.273,00	48.978.753.989,00	46.526.864.273,00
	d. Piutang Pajak Air Permukaan		357.991.182,00	352.082.792,00	357.991.182,00	352.082.792,00
	e. Piutang Pajak Rokok		-			-
2	Piutang Retribusi		232.621.000,00			232.621.000,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-			-
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		31.338.240.632,47			31.338.240.632,47
5	Piutang Lainnya		40.568.111.707,00			40.568.111.707,00
Jumlah			121.894.875.810,47	46.878.947.065,00	49.336.745.171,00	119.437.077.704,47

Catatan :
* Data Piutang Pajak s/d. 30 Juni 2023

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

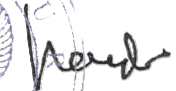
LAMPIRAN XII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertaka sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	2004	PT. BPD Bali	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besarannya Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	Rp689.912.000.000,00	Rp614.912.000.000,00	Rp75.000.000.000,00	Rp689.912.000.000,00	Rp0,00	155.842.363.119	Rp0,00	
2	2010	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besarannya Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	Rp135.000.000.000,00	Rp120.000.000.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp135.000.000.000,00	Rp0,00	Rp1.297.540.665,00	Rp0,00	

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertaka sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
3	1974	Perusahaan Daerah Provinsi Bali	- Peraturan Dasrah Propinsi, Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp5.282.769.658,00	Rp5.282.769.658,00	Rp10.000.000.000,00	Rp15.282.769.658,00	-	Rp331.193.680,00	Rp0,00	
4	2003	PT. Puri Raharja	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp8.736.000.000,00	Rp8.736.000.000,00	Rp0,00	Rp8.736.000.000,00	0,00	Rp446.466.359,00	Rp0,00	
5	1990	PT. Asuransi Bangun Askrida	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp1.150.000.000,00	Rp1.150.000.000,00	Rp0,00	Rp1.150.000.000,00	0,00	Rp202.455.499,00	Rp0,00	
6	2013	PT. Jasamarga Bali Tol	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000.000,00	0,00		Rp0,00	
7	2022	PT. Perseroda Pariwisata Digital	- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Kerti Bali Santhi	Uang	Rp20.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	20.000.000.000,00		Rp0,00	
Jumlah					Rp940.080.769.658,00	Rp850.080.769.658,00	Rp100.000.000.000,00	Rp950.080.769.658,00	Rp20.000.000.000,00	Rp2.277.656.203,00	Rp0,00	Rp0,00

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA



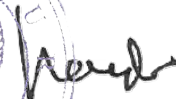
LAMPIRAN XIII

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN- LAIN TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun 2022	Perkiraan Penambahan Tahun 2023	Perkiraan Pengurangan Tahun 2023	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Aset Tetap Rusak Berat	Aset Lainnya	37.049.408.706,37	13.316.852.234,37	3.389.314.063,92	46.976.946.876,82
2	Aset Tetap Yang Akan Di Hibahkan	Aset Lainnya	239.827.247.173,00	-	14.071.393.474,00	225.755.853.699,00
3	Aset Lain-Lain Lainnya	Aset Lainnya	14.027.181.614,63	-	927.455.700,00	13.099.725.914,63
Jumlah			290.903.837.494,00	13.316.852.234,37	18.388.163.237,92	285.832.526.490,45


Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XIV

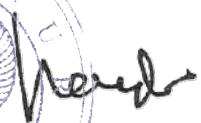
**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG
BELUM DISELESAIKAN DAN DINGGARKAN KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

1) Tahun Pertama

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst.								
Jumlah								

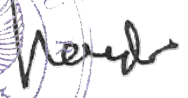
Pt. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

2) Tahun Kedua

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst.											
Jumlah											

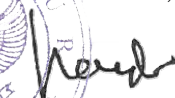
Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XV

DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mendanai kegiatan Pemilihan Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024	250.000.000.000,00	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00	78.829.667.200,00	171.170.332.800,00	-
Jumlah			250.000.000.000,00	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00	78.829.667.200,00	171.170.332.800,00	-

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman /Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur	- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tentang. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah - PMK Nomor 43/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.	28 Desember 2020	1.493.501.960.600,00	8 Tahun dengan grace period 2 Tahun	0%	Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	145.788.065.929	-	1.347.713.894.671	-
2	Pinjaman Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Direktur Utama PT. Bank BPD Bal Nomor B.11.050/3218/BPPE/Bappeda Tanggal 10 Agustus 2023 Hal : Rencana Pinjaman Daerah pada Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali T.A. 2023		703.955.881.246		0%	Pendanaan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali	-	-	-	-
3											
4											
Jumlah											

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA